ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEREMPUAN DAN POLITIK LOKAL

(Analisis Eksperimentasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam Konsentrasi Pemikiran Islam

Oleh:

Mutrofin
NIM. F53417034

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mutrofin
NIM	: F53417034
Program	: Doktor (S3)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

CAFF600238542

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mutrofin

iii

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Mutrofin ini telah disetujui

Pada tanggal 30 Desember 2019

Oleh:

Promotor

Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M.Phil, Ph.D

Promotor,

Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI

Disertasi Mutrofin ini telah diverifikasi

Pada tanggal 30 Desember 2019

Tim Verifikasi :

1. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M. Phil, Ph.D
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I
3. Dr. Abd. Chalik, M. Ag
4. Dr. Hj. Lilik Hamidah, S. Ag. M. Si
5. Dr. Hj. Aniek Nur Hayati, M. Si
6. Dr. Khoirul Yahya, M. Si

Surabaya, 30 Desember 2019

Ketua Tim,

Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M. Phil, Ph.D

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul "Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Politik Lokal (Analisis Eksperimentasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018)" yang ditulis oleh Mutrofin ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 16 April 2020

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
   (Ketua Penguji)
2. Dr. Hj. Lilik Hamidah, S. Ag. M. Si
   (Sekretaris Penguji)
3. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M. Phil, Ph.D .....
   (Promotor/Penguji)
4. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil I
   (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag
   (Penguji Utama)
6. Dra. Hj.Wahidah Zein Br. Siregar, MA, P.hD
   (Penguji)
7. Dr. Abd. Chalik, M. Ag
   (Penguji)

Surabaya, 16 April 2020

Ketua,

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Politik Lokal (Analisis Eksperimentasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018)" yang ditulis oleh Mutrofin ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 15 Juni 2020

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
   (Ketua Penguji) .....
2. Dr. Hj. Lilik Hamidah, S. Ag, M. Si
   (Sekretaris Penguji) .....
3. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M. Phil, Ph.D .....
   (Promotor/Penguji)
4. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I .....
   (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag .....
   (Penguji Utama)
6. Dra. Hj. Wahidah Zein Br. Siregar, MA, P.hD .....
   (Penguji)
7. Dr. Abd. Chalik, M. Ag .....
   (Penguji)

Surabaya, 15 Juni 2020

Ketua,

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

ama : MUTROFIN

NIM : F53417034

Fakultas/Jurusan : STUDI ISLAM

E-mail address : rofin85@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☑ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEREMPUAN DAN POLITIK LOKAL (Analisis Eksperimentasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 September 2020

Penulis

MUTROFIN

Abstrak

Judul	:	Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Politik Lokal (Analisis Eksperimentasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018)
Penulis	:	Mutrofin
Promotor	:	1. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M. Phil, Ph.D. 2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I.
Kata Kunci	:	Organisasi Kemasyarakatan, Muslimat NU, Eksperimentasi Politik, Perilaku Politik.

Penelitian ini merupakan penelitian yang terinspirasi dari fenomena politik di Jawa Timur khususnya di Trenggalek. Eksistensi Muslimat NU sebagai wadah organisasi bagi kaum perempuan yang bukan organisasi berbasis profit ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Muslimat NU sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang besar pula bagi para aktor politik, sehingga kekuatan massa ini mampu bersinergi dengan lembaga atau organisasi di luar Muslimat NU termasuk kepada partai politik. Di antara pokok masalah atau rumusan masalah yang mendorong penelitian ini dilakukan, yaitu: (1) bagaimanakah perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik?, (2) apa sajakah faktor-faktor yang menentukan aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik?. Fokus utama penelitian ini adalah urgensi perilaku aktor Muslimat NU dalam berpolitik dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Sesuai dengan substansi dua pokok persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi antara penelitian kualitatif tekstual dan lapangan. Penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional serta menggunakan teori *rational choice* dengan perpaduan teori strukturasi. Kedua teori tersebut dapat berkolaborasi sesuai data yang dihasilkan dari lapangan.

Terdapat dua *point* dalam penelitian ini, *pertama,* bahwa perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik mendukung secara aktif dan penuh. Adapun dukungan ini bersifat individu (perilaku individu). Dalam teori *rational choice* terbagi menjadi dua level, yakni makro dan mikro. Kaitannya dengan perilaku aktor politik Muslimat NU Trenggalek, tergolong pada level mikro. Artinya setiap perilaku aktor politik mengarah pada suatu tindakan, aktifitas yang merujuk pada pembuatan dan keputusan politik, bukan pada tindakan yang mengandung resiko politik. Walaupun dalam beberapa hal, perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek juga merujuk pada organisasi. Sebab kedua unsur tersebut (aktor dan organisasi) memiliki hubungan dialektika dan dualitas dalam praktik sosial. *Kedua,* faktor-faktor yang melatarbelakangi aktor Muslimat NU dalam politik terlebih dahulu harus melihat berbagai motif yang ada. Motif tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni *in order to motive* yang meliputi orientasi pada keuntungan organisasi, terwujudnya emansipasi perempuan, penguatan sumber daya manusia, dan membangun komunikasi serta jejaring. Selanjutnya *because motive* meliputi: ketaatan anggota Muslimat NU terhadap pimpinan organisasi, figur kharismatik calon pemimpin dan lainnya. Penekanan kajian ini yakni pada eksperimentasi dan perilaku politik aktor Muslimat NU khususnya di wilayah Trenggalek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abstract

Title	:	Women's Social Organizations and Local Politics (Analysis on Trenggalek Muslimat NU Political Experimentation In East Java Election In 2018)
The Researcher	:	Mutrofin
The Promotors	:	1. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip (SEA), M. Ag, M.Phil, Ph.D 2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I.
Keyword	:	Social Organizations, Muslimat NU, Political Experimentation, Political Behaviour

This research is inspired by political phenomena in East Java, especially in Trenggalek. The existence of Muslimat NU, a not profit-based organization for women, has an extraordinary power. Muslimat NU, the largest women's organization in Indonesia, also has great influences on political actors in the country. This mass force is capable of synergizing with the non-NU institutions or organizations including political parties. The main formulation of the problems that led to this research are (1) how is the behavior of Muslimat NU Trenggalek members in politics? and, 2) what are the factors that determine the Muslimat NU Trenggalek to join politics? The main focus of this research is the urgency and existence of Muslimat NU members' behavior in politics.

In accordance wit`h the substance of these two issues, this study uses a combination of textual and field qualitative research. With a sociological, psycological, and rational approach and using rational choice theory with a blend of structuration theories. So that the two theories can collaborate according to data generated from the field.

There are two points in this study. First, that the behavior of Muslimat NU Trenggalek actors in politics actively and fully supports. That the behavior of Muslimat NU actors in politics is individual (individual behavior). In rational choice theory is divided into two levels, namely macro and micro. Relation to the behavior of Muslimat NU political actors, classified at the micro level. This means that every political actor leads to an action, an activity that refers to political making and decisions. Not on actions that carry political risks. Although in some respects, the behavior of Muslimat NU actors also refers to organizations. Because these two elements (actors and organizations) have a dialectical and duality relationship in social practice. Secondly, the factors underlying the Muslimat NU actors in politics must first look at various existing motive. The motive is divided into two parts, namely in order to motive which includes: orientation towards organizational profit, the realization of women's emancipation, strengthening human resources, and building communication and networking. Then because motive includes: obedience of Muslimat NU members to the leadership of the organization, charismatic figure of the prospective leader and others. With an emphasis on the study of experimentation and political behavior of Muslimat NU actors, especially in the Trenggalek region.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص

موضوع البحث	:	التنظيم الاجتماعي للمرأة والسياسة المحلية (تحليل للتجربة السياسية للمسلمات نهضة العلماء فى انتخاب محافظ جاوى الشرقية عام 2018)
الباحث	:	مترفين
المشرف	:	الأستاذ الدكتور أحمد مزكي، Grad, Dip SEA, M. Ag, Ph.D الدكتور همس شفق، M. Fil.I
الكلمات الدليلية	:	Muslimat NU (مسلمات نهضة العلماء) ، منظمات المجتمع النسائي، سياسة، السلوك السياسي , التنظيم الاجتماعي

ينطلق هذا البحث من ظاهرة سياسية في جاوا الشرقية خاصة في ترينجاليك. تبلورت تلك الظاهرة في كيان منظمة "مسلمات نهضة العلماء" كمنظمة غير ربحية بَيْدَ أن لديها طاقة هائلة. كما تمتعت المنظمة بتأثير كبير لدى السياسيين باعتبارها أكبر منظمات النساء على المستوى الجمهوري. فبالتالي تمكنت هذه المنظمة من إجراء التعاون مع منظمات شتى حتى مع الأحزاب السياسية. وقد ركزت الباحثة على أهمية السلوك السياسي لدى شخصيات منظمة "مسلمات نهضة العلماء" والعوامل المؤثرة وراءه. فبالتالي تمت صياغة إشكالية البحث في النقطتين التاليتين: (1) كيف السلوك السياسي لدى شخصيات منظمة "مسلمات نهضة العلماء" بـ ترينجاليك؟ (2) ما هي العوامل المؤثرة لدى شخصيات منظمة "مسلمات نهضة العلماء" في السلوك السياسي بـ ترينجاليك ؟. فتمركز محور البحث على جدوى السلوك السياسي لدى شخصيات منظمة "مسلمات نهضة العلماء" بـ ترينجاليك والعوامل المؤثرة من ورائها.

بناء على إشكاليتين المشار إليهما، يتم في هذا البحث دمج مدخلين: كيفي مكتبي وميداني. كما استخدمت الباحثة المقاربات الاجتماعية والنفسية والعقلانية مستعينة بكل من نظريتي "الخيار العقلاني" (*Rational Choice*) والبنيوية في سبيل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها

في النهاية، توصلت الباحثة إلى نقطتين مهمتين. الأولى، أن السلوك السياسي لدى شخصيات منظمة "مسلمات نهضة العلماء" بـ ترينجاليك تبلور في دعمهن الفعال والمتكامل، بيد أن هذا الدعم يتصف بطابع فردي، أي أنه سلوك فردي. ومن وجهة نظرية الخيار العقلاني حيث ينقسم السلوك إلى المستويين الجزئي والكلي، فالسلوك لديهن يعتدّ من ضمن السلوك الجزئي. ويعني ذلك أن كل سلوك شخصية يتجه نحو فعل أو نشاط يعود مآله إلى صنع قرار سياسي، ولا يتجه نحو نشاط يتعرض لخطر سياسي، وإن كان بعض تصرفاتهن في بعض الأحوال قد يعود إلى اعتبار الكيان المنظمي نظرا إلى وجود العلاقة الجدلية بين الطرفين (شخصية - منظمة)، وكذلك لوجود العلاقة الثنائية بينهما من حيث الممارسات الاجتماعية. والثانية، للوصول إلى العوامل المؤثرة لا بد من النظر إلى الداوافع الموجودة. ومن ثَم يمكن تصنيف الدوافع إلى صنفين هدفية وسببية. فالهدفية تتمثل في تحقيق مصالح المنظمة، وتحقيق المساواة، وتعزيز موارد الطاقة البشرية، وبناء التواصل والعلاقات. وأما السببية فتتمثل في الولاء تجاه المنظمة، وجاذبية الشخصيات. هذا مع التنبيه على أنه يتم تركيز نطاق البحث على التجربة السياسية والسلوك السياسي لدى شخصيات منظمة "مسلمات نهضة العلماء" خاصة بـ ترينجاليك

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Sampul Depan ..... **i**

Sampul Dalam ..... **ii**

Pernyataan Keaslian ..... **iii**

Persetujuan Promotor ..... **iv**

Pengesahan Tim Penguji Ujian Verifikasi ..... **v**

Pengesahan Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup ..... **vi**

Pengesahan Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka ..... **vii**

Pedoman Transliterasi ..... **viii**

Motto ..... **ix**

Abstrak ..... **x**

Abstract ..... **xi**

Mulakhkhas ..... **xii**

Ucapan Terima Kasih ..... **xiii**

Daftar Isi ..... **xvi**

Daftar Tabel ..... **xx**

Daftar Gambar ..... **xxi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 17

C. Rumusan Masalah 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian 19

E. Kegunaan Penelitian 20

F. Penelitian Terdahulu 20

G. Metode Penelitian 32

H. Sistematika Pembahasan 54

BAB II : POLITIK, PEREMPUAN, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Politik Perempuan dan Perempuan Politik 56

1. Antara Perempuan dan Politik 56

2. Komunikasi Politik: Muslimat NU dan Politik 66

3. Pemikiran Politik Perempuan 75

B. Perilaku Politik Perempuan 80

1. Peran dan Perilaku Politik 80

2. Karakteristik dan Orientasi Perilaku Politik 88

3. Pembentukan dan Pendekatan Perilaku Pemilih 94

C. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai *Modality* 107

1. Organisasi Masyarakat Sebagai Modal Sosial 107

2. Organisasi Masyarakat Sebagai Modal Politik 116

3. Organisasi Masyarakat Sebagai Media Komunikasi Politik 123

D. Teori Pilihan Rasional dan Teori Strukturasi: Memahami Perilaku Politik Muslimat NU Trenggalek..... 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : MUSLIMAT NU DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL TRENGGALEK

A. Sejarah dan Rekam Jejak Muslimat NU 155

1. Sejarah Lahirnya Muslimat NU Secara Singkat 155

2. Muslimat NU Trenggalek: Rekam Jejak dan Perkembangannya dari Masa ke Masa 163

3. Peran Muslimat NU dalam Berbagai Bidang 173

B. Relasi dan Posisi Muslimat NU, Nahdlatul Ulama dalam Politik Lokal Trenggalek 183

C. Perilaku Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Berpolitik 193

D. Faktor yang Menentukan Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Berpolitik 208

BAB IV : EKSPERIMENTASI POLITIK MUSLIMAT NU TRENGGALEK PADA PILGUB JATIM 2018

A. Kebijakan Organisasi Muslimat NU Trenggalek Dalam Pilgub Jatim 2018 237

1. Muslimat NU Trenggalek: Merespon Kebijakan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jatim Tentang Pilgub Jatim 2018 237

2. Muslimat NU Trenggaek Berpolitik Melalui Politik Kultural 249

B. Muslimat NU Trenggalek dalam Kontestasi Pilgub Jatim 2018..... 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sikap dan Peran Muslimat NU Trenggalek dalam Kontestasi Pilgub Jatim 2018..... 256
2. Muslimat NU Trenggalek: Membaca Arah Dukungan dalam Pilgub Jatim 2018..... 268
C. Analisis Perilaku Aktor Muslimat NU dalam Berpolitik 274
1. Perilaku Politik Aktor Muslimat NU yang Mengarah Pada Orientasi 274
2. Perilaku Politik Aktor Muslimat NU Melalui Beberapa Aspek dan Pendekatan 278
3. Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Aktor Muslimat NU 290
D. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktor Muslimat NU dalam Politik 295
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 315
B. Implikasi Teoritis 316
C. Keterbatasan Studi 317
D. Saran-Saran Penelitian 318

Bibliografi 320
Lampiran-Lampiran .....
***Curriculum Vitae* Penulis .....**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Pemetaan Penelitian Terdahulu
2. Tabel 2 : Perbandingan Posisi Peneliti
3. Tabel 3 : Data Informan Penelitian
4. Tabel 4 : Perbandingan *Bonding Social Capital* dan *Bridging Social Capital*
5. Tabel 5 : Bentuk Modal Media
6. Tabel 6 : Pembagian Zonasi atau Karisedenan Muslimat NU Se-Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Proses Analisis Data
2. Gambar 2 : Elemen Komunikasi Politik
3. Gambar 3 : Unsur-Unsur yang Membentuk Proses Komunikasi Politik
4. Gambar 4 : Kerangka Pikir Teori Pilihan Rasional
5. Gambar 5: Model Stratifikasi Agen
6. Gambar 6 : Interaksi Dalam Teori Strukturasi
7. Gambar 7 : Alur Komunikasi Politik NU
8. Gambar 8 : Alur Perilaku Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Politik Lokal
9. Gambar 9 : Faktor yang Melatarbelakangi Perilaku Aktor Muslimat NU dalam Politik Lokal
10. Gambar 10: Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Politik Lokal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kemasyarakatan atau sering disebut sebagai Ormas merupakan salah satu pendorong proses dinamika sosial dan politik di Indonesia. Di Indonesia, Ormas ini dibentuk dengan cara sukarela, tanpa paksaan yang disandarkan pada kesamaan visi, misi, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan agar tercipta tujuan negara yang berdasarkan Pancasila.[1] Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan berbangsa serta memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka posisi Ormas perlu diimplementasikan dengan cara melibatkan secara aktif seluruh Ormas yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Misalnya melalui forum komunikasi sosial kemasyarakatan dan pembahasan tentang isu strategis bidang keormasan. Hal ini merupakan sebuah gambaran atas kekayaan dan keragaman Indonesia yang tercermin dalam prinsip Bhineka Tunggal Ika.

[1] Berikut beberapa tujuan Ormas menurut pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu (1) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, (2) memberikan pelayanan kepada masyarakat, (3) menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (4) melestarikan dan menjaga norma, nilai, moral, etika, dan budaya dalam masyarakat, (5) mengembangkan kesetiakawanan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, (6) menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, (7) serta mewujudkan tujuan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekayaan akan keragaman inilah yang menjadi kekuatan besar bagi Indonesia jika keragaman tersebut dikelola dengan baik dan positif. Perbedaan antara satu dengan yang lain tidak dimaknai sebagai sebuah persaingan yang ketat, namun dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai akomodatif. Namun sebaliknya, keragaman akan menjadi bencana yang besar apabila dikelola dengan tidak baik (negatif).

Maka salah satu tugas Ormas sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus mampu menjadi pioner perekat bangsa, bukan sebagai Ormas yang menebar kerusuhan dan adu domba. Eksistensi Ormas sebagai lembaga atau institusi non-pemerintah saat ini dinilai mampu sebagai mediator bagi kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Meskipun eksistensi Ormas tersebut dipandang belum maksimal dalam menjawab dan mengakomodir segala kebutuhan masyarakat. Namun, keberadaan Ormas tetap mendapatkan tempat di ruang publik.

Organisasi Kemasyarakatan telah mampu menarik simpati publik sebagai mediator di tengah-tengah menurunnya bahkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat semakin tidak percaya kepada partai politik karena dinilai partai politik hanya bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri.[2] Daya tawar yang kuat inilah

[2] David E. Apter, "Duchamp's Urinal: Who Says What's Rational When Things Get Though?" dalam Robert E. Goodin & Charles Tilly (eds), *The Handbooks of Political Science: Contextual Political Analysis.* (Oxford University Press), 2006. Lihat juga Mukhtar Sarman, *Banalitas Kontestasi Politik: Refleksi Pemilu Legislatif 2014 di Kalimantan Selatan,* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2014), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan Ormas menjadi salah satu alat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.[3]

Ormas dengan gerakan sosialnya dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan yang telah diambil dan ditetapkan oleh pemerintah. Sebuah kebijakan yang telah diputuskan dengan tidak memihak kepada satu unsur saja, melainkan harus dapat merata di semua lini kehidupan bermasyarakat secara luas.[4]

Dari beberapa *statement* di atas, tentu tidak lepas dari peran Organisasi Kemasyarakatan Islam. Sebab, berbicara Islam harus berbicara secara utuh dan konprehensif. Indonesia sebagai *basic* budaya dan keagamaan yang mayoritas penduduknya memeluk ajaran Islam, tidak bisa lepas dari peran serta Ormas Islam itu sendiri. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia semakin kuat dan besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan menjadi negara yang mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia.

Oleh karenanya, umat Islam di Indonesia melalui Ormas Islam kiranya juga harus turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengambil peran di sektor apapun termasuk dalam sektor politik, baik melalui kontestasi politik lokal, nasional atau bahkan internasional.[5] Sebab, dalam kontestasi politik

---

[3] Theodore J. Lowi, et all. *American Government: Power and Purpose*, eighth edition, (New York: W.W Norton & Company, 2004), 8.

[4] Kunto Wibisono, "Ormas Agen Perubahan Untuk Kontrol Pemerintah tak Memihak Masyarakat", https://www.antaranews.com/berita/360962/ormas-agen-perubahan-untuk-kontrol-pemerintah-tak-memihak-masyarakat: diakses tanggal 13 September 2019.

[5] Istilah tentang politik lokal, nasional, dan internasional dapat dilihat dalam Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah lepas dari manusia sebagai aktor politik maupun sebagai objek politik (baik sebagai individu maupun kelompok).[6]

Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat Ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia secara umum yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.[7] Kedua Ormas ini tidak lepas dari rekam jejak sejarah dalam dunia politik, termasuk dalam urusan politik elektoral. Kontribusi yang besar baik dari Ormas NU maupun Muhammadiyah dapat dinikmati hingga saat ini.[8]

Dalam waktu yang relatif panjang, NU dan Muhammadiyah telah melahirkan banyak generasi yang memiliki kemampuan dan kompetensi di semua aspek kehidupan. Tentu saja, kedua Ormas ini memiliki tipologi dan karakter yang berbeda-beda. Dalam ranah politik elektoral, kedua Ormas ini tidak selalu berjalan beriringan. Antara NU dan Muhammadiyah memiliki *platform* yang tidak sama. Meskipun demikian, keduanya berjalan beriringan untuk mewujudkan stabilitas bersama-sama.[9]

---

[6] Pembahasan mengenai manusia sebagai aktor politik akan dijelaskan di dalam bab selanjutnya. Namun sebagai data awal terkait dengan hal tersebut bisa dilihat dalam James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, terj, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 17.

[7] Data terkait jumlah warga Nahdliyyin seluruh Indonesia adalah 83 juta orang. Sedangkan populasi warga NU khususnya di Jawa Timur diperkirakan 60% dari total penduduk di Jawa Timur. Ibnu Mansur, "Jumlah Warga NU 83 Juta Jiwa, Benarkah?", http://www.muslimedianews.com/2014/05/jumlah-warga-nu-83-juta-jiwa-di.html#ixzz5X0FdagcR; diakses tanggal 25 Agustus 2019.

[8] Beberapa kontribusi Ormas NU dan Muhammadiyah selengkapnya dapat dilihat pada bab 2 tentang organisasi kemasyarakatan sebagai modal politik.

[9] Tahun 1955 dengan hadirnya Partai NU yang memperoleh suara 12, 2% dibandingkan dengan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang hanya memperoleh 7,5%. Suara politik NU hanya kalah dengan Masyumi yang mencapai 26,5%, kalah dengan Partai Nasionalis Indonesia pimpinan Soekarno. Namun yang menarik adalah bahwa suara politik NU tetap merupakan suara politik umat Islam yang terus bertahan sampai pemilu-pemilu berikutnya semasa rezim politik Orde Baru, sejak Pemilu 1971, sebab tahun 1960-1969, Indonesia tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sejak tahun 1971, suara politik NU kemudian dialihkan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai hasil fusi dari partai Islam semacam Masyumi, Parmusi, Sarekat Islam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ormas Islam dalam catatan sejarah juga berperan secara aktif dalam proses dinamika perpolitikan di Indonesia. Misalnya dalam kontestasi Pilpres 2019. Pertarungan baik antar partai politik dan Ormas sangat menonjol. Terlihat begitu jelas kedua pasangan calon menggunakan kekuatan besar berupa 'bendera' masing-masing Ormas untuk meraih kemenangan. Justru bukan partai politik yang 'bermain' disana.[10]

Perlu diketahui bahwa dalam kontestasi politik elektoral terdapat tiga ranah kekuatan politik. Kekuatan politik tersebut merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peran dalam kehidupan politik dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Adapun tiga kekuatan politik tersebut yaitu pengusung, pendukung, dan penunjang atau penyokong.

Pertama, pengusung. Kekuatan politik ini dimainkan oleh partai politik, artinya partai politik sebagai pengusung atau 'kendaraan' bagi para kontestan politik untuk dapat maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. *Kedua*, pendukung. Kekuatan politik ini dimainkan oleh non-partai namun bersifat kelembagaan. *Ketiga*, penunjang atau penyokong. Dalam kekuatan politik yang terakhir ini bersifat individual non-partai atau non-lembaga. Adapun aktor Muslimat NU sebagai aktor politik termasuk kategori pendukung dalam politik elektoral.

NU sendiri. Lihat Sri Roviana, 'Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik, *Jurnal Pendidikan Islam.* Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436 DOI: 10.14421/jpi.2014.32.403-424.

[10] https://suaraislam.id/menelaah-kekuatan-politik-ormas-islam-pada-pilpres-2019/; diakses pada tanggal 02 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan Ormas terhadap proses politik elektoral di Indonesia menunjukkan tingkat partisipasi dan pengaruh yang besar. Meskipun secara struktural, Ormas bukanlah partai politik, namun eksistensi dan perannya melampaui partai politik sebagai 'kendaraan' dalam perhelatan politik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khofifah dalam beberapa waktu bahwa yang 'sakti' adalah Muslimat NU. Kendati demikian ia juga tidak memandang sebelah mata peran dan kerja keras dari partai politik beserta para relawan.[11]

Peran Ormas tersebut juga tidak lepas dari sumbangsih Ormas perempuan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, terdapat tiga Ormas perempuan pertama di Indonesia, yaitu Aisiyah, Persistri, dan Muslimat NU.[12] Ketiga Ormas perempuan tersebut ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembangunan di Indonesia sesuai dengan bidang garapannya masing-masing, termasuk turut serta dalam proses demokrasi di Indonesia. Meskipun secara aturan organisasi ketiganya bukan bagian dari partai politik.

Keterlibatan masyarakat dalam kontestasi politik elektoral menjadi faktor utama.[13] Termasuk keterlibatan Ormas perempuan (baik secara

---

[11] Sofyan Cahyono, "Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim", https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/07/2018/khofifah-yang-sakti-muslimat-nu-Jatim/; diakses tanggal 21 September 2019.

[12] Ormas perempuan Aisiyah yang didirikan pada 27 Rajab 1335 H atau 19 Mei 1917. Ide berdirinya Ormas perempuan ini dimulai sejak perkumpulan Sapa Tresna pada tahun 1914, yakni perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar Kauman Yogyakarta. Sedangkan Persistri atau Persatuan Islam Istri merupakan badan otonom Persatuan Islam (Persis). Ormas ini diresmikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1936.

[13] Daud M. Liando, 'Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) dalam *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, Oktober, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu maupun kolektif)[14] dalam *moment* tersebut juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Oleh karenanya, akses yang didapatkan oleh Ormas perempuan juga cukup besar karena dapat menggeser peran dan posisi partai politik sebagai mesin politik yang seharusnya bekerja dengan efektif dan efisien. Bahkan keberadaan Ormas menjadi lebih dominan dalam proses dinamika pemilihan suara.[15]

Penelitian ini memiliki asumsi dasar bahwa aktor Ormas perempuan Muslim (dalam hal ini Muslimat NU) telah turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Banyak dari mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap dan pilihan politik yang mereka lakukan bersifat sangat heterogen.

Sebagai aktor dalam politik,[16] Muslimat NU memiliki peran yang cukup besar sehingga mampu mempengaruhi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Muslimat NU telah berusaha dan berupaya untuk menjadi organisasi masyarakat yang mandiri sehingga mampu menentukan sikap dan pilihan politiknya.

---

[14] Joyce M. Mitchell, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science*, (Chicago: Rand Mc. Nally,), 4.

[15] Sofyan Cahyono, "Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim", https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/07/2018/khofifah-yang-sakti-muslimat-nu-Jatim/; diakses tanggal 25 Agustus 2019.

[16] Adapun maksud Muslimat NU sebagai aktor dalam politik adalah tidak serta merta didefinisikan sebagaimana kegiatan dakwah semata, namun dalam politik tujuan yang akan dicapai harus jelas, harus spesifik sehingga masyarakat mengetahui untuk apa mereka bergerak. Sebab politik merupakan kekuatan memaksa dan bukan hanya sekedar kekuatan moral. Dengan demikian kajian politik tentu menyangkut masalah *public policy* bukan kesalehan personal. Oleh sebab itu, menurut Kuntowijoyo definisi politik secara Islam dapat dimaknai sebagai berikut: (1) moralitas, (2) perubahan struktur, (3) mekanisme politik yang baik atau jihad besar melawan nafsu politik. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Yogyakarta: ISCiSoD, 2018), 249-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslimat NU sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia telah menunjukkan perilaku dan keputusan politiknya. Besarnya animo masyarakat juga mendorong kaum ibu-ibu turut serta dalam pesta politik.[17] Meskipun Muslimat NU bukan termasuk organisasi politik, namun peran dan partisipasinya dalam mendukung demokrasi di Jawa Timur khususnya Muslimat NU di Trenggalek cukup signifikan.

Hal ini dapat dibuktikan melalui kontestasi politik elektoral pada Pilbup Trenggalek tahun 2015 dan Pilgub Jawa Timur 2018, dimana Muslimat NU Trenggalak sebagai Ormas perempuan turut aktif dalam perhelatan politik tersebut. Meskipun hal tersebut dilakukan oleh aktor Muslimat NU secara individu. Namun, dalam beberapa hal juga mengarah pada organisasi atau institusi.[18]

Muslimat NU Trenggalek yang secara garis organisasi berada di bawah naungan NU tetap taat terhadap segala keputusan yang dimaklumatkan oleh PCNU Trenggalek. Namun, dalam beberapa hal, sikap dan perilaku anggota Muslimat NU juga merujuk pada aturan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat Jawa Timur, walaupun sifatnya tidak mutlak.

---

[17] Sebagaimana diungkapkan oleh Kristin Samah dalam kata pengantar buku Berpolitik Tanpa Partai bahwa banyak dari kalangan masyarakat yang menyuarakan harapan pada pemerintah dengan caranya masing-masing. Sebab mereka memahami jika berpolitik tidak sekedar merebut jabatan politis, melainkan sebuah keikhlasan untuk mendukung figur tertentu yang dianggap mampu membawa kondisi negara yang lebih baik lagi. Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti, *Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan dalam Pilpres,* (Jakarta: Gramedia, 2011), xii.

[18] Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris PC Muslimat NU Trenggalek bahwa Muslimat NU sebagai Ormas perempuan saat ini telah banyak pihak yang ‘melirik ‘. Baik dari instansi pemerintahan maupun partai politik. Untuk itu, dalam menghadapi tahun politik sebaiknya semua kader Muslimat NU untuk tenang, tidak tegang dan tetap menjalankan program organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Notulensi Rapat PC Muslimat NU. 26 Nopember 2017 di Rumah Dinas Ketua DPRD Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana sikap dan perilaku Muslimat NU Trenggalek dalam politik. Jika dilihat dari rekam jejaknya terdapat beberapa pengurus Muslimat NU Trenggalek yang juga merupakan anggota sekaligus pengurus Perempuan Bangsa (Banom perempuan dari partai PKB) Trenggalek.[19] Artinya bahwa selain sebagai pengurus Muslimat NU Trenggalek juga merangkap sebagai pengurus partai. Inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa pengurus Muslimat NU juga turut aktif dalam politik elektoral.

Keaktifan sebagian besar elite pengurus Muslimat NU Trenggalek pada Perempuan Bangsa menjadi kekuatan dan keuntungan tersendiri bagi Muslimat NU, sebab dengan aktif di dua sisi, aktor Muslimat NU dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan problematika sosial di masyarakat khususnya di Trenggalek terutama yang melibatkan keikutsertaan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018 di Trenggalek, nampak terlihat bahwa politik elektoral yang terjadi merupakan sebuah kontestasi, pertarungan antara Ormas NU, Muslimat NU, dan partai politik.[20] Justru perdebatan antar partai politik satu dengan yang lainnya tidak terlalu menonjol. Disinilah momentum yang tepat untuk kembali mengatur dan menata kebutuhan terhadap akses politik bagi Muslimat NU khususnya di Trenggalek. Oleh karenanya Muslimat NU

[19] Beberapa di antaranya adalah Sekretaris Muslimat NU, Bendahara Muslimat NU, Ketua PAC Muslimat NU Durenan, Ketua PAC Muslimat NU Kampak, Ketua PAC Muslimat NU Pogalan.

[20] Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan dari Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek bahwa ia mengalami kebingungan dalam menentukan sikap politiknya. Sebab adanya arahan dari NU, Muslimat NU, dan juga partai politik berbeda, sehingga memunculkan sedikit ketegangan di akar rumput. Ibu DRJ, *Wawancara*, Trenggalek, 11 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(secara individu maupun organisasi) harus memiliki modal, salah satunya melalui pendidikan politik yang cukup dalam menghadapi hal tersebut.[21]

Muslimat NU Trenggalek tidak boleh dipandang sebagai organisasi yang hanya rutin mengumpulkan kaum perempuan khususnya ibu-ibu untuk kegiatan yasinan, tahlilan, istighostah dan berbagai kegiatan religius semata.[22] Lebih dari itu peran dan kontribusi Muslimat NU Trenggalek dalam dimensi kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Muslimat NU Trenggalek, yang juga pernah menjadi anggota legislatif Trenggalek selama dua periode yaitu Ibu STM. Ia mengatakan bahwa pasca Pilbup Trenggalek tahun 2015 silam, banyak pihak dari berbagai unsur yang 'meminang' Muslimat NU Trenggalek untuk melakukan MoU dalam segala aspek.[23]

Ia juga menambahkan bahwa meskipun sebagian besar pengurus Muslimat NU Trenggalek (di tingkat cabang sampai tingkat ranting) sudah 'sepuh' secara usia, namun perilaku politik mereka menunjukkan kesadaran berpolitik tersendiri. Usia tidak menyurutkan seluruh pengurus dan anggota untuk selalu memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya kepada kaum perempuan.

---

[21] Shazi Shah Jabeen and Aqila Rafiuddin 'Factors Influencing the Education Decision Making Process', Boston, USA, *Second 21st Century Academic Forum at Harvard* – 2015, Vol. 5, No. 1 ISSN: 2330-1236.

[22] Ahmad Makki Hasan, "Muslimat NU dan Gerakan Pemberdayaan Wanita", https://ahmadmakki.wordpress.com/2016/03/26/muslimat-nu-dan-gerakan-pemberdayaan-wanita/; diakses tanggal 12 September 2019.

[23] STM, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019. Peneliti juga menemukan pernyataan yang sama terkait hal tersebut dalam Notuensi Rapat atau Risalah Rapat yang dilaksanakan oleh PC Muslimat NU Trenggalek pada tanggal 13 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah yang menjadi spirit luar biasa pengurus dan anggota Muslimat NU Trenggalek agar dapat membangun kemandirian dan keberanian sehingga mampu melahirkan aksi-aksi strategis bagi pemberdayaan perempuan. Hal ini bisa juga membuka peluang bagi perempuan untuk produktif di wilayah publik atas kemauannya sendiri.[24] Mengingat tujuan utama Muslimat NU didirikan adalah untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan Indonesia dalam segala aspek bidang kehidupan.

Pesta demokrasi melalui Pilkada Jatim 2018 merupakan agenda yang penting bagi Jawa Timur. Hal yang menarik adalah kedua calon merupakan kader terbaik dari warga *nahdiyyin* yaitu dari NU dan Muslimat NU. Keduanya sama-sama berikhtiar untuk Jawa Timur yang lebih baik lima tahun yang akan datang.

Dalam perhelatan politik tersebut diikuti oleh dua paslon (pasangan calon) yang terdiri dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Keduanya diusung oleh masing-masing partai. Adapun di nomor urut satu adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, sedangkan di nomor urut dua adalah Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Sesuai data yang ada di KPU Trenggalek telah ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 577.675 pemilih.[25]

Dari angka tersebut diketahui jumlah pemilih laki-laki berjumlah 288.399 pemilih, sedang jumlah pemilih perempuan sebanyak 289.276

[24] Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat,* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 53-55 dalam Linda Dwi Eriyanti, 'Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Volume 20, Nomor 1, Juli 2016 (69-83). ISSN 1410-4946.
[25] KPU Trenggalek tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilih. Jika dilihat dari hasil pemilihan Pilkada Jawa Timur di Trenggalek pada tanggal 27 Juni 2018, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 394.715 orang. Dengan perincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 188.707 pemilih, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 206.008 pemilih. Itu artinya bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 kurang lebih 75%.[26]

Dari jumlah pemilih tersebut selanjutnya diperoleh hasil perolehan suara oleh masing-masing calon pasangan. Pasangan calon nomor urut satu yaitu Khofifah-Emil memperoleh suara sebanyak 266.008, sedang pasangan nomor urut dua yaitu Gus Ipul-Puti memperoleh suara sebanyak. 120.118. Rekapitulasi suara tersebut kemudian dijumlahkan dengan jumlah suara sah dan jumlah suara yang tidak sah. Adapun jumlah suara dinyatakan sah sebanyak 386.126 suara dan jumlah suara dinyatakan tidak sah sebanyak 8.589 suara. Jadi ketika dijumlahkan maka akan sesuai dengan jumlah DPT yang telah disebutkan di atas yaitu sebanyak 394.715 pemilih.[27]

Melihat hasil perolehan suara dalam Pilkada Jawa Timur 2018, maka dapat disimpulkan di awal bahwa pasangan Khofifah-Emil unggul dari pasangan calon Gus Ipul-Puti. Artinya, secara de facto pasangan Khofifah-Emil telah dinyatakan menang, dengan selisih perolehan suara sebanyak 145.890 suara.[28] Jumlah selisih yang tidak sedikit ini membuat pasangan Gus Ipul-Puti harus legowo dengan hasil yang diperoleh. Tentu, kedua calon tersebut telah melakukan ikhtiar politik dengan maksimal.

[26] Data telah dinarasikan oleh peneliti yang diambil dari KPU Trenggalek.
[27] KPU Trenggalek tahun 2018.
[28] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemenangan Khofifah dalam kontestasi tersebut disamping karena dukungan partai politik, juga ada Muslimat NU sebagai basis massa terbesar dan tersolid. Adapun solidaritas Muslimat NU dapat ditunjukkan pada berbagai acara yang diikuti oleh seluruh Pimpinan cabang Muslimat NU Se-Jawa Timur termasuk Muslimat NU Trenggalek. Dalam acara tersebut seluruh Pimpinan cabang menyatakan dukungan serta mendeklarasikan pemenangan pasangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018.[29]

Hal serupa juga disampaikan oleh pengurus partai pengusung. Ia mengatakan bahwa Muslimat NU merupakan organisasi masyarakat yang solid, militan, dan efektif dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Partai Golkar sejak awal telah berkolaborasi secara serius dengan Muslimat NU di Jawa Timur. Ia juga menambahkan bahwa Partai Golkar sadar bahwa partainya tidak memiliki jaringan yang bisa sampai pada akar rumput sebagaimana yang dimiliki oleh Muslimat NU.[30]

Adapun himbauan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek terkait politik elektoral Pilgub Jatim 2018 adalah sebenarnya bersifat umum yaitu seluruh warga Muslimat NU Trenggalek untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani. Sebagai warga

[29] IhyaUlumuddin, https://jatim.inews.id/berita/muslimat-nu-solid-menangkan-khofifah-emil-di-pilgub-jatim; diakses tanggal 02 Mei 2020.
[30] Airlangga Pribadi, "Manuver Garang Muslimat NU di Jawa Timur", https://kumparan.com/kumparannews/manuver-garang-muslimat-nu-di-timur-jawa-27431110790541303; diakses tanggal 04 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yang baik harus bersungguh-sungguh dalam menentukan calon Gubernur Jawa Timur lima tahun ke depan.[31]

Sebagai orang nomor satu di Muslimat NU Trenggalek, secara garis organisasi tindakan tersebut telah sesuai dengan khittah NU, bahwa Ormas NU dan seluruh Badan Otonom tidak boleh untuk melakukan politik praktis. Namun, disisi lain ia juga memiliki pilihan secara personal dan memiliki tanggungjawab moril sebagai bentuk ketaatan organisasi. Hal ini terkadang juga menjadi persoalan yang pelik bagi pemangku kebijakan di dalam sebuah organisasi.[32]

Tentu saja terdapat banyak faktor atas kemenangan para kontenstan di ranah politik. Menurut Piotr Faliszewski salah satunya adalah perilaku strategis dari beberapa agen atau *strategic behaviour from some agents*. Agen memiliki faktor penting dalam proses pengambilan keputusan di lapangan. Secara masif agen dapat bergerak melalui media sosial, jejaring sosial yang lebih luas.[33]

Menurut Kacung Marijan, ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam sebuah kontestasi politik. Secara kasat mata, proses Pilkada tersebut dapat diibaratkan seperti balapan mobil. Paslon dapat memenangkan kontestasi politik tersebut jika mereka memiliki tiga komponen, (1) mobil yang baik, (2) Sopir yang piawai atau canggih, (3) bahan bakar yang cukup.

---

[31] Ibu Nyai ZA, Wawancara, Trenggalek, 13 Maret 2019.

[32] Khofifah Indar Parawansa, Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam *International IDEA, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. (Jakarta: AMEEPRO, 2002).

[33] Piotr Faliszewski, 'How Hard Is It for a Party to Nominate an ElectionWinner?', *Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16)*, 257-263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa politik ketiga kompoten tersebut terdiri dari modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital)*, modal ekonomi (*economical capital*). Ketiga komponen tersebut apabila dimanfaatkan secara maksimal, maka dukungan dari masyarakat akan semakin besar.[34]

Keikutsertaan Muslimat NU Trenggalek dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018 ini merupakan bentuk eksperimentasi politik[35] di dalam masyarakat. Muslimat NU Trenggalek menjadi salah satu aktor politik yang memiliki proposisi kausal yang berkaitan dengan subjek politik dan objek politik. Hal terpenting dalam kajian eksperimentasi politik adalah bagaimana memadukan teori dengan memberikan fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini mengungkap relasi Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan politik lokal (Analisis eksperimentasi politik Muslimat NU Trenggalek pada Pilgub Jatim 2018). Adapun eksperimentasi politik merupakan suatu percobaan politik yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran sebuah teori. Pakar politik menggunakan eksperimentasi politik sebagai penerang terhadap fenomena politik yang terjadi di masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa alasan mengapa penelitian ini mengambil Muslimat NU sebagai objek penelitian dan Trenggalek sebagai lokus

---

[34] Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006, hal 89. Sebagaimana Telah Dikutip Oleh Stella Maria Ignasia Pantouw, Modalitas *Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010,* (Semarang: Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Ilmu Politik, Tesis, 2012).

[35] James N. Druckman, *Cambridge Handbook of Experimental Political Science*. https://www.polisci.northwestern.edu/documents/undergraduate/cambridge-handbook.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. *Pertama*, pada Pilgub 2018 yang menjadi kontestan adalah sama-sama berangkat satu payung organisasi yakni NU dan Muslimat NU. *Kedua*, antara NU dan Muslimat NU memiliki arah dukungan yang berbeda. *Ketiga*, Trenggalek menjadi salah satu basis kalangan NU dan Muslimat NU. *Keempat*, salah satu kontestan Pilgub pernah menjadi kepala daerah Trenggalek. *Kelima*, Trenggalek memiliki riwayat unik dalam politik, salah satunya hadirnya pasangan baru menjadi pemenang politik (Pilkada 2015 dan Pilgub 2018).

Penyebutan frase Muslimat NU dalam Disertasi ini merujuk baik kepada organisasi maupun individu, utamanya dalam Organisasi Kemasyarakatan perempuan tersebut. Penunjukkan ini terfokus pada individu pengurus. Akan tetapi, dalam beberapa hal juga merujuk ke organisasi, walaupun organisasi ini bukan sebagai partai politik.

Atas dasar pemikiran itulah penelitian ini mengarah kepada bagaimana Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan politik lokal (Analisis eksperimentasi politik Muslimat NU Trenggalek pada Pilgub Jatim 2018) dilihat dari perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik serta melihat apa sajakah faktor-faktor yang menentukan para aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan pokok yang dapat diidentifikasi, di antaranya yaitu:

a. Relasi Muslimat NU dan politik harus dimaknai sebagai hubungan simbiosis mutualis, sebab sebuah Organisasi Kemasyarakatan dapat menyalurkan berbagai aspirasi keumatan salah satunya dengan melalui politik.

b. Kaitannya dengan Organisasi Kemasyarakatan sekaligus organisasi keagamaan, Muslimat NU sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia memiliki peran dalam berbagai kontestasi politik termasuk Pilgub Jatim 2018.

c. Hubungan Muslimat NU dan politik tidak dimaknai sebagai politik praktis, melainkan bagaimana strategi politik yang digunakan oleh Ormas Muslimat NU dalam berpolitik.

d. Muslimat NU merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama bukan sebagai partai Politik. Posisi Muslimat NU dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai partisipan aktif dalam politik elektoral.

e. Muslimat NU yang dimaksudkan disini adalah aktor yang berperan dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi dan eksistensi dua pokok masalah yaitu:

a. Relasi Muslimat NU Trenggalek dan politik yang berkaitan dengan perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek
b. Menyajikan berbagai faktor-faktor yang melatarbelakangi aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik

C. Rumusan Masalah

Dari seluruh penjelasan pada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka Disertasi ini menguji relasi Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan politik lokal dengan fokus pada eksperimentasi dan perilaku politik Muslimat NU Trenggalek pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Disertasi ini tidak tertarik pada isu legal formal atas keabsahan atau ketidakabsahan Muslimat NU untuk terlibat dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Tetapi pada bagaimana secara sosiologi politik keterlibatan Muslimat NU Trenggalek pada politik elektoral di Pilkada Jawa Timur 2018.

Muslimat NU Trenggalek disini bisa merujuk kepada aktor penting organisasi atau institusi. Walaupun dalam beberapa hal juga merujuk pada institusi atau organisasi. Problem besar ini selanjutnya dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimanakah perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menentukan aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik?

D. Tujuan Penelitian

Menilik penjelasan dari rumusan masalah di atas, maka Disertasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana relasi Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan politik lokal dengan fokus tujuannya terhadap eksperimentasi dan perilaku politik Muslimat NU Trenggalek pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Disertasi ini tidak membahas mengenai isu legal formal atas keabsahan dan ketidakabsahan Muslimat NU Trenggalek dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018, maka tujuan penelitian ini tidak disandarkan pada hal tersebut. Namun, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan Muslimat NU Trenggalek pada politik elektoral dalam perspektif sosiologi politik.

Tujuan Disertasi yang dimaksudkan adalah merujuk pada aktor penting Muslimat NU Trenggalek, meskipun dalam beberapa hal juga merujuk dan mengkaitkan pada institusi atau organisasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perilaku politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praksis. Adapun penjelasannya di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk :

a. Sumbangan wawasan atas pemikiran James S. Coleman tentang r*ational choice* (pilihan rasional) dan konsepsi Anthony Giddens tentang teori strukturasi.

b. Menemukan varian mengenai faktor yang melatarbelakangi seorang aktor Muslimat NU Trenggalek dalam perilaku politik

c. Menyempurnakan dan melanjutkan hasil studi pemikiran terdahulu yang berkaitan dengan relasi Ormas perempuan dan politik, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam studi relasi Ormas perempuan dan politik.

2. Kegunaan Praksis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi aktor Muslimat NU baik di tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang bahkan ranting bahwa perilaku aktor Muslimat NU dalam politik memiliki peran yang besar.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti melakukan berbagai penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa karya ilmiah diantaranya artikel dan buku-buku referensi yang telah beredar secara luas. Dalam studi tentang Ormas dan politik ini, peneliti melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa masalah penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*), khas, aktual dan belum ada pihak lain yang menelitinya.

Terdapat sejumlah penelitian baik berupa tesis, disertasi maupun beberapa artikel tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Politik. Sejumlah penelitian dan kajian tersebut diklasifikasikan menjadi lima tema, yaitu: (1) Perempuan dan Politik, (2) Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan Posisi Publik, (3) NU dan Politik, (4) Muslimat NU dan Politik. (5) Gender dan Politik. Adapun klasifikasi antara tema pertama dan terakhir terhubung melalui *global context.*

Pertama, penelitian dan kajian tentang perempuan dan politik dilakukan oleh Zaireeni Azmi, Zaenal Mukarom, Inge Amundsen Happy Kayuni, Dinah Shelton, dan Pankaj Kumar. Kelima kajian ini memberikan informasi tentang bagaimana perjuangan kaum perempuan dalam mencapai posisi yang lebih baik dalam ranah publik (partisipasi dalam politik). Penelitian Azmi secara umum menyuguhkan perjuangan perempuan dalam demokrasi di Malaysia. Kajian ini lebih besar mengeksploitasi partisipasi politik perempuan dalam kontestasi politik di Malaysia.[36]

Penelitian Mukarom memberikan deskripsi tentang posisi perempuan dalam politik legislatif yang menempatkan unsur komunikasi sebagai fokus

[36] Zaireeni Azmi, Women's Participation In Decision Making: The Case of Muslimat In Party Islam Se-Malaysia (PAS), *International Journal of Management and Applied Science* Volume-2, Issue-12, Special Issue-1, Dec.-2016. ISSN: 2394-7926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajiannya. lebih lanjut penelitian ini mengulas lebih dalam bagaimana peran perempuan dalam membangun dan menciptakan strategi komunikasi dalam aktifitas politik.[37] Selanjutnya kajian Kayuni lebih spesifik mengulas tentang eksploitasi perempuan dalam politik. Kayuni menjelaskan dalam bukunya bahwa posisi dan perempuan dalam politik direkrut hanya sebagai perempuan 'penghibur', bahwa perempuan dijadikan objek politik untuk menarik simpati lawan politik dengan cara memberikan penyambutan melalui suguhan tarian tradisional.[38]

Penelitian Shelton ini juga fokus pada perjuangan peran perempuan dalam mencapai kesetaraan gender. Dengan menggunakan penelitian studi kasus di Amerika, ia mempromosikan penelitian ini dengan kajian tentang partisipasi perempuan di berbagai tingkat dalam proses pengambilan keputusan politik. Ia melihat bahwa tingkat partisipasi perempuan di Amerika pada masa itu sangat minim, sehingga perlu mengangkat *issue* tersebut ke dalam sebuah kritikan melalui penelitian ini. Dengan demikian, peran dan partisipasi perempuan melalui organisasi perempuan dapat dimaksimalkan dengan baik.[39]

Penelitian Pankaj Kumar mengidentifikasi partisipasi perempuan dalam parlemen yang dinilai mengalami banyak kesulitan dan tantangan.

---

[37] Zaenal Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, dalam *Mediator*, Vo. 02. Nomor. 01 Desember 2008. Terakreditasi Dirjen Dikti No. SK/56/DIKTI/Kep/2005.

[38] Inge Amundsen dan Happy Kayuni (ed), *Women in Politics in Malawi*, (Norway: Department of Political and Administrative Studies (PAS) University of Malawi, Chancellor College, 2016) ISBN: 978-99908-0-529-1.

[39] Dinah Shelton, et all. The Road To Substantive Democracy: Women´S Political Participation In The Americas. *Inter-American Commission On Human Rights*. Oea/Ser.L/V/Ii. Doc. 79 18 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Representasi perempuan juga mengalami penurunan dari masa ke masa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ia memberikan langkah-langkah strategis agar partisipasi perempuan dapat memberikan kontribusi yang besar melalui pemberdayaan politik perempuan.[40]

Kedua, penelitian dan kajian tentang Organisasi Kemasyarakatan perempuan NU dan politik dilakukan oleh Abraham Silo Wilar, Sri Roviana, dan Siti Syamsiyatun. Ketiga penelitian ini mengkaji tentang Ormas perempuan di bawah payung Ormas NU dan Muhammadiyah tentang politik. penelitian ini memiliki fokus yang berbeda satu dengan lainnya. Penelitian Wilar ini dapat dikatakan memiliki *point* tersendiri sebab Wilar merupakan peneliti dari golongan *outsider*.

Wilar mengulas tentang pola kehidupan dan pemikiran perempuan NU, yaitu IPPNU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Ia menjelaskan bagaimana posisi dan kedudukan perempuan NU dalam wilayah domestik maupun publik. Ketiga Ormas perempuan NU yang berada di wilayah Jawa Tengah ini diteliti dari sisi aktivitas gerakan organisasi yang meliputi spirit organisasi, dakwah, sosial dan politik dengan tetap mempertahankan tradisi lokal.[41]

Penelitian Roviana memberikan ulasan tentang gerakan perempuan NU melalui pendidikan pesantren berupa metode *sorogan* dan *bandongan.*

---

[40] Pankaj Kumar, 'Participation of Women in Politics: Worldwide experience', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 22, Issue 12, Ver. 6 (December. 2017) PP 77-88 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org DOI: 10.9790/0837-2212067788,

[41] Abraham Silo Wilar, *NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*, (Rembang: Pyramida Media Utama, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan sosial tersebut dilakukan dengan cara *new religius movement.* gerakan ini merupakan suatu gagasan yang berusaha menerjemahkan ide-ide keagamaan menjadi kekuatan transformatif untuk menumbuhkan struktur dan tatanan sosial yang baru dan lebih baik, partisipatif, terbuka dan emansipatoris.[42]

Selanjutnya Siti Syamsiyatun dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peran Nasyiatul Aisiyah (NA) sebagai Ormas perempuan muda Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar terhadap isu-isu gender pada kurun waktu 1966-1998. Sebagai *basic* Ormas perempuan, NA dinilai memiliki posisi strategis yang sepadan dengan eksistensi Dharma Wanita dan PKK. Melalui pendekatan sejarah, penelitian ini memberikan kontribusi yang besar bagi komunitas perempuan dalam mendengungkan spirit kesetaraan gender dalam masyarakat.[43]

Ketiga, penelitian dan kajian tentang Ormas NU dan Politik dilakukan oleh Endang Turmudi, Abdul Afif Anwar, dan Masruhan. Ketiga penelitian ini mungkin secara objek penelitian sedikit menyimpang. Namun, peneliti berpendapat bahwa Muslimat NU tidak bisa dipisahkan dari Ormas NU. Sebab kedua Ormas ini memiliki atap yang sama dalam wadah organisasi. Penelitian Turmudi memberikan banyak penjelasan terkait eksistensi dan posisi Kyai NU.

---

[42] Sri Roviana, 'Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik, *Jurnal Pendidikan Islam.* Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436 DOI: 10.14421/jpi.2014.32.403-424.

[43] Siti Syamsiyatun, Muslim Women's Politics In Advancing Their Gender Interests: A Case-Study of Nasyiatul Aisyiyah In Indonesian New Order Era, *Al-Jāmi'ah,* Vol. 45, No. 1, 2007 M/1428 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka mempunyai relasi yang sangat kuat dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Beberapa Kyai yang menjadi pengurus struktural baik di pusat, wilayah, maupun cabang mempunyai semacam 'magis politik' yang seringkali menjadi sesuatu yang 'istimewa' bagi para politisi. Oleh sebab itu, para politisi di beberapa daerah sangat menginginkan dukungan politik dari para kyai-kyai tersebut.[44]

Penelitian Anwar ini memberikan gambaran bahwa posisi NU dinilai sangat strategis dalam membangun komitmen untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Meskipun dalam dunia politik dikenal sebagai *anomic interest group* atau lebih mengutamakan kepentingan politik, NU tetap menjunjung tinggi etika berpolitik. Adapun dalam penelitian ini terfokus pada peran Organisasi Kemasyarakatan NU dalam pemilu legislatif.[45]

Selanjutnya Masruhan dalam penelitiannya lebih fokus pada tipologi konflik Kyai NU dalam Pilgub Jawa Timur tahun 2008. Konflik tersebut didefinisikan oleh kyai sebagai perbedaan pendapat dan kepentingan, ide atau paham yang bersifat praktis-tidak prinsipil, pribadi-kelompok yang tidak bermuatan dendam abadi. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dan penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki relevansi antara posisi kyai NU, pesantren dan politik.[46]

---

[44] Endang Turmudi. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: LKiS, 2004).

[45] Abdul Afif Anwar, Peran Organisasi Nahdlatul Ulama Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang*. Vol. 02. No. 1 Nopember 2014.

[46] Masruhan, *Konflik Politik Kyai NU dalam Pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008: Analisis Fiqh al-Ikhtilaf*, (Surabaya: PPs. IAIN Sunan Ampel Surabaya, Disertasi, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, kajian tentang Muslimat NU dan Politik dilakukan oleh Hilyatul Auliya, Safira Machrusah, Ishomuddin, dan Munawir Haris. Keempat penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menganalisis *problem* yang ada. Meskipun dalam objek kajiannya terdapat persamaan, namun fokus kajian yang diteliti tidaklah sama. Penelitian Auliya juga layak untuk dijadikan acuan dalam menelisik lebih jauh peran Muslimat NU dalam kontestasi politik. Auliya mengambil pendekatan sosiologi politik untuk mengetahui sejauhmana partisipasi politik yang dilakukan oleh Muslimat NU.

Dalam penelitiannya ini, Auliya menekankan bahwa meskipun Muslimat NU bukan organisasi politik namun kader atau anggota Muslimat NU berhak untuk ikut berpartisipasi dalam kancah politik. Salah satunya alasannya adalah agar Muslimat NU dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memperjuangan masyarakat khususnya perempuan Indonesia. Hanya saja kajian ini terbatas pada peran setiap individu masing-masing kader Muslimat NU secara umum.[47]

Kajian yang dilakukan oleh Machrusah memakai pendekatan sejarah. penelitian ini menyajikan tentang relasi negosiasi antara Muslimat NU dan NU dalam mencapai kesetaraan gender. Namun, karena adanya faktor eksternal (seperti politik nasional) terkadang mendukung proses negosiasi dan

[47] Hilyatul Auliya, *Kontestasi Kader Muslimat NU dalam Domain Politik: Studi Atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011,* (Yogyakarta: PPs. UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di waktu lain membuat hubungan gender mundur.[48] Selanjutnya penelitian Ishomuddin ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencoba membaca fenomena pergeseran pemahaman elit dan anggota Muslimat NU dari rutinitas dakwah ke peran Muslimat NU pada posisi strategis dalam pemerintahan atau legislatif.[49]

Selanjutnya Munawir Haris dalam penelitiannya mengeksplorasi kontribusi politik NU dan Muslimat NU dalam lintasan sejarah bangsa. Data menunjukkan bahwa NU dan muslimat NU berpartisipasi pasif dan aktif dalam politik nasional. Melalui pendekatan sejarah, penelitian ini secara runtut menjelaskan partisipasi Muslimat NU dalam kontestasi politik yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tahun 1954. Lima tahun kemudian Muslimat NU menjadi *galdiator participant*, dan mulai menunjukkan peran gendernya secara simultan dengan mengangkat isu-isu strategis yang bertujuan untuk penguatan hak, sumber daya dan aspirasi bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik termasuk politik praktis.[50]

Kelima, Penelitian Irina Zamfirache mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik disebabkan cara berfikir feminis dalam bingkai perbedaan gender. Dengan maksud lain perbedaan antara perempuan

---

[48] Safira Machrusah, *Muslimat And Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia,* Tesis, (Australia: The Australian National University, 2005).

[49] Ishomuddin,et all. Culture and Political Understanding on Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) in East Java, *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE,* Volume 6, Issue 8, August 2019, PP 5 1-62 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0608006 www.arcjournals.org

[50] Munawir Haris, Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah, *At-Tahrir,* Vo. 15, No. 2 (2015). DOI. Htpps://doi.org/10.21145/al-tahrir.v15i2.267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan laki-laki dalam mengeksploitasi peluang untuk mengamankan posisi kekuasaan memiliki orientasi yang sangat berbeda.[51]

Pemetaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian/Kajian	Klasifikasi dan Hasil Karya
1(a)	Zaireeni Azmi	Women's Participation In Decision Making: The Case of Muslimat In Party Islam Se-Malaysia (PAS)	Kualitatif Lapangan	**Perempuan dan Politik:** Epistemologi, representasi dan partisipasi perempuan dalam politik.
1(b)	Zaenal Mukarom	Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Kajian Deskriptif	
1(c)	Inge Amundsen Happy Kayuni	Women in Politics in Malawi	Metode Studi Kasus	
1(d)	Dinah Shelton	The Road To Substantive Democracy: Women´S Political Participation In The American	Metode Studi Kasus	
1(e)	Pankaj Kumar	Participation of Women in Politics: Worldwide experience	Kajian Deskriptif	
2(a)	Abraham Silo Wilar	*NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*	Kualitatif Lapangan	**Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Politik:** Ormas perempuan baik di NU maupun Muhammadiyah memiliki spirit yang sama untuk mendengungkan nilai-nilai
2(b)	Sri Roviana	Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik	Kajian Deskriptif	
2(c)	Siti Syamsiyatun	Muslim Women's Politics In Advancing Their Gender Interests: A Case-Study of Nasyiatul	Pendekatan Sejarah	

[51] Irina Zamfirache, 'Women and Politics – The Glass Ceiling', *Journal Of Comparative Research In Anthropology And Sociology,* Volume 1(1): 175-185, ISSN 2068 – 0317, 2010, http://compaso.ro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Aisyiyah In Indonesian New Order Era		emansipasi wanita dan kesetaraan gender.
3(a)	Endang Turmudi	Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan	Kualitatif Lapangan	**Ormas NU dan Politik:** Secara substansi tema ini dinilai sedikit menyimpang. Namun, keberadaan Muslimat NU tentu tidak bisa dipsahkan dari Ormas NU. ketiga tema ini menitikberatkan pada posisi Kyai dalam politik elektoral.
3(b)	Abdul Afif Anwar	Peran Organisasi Nahdlatul Ulama Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014	Metode Studi Kasus	
3(c)	Masruhan	Konflik Politik Kyai NU dalam Pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008: Analisis Fiqh al-Ikhtilaf	Pendekatan Multidisipliner dan Kualitatif	
4(a)	Hilyatul Auliya	Kontestasi Kader Muslimat NU dalam Domain Politik: Studi Atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011	Pendekatan Sosiologi Politik	**Muslimat NU dan Politik:** Keempat penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menganalisis *problem* yang ada. Meskipun dalam objek kajiannya terdapat persamaan, namun fokus kajian yang diteliti tidaklah sama.
4(b)	Safira Machrusah	Muslimat And Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia	Pendekatan Sejarah	
4(c)	Ishomuddin	Culture and Political Understanding on Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) in East Java	Pendekatan Kualitatif	
4(d)	Munawir Haris	Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah	Pendekatan Sejarah	
5	Irina Zamfirache	Women and Politics– The Glass Ceiling	Kajian Deskriptif	**Gender dan Politik:** bahwa keterwakilan perempuan dalam politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				disebabkan cara berfikir feminis dalam bingkai perbedaan gender

Dari paparan tentang klasifikasi tema di atas telah memberikan informasi dan kontribusi yang berharga bagi perkembangan dan dinamika ilmu pengetahuan, khususnya tentang Organisasi Kemasyarakatan perempuan (dalam hal ini Muslimat NU dan politik). Kontribusi tersebut ditunjukkan oleh lima klasifikasi kajian dan deskripsi hasilnya. Sedangkan posisi penelitian ini secara utama ada di antara Hilyatul Auliya, Safira Machrusah, Ishomuddin, dan Munawir Haris. Perbandingan posisi ini peneliti sajikan ke dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Posisi Peneliti

Tabel 2

No.	Peneliti	Topik Penelitian	Posisi Penelitian
1.	Hilyatul Auliya	Kontestasi Kader Muslimat NU Dalam Domain Politik: Studi Atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011	Partisipasi Muslimat NU dalam politik dilihat dari individu kader Muslimat NU
2.	Safira Machrusah	Muslimat And Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia	relasi negosiasi antara Muslimat NU dan NU dalam mencapai kesetaraan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Ishomuddin	Culture and Political Understanding on Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) in East Java	pergeseran pemahaman elit dan anggota Muslimat NU dari rutinitas dakwah ke peran Muslimat NU pada posisi strategis dalam pemerintahan atau legislatif.
4.	Munawir Haris	Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah	mengeksplorasi kontribusi politik NU dan Muslimat NU dalam lintasan sejarah bangsa
5.	Mutrofin	Ormas Perempuan dalam Politik Lokal: Studi Eksperimentasi Politik Muslimat NU	Perilaku Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek dalam eksperimentasi politik Pilgub Jatim 2018

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa khas penelitian ini ada pada *core problem* (problem inti) perilaku politik Muslimat NU Trenggalek dalam eksperimentasi politik pada politik eletoral Pilkada Gubernur Jawa Timur 2018 dengan subjek penelitian yaitu aktor elite Muslimat NU Trenggalek. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, psikologi dan pilihan rasional. Sedangkan posisi empat penelitian sebelumnya berada pada sebagian dari inti problem, dimensi dan konteks penelitian. Demikian juga dengan penelitian-penelitian dan kajian-kajian lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Memilih Metode Kualitatif

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)[52] tentang Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan politik lokal pada Pilgub Jatim 2018 di Trenggalek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab yang dikaji merupakan fenomena yang berasal dari setiap masing-masing individu. Adapun alasan dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, diantaranya:

a. Dalam pendekatan kualitatif yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang.
b. Dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam, salah satunya terhadap suatu fenomena.
c. Penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik atau menyeluruh. Sebab, fenomena yang ternyata di masyarakat tidaklah disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
d. Penelitian tentang kesadaran dan tindakan individu dalam suatu masyarakat dapat memberikan kemungkinan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, sebab fenomena yang tidak berasal dari eksternal dan bersumber dari individu-individu.

[52] Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menempatkan peneliti secara langsung untuk saling berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain untuk membangun dan membentuk suatu hubungan baik antar personal maupun kelompok. Lihat Marlene de Laine, *Fieldwork, Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in Qualitative Research*, (London: SAGE Publications, 2000), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penelitian kualitatif memunculkan peluang dalam memahami sebuah fenomena berdasarkan pandangan aktor atau *emic view* setempat. Dalam hal ini posisi peneliti adalah sebagai orang yang belajar atas sesuatu yang terjadi yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perilaku-perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek.

Peneliti juga mempertimbangkan berbagai ciri-ciri dari metode kualitatif, di antaranya:[53] (a) penelitian berlangsung dalam *setting* alamiah (pada sumber data), sehingga penelitian ini cenderung lama dan dilakukan secara terus menerus. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini membutuhkan waktu 5 sampai 8 bulan. (b) Peneliti secara langsung berfungsi sebagai instrumen dengan konsekwensi partisipasi, refleksi dan imajinasi peneliti. (c) Hasil penelitian ini bersifat deskripsi, narasi melalui kata-kata. (d) analisis data secara induktif[54] dengan mempertimbangkan relevansi berbagai data yang ditemukan di lapangan.

2. Data Penelitian

Adapun data utama dalam penelitian ini bersumber dari berbagai informasi yang didapatkan dari para informan. Mereka adalah pengurus harian di tingkat cabang (ketua, sekretaris, dan bendahara), ketua di tingkat anak cabang, dan beberapa anggota Muslimat NU Trenggalek

[53] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 102.

[54] Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, maka proses induktif yaitu proses dimana seorang peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, sehingga sering disebut sebagai *grounded theory*. Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 155-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang ada di dalam struktur kepengurusan maupun hanya sebagai fungsional. Berbagai pandangan, pendapat bahkan perilaku dan sikap politik mereka secara otomatis terekam melalui proses observasi terlibat dan wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti memilih para informan berdasarkan beberapa kriteria sehingga informasi dan data yang masuk dapat dijadikan data utama. Berbagai pertimbangan tersebut di antaranya, keterwakilan tokoh, kelas sosial, jenjang pendidikan, kedekatan dengan akses informasi serta pertimbangan usia. Hal ini peneliti lakukan untuk memperoleh informasi yang utuh dan menyeluruh sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

Untuk mendukung tingkat akurasi data utama dalam penelitian ini, maka diperlukan *cross-check* silang sebagai informasi pembanding terhadap data-data yang sudah didapatkan. Adapun tujuan dilakukannya *cross-check* adalah untuk memperjelas data yang kurang jelas atau semu, sehingga dimungkinkan setiap data yang diperoleh peneliti sudah melalui proses triangulasi.[55] Sebab, teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka memperkuat hasil penelitian.

[55] Istilah triangulasi berasal dari bidang navigasi suatu lokasi yang ditentukan dengan menggunakan sudut dari dua titik yang diketahui. Dalam penelitian, triangulasi merupakan penggunaan lebih dari satu pendekatan untuk meneliti sebuah informasi atau data yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pada temuan melalui berbagi proposisi. Selengkapnya lihat Roberta Heale and Dorothy Forbes, 'Understanding Triangulation in Research', *Evid Based Nurs*, October 2013, volume 16, number 4, 98. DOI: 10.1136/eb-2013-101494. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 330-332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menentukan Data Lapangan: Observasi dan Wawancara

Secara keseluruhan, penelitian dilakukan dalam durasi waktu berkisar antara 5 sampai 8 bulan. Namun, peneliti tidak selalu berada di lapangan dalam kurun waktu tersebut. Keberadaan peneliti bersifat temporal, datang dan pergi. Dalam seminggu, peneliti menggunakan 2 sampai 3 hari untuk untuk bertemu dengan informan. Tentu saja waktunya bisa berubah sesuai dengan waktu yang disediakan oleh informan.

Ada kegiatan yang mengharuskan peneliti datang ke lapangan sebagai bentuk keterlibatan aktif. Misalnya, ketika pertemuan rutin Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek yang diadakan setiap Ahad Kliwon. Pertemuan rutin yang diadakan oleh Pengurus Anak Cabang Se-Trenggalek (yang waktunya sudah ditentukan masing-masing PAC).

Peneliti berkali-kali datang ke pertemuan tersebut guna observasi terlibat *(participant observation)* terhadap berbagai agenda yang dibahas, mulai dari istighatsah, sholat dhuha berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan kegiatan organisasi seperti evaluasi kegiatan di masing-masing PAC (Pimpinan Anak Cabang), membangun *stake-holder* dengan Kemenag Trenggalek, BNN Trenggalek. Kegiatan lainnya adalah mengenai pengambilan keputusan politik terhadap kontestasi politik yang sedang berlangsung. Seperti bagaimana sikap politik para anggota Muslimat NU Trenggalek dalam Pilkada Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018 beberapa waktu lalu dan sikap politik di Pilpres 2019 April mendatang.

Observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana para pengurus Muslimat NU Trenggalek mengemukakan pendapat, gagasan, menerima atau menolak argumen dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan politik. Pada tingkat cabang maupun pimpinan anak cabang yang secara struktural berada di dalam kepengurusan.

Penelitian pun dilakukan dengan cermat agar data yang diobservasi tidak hilang begitu saja. Maka strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pencatatan secepatnya begitu observasi terlibat selesai dilakukan. Peneliti juga berusaha untuk memperoleh setiap notulensi rapat dan daftar hadir seluruh pengurus baik di tingkat cabang maupun anak cabang. Peneliti juga telah memperoleh notulensi rapat dan daftar hadir Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020.

Sebelum peneliti melakukan penelitian dengan fokus kajian ini, peneliti telah *intens* mengikuti dan mengamati berbagai keputusan politik yang diambil oleh para elit Muslimat NU Trenggalek. Dengan demikian, peneliti telah memiliki sejumlah informan yang dapat dijadikan sebagai ‘pintu masuk’ untuk memperoleh data awal terkait relasi Muslimat NU dan berbagai perilaku politik yang melatarbelakanginya. Setidaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti sudah mempunyai bekal yang sangat berharga, yakni nama-nama orang kunci *(key informan)* yang dapat dihubungi dan diwawancarai.

Untuk memahami dan mengetahui berbagai motif perilaku aktor Muslimat NU dalam berpolitik, salah satu motode yang paling sesuai dan tepat adalah dengan wawancara mendalam *(indepth interview)*.[56] Oleh sebab itu, peneliti juga terlibat secara langsung di dalam berbagai wawancara. Wawancara tersebut peneliti lakukan di sela-sela pertemuan rutinan Ahad Kliwon. Adapun pertemuan tersebut biasanya dilakukan di gedung PCNU Trenggalek, di rumah pengurus cabang yang digilir secara bergantian.

Wawancara juga peneliti lakukan di sepanjang perjalanan menuju Surabaya ketika acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Peneliti *ngobrol* santai di dalam mobil. Materi wawancara peneliti awali dengan bertanya tentang dilantiknya Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, sebagai awal komunikasi. Percakapan seperti itu dapat dilakukan dengan cara informal dan suasana keakraban agar memperoleh data-data yang diperlukan. Selain itu, peneliti juga meminta waktu kepada beberapa informan untuk berkunjung ke rumahnya.

Wawancara dengan para pengurus cabang (dalam hal ini ketua) sengaja dilakukan di *ndalem* dan di teras rumah. Peneliti juga tidak

[56] Wawancara mendalam tidak hanya sekedar percakapan biasa, namun peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus, sesuai dan tepat. Sebab dengan wawancara peneliti dapat menemukan berbagai informasi tentang apapun termasuk perilaku politik para aktor Muslimat NU Trenggalek. Lihat Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), 113-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungkan untuk membantu informan untuk menyelesaikan tugas dapur sembari bertanya tentang sikap dan keputusannya dalam politik. Terkadang peneliti tidak sendirian ketika *sowan.* Peneliti ditemani suami yang siap siaga membantu peneliti dalam mentatat hal-hal yang penting serta membantu dalam proses pengambilan gambar.

Dalam kegiatan observasi dan wawancara tersebut, peneliti telah menyiapkan alat-alat berupa catatan lapangan atau *fieldnote,* catatan di kertas dan langsung dilakukan pengetikan untuk menghindari distorsi informasi. Namun berbeda ketika peneliti menggunakan alat bantu berupa rekaman suara atau video, proses skriptualisasi bisa dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini peneliti memakai jasa *volunter* untuk membantu hasil wawancara tersebut.

Di samping dua metode tersebut, peneliti juga memakai tilik dokumen untuk mendapatkan deskripsi tentang berbagai kejadian atau peristiwa serta hasil studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang peneliti lakukan. Oleh karenanya, proses dokumentasi menjadi penting sebab banyak informasi yang digali oleh peneliti sebagai studi komparasi dalam menganalisis berbagai masalah yang masih ada korelasinya dengan topik penelitian.[57]

4. Posisi Peneliti

Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, bahwa posisi peneliti adalah sebagai orang yang sedang belajar mengenai fenomena

[57] David Silverman, *Qualitative Research: Theory, Method and Practice,* Second Edition, (London: Sage Publications), 125-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikaji. Peneliti berasal dari Kab. Sidoarjo dan dari tahun 2009 peneliti telah menetap di Trenggalek mengikuti suami yang berasal dari daerah tersebut. Walaupun peneliti berdomisili di daerah yang sama dengan lokus penelitian yaitu di Trenggalek, bukan berarti seluruh fenomena yang terjadi di lapangan telah diketahui oleh peneliti.

Sesuai dengan konsep *from the motive's points of view,* maka posisi peneliti belajar bersama-sama dengan elemen masyarakat mengenai bagaimana relasi Ormas perempuan dan politik, apa sajakah faktor yang mendorong aktor dalam berpolitik dan bagaimana perilaku politik aktor Muslimat NU khususnya di Trenggalek.

Trenggalek sebagai tempat tinggal peneliti cukup membantu dalam memudahkan membuat telaah referensi mengenai informan kunci atau *key informan.* Di samping sebagai peneliti, peneliti sendiri juga sebagai pengurus cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020. Meskipun demikian, peneliti harus berusaha agar mampu memposisikan sesuai dengan tempatnya. peneliti sebagai *researcher* dan peneliti sebagai organisatoris. Oleh karenanya, peneliti terus pengumpulkan data, mendalami setiap informasi yang diperoleh dari lapangan, kemudian melakukan *cross-check* data sehingga hasilnya bisa akurat.

5. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu tahap pra lapangan, tahap lapangan dan tahap analisis data.[58]

[58] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,...,* 137-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Tahap Pra-Lapangan**

a.) **Menyusun Rancangan Lapangan**

Dalam tahap ini, pertama-tama yang dilakukan peneliti adalah menyusun rancangan penelitian. Penelitian dirancang sesuai dengan fokus kajian sehingga arah dan tujuan dari penelitian ini dapat sistematis dan terarah. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field reseach*, maka peneliti telah menyiapkan surat ijin yang dibuat oleh pihak akademik untuk peneliti berikan kepada pihak-pihak yang berkait, seperti PC Muslimat NU Trenggalek, PAC Muslimat NU Trenggalek, BPS Trenggalek, KPU Trenggalek dan Bakesbangpol Trenggalek.

Beberapa lembaga tersebut sengaja peneliti datangi untuk meminta informasi atau data awal terkait dengan fokus kajian ini. Misalnya, peneliti mendatangi tiga instansi pemerintah yakni KPU, Bakesbangpol dan juga BPS pada tanggal dan hari yang sama yaitu Selasa, 27 Nopember 2018. Dari situlah, peneliti memiliki data awal tentang bagaimana kondisi geografis wilayah Trenggalek, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Trenggalek pada Pilkada baik Pemilihan Bupati tahun 2015 atau Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 yang lalu.

b.) **Menentukan Fokus dan Lokus Penelitian**

Fokus informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu (a) partisipasi para pengurus cabang Muslimat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU Trenggalek dalam pesta demokrasi melalui kontestasi Pilgub Jatim 2018, (b) mengetahui beberapa pola atau bentuk perilaku politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek, (c) mengetahui sejauh mana perilaku politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek, (d) mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik.

Adapun lokus penelitian ini adalah di Trenggalek. Ada beberapa pertimbangan mengapa lokus ini dipilih oleh peneliti. *Pertama,* Trenggalek memiliki dinamika politik yang begitu dinamis. Hal itu terlihat ketika kontestasi Pilbup Trenggalek pada tahun 2015 lalu yang dimenangkan oleh pasangan baru.

Kedua, Muslimat NU dan PCNU Trenggalek memiliki kecenderungan dan sikap yang berbeda ketika kontestasi Pilgub Jatim 2018 dihelat. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh dan mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil perwakilan aktor Muslimat NU Trenggalek dari unsur pengurus harian, dan unsur pengurus di setiap kecamatan di seluruh Trenggalek. Adapun kecamatan tersebut di antaranya: Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Pogalan, Trenggalek, Tugu, dan Bendungan. Terdapat 14 kecamatan di Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) Menjajaki Lapangan Penelitian

Meskipun peneliti berdomisili di tempat yang sama dengan lokus penelitian, namun peneliti tetap melakukan penjajakan terhadap wilayah yang menjadi objek kajian ini. Sebab, tidak semua wilayah yang menjadi sasaran telah diketahui dengan baik oleh peneliti.

Dengan demikian, langkah ini sangat diperlukan agar peneliti memiliki gambaran secara umum tentang berbagai aspek, misalnya geografi wilayah, peta demografi, bagaimana sejarahnya, konteks kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, pendidikan dan lainya.

Dengan begitu, peneliti bisa mempersiapkan diri baik fisik maupun mental, sebab sebagian besar wilayah di Trenggalek merupakan dataran tinggi. Pengenalan dan penjajakan lapangan tersebut terus dilakukan oleh peneliti sehingga keberadaan peneliti dapat dianggap menjadi bagian dari anggota kelompok atau masyarakat yang ditelitinya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kirk dan Miller bahwa peneliti harus mengadakan kontak dengan anggota masyarakat, terutama kepada para tokoh masyarakat sebagai perantara dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Di samping itu, peneliti harus memahami pandangan hidup masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti sebaiknya menggali pandangan hidup tersebut, artinya pendapat mereka tidak untuk dikomentari, apalagi dikritik. Penyesuaian diri dengan lingkungan penting dilakukan peneliti untuk mempelajari dan mengenal keadaan lingkungan tempat penelitian.[59]

Peneliti telah melakukan *survei* ke beberapa tempat berbagai tempat misalnya daerah Munjungan yang notabene daerahnya berupa dataran tinggi, Watulimo yang daerahnya berupa pantai pesisir, dan beberapa daerah lainnya.[60]

d.) Memilih Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[61] Peneliti memilih informan didasarkan pada beberapa aspek. *Pertama*, informan merupakan aktor dalam proses Pilkada Jawa Timur 2018.

Informan dapat berperan sebagai relawan (*volunter)* atau sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. *Kedua*, informan memiliki banyak informasi dan pengalaman dalam latar

[59] Jarome Kirk & Marc L. Miller, *Realiability and Validity in Qualitative Research*, vol. I, (Beverly Hills: Sage Publication, 1986), 59-70.
[60] Survei tersebut peneliti lakukan ketika menghadiri rutinan di wilayah Munjungan dan Watulimo. Sebab setiap Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU memiliki jadwal masing-masing dalam setiap pertemuan. Selain untuk kepentingan organisasi, peneliti juga pernah melakukan silaturrahim secara khusus kepada calon informan. Hal ini untuk mengutarakan kepentingan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti berusaha sekuat tenaga untuk mendatangi seluruh para informan (tentu saja dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama-sama).
[61] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,...,* 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. *Ketiga,* informan yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Dari beberapa aspek tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pengelompokkan yakni informan yang yang menjadi ketua PAC Muslimat NU merangkap sebagai tim sukses, informan yang hanya sebagai anggota Muslimat NU, dan informan yang hanya sebagai *volunter.* Untuk bisa memetakan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara pendahuluan berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas. Selain itu, peneliti memberi tahu terlebih dahulu kepada para informan tentang maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan.

Informan penelitian merupakan aktor Muslimat NU Trenggalek baik di tingkat cabang maupun di tingkat anak cabang yang dipilih berdasarkan tingkat keaktifan kehadiran para pengurus atau aktor Muslimat NU Trenggalek dalam mengikuti setiap pertemuan rutin. Tingkat keaktifan tersebut diperoleh berdasarkan daftar hadir di setiap kegiatan.[62]

Meskipun demikian, peneliti menjadikan aktor Muslimat NU Trenggalek tidak berdasarkan jumlah informannya, melainkan peneliti dasarkan pada kualitas dan kedalaman keterangan ataupun informasi yang diberikan oleh informan.

[62] Peneliti berhasil mendapatkan semua notulensi dan daftar hadir seluruh pengurus PC Muslimat NU Trenggalek. Adapun notulensi dan daftar hadir tersebut mulai tahun 2015 sampai 2020. Dari notulensi tersebut peneliti dapat mengetahui sejauh mana peran serta anggota Muslimat NU dalam politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjaga dan melindungi biodata informan, peneliti menggunakan nama inisial agar kerahasiaan data informan tetap terjaga.

Adapun keseluruhan informan penelitian dalam fokus kajian ini adalah sebagai berikut:

Data Informan Penelitian

Tabel 3

No.	Nama	Penjelasan Identitas	Alamat
1.	Ibu Hj. ZN	Ketua PC Muslimat Trenggalek	Gondang Tugu Trenggalek
2.	Ibu Hj. STM	Sekretaris PC Muslimat Trenggalek	Mlinjon Suruh Trenggalek
3.	Ibu STR	Bendahara PC Muslimat Trenggalek	Ngantru Trenggalek
4.	Ibu Hj. DRJ	Ketua PAC Munjungan	Munjungan Trenggalek
5.	Ibu SMF	Pengurus PAC Watulimo	Prigi Watulimo Trenggalek
6.	Ibu SBR	Ketua PAC Kampak	Kampak Trenggalek
7.	Ibu WJT	Ketua PAC Dongko	Dongko Trenggalek
8.	Ibu SYT	Sekretaris PAC Pule	Jombok Pule Trenggalek
9.	Ibu SDM	Ketua PAC Karangan	Jeruk Karangan Trenggalek
10.	Ibu SKM	Ketua PAC Gandusari	Gandusari Trenggalek
11.	Ibu Hj. SMD	Ketua PAC Durenan	Kamulan Durenan Trenggalek
12.	Ibu Hj. ISS	Ketua PAC Pogalan	Ngadirenggo Pogalan Trenggalek
13.	Ibu SLS	Ketua PAC Tugu	Gondang Tugu Trenggalek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14.	Ibu SWD	Ketua PAC Bendungan	Dompyong Bendungan Trenggalek
15.	Ibu MRT	Relawan (Pengurus PAC Pogalan)	Pogalan Trenggalek
16.	Ibu IMS	Relawan (Pengurus PAC Gandusari)	Gandusari Trenggalek
17.	Ibu UKH	Relawan (Pengurus PAC Tugu)	Gondang Tugu Trenggalek

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki peran yang besar dengan permasalahan penelitian. Ungkapan dan informasi yang mereka sampaikan melalui serangkaian wawancara mendalam.

e.) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum masuk dalam lapangan penelitian, peneliti telah menyiapkan berbagai perlengkapan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu menyiapkan ijin penelitian melalui surat resmi dan lainnya. Peralatan yang harus dibawa oleh peneliti adalah ATK atau alat tulis kantor. Peneliti selalu membawa bolpoin dan kertas (buku) untuk mencatat semua kejadian, informasi yang sampai kepada peneliti.

Selain itu, peneliti menyiapkan juga menyiapkan alat komunikasi dan perekam suara. Handphone menjadi salah satu alat bantu yang efektif untuk berbagai hal. Peneliti menggunakan HP untuk mengambil gambar, foto atau proses merekan suara para informan. Selanjutnya, peneliti merancang jadwal agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

2. Tahap Memasuki Lapangan

a.) Pembatasan Latar dan Peneliti

Dalam tahap memasuki lapangan, peneliti telah berusaha memahami latar penelitian terlebih dahulu. Meskipun peneliti telah mengenal beberapa informan, akan tetapi ada beberapa profil informan yang belum diketahui. Untuk itulah peneliti perlu mengenal adanya latar terbuka dan latar tertutup.[63]

Latar terbuka yang dimaksudkan adalah yang tampak di dalam lapangan penelitian. Dalam hal ini latar terbuka dapat dipersepsikan sebagai salah satu kegiatan Muslimat NU Trenggalek yang dilakukan di wilayah umum, misalnya di gedung NU Trenggalek, di rumah pengurus, bahkan di Musholla pinggir pantai Prigi, Kecamatan Watulimo.

Jika pada latar terbuka, peneliti hanya mengandalkan pengamatan atau observasi untuk proses pengumpulan data. Maka pada latar tertutup, peneliti melakukan penggalian data melalui proses wawancara secara mendalam. Hal ini dilakukan peneliti dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk pemanfaatan pengamatan berperan serta agar antara peneliti dengan para

[63] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., 137-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan dapat saling bekerja sama dengan saling bertukar informasi.

Peneliti juga menyesuaikan diri dengan para informan. Mengingat tidak semua informan paham dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti harus sabar menjelaskan tujuan penelitian yang dimaksud. Mengingat para informan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, tingkat pendidikan juga berbeda, kondisi sosial ekonomi juga tidak sama.

Ketika kondisi para informan telah dipahami oleh peneliti, maka tugas peneliti selanjutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek tanpa mempengaruhi pendapat mereka. Semua informasi dan data yang telah didapatkan tersebut selebihnya menjadi bank data bagi peneliti sampai pada proses analisis data.

b.) Memasuki Lapangan

Setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya, peneliti telah membangun komunikasi secara intens dengan para informan. Sehingga hubungan peneliti dengan subjek atau informan mencair dalam suasana kekeluargaan.[64]

Peneliti juga menggunakan strategi dalam memahami situasi, latar belakang informan. Misalnya, peneliti menayakan

[64] Dalam bahasa komunikasi disebut sebagai *rapport*. Rapport adalah hubungan antara peneliti dengan informan yang sudah melebur seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya. Sebab jika rapport itu sudah dicapai maka usaha peneliti selanjutnya akan mudah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seputar kehidupan pribadi informan, *sampun gadah putro pinten buk?* (sudah memiliki anak berapa bu?) atau *parine sampun meh panen dereng buk?* (padinya sudah mendekati panen apa belum bu?).

Selain itu, peneliti juga harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang digunakan oleh informan. Maklum, peneliti tidak terlalu paham bahasa Jawa *melipis* yang mereka gunakan. Ada beberapa istilah yang masih asing di telinga peneliti, sehingga peneliti harus sambil belajar memahami bahasa tersebut.

Meskipun demikian, komunikasi terus dilakukan oleh peneliti sampai mengarah pada substansi fokus kajian penelitian. Sebab, jika peneliti terlena dengan banyaknya basa-basi, peneliti khawatir proses pengumpulan data dan informasi tidak berjalan maksimal. Sehingga tugas utama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meskipun secara organisatoris peneliti menjadi bagian dari pengurus Muslimat NU Trenggalek, namun peneliti berusaha sekuat tenaga untuk membuat batasan atau *gap* (peneliti sebagai pengurus Muslimat NU Trenggalek atau peneliti sebagai orang yang meneliti kajian tertentu atau *researcher*). Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan bahwa peneliti hendaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan pengetahuannya secara profesional meskipun tidak perlu secara penuh.[65]

Oleh sebab itu, peneliti sangat menghindari informasi yang sifatnya mengira-ngira, menduga-duga atau membayangkan suatu ungkapan, peristiwa atau kejadian yang didengar atau dilihat. Peneliti harus mengetahui secara pasti dengan cara turut serta dalam observasi terlibat dan wawancara secara mendalam.

c.) Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data

Turut serta dalam beberapa kegiatan baik yang dilakukan oleh PC Muslimat NU Trenggalek maupun PAC Muslimat NU Trenggalek merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan sebagainya, sehingga peneliti sedikit memilih kegiatan yang tidak terlalu lama dan panjang, sebab dengan waktu yang singkat tersebut dapat dipergunakan untuk aktifitas lainnya.

Di sela-sela kegiatan tersebut, peneliti menyiapkan catatan lapangan.[66] Peneliti melakukan pencatatan tersebut misanya melalui catatan cepat, merekam setiap kegiatan yang berlangsung. Sebab, pada prinsipnya peneliti merasa kesulitan ketika harus melakukan dua pekerjaan sekaligus. Artinya, peneliti tidak dapat

[65] Robert Bogdan, *Participant Observation in Organizational Settings*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1972), 39.

[66] Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Dalam catatan lapangan tersebut peneliti menggunakan bentuk kata-kata kunci,singkatan, pokok-pokok utama. Peneliti meengkapi dan menyempurnakan catatan tersebut ketika sudah pulang ke rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengamatan sambil membuat catatan yang baik, atau peneliti tidak dapat melakukan pencatatan sambi wawancara secara mendalam dengan para informan.

Proses pengumpulan data telah dilakukan oleh peneliti melalui berbagai sumber dan cara. Di antaranya melalui notulensi rapat dan daftar hadir yang diadakan oleh PC Muslimat NU Trenggalek, observasi partisipan dengan terlibat secara langsung dalam *moment-moment* tertentu. Peneliti juga menggunakan rekaman suara dan gambar melalui handphone. Di samping itu, peneliti juga mengambil beberapa foto atau gambar yang relevan dengan fokus kajian ini.

Pada bagian inilah biasanya peneliti akan sedikit mengalami kebingungan, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang harus dilakukan ketika data sudah dikumpulkan? Maka inilah salah satu tugas peneliti yaitu peneliti melakukan reduksi data yang dianggap tidak terlalu mendukung dan relevan dengan kajian penelitian tersebut.[67] Namun sebelum peneliti melakukan reduksi data tersebut, peneliti melakukan pengelompokan terhadap jenis data yang telah didapatkan.

Misalnya, catatan lapangan baik berupa observasi maupun wawancara dijadikan dalam satu unsur. Selanjutnya data yang berupa rekaman, gambar atau sejenisnya disesuaikan dengan

[67] Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences, Fourth Edition*, (California: California Stole University, 2001), 33-34. ISBN 0-205-31847-9 Internet: www.abacon.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuknya masing-masing. Dalam proses tersebut, peneliti tidak menunggu semua data terkumpul terlebih dahulu. Sebelum akhirnya proses pengumpulan data dilakukan.

3. Tahap Analisis Data

Prosedur analisis dan penyajian data dilakukan ketika proses pengumpulan data sampai selesai. Langkah yang diambil adalah dengan mereduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*).[68]

Adapun proses reduksi data berkaitan dengan tujuan penelitian, sajian data yang menggunakan narasi deskriptif. Sedangkan proses pengambilan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data terkumpul kemudian dilakukan proses verifikasi selama penelitian berlangsung.

Ketika proses reduksi data, data diambil melalui observasi terlibat atau wawancara mendalam, kemudian diklasifikasi sesuai dengan pengelompokkan data. Misalnya: tentang alasan berpolitik, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, alasan memilih pasangan tertentu, posisi aktor dalam politik.

Semuanya diklasifikasikan sesuai dengan konsepnya. Tujuan dari klasifikasi data tersebut untuk memudahkan dalam menyusun tipologi berbagai perilaku politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek.

[68] Matthew Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah proses analisis data dapat dirumuskan sebagai berikut:

Proses Analisis Data

Gambar 1

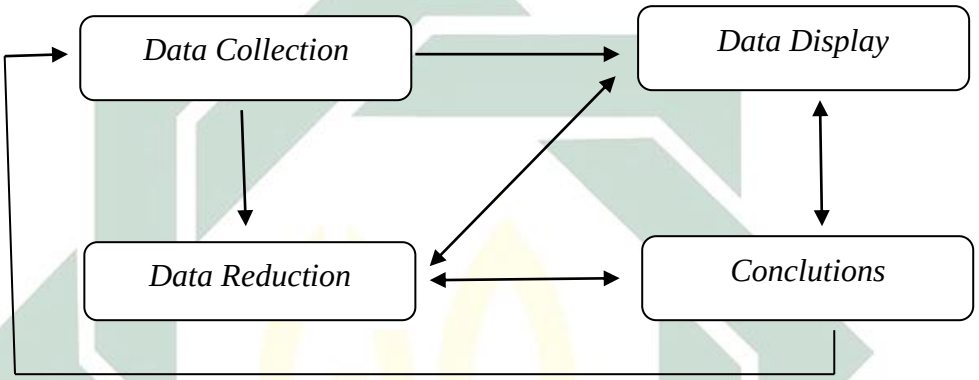

Gambar di atas menunjukkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Pengumpulan data itu sendiri juga diposisikan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Jika dilihat dari gambarnya, maka prosesnya tidaklah sekali jadi, harus berinteraktif secara bolak balik.[69]

Dari hasil pengelompokan tersebut, nantinya dapat digambarkan dalam bentuk deskriptif atau penarasian verbal sebagai ciri khas dari penelitian kualitatif. Dari proses penarasian tersebut peneliti masih menggunakan versi asli dari para informan, walaupun sangat dimungkinkan tercampur oleh ungkapan peneliti. Namun

[69] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 64-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dari belenggu tersebut.

Agar temuan dapat dibaca sebagai sesuatu yang baru (*novelty*), maka dilakukan perbandingan dengan teori atau dalam konsep sosiologi politik, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil.

Namun sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, temuan dalam bentuk teori, konsep atau proposisi tidak dapat digeneralisasikan karena bersifat lokal dan kasuistik. Oleh sebab itu, hasil penelitian kualitatif hanya dapat dipindah ke tempat lain dengan persamaan karakter, atau ciri yang melekat pada daerah atau unit analisis tertentu.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab di antaranya adalah :

Bab I membahas tentang : (a) latar belakang masalah yang meliputi problem akademik, kebutuhan pemecahan ilmiah, urgensi penelitian dan aktualisasi penelitian. (b) identifikasi dan batasan masalah meliputi berbagai masalah penelitian yang muncul agar wilayah penelitian jelas dan terarah (c) rumusan masalah berguna untuk memperjelas persoalan penelitian (d) tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. (e) kegunaan penelitian, (f) penelitian terdahulu, (g) metode penelitian, (h) sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II membahas tentang : isi konsep teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian dan istilah-istilah konseptual yang terdapat di dalam kajian politik, perempuan, dan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun konsep teoritis dan konseptual berisi mengenai (a) politik perempuan dan perempuan politik: terdiri atas perempuan dan politik, komunikasi politik, pemikiran politik perempuan. (b) perilaku politik perempuan: terdiri atas peran dan perilaku politik, karakteristik perilaku politik, serta proses pembentukan dan pendekatan politik. (c) Organisasi Kemasyarakatan sebagai *modality*: terdiri atas Ormas sebagai modal sosial, Ormas sebagai modal politik, dan Ormas sebagai media komunikasi. (d) teori *rational choice* dan teori strukturasi*:* memahami perilaku politik.

Bab III menjelaskan tentang Muslimat NU dalam kontestasi politik lokal Trenggalek. Dalam bab ini menjelaskan mengenai, (a) Sejarah dan rekam jejak Muslimat NU, Rekam jejak Muslimat NU Trenggalek, Peran Muslimat NU dalam berbagai aspek. (b) Relasi dan posisi Muslimat NU, NU dalam kontestasi politik lokal. (c) Perilaku aktor Muslimat NU dalam politik, (d) Faktor-faktor yang menentukan aktor Muslimat NU dalam politik.

Bab IV berisi tentang analisis data. Analisis data ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dan penyajian data yang telah dipaparkan dalam bab 1 dan bab III

Adapun bab V ini disajikan kesimpulan yang dilengkapi dengan penjelasan terhadap implikasi teori, keterbatasan studi serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLITIK, PEREMPUAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Politik Perempuan dan Perempuan Politik

1. Antara Perempuan dan Politik

Peran perempuan dalam kiprah politik memiliki dua pendekatan. *Pertama,* perempuan berpolitik mempunyai peran sebagai orang yang dapat menentukan suatu keputusan melalui kebijakan umum, membentuk peran atau aktifitas di wilayah publik. Para ilmuwan politik mempertimbangkan berbagai hal, misalnya, apakah perempuan menikmati perannya di wilayah publik?.

Kedua, dalam literatur politik menganggap perempuan sebagai aktor politik, perempuan mampu berinteraksi, berpartisipasi dalam politik, termasuk pada politik formal. Politik formal ini meliputi pemegang jabatan, pemegang kebijakan dan mampu menggerakkan politik secara aktif sampai pada proses paling bawah atau *grassroots.*[70]

Pankaj Kumar dalam artikel yang berjudul *'Participation of Women in Politics: Worldwide experience'* mengatakan :

> *Women, who are considered to be the cornerstone of society, women in the modern era are representing the politics of most countries around the world. Seeing history, you find that women are playing an important role in creating society. It is known that the role of women in society and their nature is philosophical, religious and political views. Communal structure and women's*

[70] Priscilla Offenhauer, *Women In Islamic Societies: A Selected Review Of Social Scientific,* (Washington DC: Federal Research Division Library Of Congress, November 2005). Literature Library Of Congress – Federal Research Division. 20540−4840, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politics were given a place in the discussion on the situation so that they could come to politics themselves.[71]

Dalam wilayah publik pun, perempuan telah dianggap sebagai tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perempuan di saat sekarang kaum perempuan sudah ikut berkontribusi dalam politik sehingga mereka berperan penting dalam membentuk dan menciptakan sebuah tatanan masyarakat melalui kebijakan. Di sisi lain, dalam posisi struktur politik pun, perempuan diberikan tempat untuk mengemukakan gagasan di wilayah umum.

Dalam karya tulis yang berjudul *The Female Political Career* memberikan gambaran yang cukup detail tentang bagaimana peran perempuan dalam politik dengan segala pengalaman, perjalanan karir politiknya, sehingga mampu menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Mereka (kaum perempuan) juga mampu mengendalikan berbagai faktor yang berkaitan dengan aktifitas politiknya.

Misalnya, mereka mampu membaca situasi lapangan lengkap dengan berbagai variabel-variabel yang ada (terkait kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, tipologi masyarakat, tingkat keberagamaan, sehingga buku ini semacam refleksi yang menawarkan kesimpulan tentang *Jalan Menuju Kepemimpinan Politik.*[72]

---

[71] Pankaj Kumar, 'Participation of Women in Politics: Worldwide experience', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 22, Issue 12, Ver. 6 (December. 2017) PP 77-88 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org DOI: 10.9790/0837-2212067788, 77-88.

[72] Lebih detail dan lengkap lihat Frances Rosenbluth, *The Female Political Career*, (The World Bank: Women In Parlaments Global Forum, January 2015), 12-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tulisan lainnya yang telah direview oleh Nidhi Tandon dengan judul *Women in Politics: Gender, Power and Development* menggambarkan bahkan melacak berbagai pengalaman dan realita beragam perempuan yang aktif dalam sistem politik formal.[73] Kisah, profil dan pengalaman tersebut sungguh menarik dalam proses penyajiannya.

Tidak hanya mencakup aspek kreatifitas, inovasi serta kemandirian dalam wilayah pribadi, namun lebih pada bagaimana mereka memiliki keinginan untuk mengubah dan meningkatkan akuntabilitas sistem pemerintahan. Sistem tersebut bisa menjadi terbatas pada hegemoni partai politik yang secara politis sistem tersebut berdasarkan pada gender dan kelas serta budaya politik yang khas patriarki.

> *If politics is essentially about working different spheres of influence, then the various spaces that women occupy comprise of the full complexity of these spheres, women in politics must straddle the private (domestic) with the public, the formal with the informal, and the party with the non-party. While many of the women interviewed only recognized the formal aspects of their political involvement, there is perhaps a growing awareness that their informal leadership and influence is unduly ignored or undervalued, and that these components of their political leverage are critical to their political careers.*

[73] Kisah-kisah tersebut disusun dari Afrika (Mesir, Ghana, Sudan dan Sierra Leone), Asia (Bangladesh dan India) dan dari Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) dan Brasil. Perempuan dalam buku ini mungkin telah memasuki politik melalui aliran pemuda partai, atau melalui pekerjaan profesional mereka sendiri di masyarakat (seperti perawat, guru, aktivis sosial atau serikat pekerja dll) atau melalui tingkat partisipasi politik pemerintah daerah (seperti di Ghana dan Bangladesh) serta melalui posisi keagamaan. Nidhi Tandon, *Women in Politics: Gender, Power and Development*, Mariz Tadros (ed), 23(2):399-401, May 2015 DOI. 10.1080/13552074.2015.1067967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pada prinsipnya politik adalah terkait dengan ruang lingkup yang berbeda, maka ruang lingkup yang diwakili oleh perempuan terdiri dari kompleksitas yang bersifat universal. Peran perempuan dalam kontestasi politik memiliki tanggungjawab dari berbagai sisi, mulai dari tanggungjawab domestik dengan publik, tanggungjawab formal dengan informal, dan tanggungjawab partai dengan non-partai. Berbagai tanggungjawab dan komponen tersebut penting bagi bagi karir politik perempuan. Hal tersebut juga menjadi keuntungan tersendiri bagi perempuan politik terkait sistem kuota untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam politik.

Di sisi lain, dengan adanya sistem kuota ini juga menjadi sistem yang semakin memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam mengisi posisi politik hanya untuk memenuhi persyaratan kuota.[74] Hal yang sering terjadi adalah bahwa perempuan dalam posisi ini sering mewakili anggota laki-laki lainnya. Dalam situasi tertentu misalnya, peran dan posisi perempuan dalam politik hanyalah untuk mengisi kursi dalam 'nama' dan tidak memiliki kekuatan besar.

[74] Penentuan kuota 30% untuk perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002) dan UU Parlemen Pemilihan (UU Nomor 12 Tahun 2003), kemudian diatur lebih lanjut dan direvisi pada UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Parlemen Pemilihan. Alasan mendasar pada penerapan kuota sistem adalah untuk mengatasi masalah ketimpangan yang disebabkan oleh hukum dan budaya di masyarakat. Sejak itu penerapan 30% kuota perempuan di bidang politik menghasilkan 11,3% keterwakilan perempuan di Indonesia pemilihan umum pada tahun 2004, dan pemilihan umum 2009 menghasilkan 18,04% perwakilan perempuan di parlemen (DPR), 16,0% perwakilan perempuan di parlemen provinsi (DPRD provinsi), dan 12,0% perwakilan dari perempuan di parlemen kabupaten / kota (DPRD kabupaten / kota). Pemilihan umum pada bulan April 2014 menghasilkan 17,80% keterwakilan perempuan di parlemen (DPR). Ani Purwanti, 'Quota Law's For Women In Politics: Implementation In Indonesia', *Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 6*, Vol. 4. April 18 – 19, 2015. ISBN 978-967-11350-4-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum memang tampaknya benar bahwa sistem kuota sebenarnya sangat tergantung konteks ruang dan waktu. Menurut Ani Purwanti dalam artikelnya yang berjudul *Quota Law's For Women In Politics: Implementation In Indonesia,* menyebutkan setidaknya ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi representasi politik perempuan, di antaranya:[75]

Pertama, Perempuan memobilisasi kuota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan melalui pemenuhan kuota menunjukkan betapa pentingnya mempelajari bagaimana kuota gender dapat mengubah beberapa hambatan partisipasi atau keterwakilan perempuan.[76] *Kedua,* Sistem kuota secara konsisten memunculkan gagasan kesetaraan dan representasi. Faktor ini memunculkan pertanyaan, apakah yang akan menjadi perhatian perempuan ketika mengambil kebijakan?

Dalam sebuah artikel disebutkan perempuan cenderung konsen pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Karena perempuan lebih memilihi hak dasar atas anak-anak mereka dan wilayah domestik. Namun, satu hal yang menjadi perhatian khusus perempuan adalah terkait dengan kesetaraan dalam bidang kesejahteraan sosial.[77]

---

[75] Ani Purwanti, 'Quota Law's For Women In Politics: Implementation In Indonesia',

[76] Sebagai contoh yang terjadi Maroko pada pemilihan parleman tahun 2002, 2007 dan 2011. Ketiga pemilihan tersebut telah mengadopsi sistem kuota sehingga memberkan kesempatan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam konstitusi. Hanane Darhour and Drude Dahlerup, 'Sustainable representation of women through gender quotas: A decade's experience in Morocco, *Women's Studies International Forum* (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2013.04.008.

[77] lebih lanjut, artikel ini menjelaskan bahwa perempuan cenderung membeli barang untuk anak-anak dan konsumsi rumah tangga, karena mereka memiliki hak dasar untuk anak-anak secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Perpanjangan jaminan representasional. Dalam sistem ini menemukan kuota gender sebagai pembuka pintu demokrasi. Namun di sisi lain argumen ini dapat juga untuk menolak kuota gender (dengan alasan bahwa kategori gender tidak relevan dengan identitas kelompok lain, misalnya budaya, etnis, ras dan lainnya). *Keempat,* Tekanan internasional. Sering kali para pemimpin politik di suatu negara mengadopsi kuota gender karena tekanan internasional untuk mempertahankan kekuasaan.

Di hampir 100 negara di seluruh dunia, partai dan parlemen telah merespons perwakilan politik perempuan. Hal ini disebabkan adanya tekanan politik baik di skala nasional maupun internasional, dengan label kuota gender pemilihan. Tidak semua negara menganggap hal ini positif. Bagi negara yang tidak setuju dengan sistem ini, sistem kuota dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpolitik.

Sebaliknya, pendukung kuota melihat kuota gender sebagai kompensasi langsung atau diskriminasi struktural terhadap perempuan dan laki-laki sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai

---

konvensional. Di sisi lain laki-laki mendapat bagian dari hak tersebut jika mereka menandatangani kontrak untuk menikah di mana mereka berjanji untuk menyediakan bagi istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu wanita dapat mendukung berbagai kebijakan yang terkait dengan anak-anak dan keluarga, seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, lebih dari pria ketika mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Li-Ju Chen, 'Do Gender Quotas Influence Women's Representation and Policies?' *The European Journal of Comparative Economics,* Vol. 7, n. 1, 2010. pp. 13-60. ISSN 1824-2979. online at http://eaces.liuc.it.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseimbangan gender dalam lembaga-lembaga politik,[78] yang dianggap penting untuk pembangunan demokratisasi.[79]

Peran dan posisi perempuan dalam politik modern saat ini merupakan sebagai subjek atau aktor yang memerlukan wawasan lebih luas dalam mengembangkan kapasitas dan jumlah perempuan yang memiliki posisi dalam bidang politik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Irina Zamfirache, bahwa keterwakilan perempuan dalam politik disebabkan cara berfikir feminis dalam bingkai perbedaan gender. Dengan maksud lain bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mengeksploitasi peluang untuk mengamankan posisi kekuasaan memiliki orientasi yang sangat berbeda.[80] Sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Term gender biasanya dipahami sebagai pemahaman maskulinitas dan feminitas yang umumnya diciptakan. Menurut Raymond Kwasi Ocran bahwa:

> *Gender is usually understood as sets of generally created understandings of masculinities and femininities. These*

---

[78] Gender dalam politik memiliki dua sisi. Pertama, representasi perempuan dan kedua, kepedulian terhadap masalah perempuan. Representasi meningkatkan kemungkinan untuk mempertimbangkan isu-isu wanita juga membawa perspektif gender, namun representasi sendiri tidak dapat menjamin hasil yang diinginkan. Nana Sumbadze, *Gender and Society,* (Georgia: UNDP, 2008), 30. Sebagaimana dikutip oleh Emelie Blomgren, *Women and Political Participation A Minor Field Study on Hindrances for Women"s Political Participation in Georgia*, (The School of Social Sciences Thesis in Political Science, 2010), 15.

[79] Drude Dahlerup, 'Electoral Gender Quotas: Between Equality Of Opportunity And Equality Of Result', *Representation,* Vol. 43, No. 2, 2007, ISSN 0034-4893 print/1749-4001 online/07/020073-20, McDougall Trust, London, DOI: 10.1080/00344890701363227.

[80] Irina Zamfirache, 'Women and Politics – The Glass Ceiling', *Journal Of Comparative Research In Anthropology And Sociology,* Volume 1(1): 175-185, ISSN 2068 – 0317, 2010, http://compaso.ro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

connotations emanate from categorizations about male and female behavior; from the features of conduct usually linked with men and women; from normative suppositions about suitable behaviors of women and men; and from conventions about biological modification and from social structures of supremacy and alteration.[81]

Raymond menjelaskan bahwa konotasi gender berasal dari kategorisasi tentang perilaku laki-laki dan perempuan, dari perilaku tersebut biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin. Namun, ketika politik itu dimaknai sebagai praktik dan pendidikan politik, maka akan ada perubahan besar terjadi didalamnya, yakni memahami politik sebagai praktik dan sarana dimana keduanya bisa saling berkerja sama. Lanjut Raymond, kesenjangan gender dapat diminimalisir melalui berbagai pendekatan seperti melalui analisis feminis, pendekatan ilmu politik dan juga sosiologi. Berbagai pendekatan di atas memiliki hubungan, relasi yang saling berkaitan. Kesemuanya tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.[82]

Secara bersamaan, tampaknya menjadi tren dalam pengetahuan bahwa perempuan hanyalah sebagai orang yang bertugas di ranah domestik saja, bahwa perempuan hanya menjadi istri presiden, bukan menjadi presiden, '*Other analysis show that the social context favors*

[81] Raymond Kwasi Ocran, *Women's Political Participation: A Comparative Study On Ghana And Tanzania,* (International Master's Degree Program in Border Crossings: Global & Local Societies in Transition (Sociology), Faculty of Social Sciences University of Eastern Finland May, 2014, 8-9.

[82] Bagi Raymond, kesenjangan gender terkadang masih dimainkan di media massa meskipun tidak vulgar. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesenjangan gender agar tidak mengarah kepada perbedaan esensial antara perempuan dan laki-laki. Raymond Kwasi Ocran, *Women's Political Participation: A Comparative Study On Ghana And Tanzania,* 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mental exclusion of some specific categories of people (women in politics) and that there is a social control that induces people to reject alternatives (women should be wives of presidents, not presidents)'.[83] Antara perempuan dan laki-laki pada prinsipnya memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, perdebatan antara posisi perempuan dan laki-laki dalam kontestasi politik juga memunculkan pertanyaan yang menggelitik, bagi Irina, ada pertanyaan yang harus dijawab terkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, apakah kontestan politik laki-laki akan didukung oleh pemilih laki-laki? atau sebaliknya kontestan perempuan akan didukung oleh pemilih perempuan?. Inilah sesungguhnya pertanyaan yang harus dijawab secara objektif. Irina menyimpulkan kemungkinan besar jawabannya adalah 'tidak'. Karena ada faktor media,[84] sebab media memainkan peran yang besar dalam membentuk dan menciptakan opini terhadap kontestan tersebut.[85]

Selain faktor media massa, ada faktor yang tidak kalah penting dalam proses penentuan 'aktor' perempuan dalam publik, yaitu partai politik. Menurut Emelie Blomgren dalam karya ilmiahnya, ia menyatakan bahwa partai politik merupakan aktor terpenting dalam

[83] Irina Zamfirache, 'Women and Politics – The Glass Ceiling', *Journal Of Comparative Research In Anthropology And Sociology,* 177-178.

[84] Meskipun media massa biasanya berkaitan dengan komunikasi, televisi, radio, iklan, internet dan lainnya, namun media juga mampu menyuguhkan peran perempuan perempuan dalam media massa, misalnya di bidang politik. Bagaimana media massa menggambarkan perempuan, signifikansi perempuan dan media, pengaruh media terhadap pandangan gender. Radhika Kapur, *Role of Women in Mass Media.* https://www.researchgate.net/publication/323770675_The_Role_of_Women_in_Mass_Media

[85] Irina Zamfirache, 'Women and Politics – The Glass Ceiling', *Journal Of Comparative Research In Anthropology And Sociology,* 180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan representasi kaum perempuan. Mereka memiliki prosedur dalam mengendalikan nominasi dalam pencalonan kandidat. Partai politik merupakan aktor terkuat di ranah politik dan merupakan kunci dalam pemerintahan yang demokratis.[86]

National Democratic Institute mencatat dalam tulisan ringkas dengan judul *Why Women In Politics*? menyebutkan seperti ini:

> *Still, some may ask Why it matters if women become political leaders, elected policymakers or civil society activists. Why does the world need more women involved in all aspects of the political process? Women's political participation results in tangible gains for democracy, including greater responsiveness to citizen needs, increased cooperation across party and ethnic lines, and more sustainable peace.*[87]

Bahwa beberapa orang mungkin bertanya mengapa wanita penting menjadi pemimpin politik? Mengapa dunia perlu lebih banyak perempuan terlibat dalam proses politik? Sebab partisipasi politik perempuan menghasilkan berbagai keunntungan yang nyata bagi demokrasi, termasuk respon yang lebih besar terhadap kebutuhan warga, meningkatkan kerjasama lintas partai dan etnis. Bahkan Kofi Annan mencatat :

> *Kofi Annan noted, "Study after study has taught us, there is no tool for development more effective than the empowerment of women. No other policy is as likely to raise economic productivity or to reduce child and maternal mortality. No other policy is as sure to improve nutrition and promote health, including the prevention of*

[86] Emelie Blomgren, *Women and Political Participation A Minor Field Study on Hindrances for Women"s Political Participation in Georgia*, (The School of Social Sciences Thesis in Political Science 2010), 12-13.
[87] National Democratic Institute, *Why Women In Politics*?, 1. https://www.peaceisloud.org/wp content/uploads/2017/04/Why-Women-in-Politics.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HIV/AIDS. No other policy is as powerful in increasing the chances of education for the next generation.[88]

Pernyataan Kofi Annan terkait perempuan berpolitik memiliki dampak yang positif. Sebab penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa tidak ada alat politik yang lebih efektif dari pada pemberdayaan perempuan. Perempuan berpolitik mampu memainkan peran dan strategi dalam produktivitas ekonomi, meningkatkan kesehatan dan gizi serta berperan aktif dalam meningkatkan peluang pendidikan.[89]

2. Komunikasi Politik: Muslimat NU dan Politik

Memperbincangkan terkait komunikasi politik tidak semudah seperti membahas masalah gerakan politik. Sebab, dalam term komunikasi politik terdapat dua konsep disiplin keilmuan. *Pertama*, disiplin ilmu tentang komunikasi. *Kedua*, disiplin ilmu tentang politik. Mengkombinasikan dua disiplin ilmu yang berbeda dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda.[90] Kedua disiplin tersebut dapat menonjol salah satu tergantung bagaimana seseorang memiliki latar belakang kelimuan tersebut.

Menurut Clio Kenterelidou, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai peran politik komunikasi dalam proses politik, *'Political*

[88]Ibid., 5.

[89] Perempuan profesional dengan kelebihan dan keahlian mereka dalam menjalankan jabatan, menjamin pelaksanaan muatan tugas sebagai perealisasian untuk kemaslahatan yang diharapkan oleh generasi masyarakat. Agar muatan tugas tidak menggiringnya pada pelalaian ikatan-ikatan dan etika agama yang seharusnya menjadi pengikat baginya. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam,* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 80.

[90] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

communication is the role of communication in the political process'.[91] Proses politik tersebut dapat berupa politik formal dan politik non-formal. Selain itu, komunikasi politik dapat juga berarti proses yang mencakup lembaga dan aktor politik, media dan yang terpenting adalah masyarakat.

Komunikasi politik telah muncul sebagai titik fokus bagi para sarjana dalam ilmu politik, ilmu komunikasi dan ilmu sosial. Label komunikasi politik muncul untuk menggambarkan proses intervensi lembaga-lembaga politik dan masyarakat melalui interaksi antara satu dengan yang lain. Komunikasi ini juga melibatkan beberapa pesan politik yang dilakukan oleh aktor politik yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintah serta kebijakan pemerintah. [92]

Peran media juga dipandang dapat memberikan lebih banyak peluang bagi para kandidat individu untuk mempromosikan pesan mereka, *'New media have been seen as providing more opportunities for individual candidates to personalise their message.*[93]

Mengingat semakin banyak aktivis politik, keberadaan komunikasi politik dapat memobilisasi tindakan individu itu sendiri, mengingat komunikasi tidah hanya proses penyampaian pesan semata, lebih dari itu

---

[91] Clio Kenterelidou, *Public Political Communication and Media: The case of contemporary Greece,* (Department of Journalism and Mass Communication: Aristotle University of Thessaloniki, June 2005), 3.

[92] Clio Kenterelidou, *Public Political Communication and Media: The case of contemporary Greece,* 4.

[93] Darren Lilleker and Karolina Koc-Michalska, *Online Political Communication Strategies: MEPs e-representation and self-representation,* Francis (Routledge), 2013, 10 (2), pp. 190-207. DOI. 10.1080/19331681.2012.758071.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi harus memiliki strategi dalam proses penyampaiannya. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Michele Micheletti dalam *Communication and Political Understanding as Political Participation*, bahwa '*strategic communication is increasingly viewed as the base of successful goal attainment'*.[94]

Dengan demikian strategi komunikasi merupakan dasar atau tolak ukur untuk menyampaikan pesan politik agar dapat tersampaikan secara sukses. Pesan-pesan politik tersebut bisa berupa tuntutan, protes maupun dukungan (aspirasi atau kepentingan). Jika komunikasi politik berjalan lancar, wajar dan sehat, maka sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.

David L. Paletz dalam *'Political Culture and Political Communication'* menyebutkan *'Mass communication provides the possibility of a quick diffusion of new ideas into a society and hence the possibility of more rapid changes in political cultures'*.[95] Media komunikasi telah menyediakan berbagai kemungkinan dalam menciptakan ide-ide atau gagasan baru dalam masyarakat.

Lebih lanjut ia juga mengatakan dalam tulisannya tersebut bahwa eksistensi politik dapat dicapai melalui peran media didalamnya. Komunikasi politik tidak akan pernah lepas dari peran simbolik media.

---

[94] Michele Micheletti dalam *Communication and Political Understanding as Political Participation*, (Sweden: Karlstad University).

[95] David L. Paletz dalam *'Political Culture and Political Communication'* (Barcelona: Duke University, 1994), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap beberapa alasan mengapa para politikus atau aktor politik menggunakan media dalam aktifitas politik, di antaranya adalah:[96]

a. Untuk membangun dan mempertahankan kelompok politik atau gerakannya. Untuk mempertahankan kelompok politiknya kecuali melalui media.
b. Untuk mempengaruhi masyarakat, sebab masyarakat merupakan bagian terpenting dari aktifitas politik
c. Untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan semua program pemerintah sehingga dapat diakses oleh siapapun, negara manapun.

Namun, dalam dunia modern seperti yang dikemukakan oleh Marina A. Chekunova, dkk bahwa *'in transformation of the realm of political communication, a more important part is given to the so-called "new social media".*[97] Media sosial baru dalam komunikasi politik menjadi alat untuk memastikan proses (baik berupa persiapan, pembuatan dan implementasi) keputusan politik.

Berikut ini adalah gambar tentang elemen atau dasar komunikasi politik.[98]

[96] David L. Paletz dalam *'Political Culture and Political Communication',* 4.
[97] Media massa baru merupakan kombinasi antara teknologi dan praktek secara online seperti blog, podcast, dan jejaring sosial lainnya. Twitter dan facebook telah menjadi jejaring sosial yang paling banyak diminati dan digunakan karena lebih komunikatif. Secara *feedback*, media ini memberikan umpan balik dalam format dialog Marina A. Chekunova, et all., 'New Media In Political Communication: General Approaches', *EEIE SHS Web of Conference,* 9, 01015 (2016). DOI: 10.1051/shsconf/20162901015
[98] Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*, Second edition, (London and New York: Routledge), 1995, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elemen Komunikasi Politik

Gambar 2

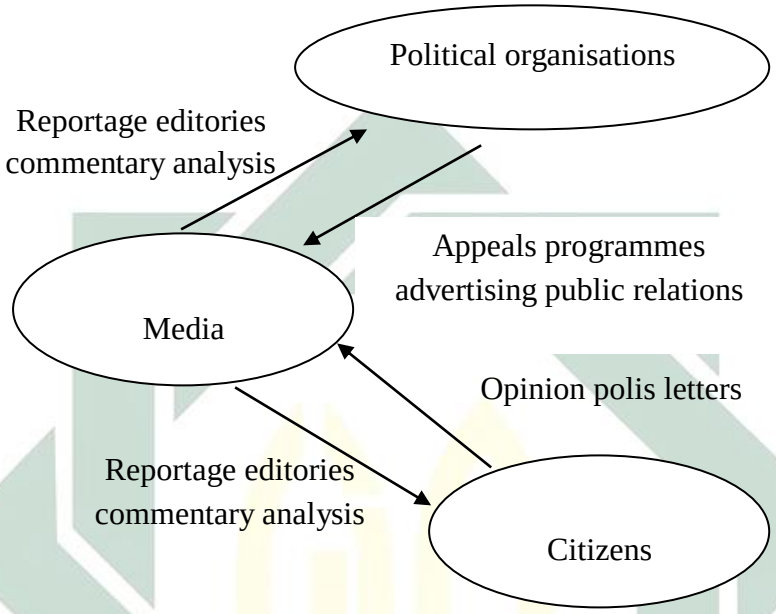

Gambar di atas mengilustrasikan bahwa studi tentang komunikasi politik mengarah pada tiga elemen dasar proses politik dimana politik untuk dipahami dan direalisasikan. Tiga elemen tersebut yaitu media, organisasi politik dan warga masyarakat. *Pertama,* Media tentu saja tidak sekedar melaporkan secara netral dengan cara yang tidak memihak tentang apa yang terjadi di arena politik, meskipun terkadang media memberikan penilaian secara subjektif dan bias.[99]

Kedua, organisasi politik atau *political organisation*, yaitu organisasi politik juga dapat dianalogikan sebagai pemasaran politik.

[99] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana menargetkan audiens, mencari dukungan melalui apa, menggunakan saluran komunikasi massa yang bagaimana. Sebagaimana pemasaran politik, organisasi politik juga menggunakan banyak prinsip yang diterapkan untuk mencapai kesuksesan yang maksimal.[100] *Ketiga*, warga masyarakat atau *citizens* mengacu pada cara-cara dimana *audiens* juga menjadi bagian dari media yang menjadi dasar bagi partisipasi warga negara.

Selain itu juga, Rahman Olalekan Olayiwola mengatakan *'Anywhere in the world, the press has always been involved in politics'*,[101] bahwa peran media massa dalam komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap berbagai *issue* nasional khususnya yang berkaitan dengan pemilu sangatlah *urgen.* Tidak hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia pun media massa selalu terlibat dalam politik.

Rahman juga mengutip pendapat Harold D. Lasswell[102] bahwa ada tiga fungsi yang dilakukan oleh media massa terhadap aktifitas politik, *'itemizes three functions performed by the mass media, namely, surveillance of the world to report on-going events, interpretation of the*

---

[100] Brian McNair, *An Introduction To Political Communication,...* 7.

[101] Rahman Olalekan Olayiwola, Political Communications: Press and Politics in Nigeria's Second Republic, *Africa Media Review,* Vol. 5 No. 2.1991, 33. .http://digital.lib.msu.edu/projects/africanjournals/.

[102] Harold D. Lasswell merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah awal ilmu komunikasi di Amerika adalah. Dengan diktum komunikasinya *'Who says what, to whom, to which channel and with what effect'*. Siapa mengatakan apa, kepada siapa, ke saluran apa, dan dengan efek apa. Ia juga disebut sebagai *The Founding Fathers* Ilmu Komunikasi. Melalui karyanya yang diangkat dari Disertasi doktor yang berjudul *Propaganda Technique In The World War*. Harold D. Lasswell, *Propaganda Technique In The World War,* (New York: The United States of Amerika, 1938), First Publised in 1927, Reprinted 1938. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000379902;view=1up;seq=10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meaning of events, and socialization of individuals into their cultural settings'[103]

Pertama, media massa berfungsi untuk mengawasi seluruh aktifitas yang politik dalam skala dunia. *Kedua,* media massa melakukan interpretasi makna dari setiap kejadian politik. *Ketiga,* media massa berfungsi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, sebab ketiga mempunyai ketersalingan antar pribadi, media kelompok dan lainnya.[104]

Jay G. Blumler tampaknya sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh pakar sebelumnya terkait dengan pentingnya menggunakan atau memaksimalkan media dalam komunikasi politik. Ia mencoba lebih realistis dalam menawarkan kerangka kerja media massa tentang kekuatan dan kelemahan dalam menggunakan media tersebut. Ia mengatakan bahwa komunikasi politik dua faktor tersebut, yakni kekuatan dan kelemahan yang masing-masing memiliki konsekwensi.

Ia menyebutkan *'...the advantages of this characterization are that it invites us to consider exactly how the present situation differs from what preceded it'.*[105] Adapun keuntungan dalam menggunakan dua faktor tersebut adalah dapat mempertimbangkan dan mengetahui dengan tepat bahwa situasi saat ini akan berbeda dengan situasi sebelumnya.

---

[103] Rahman Olalekan Olayiwola, Political Communications: Press and Politics in Nigeria's Second Republic, 34.

[104] Selain ketiga fungsi tersebut, media juga berperan sebagai manipulasi politik, artinya bahwa fungsi-fungsi ini dilakukan untuk diperdebatkan, saling mempengaruhi kehidupan individu, kelompok, organisasi sosial, serta program politik domestik maupun internasional.

[105] Jay G. Blumler and Dennis Kavanagh, 'The Third Age of Political Communication: Influences and Features', *Political Communication*, 16, 1999, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, untuk memaksimalkan proses kerja dari komunikasi politik, maka harus ada berbagai unsur-unsur yang saling mendukung. Unsur-unsur tersebut meliputi: sumber politik, pesan politik, media politik, target politik, pengaruh atau efek komunikasi politik. Unsur-unsur ini juga sering disebut sebagai komponen atau elemen. Jika unsur-unsur tersebut dilukiskan dalam gambar dapat dilihat sebagai berikut:[106]

Unsur-Unsur yang Membentuk Proses Komunikasi Politik

Gambar 3

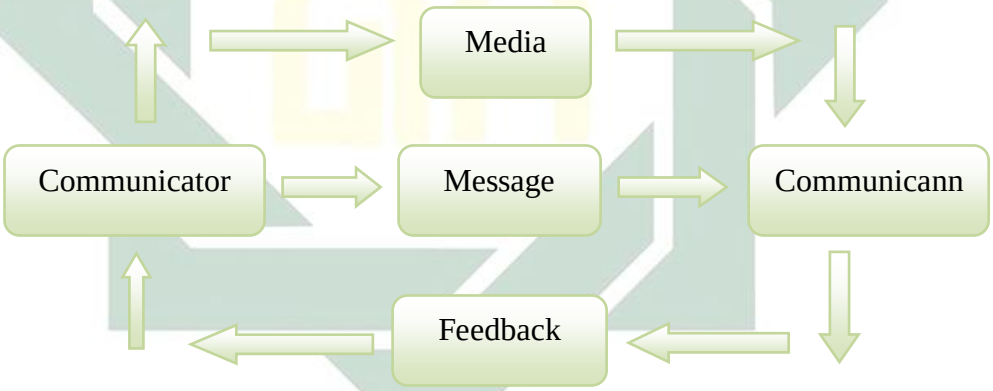

Dari gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber politik

Sumber politik atau bisa disebut sebagai komunikator politik merupakan elemen yang sangat penting dalam proses komunikasi politik. Menurut Hendra Alfani *'the political communicator is a*

[106] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, 29-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

person or group of people whose political message that is usually associated with government power, Government policy, government rules, the authority of the Government which aims to influence audiences either verbal or non verbal'.[107] Dapat diinterpretasikan bahwa komunikator politik adalah seseorang atau sekelompok orang yang pesan politiknya biasanya berkaitan dengan kekuasaan politik, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, wewenang pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak umum baik berupa verbal maupun non-verbal.

2. Pesan politik

Pesan politik ini sebagai sesuatu yang disampaikan sumber politik (komunikator politik) kepada target politik. Pesan politik dapat disampaikan melalui tatap muka atau media komunikasi. Adapun konten dari pesan politik berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat ataupun propaganda.

3. Media politik

Media merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi dalam politik juga memiliki bentuk yang beragam. Mulai dari media cetak, media elektronik sampai internet.

[107] Komunikator politik meliputi: politisi, pejabat legislatif, pejabat eksekutif, pejabat yudikatif, dan para profesional (para jurnalis, peneliti, pengamat politik dan lainnya). Komunikator politik yang paling utama adalah aktivis yang berada dalam sebuah organisasi yang bersifat interprsonal. Hendra Alfani, 'Political Communication Channel and The Phenomenon of Political Communicators in Indonesia', *Communication Sphere*. Vol. 1. No. 1, November 2015. ISSN: 2477-1562, 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan media juga menjadi bagian yang penting dalam proses komunikasi politik. Aktifitas yang berkaitan dengan media meliputi: isi media, jenis media, terpaan media, situasi, dan lainnya.[108]

4. Target politik

Target politik merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber atau komunikator. Target politik atau bisa disebut sebagai komunikan politik dapat terdiri dari satu orang atau lebih, dapat dalam bentuk organisasi, instansi, partai ataupun negara.

5. Feedback

Feedback merupakan salah satu pengaruh yang berasal dari target politik. Meskipun pengaruh tidak selamanya berbalik kepada target, namun tanggapan balik atau *feedback* dapat dibedakan dengan pengaruh. *Feedback* sangat penting karena setiap pesan komunikasi dapat berjalan harmonis telah direspon oleh target.

3. Pemikiran Politik Perempuan

Pemikiran politik perempuan NU[109] ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama,* pemikiran *mainstream* yang memiliki pengaruh luar biasa.

[108] Penggunaan media juga dapat bermanfaat sebagai saluran komunikasi politik yang berkaitan dengan pesan-pesan politik, di antaranya berupa materi kampanye, visi misi, tujuan oleh politisi kepada anggota masyarakat. Syarifuddin, 'Komunikasi Politik Bermedia Dan Penggunaannya Oleh Masyarakat (Survey pada Masyarakat Palopo Sulawesi Selatan Tentang Kampanye Pilpres 2014)', *Jurnal Studi Komunikasi dan Media,* Vol. 19 No. 1 (Januari - Juni 2015), 31.

[109] Sebut saja, Shinta Nuriyah Wahid, Siti Musdah Mulia, Khofifah Indar Parawansa, Maria Ulfah Anshor, Lily Zakiyah Munir, Aisyah Hamid Baidhowi. Karya mereka dapat mewakili pemikiran politik dan gender yang bersifat mainstream. Contohnya: Istri (alm. Gusdur) tersebut menggagas pemikiran bahwa ketimpangan gender berseumber dari sebuah relasi yang dibangun dalam keluarga. Ia berpendapat bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan salah satunya disebabkan adanya tafsir misoginis yang dianggap sebagai kebenaran yang absolut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pemikiran *non-mainstream.*[110] Adapun maksud dari pemikiran *mainstream* adalah pemikiran yang mempunyai pengaruh yang besar dan memiliki pengikut yang cukup banyak. Melalui beberapa karya-karyanya yang telah di*publish* kepada masyarakat, para pemikir perempuan NU itu mampu mempengaruhi khalayak tentang berbagai *issue* keperempuanan.

Berbagai *issue* tersebut di antaranya kesetaraan dan keadilan gender, seksualitas, bahkan *issue* tentang keterlibatan perempuan dalam politik formal. Bagaimana kemudian membangun sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik formal tersebut. Oleh sebab itu, perlu kiranya perempuan juga terlibat dalam politik, baik di partai politik, lembaga politik serta menduduki jabatan publik sekalipun.

Kedua, pemikiran *non-mainstream* yaitu pemikiran yang tidak memiliki dampak atau pengaruh yang besar bagi masyarakat. Tipe pemikiran yang kedua ini biasanya berada di luar lingkaran *elite* atau kelembagaan. Hal ini mudah dijumpai di forum-forum non-formal, misalnya pengajian, arisan yang berada dalam tingkat bawah. Forum-forum seperti itu digunakan untuk sekedar berdiskusi dan mengaktualisasikan berbagai kepentingan para anggota jama'ah.

Dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi yang berbeda-beda, tentu akan memberikan ruang dan kesadaran yang berbeda pula. Satu hal yang harus dipahami mereka bahwa peluang dan

[110] Linda Dwi Eriyanti, 'Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran *Mainstream* dan *Non-Mainstream'*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Volume 20, Nomor 1, Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan untuk mengatasi persoalan keperempuanan adalah dengan mengubah struktur pola pikir yang ada dari dalam. Artinya perempuan harus memiliki pemikiran alternatif dalam forum tersebut sehingga mereka mendapatkan ruang untuk membangkitkan keberdayaan kaum perempuan (khususnya) bagi kehidupan mereka.[111]

Sebenarnya disitulah letak kekuatan organisasi masyarakat perempuan NU, sebagai wujud dan bentuk keberlangsungan atau eksistensi sebuah kelompok. Sayangnya, forum-forum sejenis pengajian tersebut hanya dianggap sebagai rutinitas yang wajib diikuti oleh para anggota. Sehingga yang terjadi adalah forum diskusi tanpa ada suntikan semangat memperjuangkan hak-hak perempuan di wilayah publik.

Kedua pemikiran tersebut memiliki ketentuan dan pengaruh yang berbeda dalam menentukan posisi perempuan dalam bidang politik.[112] Tentunya antara pemikir *mainstream* dan pemikir *non-mainstream* dalam mengatasi problem *opresi* atau penindasan terhadap kaum perempuan agar mendapatkan *preskripsi* atau peraturan yang tidak sama. Oleh karenanya diskursus tentang bagaimana pemikiran tersebut dapat

---

[111] Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebur kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan untuk bisa menjadi mitra sejajar. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan, 2004), 275.

[112] Pemikiran *mainstream* menempatkan perempuan dengan jalur preskripsi atas segala dampak opresi atau penindasan melalui proses politik formal. Sedangkan pemikiran *non-mainstream* memberikan preskripsi melalui cara yang berbeda. Yaitu dengan jalur informal yang memberikan dimensi lebih diskutif dengan cara memaknai relasi kuasa dalam rumah tangga. Preskripsi yang diungkapkan oleh pemikir *non-mainstream* setidaknya lebih efektif mengatasi opresi atau penindasan yang dihadapi oleh kaum perempuan di level bawah. Sedangkan pemikiran *mainstream* oleh perempuan NU meliputi cukup banyak *issue* yang berkaitan dengan perbaikan taraf hidup kaum perempuan yang tidak mampu dijawab oleh kalangan pemikir *mainstream.* Selengkapnya lihat Linda Dwi Eriyanti, 'Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran *Mainstream* dan *Non-Mainstream'*...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan di wilayah publik harus terus dikembangkan agar mampu memberikan solusi yang tepat bagi perempuan yang terjun dalam bidang politik.

Untuk itu, pemerintah harus mewujudkan persamaan dan kesetaraan gender khususnya tentang partisipasi perempuan dalam bidang politik serta kehidupan publik di semua tingkatan. Pernyataan tersebut juga diungkapkan Khofifah Indar Parawansa dalam ceramah ilmiah tentang *Visi Elite Politik Perempuan dalam Pembangunan*.[113] Ia secara lugas mengatakan bahwa seyogyanya pemerintah bersama-sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)[114] diminta untuk melakukan penghapusan perilaku dan sikap diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.[115] Karena bentuk diskriminasi dalam berbagai hal tidaklah dibenarkan.

Perempuan juga harus diberikan akses dalam hal pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja sehingga akan terwujud *equal pay for equal work or for work equal value*. Misalnya, bagaimana mewujudkan keadilan kerja antara laki-laki dan perempuan. Pun demikian di dalam kancah politik. Perempuan juga memiliki peluang dan kesempatan yang sama.

---

[113] Tentang visi pemberdayaan perempuan sesuai dengan arahan GBHN tahun 1999-2004 dirumuskan sebagai berikut: "Membangun kualitas hidup perempuan melalui ikhtiar kesetaraan dan keadilan gender untuk mewujudkan kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan bagi pria dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara".

[114] LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan.

[115] Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 78-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itulah, berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan politik perempuan melalui berbagai ikhtiar. *Pertama*, dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi atau *institutional building.* Dengan cara ini diharapkan mampu menunjukkan dan mengembangkan potensi pada diri perempuan sehingga peran dan posisi perempuan tidak lagi sebagai 'pemanis' tapi turut andil dalam memberikan bobot demokrasi dan agregasi politik perempuan. *Kedua*, menciptakan gerakan perempuan yang terfokus pada penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan atau *capacity building*.[116]

Proses penguatan itu dapat direalisasikan dan diwujudkan di lingkungan organisasi dan partai politik. Perempuan diarahkan untuk memimpin organisasi atau partai politik dengan baik, mampu berkomunikasi, sebagai pendengar yang baik, serta mempunyai kematangan berpikir dan kekuatan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.

Apabila kedua ikhtiar di atas dapat dilakukan secara maksimal, maka perempuan-perempuan tersebut dapat menjalankan perannya secara nyata sebagai politikus perempuan sekaligus turut berperan dalam mem*planning* dan membuat agenda perubahan secara bersama-sama bagi perempuan. Di sisi lain, adanya gerakan perempuan dapat merefleksikan akan kesadaran dan tanggungjawab politik perempuan untuk

[116] Ibid., 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjuangkan keadilan dan keserasian gender tanpa ada diskriminasi.[117]

B. Perilaku Politik Perempuan

1. Peran dan Perilaku Politik

Peran politik perempuan sering dimaknai sebagai keterlibatan perempuan dalam wilayah publik. Keterlibatan perempuan sebagai pemimpin baik pemimpin lembaga pemerintahan atau lembaga sosial kemasyarakatan. Pembagian kerja antara wilayah domestik dan publik merupakan Pemilihan masing-masing individu perempuan yang layak dihargai. Bahkan dalam *nash* disebutkan terdapat kisah yang menunjukkan adanya perempuan dalam kancah perpolitikan. Bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dalam memimpin.[118]

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Dalam prosesnya, interaksi antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk proses pembuatan,

---

[117] Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad dan ternyata sangat efektif untuk membatasi perempuan dalam wilayah ini. Sehingga akibat yang paling jelas adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik. Ani Widyani Soejipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), 25.

[118] Di dalam Al-qur'an tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang perempuan aktif dalam kegiatan politik termasuk menjadi pemimpin, salah satunya adalah Ratu Balqis yang memimpin negeri Saba'. (QS. Al-Naml, 23). Lihat M. Abdul karim, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam proses menentukan kebijakan.[119]

Meskipun Ramlan Surbakti tidak menjelaskan secara spesifik mengenai suatu tindakan politik. Namun, menurut Michael Walzer bahwa tindakan politik merupakan salah satu bentuk perilaku politik yang dilakukan oleh aktor politik dengan resiko yang besar, yaitu berkaitan dengan resiko moral dan politis.[120]

Menurut Harold D. Lasswell, dikutip oleh Muslih Mufti, perilaku politik memiliki dua persepsi. *Pertama*, bahwa perilaku politik selalu berorientasi pada sebuah *value*. *Value* tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. *Kedua*, perilaku politik berorientasi pada masa depan *(in order to motive)*, berkaitan dengan masa lalu *(because motive)*, sebab membahas masalah politik, sama halnya memberikan harapan baru agar kepada masyarakat untuk berbuat lebih baik.[121]

Kedua perilaku politik di atas dapat diringkas bahwa perilaku politik mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek orientasi, aspek nilai, dan aspek waktu. Aspek orientasi menggambarkan cita-cita setiap individu atau kelompok yang akan dicapai. Aspek nilai atau *value* lebih menekankan pada sebuah perilaku, sesuatu yang dijalankan dan diperebutkan. Aspek waktu menunjukkan adanya korelasi perilaku politik

---

[119] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 131.
[120] Michael Walzer, Political Action: The Problem of Dirty, *Philosophy & Public Affairs, Vol. 2, No. 2* (Winter, 1973), pp. 160-180 Published by: Wiley-Blackwell Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2265139 . Accessed: 24/08/2012 11:57
[121] Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara aktor politik, latar belakang aktor politik dulu, sekarang dan yang akan datang.[122]

Selama ini, ada beberapa anggapan atau kesan bahwa dalam dunia politik yang memiliki peran adalah hanya laki-laki saja. Perempuan juga memiliki kesempatan dan hak yang sama pula. Inilah yang harus menjadi kesadaran bersama tentang peran perempuan dan laki-laki dalam berbagai dimensi kehidupan. Adapun *image* yang mengatakan bahwa politik itu sadis, kotor, kejam, dan penuh intrik dan semacamnya tidaklah begitu tepat, sehingga jumlah perempuan yang terjun dalam kancah politik terbilang begitu sedikit.[123]

Secara historis pada awal perkembangan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ricklander bahwa laki-laki selalu diidentikkan dengan 'lembaga' atau orang yang bekerja di ranah publik, sedang perempuan hanya bekerja dan beraktifitas di wilayah domestik saja, misalnya: mengurus anak dan menyiapkan makanan dan lainnya.

> *Historically the external world has been the business of men. Women took care of the internal world. Politics traditionally is external, but not necessarily the bussiness of all men-often only of the few.*[124]

---

[122] Amirotun Sholikhah, 'Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)', *Komunika*, Vol. 8, No. 1, Januari - Juni 2014, ISSN: 1978 1261.

[123] Muhammad Asfar, 'Wanita dan Politik: Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami', dalam *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Liza Hadiz (ed), (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), 398.

[124] Louise Ricklander, 'Women and Politics' dalam Jenny Firth-cozens and Micheal A. West (eds), *Women at Work: Psychological and Orgnizational Perspective*, (Philadelphia: Open University Press, 1993), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun peran perempuan dalam bidang politik sangat terbatas pada saat itu, namun dengan berkembangnya situasi dan kondisi di era modernisasi, globalisasi, dan serba digitalisasi saat ini, sikap dan peran perempuan di dunia politik telah banyak mengalami pergeseran yang begitu signifikan.[125]

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan pandangan mereka terhadap berbagai dimensi kehidupan termasuk dalam bidang politik. Dengan kesempatan yang sama mereka berhak juga mencalonkan diri sebagai pejabat publik, misalnya sebagai anggota legislatif sampai pada eksekutif. [126]

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Almond dan Verba bahwa peran dan perilaku politik perempuan telah menunjukkan fenomena yang menarik sebagai agen sosialisasi politik.[127] Perempuan tidak hanya memerankan politik dalam wilayah domestik semata, tetapi juga turut aktif berperan di segala bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan politik. Lebih lanjut mereka berpandangan

[125] Makin maraknya perempuan di sektor publik khususnya di bidang politik menyebabkan banyaknya kajian dan studi tentang perempuan. Peran perempuan tidak hanya dipahami sebagai fenomena perubahan sosial dan kultural dari suatu masyarakat tertentu, bahkan di Amerika Serikat gerakan perempuan telah mencapai suatu tahapan keilmuan. Temuan-temuan studi tentang feminisme semakin konprehensif ketika para antropolog melakukan penelitian lapangan tentang berbagai aspek gender. Diane Bell, et all (eds), *General Field: Women, Man and Ethnography*, (London and New York, 1993).

[126] Lihat M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), 22.

[127] Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture*, (Princeton: Princeton University Press, 1963).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perempuan telah ikut berpartisipasi secara aktif memperjuangkan kepentingan umum melalui lembaga sosial atau lembaga politik.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan seputar peran perempuan dalam politik. Salah satu pertanyaan yang cukup menggelitik adalah apakah keterlibatan perempuan dalam politik hanya sekedar sebagai 'aksesoris politik' belaka ataukah kehadiran mereka memang memiliki kompetensi dan motivasi yang memadai untuk turut serta dalam dunia politik?[128]

Pertanyaan itulah yang harus direspon bahwa anggapan perempuan yang terjun dalam bidang politik hanya sebagai 'hiasan belaka' tidaklah sepenuhnya benar. Menurut Hartman maraknya peran perempuan di sektor publik tidak lepas dari faktor keberhasilan industri.[129] Di satu sisi, posisi perempuan yang subordinasi itu diakibatkan oleh faktor biologis. Aribowo dalam sebuah laporan penelitian tentang *Potret Politisi Wanita* menyebutkan bahwa subordinasi perempuan disebabkan karena fungsi reproduksi yang dianggap sebagai kelemahan.[130]

Dengan anggapan seperti itu, perempuan selalu identik dengan pekerjaan bersifat monoton yang tidak terlalu menggunakan kekuatan akal dan pikiran. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian di Amerika

[128] Muhammad Asfar, 'Wanita dan Politik: Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami', 400.

[129] Ia menegaskan bahwa proses perampasan kontrol alat-alat produksi diawal perkembangan kapitalisme lebih buruk tingkat efektifitasnya terhadap perempuan daripada laki-laki. Meskipun demikian ia tidak menyangkal bahwa kemunculan cara produksi kapitalis secara sistematis mengubah pola hubungan seksual yang ada sebelumnya, sehingga proses kapitalis telhmembentuk hubugan baru dominasi antara perempuan dan laki-laki. Anthony Gidden dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Politik,* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 472-473.

[130] Aribowo, *Potret Politisi Wanita,* Laporan Penelitian, (Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1994), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat bahwa ketika terjadi revolusi elektronika pada tahun 1950-an, peran dan posisi perempuan dalam pekerjaan hanya sebagai berbasis keterampilan bukan pikiran.[131]

Tentu, dalam politik sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa politik merupakan kepentingan golongan (*anomic interst group*), kepentingan kelompoklah yang paling dominan.[132] Tidak ada yang abadi dalam dunia politik kecuali kepentingan itu sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki peran politik yang besar dalam proses domokrasi baik dalam berbangsa maupun bernegara.

Sementara itu, Imam Suprayogo mencontohkan peran kyai dalam politik. Ia mengatakan tidak ada alasan bagi seorang kyai untuk menjaga jarak dalam politik. Justru berpolitik itu merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri.[133] Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa alasan terkait keterlibatan kyai dalam politik. Beberapa bentuk relasi antara kyai dan politik dapat ditunjukkan dengan beberapa hal, di antaranya:

Pertama, dalam ajaran Islam, seseorang (dalam hal ini kyai) tidak hanya diwajibkan pada hal-hal yang bernilai ritual, spiritual saja melainkan juga nilai-nilai yang berhubungan dengan seluruh kehidupan manusia. seperti ilmu pengetahuan, sosial, budaya bahkan politik.

---

[131] Ibid., 19.
[132] Abdul Afif Anwar, 'Peran Organisasi Nahdlatul Ulama Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang*, Vol. 02. No. 1, Nopember 2014.
[133] Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN-Malag Press, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Nabi Muhammad Saw, satu sisi beliau diutus untuk membawa risalah (ajaran Islam), di sisi lain beliau sebagai kepala negara.

Kedua, jika dilihat dari sisi sejarah, keterlibatan kyai dalam politik terlihat nyata pada pra kemerdekaan Indonesia. Lembaga pesantren salah satu tempat, media untuk melakukan strategi melawan penjajah. Oleh sebab itu Islam harus dipahami *two power,* Islam sebagai kekuatan agama dan kekuatan politik.[134]

Ketiga, kedudukan kyai sebagai elite agama memiliki kekuatan yang besar untuk merekrut jama'ah di lingkungan masyarakat. Kyai dianggap orang yang memiliki kelebihan untuk membantu memecahkan *problem* para jama'ahnya. Kyai juga memiliki figur karismatik dalam dirinya sehingga disegani oleh komunitas masyarakat.

Meminjam bahasa Geertz, posisi kyai ini disebut sebagai *culture broker*[135], yaitu sebagai katalisator transfOrmasi nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Seorang kyai berperan menjadi penghubung antara entitas satu dengan lainnya. Antara budaya satu dengan lainnya.

Salah satu peran politik perempuan itu diwujudkan melalui organisasi masyarakat yaitu Muslimat NU. Dalam hal politik, perempuan NU ini meyuarakan aspirasi masyarakat melalui konstentasi politik. Faisal Baasir mengatakan pada prinsipnya kekuasaan politik dalam Islam adalah tidak hanya semata mengejar kekuasaan, lebih dari itu yaitu

[134] BJ Bollan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 16.
[135] Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960). Sebagaimana dikutip oleh Agus Iswanto, "Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformulasi Tradisi Di Tengah Perubahan," *Jurnal Lektur Keagamaan,* Vol. 11, No. 2, (2013): 455–572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan asas kesetaraan dan kebebasan.[136]

Begitu juga dengan perilaku dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan jalan panjang yang harus mereka tempuh untuk menerobos dominasi laki-laki terhadap perempuan. Tentunya keterlibatan tersebut disertai dengan etika politik yang sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, perilaku politik mencakup kemandirian, kebebasan bependapat dan tindakan agresif merupakan karakteristik yang tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan.[137]

Inilah yang menjadi kesempatan dan peluang bagi organisasi masyarakat perempuan NU, dalam hal ini adalah Muslimat NU. Tentunya antara laki-laki dan perempuan harus memiliki kemampuan, kapabilitas, integritas, komitmen yang besar untuk berperan serta dalam kontestasi politik sehingga mampu menciptakan dan mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik.[138] Organisasi masyarakat khususnya

---

[136] Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 127-128.

[137] Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis,* 277. Sebagaimana juga diungkapkan oleh KH. Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa dalam perjalanan sejarah politik kaum Muslimin partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktifitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 167.

[138] Hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa sikap atau perilaku, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan masyarakat dengan kekuasaan. Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi perempuan di luar organisasi NU pun juga memiliki peluang dan kesempatan yang sama.[139]

2. Karakteristik dan Orientasi Perilaku Politik

a. Karakteristik Perilaku Politik

Perilaku atau biasa disebut *behavior* dalam *term* psikologi dimaknai sebagai sebuah reaksi yang dapat bersifat *simple*, sederhana maupun kompleks.[140] Setiap manusia memiliki bentuk perilaku instinktif yang berbeda satu dengan lainnya. Perilaku tersebut didasari oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan setiap manusia.

Kalangan behavioris menyebutkan bahwa pemahaman mengenai kehidupan politik didasarkan pada tingkah laku dari para aktor politik. Sebab, setiap individu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda (secara psikologis) dan mempunyai nilai budaya yang berbeda pula. Pendekatan behavioristik ini juga tidak hanya menekankan pada aspek psikologi semata, namun juga segi orientasi dalam segala aktifitas politik tersebut.[141]

Salah satu karakteristik setiap manusia adalah sifat deferensialnya. Sifat deferensial ini merupakan sifat yang dimiliki seseorang untuk merespon kejadian atau peristiwa dengan cara yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki cara masing-masing dalam merespon setiap kejadian. Pendek kata, seseorang yang diberikan

---

[139] Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 161.
[140] Saifuddin Anwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya,* (Yogyakarta: Liberti, 1988), 6-9.
[141] Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik,* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stimulus oleh orang lain akan menimbulkan respon atau reaksi yang berbeda, meskipun stimulus tersebut sama.

Dalam kajian psikologi, terdapat beberapa karakteristik sikap atau perilaku secara umum diantaranya: *pertama,* **Arah**. Suatu sikap atau perilaku pasti memiliki arah dan tujuan. Apakah sikap yang diambil tersebut menyetujui atau menolaknya, mendukung atau menentang, memihak atau memecah terhadap suatu objek tertentu.

Apabila seseorang memilih sikap mendukung atau menyetujui objek tertentu, maka orang tersebut memiliki arah sifat yang positif terhadap objek yang dimaksud. Begitupun sebaliknya. Apabila seseorang lebih cenderung memiliki sikap menolak, maka orang tersebut dapat dikatakan pihak yang memiliki sifat negatif atau berseberangan dengan objek yang dimaksud.

Seperti halnya Muslimat NU misalnya, apabila elit pengurus Muslimat NU di tingkat bawah tunduk, mendukung atas kebijakan elit pengurus yang berada di atas, maka sikap atau perilaku mereka secara otomatis menunjukkan sikap yang positif (loyalitas). Sebaliknya, jika para elit Muslimat NU yang berada di level bawah tidak patuh, tidak taat, dan tidak mendukung para elit Muslimat NU di level atas, maka mereka menunjukkan sikap negatif terhadap objek yang dimaksudkan.

Kedua, **Intensitas.** Intensitas dapat dimaknai sebagai kekuatan sikap yang ada pada diri pribadi seseorang. Setiap orang pasti memiliki kekuatan sikap yang berbeda-beda. Apabila diilustrasikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya terdapat dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan sikap, tentu salah satu diantara mereka mempunyai kecenderungan sikap yang lebih menonjol. Adapun yang membedakan adalah tingkat intensitasnya.

Untuk memudahkan intensitas sikap tersebut, peneliti mencoba memberikan contoh mengenai intensitas sikap antara Pimpinan Cabang Muslimat NU Trenggalek dengan Pimpinan Cabang Muslimat NU Tulungagung. Meskipun sama-sama berangkat dari Pimpinan Cabang, tentu keduanya memiliki kecenderungan untuk merespon instruksi Pimpinan Wilayah dengan cara yang berbeda. Tingkat intensitas sikap yang mereka tunjukkan tidaklah sama.

Ketiga, **Keluasan.** Keluasan sikap adalah suatu sikap yang menunjuk kepada luas tidaknya cakupan aspek objek sikap yang disetujui, atau tidak, didukung atau tidak oleh seseorang. Seseorang dapat menunjukkan keluasan sikapnya tersebut dengan sikap *favorable,* sesuatu yang disukainya, dikaguminya.

Contohnya, sikap PC Muslimat NU Trenggalek dalam hal menentukan sikap terhadap intruksi dari PW Muslimat NU Jawa Timur terkait Pemilihan Gubernur. Apabila PC Trenggalek memiliki keluasan sikap (mendukung atau tidak mendukung) akan terlihat secara nyata dari pernyataan sikap tesebut.

Keempat, **Konsistensi**. Konsistensi merupakan kesesuaian respon sikap dalam diri seseorang. Sikap ini ditunjukkan oleh tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kebimbangan dan keraguran pada diri individu. Orang yang konsisten selalu memegang komitmen antara ucapan dan tindakan. Apabila antara ucapan dan tindakan tidak sama, maka yang terjadi adalah sikap inkonsistensi.[142]

Kelima, **Spontanitas.** Sikap yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk menyatakan sifat secara reflek, spontan, tanpa berpikir terlebih dahulu. Sikap ini memiliki ciri yaitu apabila orang tersebut menyatakan sesuatu tanpa harus mengungkapkan hal apapun. Maksudnya, apabila orang tersebut mendukung akan mengatakan iya, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu sikap spontan ini umumnya sulit untuk dijadikan tolak ukur dalam sebuah perilaku.

Idealnya memang karakteristik perilaku manusia sesuai dengan apa yang disebutkan di atas. Namun, tentu hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan secara sempurna. Setidaknya gambaran tentang karakteristik perilaku manusia dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis mengenai perilaku politik seseorang, meskipun tidak secara khusus.

b. Orientasi Perilaku Politik

Orientasi atau kecenderungan politik merupakan cara pandang seseorang (secara personal) dari suatu masyarakat yang terdapat dalam sebuah struktur masyarakat mengenai fenomena politik.

[142] Dalam berorganisasi, perempuan perlu menjaga dan memelihara ketertiban organisasi, disiplin organisasi, kejujuran, keterbukaan dalam berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam organisasi, aktifitas perempuan tersebut dapat dipadukan dengan berbagai unsur yaitu ilmu, amal, wawasan pemikiran dan pengalaman. St. Rogayah Buchorie, *Wanita Islam: Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya*, (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun faktor yang melatarbelakangi orientasi politik seeorang adalah berbagai nilai baik yang ada di dalam masyarakat maupun di luar masyarakat sehingga membentuk sikap seseorang dalam memaknai objek politik.

Namun, sarana diskursus politik melalui organisasi, partai politik atau lemabaga swadaya masyarakat (LSM) belum menampakkan adanya suasana *sharing* yang kritis dan terbuka. Oleh sebab itu kecenderungan individu atau masyarakat dalam politik justru hanya menjadi 'sumbu pendek' sehingga partisipasi politik mudah untuk dimobilisasi.[143]

Kecenderungan politik tersebut mempengaruhi perilaku politik seseorang secara individu. Oleh karenanya, orientasi politik individu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama. **Orientasi kognitif**. Orientasi ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sistem politik. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan atas hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Warga masyarakat secara individu harus mengetahui dan memahami bagaimana posisi hak dan kewajiban warga negara di dalam lingkaran konstitusi.

Secara individu, warga masyarakat juga harus mengetahui bagaimana tata cara dan proses pemilihan umum, mengetahui bagaimana kandidat figur pemimpin, mengatahui partai apa sajakah

[143] Imam Baehaqi (ed), *Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog,* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengikuti pemilu, serta memahami berbagai simbol-simbol yang dipakai oleh sistem politik, misalnya: lambang negara, mata uang yang berlaku, dan sejenisnya.

Kedua, **Orientasi Afektif.** Orientasi afektif ini lebih mengarah pada perasaan personal terhadap sistem politik. Wujud perasaan menunjuk kepada adanya hubungan kedekatan emosional dengan sistem politik sehingga aspek ini cenderung lebih efektif daripada orientasi pengetahuan. Jika orientasi kognitif mengarah pada sisi pengetahuan individu, maka orientasi afektif lebih pada aspek emosional seseorang.

Misalnya, banyak kebijakan-kebijakan populis (yang langsung dipahami dan dikenal secara langsung oleh masyarakat) yang dikeluarkan untuk 'menyentuh' perasaan masyarakat. Contohnya, biaya pendidikan gratis, adanya bantuan tunai oleh masyarakat miskin, dan sejenisnya. Hal ini merupakan salah satu 'trik' aktor politik (dalam hal ini pembuat dan pemegang kebijakan) agar masyarakat merasa diperhatikan, diuntungkan dengan *policy* yang dikeluarkan.

Oleh karenya, sikap dan perilaku yang telah lama bersemi dalam diri seseorang, baik di keluarga, lingkungan masyarakat, dan bahkan lingkungan yang lebih luas dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap proses pembentukan afektif seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, **orientasi evaluatif**. Orientasi evaluatif ini berkaitan dengan standar nilai seseorang terhadap sistem politik. Standar nilai yang digunakan juga berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan politik (pertimbangan orientasi kognitif dan orientasi afektif) berupa berbagai informasi serta nilai yang dianut.

3. Pembentukan dan Pendekatan Perilaku Pemilih

a. Pembentukan dalam Perilaku Pemilih

Politik adalah sebuah instrumen yang dipakai oleh para aktor politik untuk mewujudkan nilai-nilai agung serta kepentingan bersama. Politik itu mulia selama digunakan untuk tujuan-tujuan yang mulia pula.[144] Artinya kebijakan-kebijakan politik akan mampu melahirkan implikasi dan manfaat yang sangat besar jika kebijakan tersebut diimbangi dengan kesalehan politik para aktor politik. Kesalehan politik itulah diawali dari kesalehan pribadi (karakter-spiritual-transedental), kesalehan sosial, kesalehan lingkungan, dan kesalehan kemanusiaan.[145]

Secara umum, bentuk perilaku politik dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama,* perilaku politik lembaga-lembaga atau pejabat pemerintah. *Kedua,* perilaku politik warga negara (sebagai warga negara secara individu maupun secara kelompok).[146] Dalam

[144] Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa Penting kiranya memberikan gambaran bahwa politik yang tepat juga menyejukkan, tidak menakutkan kepada kaum perempuan. Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis,* 277.
[145] Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi*, (Malang: Instrans Publishing, 2014), 188.
[146] P. Anthonius Sitepu, *Teori-teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan keputusan di tubuh pemerintahan, kedua unsur di atas (antara lembaga dan masyarakat) bersama-sama memiliki andil yang besar, sebab hal ini mencerminkan bentuk negara yang demokratis.

Salah satu proses pembentukan perilaku politik seseorang ditandai dengan adanya interaksi sosial yang dialami oleh setiap individu. Interaksi sosial ini tidak sekedar adanya kontak sosial (hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial) semata, melainkan bagaimana proses interaksi tersebut mampu mempengaruhi individu satu dengan lainnya.

Dalam hubungannya individu dengan individu yang lain, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses interaksi sosial, yaitu:[147] (1) Aspek kontak sosial. Aspek kontak sosial ini merupakan sebuah hubungan yang terjadi antara individu dengan individu yang lainnya. Adapun kontak sosial daat terjadi melalui kontak secara fisik maupun simbolik. (2). Aspek komunikasi. Dalam aspek komunikasi ini terjadi proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.[148]

Dalam aspek kontak sosial dan aspek komunikasi, keduanya memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan mendapatkan respon positif dan respon negatif. Respon positif apabila kedua aspek

[147] Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 2002).

[148] Kedua aspek tersebut dapat menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Bahasa verbal dapat melalui komunikasi secara langsung, baik dengan tulisan atau lainnya. Sedangakan bahasa non-verbal merupakan bahasa yang digunakan seseorang dalam berkomunikasi yang lebih menitikberatkan pada simbol-simbol, misalnya bahasa isyarat, sandi, ekspresi wajah, intonasi suara, dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah pada ber*gaining* atau kerjasama, saling memberikan informasi dan masukan. Namun sebaliknya, kedua aspek tersebut kemungkinan juga mendapatkan respon negatif. Respon negatif dapat ditandai dengan adanya pertentangan dan konflik.

Oleh karena, secara substansi interaksi dibangun untuk mewujudkan dan menciptakan *understanding* atau kesepahaman di antara individu satu dengan lainnya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang lain sehingga menghasilkan pola pikir dan tingkah laku yang positif dalam berperilaku politik.

Interaksi sosial tersebut meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan fisik, individu dengan lingkungan psikis yang ada di sekelilingnya. Dalam proses itulah, individu bereaksi membentuk pola sikap dan perilaku tertentu terhadap objek yang dihadapinya.

Berikut faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang di antaranya:

Pertama, pengalaman pribadi. Sebenarnya apa yang telah kita alami bisa mempengaruhi sikap dan perilaku di masa yang akan datang. Pengalaman pribadi seseorang itulah yang akan membentuk dua sikap, sikap positif dan sikap negatif. Untuk melahirkan dasar pembentukan sikap, maka pengalaman pribadi harus melalui kesan yang kuat.

Kedua, pengaruh kebudayaan. Disadari atau tidak, budaya telah menanamkan sikap seseorang dalam menghadapi berbagai problem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Kebudayaan telah banyak mewarai sikap sebagian besar anggota masyarakat. Pengaruh budaya tersebut dapat bernuansa positif atau bahkan negatif. Hanya kepribadian individu yang kuat yang mampu memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.

Ketiga, media massa. Media massa sebagai alat komunikasi memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Keberadaan media massa mampu menjadikan dunia yang luas menjadi begitu sempit. Pertukaran informasi, pikiran, gagasan, ide menjadi lebih mudah diperoleh. Bahkan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh canggihnya media massa. Penyampaian pesan, informasi serta sugesti melalui media massa saat ini banyak dipakai oleh setiap kalangan, terlebih oleh para politikus.

Keempat, institusi. Institusi atau lembaga sebagai sistem memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap atau perilaku seseorang, sebab didalamnya memuat nilai-nilai moral, sehingga lembaga ini turut berperan salam menentukan sikap tiap individu.

Kelima, emosi. Emosi merupakan bentuk gejolak jiwa seseorang yang timbul dari diri sendiri akibat adanya rangsangan dari luar dirinya. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan. Emosi juga dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang. Perilaku tersebut dapat berupa emosi positif atau emosi negatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kelima yang dikemukakan di atas, menurut Adman Nursal dalam bukunya yang berjudul *Politik Marketing Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden.*[149] Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan Pemilihannya, di antaranya adalah:

1.) Citra Sosial. Citra sosial atau disebut sebagai *social imagery* merupakan sebuah nilai kepercayaan yang secara konkrit diberikan kepada personal dan merupakan sebuah opini yang dapat berjalan cepat ataupun lambat. Citra sosial ini juga dapat diartikan sebagai citra kontestan, figur, kandidat politik untuk mengetahui dari mana mereka datang (mengetahui visi misi, partai yang mengusung dan mendukung, dan lainnya).

2.) Identifikasi partai. Seorang pemilih dapat menentukan Pemilihan politiknya melalui kecenderungan partai. Dalam prosesnya, identifikasi partai memerlukan proses yang lama dan panjang. Sebab masyarakat perlu mengetahui visi misi partai yang akan dipilihnya. Apabila sosialisasi partai sudah dilakukan, maka masyarakat luas akan megetahui secara detail sehingga membentuk ikatan yang erat dengan partai politik.

[149] Adman Nursal, *Politik Marketing Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) Perasaan emosional. Perasaan emosional atau *emotional feeling* merupakan perasaan yang ditunjukkan oleh seorang kandidat atau kontestan politik untuk menyampaikan beberapa pesan visi misi politiknya sehingga pesan tersebut dapat ditangkap dengan mudah.

4.) Citra kandidat. Dalam citra kandidat ini atau *candidate personality* adalah sesuatu yang menunjukkan nilai, sifat, karakter individu seorang kontestan politik. Seorang kandidat harus memiliki nilai-nilai positif sebagai upaya agar pemilih yakin terhadap Pemilihan politiknya. Sifat-sifat tersebut misalnya, memiliki rasa empati, jujur, berkarakter, artikulatif, komunikatif dengan masyarakat.

5.) Isue dan kebijakan politik. seorang kandidat harus menyampaikan visi misi, gagasan, program serta kebijakan yang akan diambil ketika terpilih nantinya. Ia harus mempresentasikan program tersebut kepada khalayak luas sehingga program dan kebijakan tersebut dapat diakses serta dipahami oleh masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak buta dalam memilih calonnya.

6.) Peristiwa mutakhir. Dalam hal politik, peristiwa mutakhir adalah peristiwa yang terjadi pada saat melakukan sosialisasi politik. Berbagai kebijakan yang berkembang sejalan dengan peristiwa menjelang dan selama proses kampanye.

7.) Peristiwa individu. Peristiwa individu atau *individuality events* merupakan perisiwa yang dialami oleh seorang kandidat (secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi). Peristiwa tersebut dapat berupa pengalaman politik atau pengalaman kehidupan.

b. Pendekatan dalam Perilaku Pemilih

Pendekatan merupakan sebuah proses cara, sikap atau pandangan terhadap sesuatu. Biasanya wujud dari pendekatan adalah asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dapat dipahami bahwa pendekatan dalam perilaku pemilih adalah bagaimana mengetahui dan memahami seseorang dalam menentukan Pemilihan terhadap calon pemimpin.

Secara umum, pendekatan yang digunakan dalam perilaku pemilih ada tiga macam, yaitu pendekatan secara sosiologis, pendekatan secara psikologis, dan pendekatan secara Pemilihan rasional.[150] Ketiganya memiliki karakter masing-masing yang menjadi titik tolak dari perilaku seseorang dalam menentukan Pemilihan politiknya.

Pertama, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap nilai-nilai sosiologis yang melekat pada diri seseorang (secara personal) yang mempengaruhi perilaku seorang individu dalam politik. Faktor sosiologis menjadi faktor utama dalam pendekatan ini. Adapun pendekatan sosiologis dapat berupa

[150] Ketiga pendekatan tersebut di kenal sebagai pendekatan *The Columbia Study* atau pendekatan sosiologis, pendekatan *The Michigan Model* atau pendekatan psikologis, dan pendekatan *rational choice* atau pendekatan pemilihan rasional. Lihat Bartels, L. M, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*, (Oxford: Oxford University Press, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelas sosial, agama, kedaerahan, etnis atau suku, tradisi keluarga dan lainnya.[151]

Dalam menggunakan pendekatan ini, perilaku pemilih sebenarnya tidak sepenuhnya bersumber dari pengalaman secara personal, individu. Namun berasal dari pengalaman kelompok. Oleh karenanya, perilaku pemilih dalam aktifitas politik seseorang lebih cenderung untuk mengikuti arus politik dari mana lingkungan sosial mereka berasal.[152]

Seorang pemilih akan memiliki ikatan emosional yang besar terhadap situasi dan kondisi lingkaran sosial yang ada. Sebab, pengelompokkan baik secara usia, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan atau sejenisnya dapat memberikan *influence* yang luar biasa dalam menentukan sikap dan perilaku politik seseorang.[153]

Dari lingkaran sosial itulah (tempat kerja, tempat organisasi, keluarga, dan sejenisnya) seseorang memiliki kedekatan dalam perilaku politiknya sebagai pemilih. Maka asumsinya dapat dikatakan, jika seorang individu berinteraksi dengan lingkungan sosial, maka ia

[151] Bartels, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*, 240.
[152] Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode,* (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), 24-25.
[153] Chip Chexk Purba, Hubungan Faktor Sosiologis dan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan Tahun 2015 di Kecamatan Bandar Petalangan (Studi Kasus Desa Lubuk Keranji Timur dan Desa Kuala Semundam), *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dipengaruhi oleh kontrol dan tekanan sosial yang sedang terjadi.[154]

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adman Nursal dalam *Political Marketing*, ia menyebutkan bahwa pengelompokan dan pengklasifikasian dalam bentuk *social group* memiliki pengaruh dan peran yang besar terhadap pembentukan persepsi, sikap, dan orientasi individu.[155] Seseorang yang belum memiliki komitmen yang kuat akan mengikuti arah kelompok tertentu yang ada di dalam masyarakat.

Namun, perlu dipahami dalam pendekatan sosiologi ini, bahwa perilaku pemilih cenderung dikategorikan sebagai pemilih yang konstan. Artinya, perilaku pemilih tidak bisa berubah dalam waktu yang cepat. Perilaku pemilih hanya bisa berubah dalam durasi waktu yang lambat. Di sisi lain, perilaku pemilih yang menggunakan pendekatan ini sulit untuk mengetahui sebab berubahnya perilaku politik personal.[156]

Jadi, standar penilaian yang dipakai dalam pendekatan sosiologis adalah menggunakan basis utama kondisi sosial, bukan personal yang dijadikan sebagai *center of analysis*. Lingkungan sosial

[154] Dieter Roth., *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: Friderich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, 2008), 24.
[155] Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor agama, kelas sosial, geografis, bahkan status ekonomi (bagi negara maju) memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi dan menentukan perilaku pemilih dalam politik. lihat Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 55-56.
[156] Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi unsur utama dalam menentukan sikap dan perilaku pemilih dengan berbagai instrumen yang telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, pendekatan psikologis.[157] Dalam pendekatan ini, unsur utamaya adalah adanya ketergantungan atau keterikatan motivasi psikologis seorang individu sehingga memiliki orientasi politik kepada figur tertentu. Hubungan psikologis antara pemilih dan yang dipilih tersebut dapat ditunjukkan dari kedekatan dengan organisasi, partai atau bahkan dari figur kandidat tertentu.[158]

Ikatan emosional (psikologis) terjadi karena antara subjek dan objek dalam politik telah menjalin hubungan secara intens, mendalam dan berlangsung waktu yang cukup lama. Keduanya sama-sama menjaga hubungan komunikasi dengan baik. Inilah yang menjadikan seseorang memiliki orientasi politik dengan mempertimbangkan sisi kedekatan psikologis.

Kaitan dengan kedekatan calon atau kandidat dalam sebuah perhelatan politik. Maka, seorang kandidat harus memiliki kualitas personal yang mumpuni. Terdapat dua unsur terkait hal tersebut yaitu kualitas instrumental dan kualitas simbolik. (1) Kualitas instrumental yakni para kontestan politik memiliki kemampuan untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka dapat merealisasikan janji politiknya. (2) kualitas simbolik adalah kualitas yang berkenaan dengan kualitas

[157] Pendekatan ini disebut sebagai the michigan Model. Berkembang pada awal tahun 1950-an. Penjelasan lebih rinci dan jelas dapat dilihat di *'The American Voter'* tahun 1960 yang ditulis oleh beberapa ilmuan di antaranya Campbell, Converse, Miller dan Stokes.
[158] Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

personal kontestan. Hal ini berhubungan dengan integritas diri, moral dan ketaatan.[159]

Dalam pendekatan ini juga diungkapkan beberapa unsur atau faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam menentukan Pemilihan dalam politik.[160] Menurut Dalton,[161] dampak terbesar yang ditimbulkan dari karakteristik pemilih adalah dipengaruhi oleh disposisi sikap.[162] Menentukan sikap pada saatnya akan tergantung bagaimana loyalitas *group* serta orientasi nilai kepada personal.

Kombinasi terhadap pendekatan psikologi dan politik dapat memberikan pola analisis yang komprehensif, universal terhadap fenomena serta dinamika politik yang sedang dan akan terjadi. Sebab memperbincangkan politik sendiri tidak akan pernah lepas dari aktor politik (baik sebagai kontestan ataupun partisipan). Semua aspek tersebut berkaitan erat dengan personal (manusia) sebagai eksekutor politik.

Sebagai bentuk riil manusia sebagai aktor politik adalah sesuatu yang diakui bahwa seseorang termovitasi, tergerak untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan sifat karakteristik personal, nilai-nilai keyakinan, kedekatan dengan kelompok dan sebagainya. Pada

---

[159] Andriyus, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Singingi Hilir pada Pemilihan Umum Legislatif 2009', *Journal of Government, Social and Politics*, vol. 2, nomor 2, September 2013, 27.
[160] Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, 38.
[161] Russell J. Dalton, *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. (New York: Chatham House Publishers, 2002), 174.
[162] Disposisi sikap adalah sebuah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku politik untuk melaksanakan dan mewujudkan visi misi dengan sungguh-sungguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsipnya tujuan dari psikologi dalam kajian politik adalah menyusun aturan umum terkait perilaku yang bisa menjelaskan dan memprediksi peristiwa fenomena politik.

Manusia sebagai eksekutor politik yang sekaligus sebagai makhluk politik juga mempunyai *value and identity* dalam dirinya. *Value* mengandung makna tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sedang *identity* memiliki makna siapakah aktor politik yang memiliki figur dan komponen kognitif serta emosi yang kuat.

Ketiga, pendekatan rasional. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai *rational choice*. Pendekatan pilihan rasional adalah suatu pendekatan yang berangkat dari asumsi ekonomi-politik. Mengapa demikian? Sebab pendekatan ini merupakan hasil adopsi dari teori ekonomi.[163] Pendekatan ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman tentang perilaku ekonomi-politik sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun premisnya adalah apabila sebuah asumsi pilihan rasional bisa menjelaskan situasi pasar, maka hal tersebut dapat pula menjelaskan fungsi politik. Dengan kata lain, seorang pemilih dalam menentukan Pilihan politiknya didasarkan pada keputusan yang bersifat rasional. Maksudnya, pilihan tersebut disandarkan pada kepentingan personal namun dapat dipakai sesuai dengan prinsip nilai kemaslahatan dan kemanfaatan.

[163] Bartels, L. M, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pilihan rasional ini, hal utama yang ditekankan adalah mengarah pada hasil dari suatu aktifitas politik. Orientasi hasil tersebut dapat dicapai oleh suatu organisasi atau figur kandidat tertentu dalam proses politik.[164] Pendekatan ini merupakan pendekatan perilaku pemilih sebagai kritikan dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, premis utamanya seorang pemilih dalam aktifitas politik menekankan pada situasi dan kondisi dalam perhelatan politik. Seorang pemilih menentukan pilihannya menggunakan asas kemaslahatan. Inilah yang tidak ditemukan dalam pendekatan sebelumnya.

Ada beberapa pertimbangan rasional yang dilakukan sebelum seseorang menentukan pilihannya. Seorang pemilih juga memperoleh keuntungan yang akan didapatkan. Karena mengadopsi dari teori ekonomi, maka pendekatan pilihan rasional ini sebagai produk "itung-itungan', mengkalkulasi, menghitung seberapa besar keuntungan dan seberapa kerugian yang akan diterima, terlebih bagi seorang pemilih.[165]

Ketiga pendekatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berpartisipasi dalam politik termasuk memilih calon pemimpin dalam kontestasi politik adalah kegiatan atau aktifitas politik yang otonom. Dalam menentukan pilihan, seorang pemilih tidak ada paksaan,

[164] Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, 49.
[165] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desakan, bahkan ancaman dari pihak manapun. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan perilaku politik. Namun yang menjadi benang merah adalah sikap dan perilaku politik tersebut dapat ditentukan dari berbagai faktor yang melekat pada diri seorang pemilih, baik faktor internal maupun eksternal.

C. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai *Modality*

1. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Modal Sosial

Konsep modal sosial atau *social capital* telah digunakan hampir satu abad. Lyda Judson Hanif melalui tulisan yang berjudul *The Rural School Community Centre* pada tahun 1916 awal abad 20 merupakan tulisan pertama kali dalam kajian modal sosial. Ia menjelaskan dalam tulisan tersebut bahwa unsur masyarakat (dalam hal ini tetangga) dapat bekerja bersama untuk mengawasi sekolah. Lyda menyebut:

> *'....I do not refer to real estate, or to personal property or to cold cash, but rather to that in life which tends to make these tangible sub-stances count for most in the daily lives of a people, namely, good-will, fellowship, mutual sympathy and social intercourse among a group of individuals and families who make up a social unit, the rural community, whose logical center is the school.'*[166]

Modal sosial yang dimaksudkan Lyda bukanlah sesuatu yang berbentuk uang ataupun kekayaan, namun modal sosial dalam hal ini adalah suatu aset yang paling diperhitungkan dalam kehidupan

[166] Lyda Judson Hanif, 'The Rural School Community Center,' *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 67, New Possibilities in Education (Sep., 1916), 130-138, p. 130 URL: https://www.jstor.org/stable/1013498. This content downloaded from 202.67.46.46 on Fri, 25 Jan 2019 01:09:35 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasyarakat, yaitu niat baik, rasa simpati dan hubungan sosial antara individu, keluarga yang membentuk unit sosial. Untuk memberikan makna secara definitif tunggal tidaklah mudah, namun secara sederhana modal sosial dapat diartikan sebagai penghubung, nilai-nilai dan pemahaman bersama dalam masyarakat untuk saling mempercayai satu sama lain.[167]

Tulisan yang dikenalkan oleh Lyda tersebut menggambarkan keberhasilan yang dicapai oleh kepala sekolah dengan membangun rasa kebersamaan dalam sebuah komunitas masyarakat yang dimulai dalam lingkungan sekolah. Dari kebersamaan itulah menciptakan kemajuan yang tidak hanya dicapai oleh peserta didik semata tetapi oleh warga masyarakat dalam semua bidang kehidupan.

Inilah yang disebut oleh Lyda sebagai strategi pengembangan modal sosial dalam masyarakat. Pendekatan terhadap masalah yang ditunjukkan terlihat lebih praktis.[168] Konsep modal sosial ini muncul ketika banyak orang beranggapan bahwa setiap anggota masyarakat tidak mungkin secara individu dapat memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Untuk itulah diperlukan kerjasama yang solid untuk mengatasi masalah tersebut.

---

[167] Dalam tulisan tersebut dikemukakan bagaimana runtuhnya dan masa kebangkitan komunitas Amerika. Bahwa orang Amerika menjadi lebih kaya namun 'layu' (waktu mereka hanya dihabiskan untuk bekerja baik di kantor atau di rumah,) mereka tidak memiliki waktu untuk untuk berkumpul dengan kelompok masyarakat, berorganisasi dan bersosialisasi dengan tetangga, teman dan bahkan keluarga sendiri. A Bigger Picture, *What is social capital?,* OECD Insights: Human Capital, 102.

[168] Lyda Judson Hanif, 'The Rural School Community Center,' *The Annals of the American Academy of Political and Social Science.* Rusydi Syahra, 'Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di masa-masa awal, modal sosial bukan menjadi sesuatu yang penting. Menurut Bruce A. Miller, dahulu modal sosial hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial atau lingkungan dari komunitas. Di masa lalu, mungkin fokus pada masalah ekonomi agar masyarakat tetap bertahan hidup.[169] James Coleman berbeda pendapat mengenai modal sosial, ia mengatakan:

> *'social capital is defined by its function.it is not a single entity but a variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors-wheather persons or corporate actors-within the structure....'*[170]

Coleman mendefinisikan modal sosial dari fungsinya. Ia bukan entitas tunggal tetapi berbagai entitas yang berbeda dan memiliki dua entitas yang sama (antara struktur sosial dan tindakan sosial). Christian Waldstrøm berpendapat bahwa modal sosial sangat berbeda dengan modal jenis lainnya,

> *....This leads to the fundamental question of whether social capital resides in actors or in the relations between them. It is the implicit assumption of most literature that social capital is not the property of actors, but exists in the social relations of the actor....*[171]

modal sosial menjadi pertanyaan yang mendasar apakah ia sebagai aktor ataukah terdapat hubungan diantara beberapa aktor? Inilah

---

[169] Bruce A. Miller, 'The Role of Rural Schools in Community Development: Policy Issues and Implications,' *Journal of Research in Rural Education*, Winter, 1995, Vol. 11, No.3, 163-172.

[170] James S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, (1988), pp. S95-S120, S98. Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. http://links.jstor.org/sici?sici=0002 9602%281988%2994%3CS95%3ASCITCO%3E2.0.CO%3B2-P

[171] Christian Waldstrøm, *Social Capital In Organizations–Beyond Structure and Metaphor*, Department of Organization & Management, Haslegaardsvej,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggapan sebagian kalangan bahwa modal sosial bukan merupakan milik aktor, akan tetapi terdapat dalam hubungan sosial aktor tersebut. Intinya bahwa modal sosial tidak milik setiap individu atau aktor, maliankan milik antar individu. Di tingkat organisasi atau kelompok, modal sosial bersifat kolektif interaktif.

Di sisi lain peran individu dan modal manusia dalam modal sosial sangatlah penting, sebab kelompok atau modal manusia (*human capital*) yang anggotanya saling mempercayai, dapat bekerja sama akan lebih baik daripada tidak memiliki anggota kelompok yang dapat dipercaya. Modal sosial juga menghasilkan nilai melalui 'investasi' dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan individu. Salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia adalah pendidikan.[172]

Sanjar Salajegheh juga menjelaskan bahwa menurut para peneliti hubungan antara modal manusia dan modal sosial adalah bersifat kausatif, ...*'that is, every individual's knowledge is positively related to the position he gains in social capital is improved according to his effect on other members'*,[173] bahwa pengetahuan setiap individu secara positif dengan posisi yang ia peroleh dalam modal sosial sesuai dengan pengaruhnya terhadap anggota lainnya.

[172] Sanjar Salajegheh and Nasrin Pirmoradi, 'Social Capital of the Organization', *International Journal of Engineering Research and Developmen*t, e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X, www.ijerd.com Volume 7, Issue 12 (July 2013), PP. 40-52, 44.
[173] Sanjar Salajegheh and Nasrin Pirmoradi, 'Social Capital of the Organization', *International Journal of Engineering Research and Developmen*t, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara hemat dapat dikatakan bahwa mereka yang memiliki modal sosial yang lebih tinggi akan lebih dihormati karena pengaruh yang mereka miliki. Antara modal manusia yang meliputi keterampilan, aset, pengetahuan, kemampuan, koneksi dan pengalaman anggota masyarakat dengan modal sosial yang meliputi jaringan dan hubungan, kepercayaan dan timbal balik memiliki keterikatan yang sangat kuat.

Menurut Putnam[174] terdapat tiga unsur atau elemen penting dalam konsep modal sosial di antaranya:[175]

a. Kepercayaan (*Trust*)

Ketika berbicara tentang kepercayaan dalam masyarakat modern, maka berbicara tentang kepercayaan umum. Seorang aktor individu atau kolompok individu ketika melakukan sesuatu untuk kebaikan, mereka percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan akan dihargai orang lain.[176] Menurut Coleman, kepercayaan merupakan sistem rasa saling percaya yang erat kaitannya dengan modal sosial. Coleman mangatakan ada dua eleman penting dalam modal sosial,

> *'this form of social capital depends on two elements: trustworthinness of the social environment, which means that*

[174] Robert David Putnam lahir pada 9 Januari 1941, di Rochester , New York. Ia dibesarkan di Port Clinton , Ohio. Putnam lulus dari Swarthmore College pada tahun 1963 di mana ia adalah anggota persaudaraan Phi Sigma Kappa. Sebagai siswa yang berprestasi, ia memenangkan Fulbright Fellowship untuk belajar di Balliol College, Oxford dan kemudian mendapatkan gelar master dan doktor dari Yale University pada tahun 1970.

[175] Martti Siisiäinen, Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam', Paper presented at ISTR Fourth International Conference *"The Third Sector: For What and for Whom?"* Trinity College, Dublin, Ireland July 5-8, 2000.

[176] Martti Siisiäinen, Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam',

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obligations will be repaid, and the actual extent of obligations held'.[177]

Kepercayaan terhadap lingkungan dan kewajiban yang harus diemban. Kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma yang dianut bersama. Kepercayaan berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisir bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Oleh sebab itu, kerjasama tidak mungkin terjalin jika tidak didasarkan adanya saling percaya di antara sesama pihak yang saling terlibat.

b. Nilai atau norma (*Norms)*

Nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman tersebut berarti atau tidak. Suatu tindakan dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif yang mengandung berbagai sanksi baik secara moral maupun fisik.

Menurut Putnam, ...*'norms are the unwritten rules of conduct of a certain group (or community) of people'*.[178] Norma yaitu aturan

[177] James S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, S102. Qianhong Fu, *Trust, Social Capital, And Organizational Effectiveness*, Major Paper Submitted To The Faculty Of The Virginia Polytechnic Institute And State University In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of, Master Of Public And International Affairs April 22, 2004.

[178] Putnam, R.D. (with R. Leonardi and R.Y. Nanetti), *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy,* (Princeton: Princeton University Press, 1993). Dikutip oleh Frank A.G. den Butter, and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku yang tidak tertulis dari kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Norma berfungsi sebagai penekan bagi anggota masyarakat agar segala perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Nilai dan norma adalah penentu utama dalam berperilaku dan interaksi sosial.[179] Keduanya merupakan alat untuk mengukur bagaimana seharusnya individu bertindk dalam masyarakat. Oleh karenanya, norma merupakan bagian dari konsep modal sosial yang tidak diciptakan oleh suatu institusi. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, figur yang membangun suatu tata cara perilaku seseorang atau suatu kelompok.

c. Jaringan (*Networks*)

Jaringan adalah ikatan antar simpul individu atau kelompok yang dihubungkan melalui media yang dikaitkan dengan kepercayaan. Kepercayaan dipertahankan oleh norma yang telah mengikat kedua belah pihak. *Networks* terbentuk karena kesamaan wilayah, kesamaan politik, kesamaan agama, kesamaan geneologis.

Oleh karenanya, pembentukan jaringan masyarakat untuk mendapatkan modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu institusi dengan perlakuan khusus. Masyarakat yang sehat cenderung

---

Networks', *Version*, 09 June 2005, 2-3. Author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/229023696.

[179] Frank A.G. den Butter, and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and Networks', 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki jaringan-jaringan yang kokoh. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis karakteristik dan orintasi kelompok.

Dalam konsep modal sosial memiliki dua tipologi yang menjadi kekuatan besar, yaitu modal sosial terikat (*bonding social capital*) dan modal sosial yang menjembatani (*bridging sosial capital*).[180] *Pertama*. Modal sosial terikat (*bonding social capital)* yaitu setiap anggota kelompok maupun kelompok dalam konteks ide, relasi lebih berorientasi kedalam (*inward looking*) dengan ciri masyarakat yang homogen.

Tujuan dari tipologi ini adalah untuk menjaga nilai-nilai yang bersifat turun temurun sehingga dapat dijalani dan diakui sebagai bagian dari tata perilaku moral. Umumnya tipologi *bonding social capital* ini bersifat konservatif.

Kedua. Modal sosial yang menjembatani (*bridging sosial capital*) merupakan salah satu kekuatan modal sosial yang mampu menjembatani atau menyambung relasi satu dengan lainnya, individu dengan kelompok yang memiliki perbedaan identitas. *Bridging sosial capital* membuka peluang informasi keluar sehingga potensi eksternal dari komunitas lain dapat diakses.[181]

Kelompok ini memiliki pandangan dan sikap terbuka dan mengikuti perkembangan atau dinamika yang ada dari luar kelompoknya

[180] Boedyo Supono, 'Peranan Modal Sosial dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan,* Vol. 11, No. 1, April 2011, 12-13.
[181] Suparman Abdullah, 'Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas', *Socius,* Volumei XII - Januari 2013, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*outward looking*). *Bridging sosial capital* memiliki prinsip-prinsip tentang kebersamaan,[182] kebebasan,[183] nilai-nilai kemajemukan dan kemanusiaan,[184] terbuka dan mandiri. Prinsip tersebut menggambarkan kelompok atau organisasi yang lebih modern.

Perbedaan prinsip antara *Bonding sosial capital* dan *Bridging sosial capital* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbedaan *Bonding sosial capital dan Bridging sosial capital*

Tabel 4

Bonding sosial capital	***Bridging sosial capital***
▪ Terikat/ketat (jaringan yang ekskusif) ▪ Pembedaan antara *inward* dan *outward* sangat jelas ▪ Hanya ada satu solusi/jawaban ▪ Kurang akomodatif terhadap pihak luar ▪ Mengutamakan kepentingan dan solidaritas kelompok	▪ Terbuka, bebas (jaringan yang inklusif) ▪ Jaringan lebih fleksibel ▪ Memungkinkan utuk memiliki alternatif jawaban ▪ Lebih akomodatif untuk menerima perubahan ▪ Cenderung memiliki sikap alturistik, humanis dan universal

Antara modal sosial yang mengikat atau *bonding sosial capital* dan modal sosial yang bebas atau *bridging sosial capital* dapat ditemukan beberapa perbedaan. Misalnya jika dilihat dari jaringan. *Bonding sosial*

[182] Bahwa setiap anggota kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama.
[183] Setiap anggota kelompok bebas berbicara, bebas mengemukakan pendapat atau ide-ide, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi.
[184] Kemajemukan disini membangun kesadaran bahwa hidup dengan beragam suku, ras, budaya dan cara berfikir yang berbeda adalah hal yang logis, biasanya kelompok ini memiliki sikap dan pandangan terbuka dan mengikuti perkembangan dunia diluar kelompoknya (*outward looking*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

capital lebih memiliki sifat yang eksklusif, tidak semua orang/lembaga bisa bergabung di dalamnya. Lain hal dengan *bridging sosial capital.* Dalam konsep ini, jaringan bersifat inklusif, terbuka untuk umum.

Apabila dikaitkan dengan organisasi/lembaga, kedua prinsip di atas memiliki sisi kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun, jika dikaitkan dengan organisasi kemasyarakat sebagaimana dalam pembahasan ini, maka prinsip yang sesuai dengan keorganisasian adalah prinsip *bridging sosial capital.*

Dimana prinsip ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, keterbukaan, saling memberikan masukan, saran untuk kemajuan organisasi yang lebih baik. Sehingga visi misi organisasi dapat diwujudkan demi kebaikan bersama.

2. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Modal Politik

Kajian tentang modal politik secara spesifik masih belum banyak ditemukan. Untuk mendefinisikan tentang modal politik itu sendiri memerlukan istilah-istilah yang hampir sama dengan konsep modalitas secara umum. Modal politik menurut Kimberly L. Casey adalah sesuatu yang berhubungan dengan pasar politik, arena politik seperti pemilihan umum baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Artinya, modal politik sebagai variabel politik dalam bidang politik.[185]

[185] Kimberly L. Casey, *'Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory.* https://www.researchgate.net/publication/237710955_Defining_Political_Capital_A_Reconsideration_of_Bourdieu's_Interconvertibility_Theory.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori modal sebenarnya secara tradisional dikaitkan dengan ekonomi. Bourdieu berpendapat bahwa konsep modal dapat dipahami dan dibedakan sebagai fenomena material dan fisik. Bagi Bourdieu, manusia berorientasi pada material atau keuntungan simbolik. Ia juga memberikan batasan jenis modal, di antaranya:

a. Modal ekonomi.

Modal ekonomi erat dihubungkan dengan dengan uang dan properti. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam relasinya dengan politik, modal ekonomi memiliki peran yang sangat besar dan mutlak. Isue politik menjadi salah satu sasaran bagi politisi dalam melakukan sosialisasi politiknya.

Kedua disiplin ilmu itu saling keterkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi. Meskipun organisasi masyarakat sebagai lembaga yang nirlaba, namun keberadaannya dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi para kompetitor pemilu. Eksistensi organisasi mampu mempengaruhi perilaku para pengikutnya baik secara personal maupun kelompok di dalam masyarakat.

b. Modal budaya.

Dalam kajian sosiologi, modal budaya merupakan sebuah aset seseorang. Di dalamnya terdapat pendidikan, gaya berbicara, gaya berpakaian, kecerdasan dan lainnya. Adapun fungsi dari modal budaya adalah sebagai hubungan sosial dalam praktek aktifitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, termasuk sistem pertukaran. Dalam modal budaya ini juga terdiri dari berbagai material dan barang simbolis.[186]

Menurut Bourdieu, ia mengembangkan ekonomi politik sebagai simbol kekuatan yang mencakup teori kepentingan simbolik. Ia menyebutkan bahwa teori kekuasaan sebagai modal dan simbolik. Logika yang dipakai adalah semua barang, material sebagai simbol tanpa menunjukkan perbedaan yang ada. Dengan menggunakan modal budaya ini, mereka akan menampilkan dirinya sebagai orang yang pantas dalam lingkungan sosial yang ada.[187]

c. Modal sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa modal sosial adalah sebuah konsep dengan berbagai makna, definisi yang didasarkan pada hubungan sosial dan jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan ikatan yang terdiri atas simpul individu atau kelompok yang menghubungan antara satu dengan lainnya melalui media.

Pembentukan jaringan dalam masyarakat bertujuan untuk memperoleh modal sosial berupa kepercayaan. Kepercayaan ini perlu diorganisir dalam sebuah lembaga atau institusi dengan perlakuan yang khusus. Oleh karenanya, modal sosial ini biasanya diwarnai dengan berbagai bentuk dan tipologi serta oreintasi masyarakat.

[186] David Swartz, *The Sociology Of Pierre Bourdieu*, (London The University of Chicago Press, 1997), 66. ISBN (CLOTH): 0-226-78594-7. ISBN (PAPER): 0-226-78595-5.
[187] Swartz, *The Sociology Of Pierre Bourdieu* , 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Modal simbolik.

Modal simbolik ini hadir sebagai upaya kritik teori ekonomi. Teori ekonomi menganggap sebuah hubungan hubungan atau relasi didasarkan pada pertimbangan modal dan produksi, mengenai untung dan rugi. Namun dalam modal simbolik, hal tersebut tidak berlaku. Sebab, masyarakat yang memiliki relasi yang dekat, mempunyai relasi simbolik yang intens akan sulit menerapkan teori ekonomi tersebut.

Selain itu, modal simbolik memiliki peran dalam memapankan relasi-relasi kuasa dalam sistem dan struktur masyarakat. Dapat diambil contoh misalnya, kebiasaan seseorang untuk memberikan 'hadiah' kepada orang lain. Dalam praktek ekonomi, hal ini mungkin tidak memiliki makna, namun sebernarnya menyimpan kepentingan yang tidak diungkapkan secara verbal.

Tindakan individu atau tindakan kelompok mampu meningkatkan komunitas modal politik. Organisasi masyarakat sebagai bagian dari tindakan kelompok dapat menjalin dan membangun komunikasi di antara lembaga-lembaga yang berkaitan dengan politik.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk menambah kesadaran masyarakat tentang bagaimana struktur kekuasaan di masyarakat dan bangsa terkait apa yang terjadi. Misalnya, kegiatan pemungutan suara, diskusi politik dengan keluarga, teman dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca informasi lainnya baik melalui media cetak, elektronik maupun internet.[188]

Muslimat NU sebagai organisasi yang memiliki massa perempuan terbanyak ini juga bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai modal politik yang besar. Oleh karenanya, menurut Abdul Chalik dalam bukunya yang berjudul *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik: Perubahan dan Kesinambungan* mengatakan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan massa, maka sangat memungkinkan terjadinya transaksi politik baik secara langsung maupun tidak langsung.[189]

Modal politik merupakan bentuk yang diambil dari kekuasaan secara formal, artinya konsep modal sosial memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan itu sendiri.[190] Dinamika modal politik dapat menjadi sesuatu yang mendasar bagi demokrasi di masyarakat. Oleh karenanya, modal politik dalam demokrasi berasal dari perwakilan.

Adapun perwakilan yang dimaksud disini adalah perwakilan yang berasal dari rakyat. Richard D. French menambahkan terdapat tiga karakteristik penentu utama modal politik, yaitu opini, kebijakan dan penilaian politik.[191]

---

[188] *Cheryl Jacobs,* 'Community Capitals: Political Capital', *South Dakota State University Open PRAIRIE: Open Public Research Access Institutional Repository and Information Exchange,* Revised April 2011, 1-4. http://openprairie.sdstate.edu/extension_extra/522.

[189] Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik: Perubahan dan Kesinambungan,* (Yogyakarta: Pintal, 2011), 174.

[190] Richard D. French, 'Political Capital', *Representation,* Vol. 47, No. 2, 2011, 216. ISSN 0034-4893 Print/1749-4001 Online/11/020215–16. DOI: 10.1080/00344893.2011.581086.

[191] Richard D. French, 'Political Capital', 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Opini (*opinion*) Penentu modal politik adalah opini, yakni penilaian dari kelompok sipil terhadap aktor politik. Opini merupakan hasil dari interaksi, diskusi sehingga menghasilkan penilaian sosial terhadap individu atau kelompok sosial. Adapun yang dibahas mengenai kepentingan umum atau persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat.

Opini ini dapat ditangkap melalui tindakan atau ucapan dari tokoh politik sehingga memunculkan kesan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk dilihat dan didengar agar memperoleh simpati dari masyarakat sebagai upaya atas tokoh politik tersebut untuk dipilih kembali.[192] Karakteristik opini merupakan unsur yang paling dominan dalam penentu modal utama.

Beberapa karakteristik opini di antaranya, opini sangat peka terhadap berbagai peristiwa penting, opini lebih mengedepankan sebuah kejadian/peristiwa, bukan perkataan (kecuali perkataan tersebut sebuah peristiwa), opini lebih cenderung pada sebuah reaksi dari kejadian, bukan mendahului terjadinya kejadian, secara psikologi, opini lebih ditentukan oleh kepentingan personal, dan seterusnya.

Kedua. Kebijakan (*policy*). Jika opini merupakan penentu dominan, lalu apakah peran dari kebijakan tersebut? Kebijakan terdiri dari penghargaan dan hukuman yang bersifat politis. Kebijakan disini dimaknai sebagai sanksi atau imbalan yang bersifat substantif dari aktor

[192] French, 'Political Capital', 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Kebijkan ini mengandung berbagai konsep dan asas sebagai dasar yang dapat diterapkan pada pemerintahan atau organisasi.

Ada hal yang perlu dipahami bahwa kebijakan memiliki makna yang berbeda dengan peraturan atau hukum. Keberadaan hukum dapat memaksa atau melarang suatu tindakan/perilaku, maka kebijakan hanya dijadikan sebagai pedoman tindakan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Oleh sebab itu, kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan berbagai keputusan.

Ketiga, penilaian politik. Penilaian oleh aktor politik dalam penyebaran modal politik. Keberhasilan masa lalu terhadap penilaian politik bukanlah jaminan kesuksesan di masa datang, sebab para aktor politik berada dalam lingkungan atau konteks yang berbeda. Penilaian seperti ini tidak bisa direduksi menjadi rasionalitas transparan dari penalaran ilmiah.[193]

Penilaian ini bisa merujuk kepada kepercayaan publik terhadap aktor politik. apabila aktor politik tersebut memiliki rekam jejak yang positif dalam masyarakat, maka citra yang baik dari masyarakat akan melekat pada dirinya. Dan begitu sebaliknya. Masyarakat memberikan penilaian tidak hanya ketika para aktor politik melakukan sosialisasi politik atau pada waktu kampanye saja. Namun, masyarakat secara objektif melakukan pengamatan yang terus menerus untuk mengetahui sifat dan karakter dari aktor politik.

[193] French, 'Political Capital', 223-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karakter dari aktor politik dapat dilihat dari corak kepribadian individu. Setiap individu tentu mempunyai sisi lain dari proses pembentukan kepribadiannya. Salah satunya faktor sosial kultural. Lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang, misalnya: keluarga, sekolah, agama, partai politik, organisasi masyarakat, dan lainnya.[194]

Para aktor politik juga membutuhkan organisasi politik untuk mewujudkan visi dan misi politiknya. Mereka harus melibatkan banyak pihak dan memobilisasi guna menyusun strategi untuk menghasilkan perubahan yang nyata.[195] Organisasi politik bukan hanya mereka yang turut serta dalam sebuah forum semata, hal yang terpenting dari itu adalah bagaimana memahami dinamika kelompok dan pola kelompok tersebut.

3. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Media Komunikasi Politik

Organisasi masyarakat saat ini diyakini bisa menjadi sarana/media untuk merekatkan bangsa. Lembaga non-pemerintahan yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat dinilai dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Meskipun keberadaan organisasi masyarakat masih dipandang belum memiliki kontribusi yang besar, setidaknya eksistensi organisasi tersebut tidak ditolak oleh publik.[196] Maka organisasi NU dan Muhammadiyah menjadi representasi dari Ormas terbesar di

---

[194] Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 3012-303.
[195] Pari Baumann, *Sustainable Livelihoods And Political Capital: Arguments and Evidence From Decentralisation and Natural Resourcemanagement In India*, (London: Overseas Development Institute, October 2000), 20. ISBN 0 85003 496 5.
[196] Yohan Wahyu, https://nasional.kompas.com diposting, 4 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki andil yang cukup besar dalam menumbuhkan semangat kebangsaan.[197]

Muhammadiyah dan NU tak ragu lagi adalah organisasi terbesar di Indonesia. Hal ini tentu tidak berlebihan. Muhammadiyah dengan perangkat anak-anak organisasinya. Selanjutnya melihat medan garapannya. Banyak lembaga pendidikan dengan lebel Muhammadiyah (dari TK sampai Universitas). Demikian kolosalnya lembaga yang dimilikinya, sehingga sulit mendapatkan berapa jumlah angka yang dimiliki bahkan dari data Muhammadiyah sendiri.

Organisasi Nahdlatul Ulama, begitu banyak pesantren yang berada di bawah naungannya. Jumlahnya pun hampir tidak bisa dihitung dengan angka yang pasti. Terdapat banyak juga majlis ta'lim yang tersebar di pelosok daerah. Anak-anak organisasi NU juga tak kurang banyaknya (dari pelajar sampai kaum perempuan). Menurut Deliar Noer organisasi ini digolongan ke dalam kaum tradisionalis. Meski demikian, organisasi NU ternyata tidak pernah layu dalam arus modernitasi. NU tetap melakukan inovasi tanpa harus menggerus tradisi yang sudah lama dilestarikan.[198]

---

[197] NU dan Muhammadiyah telah mencatat sejarah yang besar bagi Bangsa Indonesia. Keduanya memiliki visi misi yang sama dalam melawan kolonialisme pada waktu itu. Sejarah mencatat bahwa organisasi NU dengan semangat kebangsaan melalui resolusi jihad yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dan organisasi Muhammadiyah turut berjuang memberikan semangat untuk melawan tentang Belanda, yang dipimpin oleh KH. Mas Mansyur. Dengan adanya fakta sejarah tersebut, baik NU maupun Muhammadiyah berperan dalam membentuk nilai-nilai kebangsaan, membangun karakter anak bangsa, menumbuhkan demokrasi dan memelihara toleransi yang tinggi.

[198] Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tantangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 146-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU didirikan dalam situasi politik dimana pergerakan menuju kemerdekaan sedang mulai memuncak. Ketika Indonesia menghadapi berbagai masalah krusial, banyak berdiri organisasi dan partai politik. dan pada saat yang bersamaan terjadi penangkapan terhadap banyak kyai dengan tuduhan komunis serta disusul dengan Konggres pemuda (1928).

Namun NU tidak boleh melepaskan diri dari semuanya. Sebab, bagaimanapun NU merupakan potensi politik. Sebagai organisasi kemasyarakatan, NU juga bergaul, bekerja sama, bersaing, kadang-kadang juga 'bertengkar' dengan organisasi maupun partai lain.[199]

Fleksibilitas pandangan NU tampaknya bersumber dari terbentuknya peluang untuk menciptakan hukum yang dibolehkan. Tidak mengherankan jika dalam perilakunya, golongan ini ini berpegang pada kaidah *al-hukmu ma'a illat*. Dengan berpikir melalui logika sebab akibat (*ilat/causality*) dan mendorong untuk menggunakan metode analogis sehingga melahirkan pola pikir NU yang luwes dan elastis.[200]

Implikasi dari kecenderungan pola pikir keagamaan tersebut, maka pola pikir NU cenderung berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Dimensi penting dari kerangka pikir NU yang serba fikih (*fiqh oriented*) menempatkan paham ahlus sunnah wal jama'ah sebagai paham yang begitu longgar. Terdapat berbagai peluang bagi para

[199] KH. Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran: Refleksi 65 tahun Ikut NU*, (Surabaya; Khalista, 2007), 86-90.
[200] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganutnya untuk menginterpretasikan realitas, baik bersifat kultural maupun struktural.[201]

Muslimat NU yang merupakan banom (badan otonom) dari Nahdlatul Ulama juga memiliki andil yang cukup besar dalam proses pembangunan. Muslimat NU turut berkontribusi dan memberikan warna dalam berbagai dimensi kehidupan, salah satunya urusan politik. sebagai organisasi masyarakat yang nirlaba, Muslimat NU tetap melakukan ikhtiar untuk terus memberikan kemanfaatan, kemaslahatan umat khususnya warga nahdiyat.

Masyarakat berasumsi bahwa organisasi masyarakat mampu menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan informasi kepada publik. Informasi dapat disalurkan melalui komunikasi yang dibangun antara masyarakat dan lembaga non- formal tersebut. Untuk memperlancar proses distribusi informasi itu, maka diperlukan media komunikasi.

Salah satu unsur yang dibutuhkan dalam komunikasi politik adalah adanya media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi/pesan dari komunikator kepada komunikan. Media komunikasi juga berfungsi untuk memproduksi, mereproduksi, me-*manage* dan menyebarkan informasi kepada khalayak.

[201] Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Onong Uchjana Effendy bahwa organisasai sebagai suatu struktur yang melangsungkan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dimana interaksi di antara satu dengan lainnya dapat berjalan harmonis, dinamis dan pasti.[202] Ia juga menekankan bahwa jenis dari organisasi memiliki banyak macam, misalnya: organisasi pemerintah, semi-pemerintah, swasta, dan lainnya.

Organisasi masyarakat melalui media sosial dapat memberikan dan menciptakan peluang sekaligus tantangan untuk menghadirkan konten-konten positif. Tantangan terbesar organisasi masyarakat adalah bagaimana menyajikan, mempublikasi dan memproduksi konten edukatif dengan pendekatan persuasif. Jika dikaitkan dengan politik, organisasi masyarakat harus mampu memberikan sajian konten yang menyejukkan sehingga jauh dari ujaran kebencian.[203]

Oleh karenanya, dalam komunikasi politik terdapat beberapa media yang digunakan di antaranya:

a. Media massa.

Dalam kegiatan politik, media massa memiliki peran yang sangat penting. Salah satu keunggulan dari media massa adalah kecepatannya dalam menyampaikan pesan dari aktor politik kepada khalayak umum. Hal ini disebabkan karena mudahnya sarana komunikasi yang diperoleh sehingga informasi tentang apapun dapat

[202] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 114-115.
[203] Prasetya, *Ormas Harus Bisa Menyebarkan Konten Positif Melalui Media Massa*, online pada 05 September 2018. Diakses tanggal 01 Nopember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima dengan cepat dan mudah. Sekarang ini media massa telah tergantikan dengan media sosial[204] yang semakin berkembang.

Masyarakat secara luas baik individu maupun kelompok dapat mengakses berita ter-*update* dari *handphone* masing-masing. Seseorang tidak perlu susah payah untuk keluar rumah hanya untuk mendapatkan berita yang sedang dibutuhkan. Mereka cukup mencari informasi apapun melalui *handphone* yang dimilikinya melalui *online*.

Perkembangan teknologi yang serba canggih bukan tanpa cela. Terdapat pula sisi negatif atau positif dari hadirnya media komunikasi dan teknologi saat ini. Sebagai masyarakat, tentu harus melek teknologi agar dapat mengimbangi berbagai peristiwa dan berita yang terus perubah sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.

Perkembangan politik yang sedang terjadi dapat ditelusi dengan menggunakan media sosial. Melalui media ini, para aktor politik dengan sangat mudah melakukan sosialisasi atau kampanye politik mengenai berbagai visi misi yang dimilikinya. Kemampuannya menjangkau para komunikan (dalam urusan politik ini bisa tim sukses, relawan, simpatisan atau partisipan politik) lebih efisien (baik dari sisi materi, waktu, atau ongkos kampanye).

[204] Anthony Mayfield dalam bukunya yang berjudul *What Is Sosial Media*? Ia mengatakan bahwa media sosial merupakan sebuah media *online* yang menjadikan sekelompok tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai media sosial yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Anthony Mayfield, *What Is a Social Media?*, (London: iCrossing, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Media komunikasi interpersonal.

Media komunikasi interpersonal merupakan media komunikasi yang digunakan oleh aktor politik untuk menyampaikan pesan politik kepada khalayak umum melalui *two way communication*, melalui komunikasi dua arah.[205] Dengan menggunakan pesan pribadi, para aktor politik mengirimkan pesan melalui telpon, sms, *whatsApp*, email atau sejenisnya.

Komunikasi interpersonal (KIP) juga bisa disebut dengan komunikasi antar personal (KAP). Keduanya memiliki makna yang selaras, namun hanya berbeda dalam istilah. KIP merupakan sebuah interaksi dari orang ke orang, yang bersifat dua arah, dengan bentuk verbal maupun non-verbal. Antara satu dengan lainnya saling berbagi informasi dan perasaan (antar individu dengan individu lain).

Komunikasi bentuk ini merupakan komunikasi yang paling sederhana. Sebab, setiap orang pasti melakukan komunikasi setiap hari dalam kehidupannya dan menjadi sebuah keharusan, baik dalam organisasi formal maupun non-formal. Oleh karenanya, penting bagi setiap orang mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi.[206]

Selain untuk menjalin hubungan dengan orang lain, komunikasi ini juga sebagai 'jembatan' dalam menjalin hubungan sosial yang diinginkan bila seseorang merasa harga dirinya atau rasa amannya bertambah. Sebab, hanya dengan komunikasi semua pihak

[205] Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004).
[206] Edi Harapan, *Komunikasi Antar Pribadi: Perilaku Insani dalam Organisasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlibat akan dapat menambah perasaan, saling memahami dan mengerti lawan komunikasinya.

c. Media komunikasi organisasi.

Organisasi diposisikan sebagai sebuah media dalam komunikasi politik. organisasi dinilai mampu menyalurkan berbagai pesan politik kepada khalayak umum, baik berupa organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Dalam komunikasi organisasi ini, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu saluran komunikasi organisasi formal dan saluran komunikasi organisasi informal.

Pertama, saluran komunikasi organisasi formal. Saluran formal ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi organisasi ini terjadi dengan persetujuan resmi dari organisasi atau peraturan yang teah ditetapkan oleh organisasi tersebut. *Kedua,* saluran komunikasi organisasi informal. Komunikasi ini terjadi karena dasar interaksi sosial yang biasa terjadi di dalam masyarakat.

Antara saluran komunikasi organisasi formal dan saluran komunikasi organisasi informal memiliki ciri yang berbeda-beda. Jika komunikasi secara formal dilakukan secara prosedural, maka berbeda dengan komunikasi informal. Komunikasi informal ini lebih fleksibel dan tidak mengikat. Komunikasi ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, antara komunikator dan komunikan. Sehingga tidak memerlukan waktu khusus dalam menjalin komunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami konsep modal media yang digunakan untuk kepentingan politik, berikut ini adalah bentuk modal media yang dihasilkan oleh aktor politik di bidang media tergambar di bawah ini :[207]

Bentuk Modal Media

Tabel 5

Media (*Media Field*)	**Modal Media dilembagakan (*Institutionalized media capital*)**	**Modal Media Individu (*Individual media capital*)**
Modal media internal: kemampuan untuk mengendalikan perhatian publik	Posisi institusional meningkatkan kemungkinan jaringan dengan jurnalis dan dengan demikian mengakumulasi modal media internal	Karisma pribadi, kontak dengan jurnalis, dan pengetahuan tentang budaya baru mengakumulasi modal media internal
Modal media eksternal: perhatian publik diperoleh melalui publikasi media	Posisi institusi meningkatkan publikasi media	Karisma pribadi dan ”daya tarik media” meningkatkan publisitas media.

Pada tabel di atas, modal media dapat dibagi menjadi dua macam yaitu modal media internal dan modal media eksternal. Modal media internal adalah media berperan untuk mengendalikan perhatian publik. Dalam hal ini media memiliki wewenang dan kelebihan untuk mengontrol berbagai informasi yang akan disampaikan kepada khalayak umum.

[207] Esa Reunanen, *Media Capital in the Political Field*, Tampere 14.4.2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan modal media eksternal yaitu bagaimana perhatian publik diperoleh melalui publikasi media. Modal media eksternal (publisitas) hanya mentransfOrmasikan ke modal politik jika didukung oleh komponen lain dari politik, seperti keahlian, bakat dan jejaring sosial. Dengan kata lain, apapun informasi yang sampai kepada khalayak merupakan hasil dari apa yang disajikan, disampaikan dan diproduksi oleh media. Dengan adanya publikasi media, berbagai informasi tentang apapun (termasuk politik) dapat diakses oleh khalayak umum.

Secara bentuk, modal media juga dibagi menjadi dua macam, yakni modal media yang dilembagakan *(institutionalized media capital)* dan modal media individu (*individual media capital).* Keduanya memiliki perbedaan masing-masing. Modal media yang dilembagakan yaitu sebagai posisi institusional dalam meningkatkan jaringan dengan jurnalis sehingga dapat mengakumulasi modal media internal.

Modal media individu lebih memaksimalkan figur karismatik personal, dimana seorang aktor politik dapat melakukan komunikasi dengan seorang jurnalis (orang yang menggali dan mencari informasi) sehingga mampu meningkatkan modal media itu sendiri. singkatnya, dalam modal media yang memiliki peran utama adalah hadirnya tokoh, figur karismatik personal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Teori Pilihan Rasional dan Teori Strukturasi: Memahami Perilaku Politik Muslimat NU

Secara geneologi keilmuan, teori pilihan rasional merupakan hasil adopsi dari ilmu ekonomi. Dimana konsep dasar ilmu ekonomi ialah mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam kajian sosiologi, teori ini kemudian dipopulerkan oleh James Samuel Coleman.[208] Ia mendirikan sebuah rumah jurnal yang diberi nama *Rationality and Society* di tahun 1989. Salah satu tujuannya untuk mengenalkan *Rational Choice Theory* yang dikembangkannya.

Teori pilihan rasional atau *rational choice theory* merupakan teori yang memiliki asumsi dasar bahwa semua perilaku sosial yang disebabkan oleh perilaku manusia secara individu dapat mempengaruhi setiap keputusan yang dihasilkan. Teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori tindakan rasional yang terfokus pada penentu pilihan masing-masing individu. Adapun tindakan rasional tersebut berdasarkan atas tujuan yang telah ditentukan oleh *value* atau preferensi-preferensi yang ada.

Konsep dasar yang dikemukakan oleh Coleman juga menuai banyak kritikan. Coleman secara tidak langsung juga mengakui bahwa para aktor

[208] James S. Coleman lahir di Bedford, Indiana pada tahun 1926. Ia dibesarkan di Amerika Serikat bagian Selatan dan Tengah. Lulus Diploma Sekolah Menengah dari Dupont Manual High School di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1944. Kemudian ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang Kimia dari Universitas Purdue tahun 1949. Setelah itu melanjutkan studinya pada Universitas Columbia dan memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Sosiologi tahun 1955. Lihat Peter V. Marsden, The Sociology Of James S. Coleman, *Annu. Rev. Sociol*, on January 24, 2005, 2-3., 2-3. DOI: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122209. lihat selengkapnya Jon Clark (ed), *James S.Coleman*, (London and New York: Routledge Falmer, 1996), 422-441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak selalu menggunakan perilaku dan pilihan rasional dalam setiap aktifis yang masyarakat lakukan. Namun, Coleman lebih melihat *rational choice* sebagai perilaku kolektif yang berdasarkan pada nilai dan norma yang berlaku pada diri aktor.

Terdapat dua mekanisme yang menentukan pilihan rasional dari seorang aktor yaitu mikro dan makro. Secara teoritis, Coleman menggambarkan perilaku aktor yang bersifat mikro yang kemudian mengarah pada tingkatan makro. Untuk itu Coleman melakukan analisis fenomena makro sebagai berikut:

Pertama, perilaku kolektif. Perilaku kolektif yang digunakan oleh Coleman dalam melakukan analisis mengenai fenomena makro adalah bagaimana ia berusaha untuk memaparkan berbagai dinamika perilaku kolektif yang diniplainya selalu dinamis. Artinya, perilaku kolektif itu tidak hanya bersifat stabil saja, namun juga ada yang bersifat kacau. Oleh karenanya, teori pilihan rasional menjadi salah satu alternatif dalam menjawab jenis fenomena makro tersebut.

Kedua, Norma, yaitu fenomena tingkat makro yang dibentuk berdasarkan tindakan atau perilaku dari tingkat mikro. Ketika norma itu ada, maka segala konsekwensi logis dari setiap tindakan atau perilaku (baik individu maupun kelompok) akan dibebankan padanya. Norma ini biasanya berbentuk sanksi atau ancaman yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, studi norma tentang perilaku, bagaimana kepatuhan seorang aktor dapat membawa manfaat bagi target.[209]

Ketiga, aktor korporat. Setiap aktor individu maupun aktor kolektif tentu memiliki tujuannya masing-masing. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan motifnya. Dalam kajian struktur sosial, bisa saja aktor individu berupaya untuk mengejar apa yang diinginkannya, meskipun hal tersebut akan bertentangan dengan aktor kolektif. Inilah yang kemudian oleh Coleman disebut aktor korporat sebagai aktor yang tidak diperbolehkan bertindak sesuai dengan kepentingan individu semata, namun aktor yang mampu bertindak sesuai dengan kepentingan bersama atau kepentingan kolektifitas.

Menurut Wirawan dalam bukunya yang berjudul *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, ia menjelaskan bahwa pilihan rasional sebagai pergerakan intelektual yang memiliki makna cukup beragam.[210] Beberapa ahli memberikan penekanan terhadap pilihan rasional sebagai hal yang menyangkut sebagian besar penelitian sosiologi, yaitu analisis yang memandang perilaku atau tindakan seseorang sebagai sesuatu yang *purposive*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Finn Collin dalam *Social Reality* bahwa hanya seorang aktor yang mengetahui dimana tepatnya perilaku yang ia lakukan. Dari perilaku awal hingga akhir. Perilaku itulah yang menunjukkan identitas pribadinya. Singkatnya, seorang aktor dapat

[209] Marsden, The Sociology Of James S. Coleman, 14-15.
[210] Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 191-192,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun realita sosial melalui interpretasinya tentang perilakunya sendiri.[211]

Adapun tujuan dari teori pilihan rasional menurut Yoshimichi Sato adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dengan mengasumsikan pilihan rasional pada tingkat aktor.[212] Selain itu pilihan aktor juga harus menjelaskan tindakan aktor secara personal. Lanjut dia, dengan adanya asumsi tentang pilihan rasional oleh aktor, maka memungkinkan untuk dianalisis agar teori tersebut dapat terwujud lebih mudah. Sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Meskipun awalnya individu mengacu pada tujuan dan maksud tertentu, namun tindakan individu tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya:

1. Keterbatasan sumberdaya

   Keterbatasan sumberdaya ini memiliki banyak interpretasi. Sumberdaya dimaknai sebagai sesuatu yang mampu mengantarkan seseorang pada tujuan tertentu. Di dalam politik misalnya, seorang aktor politik yang memiliki sumberdaya yang besar (kekuatan materi misalnya), akan dengan mudah untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Para aktor politik yang memiliki keterbatasan sumberdaya dalam hal tersebut, tentu akan menemukan berbagai rintangan dan hambatan.

   Oleh sebab itu, seorang aktor harus benar-benar mengetahui seberapa besar kapasitas yang dimilikinya sehingga mampu

[211] Finn Collin, *Social Reality*, (London and New York: Routledge, 1997), 112.
[212] Yoshimichi Sato, 'Rational Choice Theory', *Sociopedia.isa*. 2013. DOI: 10.1177/205684601372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungan segala konsekwensi yang akan dilakukan dalam proses ke depan. Sebab, jika tidak melakukan perhitungan secara cermat, akan mengancam peluang dalam meraih tujuan selanjutnya.

2. Adanya lembaga sosial

Lembaga sosial bertujuan untuk mengontrol semua tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh aktor. Lembaga sosial ini berisi tentang berbagai aturan-aturan yang mengikat baik di ranah keluarga, masyarakat ataupun di lingkup yang lebih luas. Lembaga sosial meliputi lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan sampai pada lembaga politik sekalipun.

Oleh karenanya, lembaga sosial ini mencakup semua tingkah laku perbuatan yang harus dipatuhi, dilakukan oleh setiap individu atau kelompok masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan nilai fungsinya, yakni sebagai struktur sosial yang mengatur, mengarahkan serta menjalankan semua kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap manusia. Dalam lembaga ini juga terdapat nilai-nilai, norma, adat serta unsur kemasyarakatan yang sama. Setiap anggota yang telah bergabung pada suatu lembaga tertentu, maka secara akan terikat dengan peraturan yang ada.[213]

Selain aturan yang bersifat tertulis, sebagai bagian dari anggota lembaga sosial harus memahami peraturan yang yang tidak tertulis (bisa berupa tradisi, kebiasaan). Salah satu contoh dari lembaga sosial adalah

[213] Ary H.Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan,* (Jakarta: PT. Renika cipta, 2000), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga politik. Lembaga ini biasanya terkait masalah yang berkenaan dengan tata tertib, aturan, dan administrasi tertentu. Dalam lembaga politik juga sebagai wadah bagi para politisi yang memiliki visi misi yang sejalan dalam urusan politik.

Meskipun ada banyak versi *Rational Choice Theory* (selanjutnya ditulis RCT), namun sebagian besar penganut teori ini mengambil beberapa penjelasan atau kata kunci sebagai berikut:[214]

a. Asumsi intensionalitas

Para teoretis Pemilihan rasional mengasumsikan intensionalitas. Intensionalitas ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan *intentional explanations* atau penjelasan maksud/intensional). *Intentional explanations* tidak hanya menyatakan bahwa setiap individu bertindak secara intensional (sesuai dengan maksud tertentu), namun juga mempertimbangkan aspek-aspek keyakinan/kepercayaan masyarakat serta keinginan-keinginan dari para individu yang ikut terlibat di dalamnya.

Dalam rangka memahami intensionalitas, maka terlebih dahulu perlu membahas mengenai definisi fenomenologi. Fenomenologi memiliki makna 'menunjukkan' dan 'menampakkan diri sendiri'.[215] Fenomenologi yang diprakarsai oleh Edmund Husserl (1859-1938).[216] Dari beberapa kata

[214] Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, 210-213.

[215] Dengan demikian, semua wilayah fenomena (realitas) yang menampakkan diri (manusia, gejala sosial budaya atau objek-objek yang lain) dapat dikatakan sebagai objek fenomenologi. Lihat Akhyar Lubis,, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 206.

[216] Edmund Husserl (1859-1938) lahir di kota kecil Proznitz daerah Moravia yang waktu itu di bawah kekaisaran Austria-Hongaria dan sejak perang dunia I masuk wilayah Cekoslowakia. Husserl berasal dari golongan Yahudi menengah dan pada usia 27 tahun masuk Protestan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kunci dalam memaknai fenomenologi, di antaranya (1) *Epoche*, (2) Reduksi, (3) intensionalitas, dan (4) *Lebenswelt*.

Dari kata kunci di atas, intensionalitas menjadi salah satu unsur dari RCT. Intensionalitas merupakan kesadaran akan sesuatu. Dengan kata lain, kesadaran selalu terarah pada suatu objek. Tugas utama fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran maka harus berpikir lebih dalam lagi melampaui fenomena yang tampak tersebut sampai mendapatkan *meaningfulness* atau kebermaknaan.[217]

Collin hanya menegaskan bahwa fakta manusia dan sosial adalah dihasilkan ketika perilaku manusia digabungkan dengan 'makna'. Makna ini menghasilkan fakta terakhir dan di atas fakta perilaku manusia secara murni, yakni fakta tentang sebuah aksi yang dilakukan oleh aktor sehingga memunculkan sebuah perilaku.[218]

---

pengaruh temannya yakni G. Alberch. Husserl belajar matematika, filsafat dan astronomi di Universitas Leipzig, Berlin, dan Wina. Minat pada filsafat tumbuh sewaktu Husserl mengikuti kuliah Franz Brentano merupakan filsuf yang paling berpengaruh di Universitas tempat Husserl belajar dan Brentano dalam pemikirannya mengupayakan menggabungkan pemikiran Skolastik dengan empirisme. Kelak pengaruh pemikiran Brentano pada Husserl terlihat pada konsep intensionalitas yang menjadi salah satu pemikiran penting dari Husserl. Husserl meraih gelar doktor filsafat dengan Disertasi mengenai filsafat matematik. Husserl kemudian menjadi dosen privat di Universitas Helle dari tahun 1887-1901. Tahun 1901 Husserl diangkat menjadi profesor di Gottingen (1901- 1916) dan waktu inilah pemikirannya tentang fenomenologi mencapai kematangan. Setelah tahun 1916, Husserl memenuhi undangan menjadi profesor di Universitas Freiburg im breisgau. Pemikiran Husserl khususnya fenomenologi melalui tulisan-tulisannya telah mempengaruhi filsafat abad ke 20. Akar filosofis fenomenologi Husserl ialah dari pemikiran gurunya, Franz Bretano. Dari Brentano-lah Husserl mengambil konsep filsafat sebagai ilmu yang rigoris (sikap pikiran di mana dalam pertentangan pendapat mengenai boleh tidaknya suatu tindakan). Lihat Federick Elliston, *Phenomenology Reinterpreted: from Husserl to Heideger* dalam *Philosophy Today*, Vol. xxi, No. 3/4, 1977, 279; Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 957.

[217] Finn Collin, *Social Reality*, (London & New York: Routledge, 1997), hal. 104.

[218] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Realitas itu mewujudkan diri atau menurut ungkapan Martin Heidegger yang merupakan fenomenolog interpretatif: Sifat realitas itu membutuhkan keberadaan manusia (*des Wesen des Sin dan Menscenhenwesen brauch*).[219] Noumena tentu membutuhkan semacam *hardware* atau tempat untuk berada, dan tempat tersebut adalah manusia.

Secara khusus, RCT memiliki dua bentuk kontradiksi sosial, yaitu *counterfinality* dan *suboptimality*. *Counterfinality* merujuk pada adanya kesalahan komposisi (*fallacy of compotion*) yang terjadi ketika seseorang bertindak menurut 'asumsi salah' yang menyatakan bahwa apa yang bermanfaat untuk seorang individu dalam lingkungan tertentu, maka secara otomatis akan bermanfaat pula bagi semua individu dalam lingkungan tersebut.

Dapat diambil contoh misalnya, seseorang yang mendukung salah satu calon dalam kontestasi politik. orang tersebut mengetahui bahwa calon yang dipilih terjerat kasus, namun ia tetap memilih calon tersebut sembari yakin bahwa pilihannya akan didukung dan diterima oleh orang lain, masyarakat secara luas.

Selanjutnya bentuk kontradiksi sosial yang kedua adalah *suboptimality*. *Suboptimality* terjadi ketika para individu yang dihadapkan dengan berbagai pilihan, memilih strategi tertentu di mana ia menyadari bahwa para individu lain juga memilih strategi yang sama. Mereka

[219] Martin Heidegger, *Die Tecnik und die Kehre*, (Pullingen, 1962), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari bahwa setiap individu akan mendapatkan keuntungan minimal ketika memilih strategi yang lain.

b. Asumsi rasionalitas

Selain intensionalitas, RCT mengamsumsikan rasionalitas. Penjelasan mengenai pilihan rasional merupakan bagian dari intensionalitas pada tindakan sosial. Rasionalitas dapat dimaknai bhwa ketika seorang indvidu bertindak dan beraksi, ia dengan sadar memiliki rencana yang koheren dan berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, serta berusaha meminimal mungkin biaya yang dibutuhkan.

Rasionalitas mengimplikasikan suatu dengan 'asumsi keterkaitan', yang artinya bahwa seorang individu memiliki suatu 'urutan preferensi' dari berbagai opsi yang ada. Dari urutan tersebut terdapat fungsi nilai atau *utility function* yang lebih diprioritaskan. Untuk sampai pada asumsi rasionalitas, urutan preferensi tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.

Perilaku individu yang merujuk pada asumsi *rational choice explanations* merupakan sebuah preferensi subjektif dari seorang individu, bukan pada preferensi objektif dari seorang individu. Oleh karenanya, dapat dimungkinkan bahwa seorang individu bertindak dan bersikap sesuai dengan preferensi subjektif meskipun hal tersebut tidak tepat (bertumpu pada keyakinan yang salah).

Agar tidak terjebak dalam perilaku dan sikap yang salah, maka seorang individu harus bisa menemukan/pencarian sarana yang terbaik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang individu diharapkan mengumpulkan berbagai infomasi untuk membuktikan keyakinannya.

c. Adanya perbedaan antara ketidakpastian dan resiko

Seorang individu dengan sadar akan mengatetahui dampak atau efek yang dihasilkan dari perilaku dan sikapnya. Terkait hal politik, seorang individu sudah bisa mempredikdi apa yang akan terjadi terhadap pilihan politiknya. Berbagai konsekwensi tersebut harus ditanggung oleh seorang individu. Dalam RCT cenderung memandang pilihan dalam ketidakpastian sebagaimana pilihan dalam resiko.

Ketika dihadapkan pada resiko, orang-orang dapat mengatribusikan berbagai probabilitas (kemungkinan-kemungkinan) ke berbagai hasil *(outcome)*, sementara ketika dihadapkan kepada ketidakpastian, mereka tidak dapat melakukan hal tersebut. Secara umum RCT menfokuskan pilihan pada resiko dengan dua alasan. *Pertama*. Mereka berargumentasi bahwa situasi-situasi ketidakpastian tidak pernah eksis (tidak pernah muncul ke permukaan). *Kedua*, jika memang eksis, RCT tidak dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan-tindakan orang tersebut.

d. Adanya perbedaan antara pilihan strategis dan parametik

Penekanan pada pilihan parametik merujuk pada pilihan-pilihan yang dihadapi oleh para individu yang dihadapkan dengan suatu lingkungan yang independen. Untuk dapat menunjukkan pilihan strategis, seorang individu dapat mempertimbangkan terlebih dahulu plihan yang dibuat oleh orang lain sebelum individu tersebut menentukan pilihannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, mempertimbangkan pilihan kontradiksi sosial (*suboptimality* dan *suboptimality*) yang telah disebutkan di atas menjadi contoh pilihan yang sangat strategis. Sebab dengan *suboptimality* seorang individu dihadapkan dengan berbagai pilihan dengan pendekatan yang sama. Sedang dengan *suboptimality*, pemilih cenderung untuk menentukan pilihan sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Untuk memperjelas konsep teori rasional, maka secara singkat teori rasional memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya:

1. Manusia berusaha memaksimalkan kepuasan yang mereka terima dari dunia sosial. 'Kepentingan' yang berkaitan dengan dunia sosial memiliki karakter objektif.
2. Setiap anggota masyarakat berkuasa mengontrol penawaran barang berharga sosialnya. Barang berharga (*valuable*) tersebut terdri dari unsur-unsur/barang-barang dengan konsekwensi material dan psikologis. Kepuasan individu dimaksimalkan sampai pada tingkat penawaran barang berharga yang dikuasai oleh seorang individu.
3. Interaksi dengan orang lain dalam dunia sosial dipahami sebagai serangkaian negosiasi permintaan yang sifatnya kompetitif. Dalam teori rasionalitas, total biaya untuk memperoleh total keuntungan dipertahankan nol, yaitu menggunakan permainan *'zero-sum'*. Ini artinya keuntungan diri sendiri otomatis mengisyaratkan adanya kerugian pada pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perilaku manusia didasarkan pada rasionalitas, sebab perilaku mereka menggunakan pertimbangan kemanfaatan, kegunaan serta kerugian dari perilaku yang ditimbulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka Pikir Teori Pilihan Rasional

Gambar 4

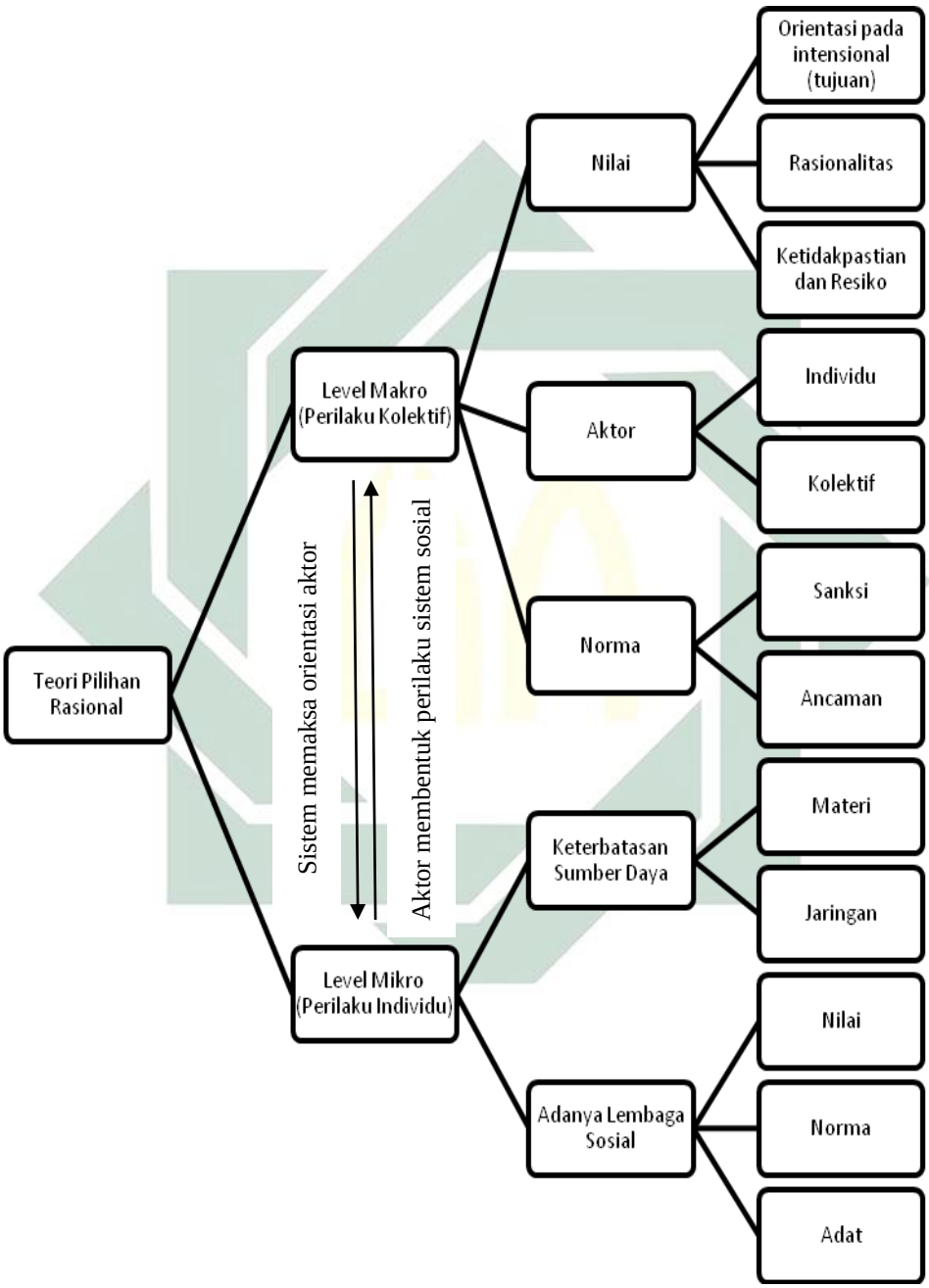

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, untuk memahami perilaku politik Muslimat NU Trenggalek dalam kaitannya dengan eksperimentasi politik elektoral, teori pilihan rasional saja tidaklah cukup untuk menggambarkan perilaku politik tersebut. Sebab, dalam teori ini perilaku politik Muslimat NU Trenggalek dapat dikategorikan sebagai aktor politik secara individu. Dalam teori pilihan rasional dapat dikategorikan dalam level mikro (perilaku individu).

Sedangkan dalam implementasinya, perilaku politik Muslimat NU Trenggalek juga mengarah pada sebuah institusi atau organisasi tertentu. Maka untuk melengkapi dan menjawab problem tersebut harus mengkombinasikan dengan teori yang lain. Adapun teori tersebut adalah teori strukturasi ala Anthony Giddens.

Teori strukturasi ini merupakan teori yang menepis ketegangan dualisme, yakni antara agen dan struktur, antara subjektivisme dan objektivisme, antara voluntarisme dan determinisme. Teori ini juga mencoba mencari titik pertemuan atau *likage* di antara unsur dualisme tersebut. Secara historis, Giddens mengawali pemikirannya melalui bacaan dari berbagai pemikir Barat, misalnya Karl Marx, Emile Dhurkheim, dan Max Weber. Dari pembacaan itulah Giddens merumuskan teori strukturasi dengan karya terkenalnya yang berjudul *The Constitution of Society: Outline of The Structuration* (1984).[220]

Giddens memutus perdebatan antar dualisme dengan pernyataan bahwa segala tindakan manusia disebabkan adanya dorongan eksternal.

[220] Abdul Firman Ashaf, Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif, *Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2, Juli 2006 : 205 – 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab, struktur bukan unsur yang bersifat eksternal bagi setiap individu, melainkan dalam pengertian yang khusus bersifat internal. Konsep Giddens ini mirip dengan teori Berger bahwa terjadi proses dialektis antara struktur dan individu (agen). Berger juga berpendapat bahwa dorongan eksternal adalah kunci utama dalam memahami bagaimana manusia melakukan tindakan sosial, dan bagaimana struktur mampu mengekang tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia (adanya internalisasi).[221]

Menurut teori strukturasi, manusia sebagai aktor atau agen yang bertujuan memiliki alasan atas perilaku dan aktivitasnya sehingga mampu menjelaskan alasan tersebut secara berulang-ulang. Bisa jadi perilaku dan tindakan aktor atau agen dapat mempengaruhi struktur yang ada di dalam dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu bagi Giddens tindakan individu dapat dilakukan secara terus menerus.

Bagi Giddens, realitas sosial dapat berjalan sejalan secara utuh jika analisis sosial antara perilaku aktor dengan struktur saling bertautan. Sebab tindakan aktor merupakan hasil persenyawaan antara motivasi pribadi dan unsur struktur yang saling bertautan. Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain maka muncullah dualitas bukan dualisme. Apabila kedua unsur tersebut bersatu maka akan terwujud sebuah tindakan. Inilah yang membentuk aktivitas secara berulang-ulang dalam praktik sosial.[222]

---

[221] Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990). Lihat juga Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
[222] Nirzalin, Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens, *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No.3, Juni 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anthony Giddens dalam bukunya yang berjudul *The Constitution of Society: Outline of The Structuration* menyebutkan beberapa unsur terkait teori di antaranya:[223] *pertama,* **Agensi.** Agensi ini dapat dimaknai sebagai individu atau aktor. Teori strukturasi terpusat pada bagaimana cara agen memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakannya sendiri. Artinya, bahwa setiap aktivitas dan tindakan manusia tidak diwujudkan oleh aktor secara individual, melainkan terus menerus dilakukan secara berulang-ulang melalui cara mengekspresikan diri sebagai aktor. Dalam hal ini aktor bisa disebut sebagai *key person* yang dibentuk dari sejumlah harapan dan praktik serta dipadukan dengan kesadaran bersama.

Manusia sebagai agensi atau aktor tidak dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki logika, pikiran yang dengan mudah menerima sesuatu yang ada. Akan tetapi, manusia merupakan subjek aktivitas sosial yang memahami dan mengetahui setiap tindakan yang dilakukan. Tindakan tersebut dikontrol melalui norma, kaidah, dan aturan yang berlaku dengan kesadaran.[224]

Menurut Giddens, terdapat tiga bentuk kesadaran dalam diri manusia, yaitu (1) motivasi tak sadar (*unconscious motives*); merupakan motivasi yang memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan, tetapi bukan serta merta tindakan itu sendiri.[225] (2) kesadaran praktis (*practical consciousness*);

---

[223] Giddens, Antony, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration,* (UK: Polity Press, 1984).

[224] Abdul Firman Ashaf, Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif, *Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2, Juli 2006 : 205 – 218.

[225] Motivasi tak sadar bisa diilustrasikan pengurus Muslimat NU yang sangat jarang mengikuti pertemuan kecuali hanya pada *moment* tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran dimana sesuatu yang menunjuk pada pengetahuan yang tidak dijelaskan sebabnya.[226] dan (3) kesadaran diskursif (*discursive consciousness*); yaitu berorientasi pada kapasitas seseorang untuk merefleksikan dan memberikan penjelasan atas tindakan yang dilakukan.[227]

Berikut ini model stratifikasi agen atau aktor dapat digambarkan sebagai berikut:

Model Stratifikasi Agen

Gambar 5

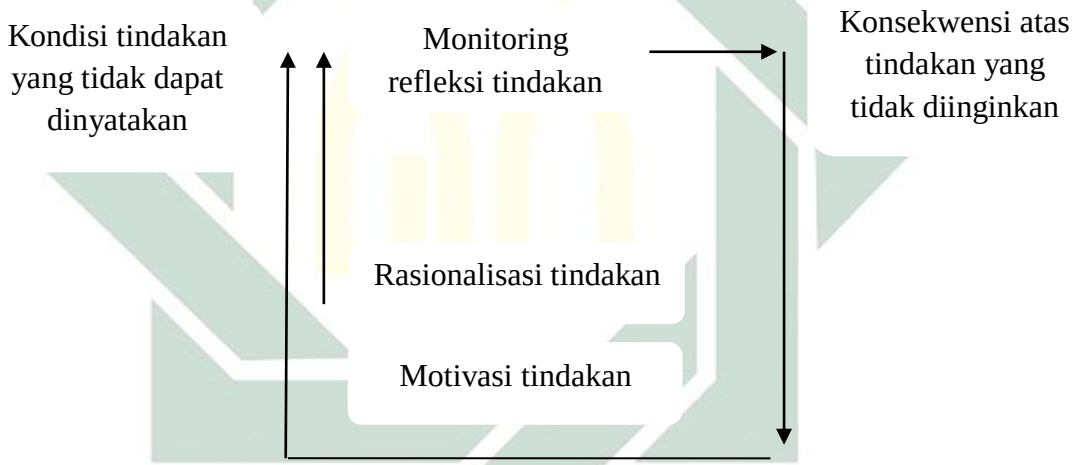

Gambar tentang model stratifikasi agen atau aktor di atas menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dalam monitoring refleksi tindakan tersebut bahwa agen memiliki

[226] Bentuk dari kesadaran praktis misalnya ketika pengurus Muslimat NU mengadakan rapat rutinan setiap bulan, maka seluruh anggota pengurus menggunakan seragam kebesaran secara bersama-sama meskipun tanpa ada instruksi sebelumnya.

[227] Berbeda dari dua bentuk kesadaran sebelumnya, kesadaran diskursif ini lebih menempatkan aktitivas dengan pertimbangan dan alasan-alasan yang rasional. Contohnya: apa yang menjadi alasan anggota pengurus Muslimat NU berkenan hadir dalam sebuah rapat bulanan? dan seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciri tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini agen tidak hanya bersifat individu, melainkan juga agen lainnya. Artinya, seorang agen tidak hanya melakukan menitor terhadap aktivitas yang dilakukan orang lain, namun juga berusaha untuk mengamati dan memahami asapek-aspek lainnya, misalnya aspek sosial, aspek lembaga, dan sebagainya.

Unsur selanjutnya adalah rasionalisasi tindakan. Dalam rasionalisasi tindakan ini menunjukkan bahwa perilaku agen atau aktor disadarkan pada aspek rasionalitas bukan pada alasan. Aktor memiliki pertimbangan dan pemahamannya sendiri dalam menentukan perilakunya. Ia juga akan menjelaskan mengenai konsekwensi perilaku aau tindakan yang telah dilakukannya, apabila diperlukan.

Dengan mengacu pada gambar di atas maka dapat dibedakan antara monitoring refleksi, rasionalisasi tindakan dengan motivasinya. Jika beberapa alasan mengacu pada dasar-dasar tindakan yang dilakukan oleh agen atau aktor, motif mengarah pada keinginan-keinginan yang mengarahkannya. Sederhananya, motivasi lebih mengacu pada potensi tindakan bukan pada model implementasi tindakan agen secara terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga mayoritas perilaku seorang agen tidak dimotivasi secara langsung.

Kedua, **Struktur.** Dalam struktur ini dibagi menjadi dua bagian yaitu aturan dan sumber daya. Menurut Sewell, struktur merupakan sesuatu yang sangat penting namun sulit untuk dipahami.[228] Sebab di dalamnya dapat memunculkan resiko sehingga melahirkan kesalahan interpretasi. Misalnya,

[228] William H. Sewell, A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation, *American Journal of Sociology*, Vol. 98, No. 1 (Jul., 1992), pp. 1-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan dimaknai sebagai sesuatu yang berhubungan dengan permainan, aturan sering diwujudkan yang tunggal, seolah-olah dapat dikaitkan dengan perilaku tertentu, dan lain sebagainya.

Muslimat NU adalah agen yang kuat berdasarkan pada sumber daya yang alokatif dan otoritatif. Namun, kekuatan mereka dapat ditingkatkan dan dihambat oleh norma-norma perilaku di bawah institusi atau organisasi. Struktur terjadi kepada agen yang mengacu pada berbagai aturan dan sumber daya, sehingga ketika seorang agen melakukan suatu tindakan, mereka juga berproduksi atau mengubah prinsip-prinsip struktural yang terorganisir. Intinya, bahwa teori strukturasi ini adalah teori yang mengakui kontinuitas struktural sembari membiarkan agen untuk melakukan inovasi dan perubahan.[229]

Aktor Muslimat NU mungkin individu, namun identitas mereka pada dasarnya sosial. Mereka adalah anggota pengurus Muslimat NU, aktor elite Muslimat NU yang turut serta dalam politik elektoral sebagai partisipan aktif. Aktor dalam hal ini sebagai individu (tergolong level mikro) tetap bertautan dengan struktur (tergolong makro) yang menekankan karakteristik sosiologis dan psikologis dari aktor individu. Oleh sebab itu Giddens berpendapat bahwa *'It is quite essential to see that this is only a methodological bracketing: these are not two sides of a dualism, they express a duality, the duality of structure.'*[230] (sangat penting untuk dilihat, dipahami bahwa hal ini tidak hanya bersifat 'tanda kurung' metodologis semata, bukan sisi dualisme,

[229] Richard Whittington, *Giddens, Structuration Theory and Strategy as Practice*., 149-150.
[230] Anthony Giddens, *Central Problems of Social Theory*, (London: Macmillan, 1979), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mengekpresisikan sebagai dualitas struktur). Bentuk interaksi dalam teori struturasi sebagai berikut:[231]

Interaksi dalam Teori Strukturasi

Gambar 7

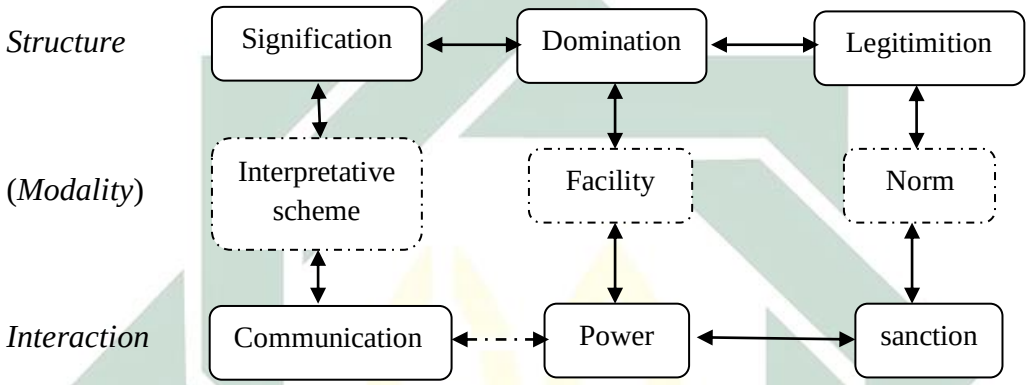

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Giddens bahwa tiga bentuk dalam unsur teori strukturasi di atas merupakan bentuk dari sumberdaya yang difokuskan pada unsur signifikasi dan legitimasi. Unsur-unsur tersebut merupaka sistem sosial yang terstruktur yang ditimbulkan dan direproduksi oleh agen-agen yang mempunyai kemampuan dalam proses interaksi. Ketiga unsur tersebut dalam praktik sosial dapat dilihat misalnya dalam penyebutan tokoh elite pada pimpinan Ormas, contohnya pada Ormas perempuan Muslimat NU.

Penyebutan elite pimpinan Ormas dengan sendirinya menempatkan pada posisi mendominasi pihak lain. Secara bersamaan, sebutan elite pimpinan Ormas memiliki legitimasi yang diberikan oleh doktrin organisasi

[231] Giddens, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberikan pernyataan-pernyataan kepada pada anggota pengurus baik di tingkat cabang, anak cabang, bahkan pada tingkat ranting sekalipun. Begitu pula dengan aturan yang ada dalam peraturan organisasi.

Seseorang yang menyebut pimpinan organisasi dengan sebutan tokoh elite organisasi adalah struktur signifikansi yang berkaitan dengan otoritas yang menjadi struktur dominasi, sebab bersamaan dengan legitimasi itulah tokoh elite organisasi tersebut menjadi sumber rujukan bagi seluruh jama'ah dalam berbagai tindakan sehingga para jama'ah tersebut patuh dan terikat pada tokoh elite Ormas tersebut.[232]

Dari sinilah seorang agen atau aktor dapat mewujudkan tindakannya bukan hanya karena terdapat motivasi atau keinginan dalam dirinya sendiri, melainkan juga karena ia mengadaptasikan struktur sekaligus struktur memberinya keberdayaan yang memungkinkan tindakan aktor untuk direalisasikan. Dalam posisi inilah Giddens menempatkan kekuasaan bukan sebagai suatu totalitas, namun suatu dominasi melalui mobilisasi sumberdaya struktur dominasi yang dimiliki oleh para agen atau aktor.

Dengan demikian, Giddens menguraikan konflik besar antara struktur dan agensi, antara subyektifisme dan objektifisme, antara voluntarisme dan determinisme. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Kunci dalam teori strukturasi terletak pada beberapa unsur, di antaranya praktis sosial, sistem

[232] Ketiga unsur di atas yaitu signifikansi, dominasi dan legitimasi dapat diilustrasikan dalam praktik sosial yang lebih mudah. Misalnya. Sebutan kyai (struktur signifikansi) menyebabkan posisi kyai dapat memberikan fatwa) bagi para santri-santrinya (struktur dominasi). Apabila terdapat santri yang melanggar fatwa tersebut, maka kyai memiliki wewenang untuk memperingatkan santri tersebut (struktur legitimasi) oleh aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, agensi, struktur, aturan, sumber daya, dualitas, strukturasi, lembaga dan analisis kelembagaan dan analisis perilaku yang bersifat strategis.[233] Untuk tersebut hanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

[233] Richard Whittington, *Giddens, Structuration Theory and Strategy as Practice*. https://www.researchgate.net/publication/285180282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MUSLIMAT NU DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL TRENGGALEK

E. Sejarah dan Rekam Jejak Muslimat NU

Untuk mengetahui dan memahami sejarah Muslimat NU, maka terlebih dahulu akan digambarkan sekilas tentang sejarah Nahdlatul Ulama secara umum. Mengapa demikian? Sebab organisasi Muslimat NU merupakan salah satu Badan Otonom (Banom) yang berada di bawah bendera organisasi masyarakat terbesar ini. Oleh karenanya, memahami perjalanan sejarah organisasi masyarakat Muslimat NU tentu tidak boleh dilepaskan dari rekam jejak sejarah Nahdlatul Ulama'. Berikut peneliti gambarkan sejarah Nahdlatul Ulama (yang seterusnya disingkat NU) secara singkat.

NU merupakan salah satu Ormas terbesar di Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M, tepatnya tanggal 16 Rajab 1344 H. Berdirinya Ormas ini dipelopori oleh sejumlah tokoh ulama tradisional (ulama pesantren).[234] Organisasi NU ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama sepaham lainnya, K.H. Wahab Chasbullah. NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Greg Fealy[235] menyatakan dalam bukunya

[234] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, (Jakarta:Erlangga, 1992), 1.

[235] Greg Fealy juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu itulah NU paling rajin melibatkan diri dalam dunia politik untuk mencapai tujuan dalam bidang-bidang tersebut. NU disebut memiliki peran yang begitu menyolok serta terlibat secara langsung dalam percaturan politik nasional. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS: 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjudul *Ijtihad Politik Ulama*, bahwa NU giat-giatnya merambah ke bidang politik pada kurun waktu 1952-1967.

Menurut beberapa sumber, pembentukan NU ini muncul sebagai reaksi definsif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis. Bruinessen mengatakan bahwa Ormas NU hadir sebagai upaya menyelamatkan dan mempertahankan tradisi keagamaan. Namun di lain sisi, upaya yang dibangun adalah menandingi dari pada menolak gagasan-gagasan dan praktek-praktek yang lebih dahulu diperkenalkan oleh kalangan reformis.[236]

Selain itu, ada juga Mitsuo Nakamura yang berpandangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bruinessen. Ia menyatakan bahwa organisasi NU merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia yang memiliki gerakan paling dinamis dan universal. Kehadiran NU dianggap sebagai bentuk reaksi kaum konservatif terhadap bergejolaknya gerakan kaum reformis Islam. Mitsuo beralibi bahwa organisasi NU (kaum konservatif tradisionalis) mempunyai tradisi atau kultur keagamaan yang kontas dengan kaum reformis, dalam hal ini organisasi Muhammadiyah.[237]

Tahun 1926 yang menandai kelahiran Ormas NU memiliki makna yang begitu penting bagi perjuangan-perjuangan nasional. Sebab tahun-tahun

---

[236] Adapun kelompok reformis tersebut adalah Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Muhammadiyah dibentuk di Yogyakarta, tahun 1912. Pada awal tahun 1920 Muhammadiyah mulai melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah di pelosok Indonesia. Muhammadiyah juga sangat menekankan aktifitasnya pada bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dan fasilitas umum, misalnya rumah sakit dan berbagai panti asuhan. Sedangkan Sarekat Islam (SI) didirikan pada tahun yang sama, 1912. Tujuan SI adalah untuk membela kepentingan-kepentingan kelas pedagang Muslim dalam persaingan dagang dengan kalangan Cina. Selengkapnya lihat Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 17.

[237] Mitsuo Nakamura, 'Nahdlatul Ulama', in John L.Esposito (eds), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World,* Vol. III, New York: Oxford University Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan tahun yang menunjukkan berbagai peristiwa perjuangan nasional. Mulai dari tumbangnya Partai Komunis Indonesia oleh Bangsa Belanda, didiriknnya Partai Nasional Indonesia tahun 1927, yang dipimpin oleh Soekarno, disusul kemudian Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Inilah peristiwa-peristiwa nyata dari sebuah pemikiran yang mampu menumbuhkan kesadaran berbagsa dan bernegara tanpa adanya sekat. Inilah salah satu bentuk kesadaran berbangsa yang menjadi pendorong kelahiran Ormas NU.[238]

Secara etimologi, NU memiliki makna kebangkitan para ulama. Namun makna ini memiliki interpretasi yang dalam serta jaringan interaksi sosial yang luas, sehingga NU menjadi salah satu gerakan yang mampu menerobos di seluruh elemen masyarakat. Jaringan sampai pada *grassroot* inilah yang merupakan salah satu kekuatan dan kebesaran NU sehingga mampu menjadi kekuatan raksasa Islam di Indonesia.[239]

Kekuatan raksasa inilah yang kemudian melahirkan hubungan komunikasi politik NU. Komunikasi politik diperlukan dalam rangka merumuskan posisi organisasi di tengah derasnya perubahan politik yang terjadi dalam sejarah kontemporer di Indonesia. NU yang merupakan representasi Islam tradisional di Indonesia.[240] Dengan menggunakan klaim politis sebagai Ormas Islam terbanyak dan terbesar di Indonesia, NU baik

---

[238] Mujamil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisonalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 35.

[239] A. Muchid Muzadi menyatakan bahwa NU memiliki dua wajah. Wajah jam'iyah dan wajah jama'ah. Wajah jam'iyah yaitu NU sebagai organisasi formal yang bersifat struktural. Sedangkan wajah jama'ah adalah sebuah kelompok ideologis yang bersifat kultural). dikutip oleh Mujamil Qomar dalam A. Muchid Muzadi, 'NU Kini Lebih Jama'ah daripada Jam'iyyah', *Aula*, no. 11, November 1997, 65-66.

[240] Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 33-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui elite politik maupun (secara personal maupun kolektif) sering memunculkan pesan-pesan politik yang menarik perhatian banyak kalangan.[241]

Sebagai organisasi kultur, NU adalah salah satu Ormas yang memiliki daya tarik serta diakui secara legal oleh negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Syarif Hidayatullah dalam artikel yang bertajuk *'The consolidation of The Islamic Tradisionalism: A Case Study of The Nahdlatul Ulama'*, bahwa organisasi NU memiliki relasi yang harmonis antara agama dan negara, lebih spesifik mengenai pemikiran keislaman dan pemikiran ke-Indonesia-an.[242]

Untuk mengetahui dan memahami secara sederhana bentuk komunikasi politik NU dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur Komunikasi Politik NU

Gambar 8

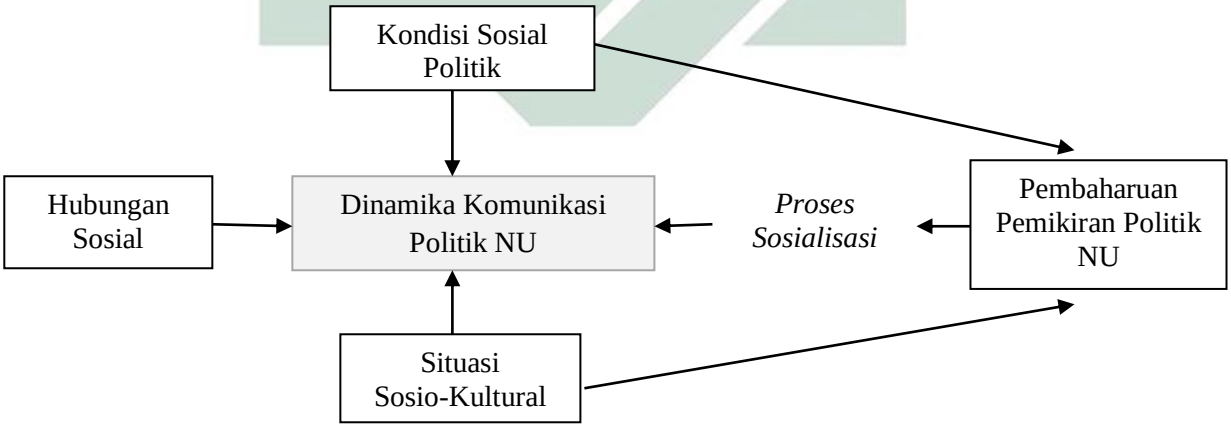

[241] Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama': Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 173.
[242] Syarif Hidayatullah, 'The Consolidation of The Islamic Tradisionalism: A Case Study of The Nahdlatul Ulama', dalam *Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future*, 935.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan kiprah organisasi NU, maka peneliti akan memaparkan bagaimana sejarah dan rekam jejak Muslimat NU Trenggalek berkaitan dengan perannya sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Oleh sebab itu untuk melengkapi data terkait hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian berupa wawancara dan beberapa literatur yang relevan.

1. Sejarah Berdirinya Muslimat NU Secara Singkat

Muslimat NU merupakan organisasi perempuan pertama yang dibentuk oleh perempuan NU. Pada awalnya, Muslimat NU memiliki nama Nahdlaoel Oelama Moeslimat atau disingkat NOM. NOM adalah sebuah gerakan atau kebangkitan perempuan NU. Salah satu faktor yang melatarbelakangi berdirinya NOM adalah situasi dan kondisi sosial yang ada pada waktu itu. Di samping itu, NOM sebagai wadah bagi peremuan NU untuk turut menyuarakan pendapat dan gagasan.[243]

Perjalanan panjang yang dilalui oleh NOM itulah menjadi catatan sejarah ketika diselenggarakannya kongres NU ke-13 tahun 1938 di Menes. Inilah moment paling bersejarah dan memilik makna penting bagi terbentuknya organisasi Muslimat NU. Meskipun keberadaan Muslimat NU saat itu masih belum begitu aktif di dalam organisasi NU.[244]

[243] Lailatus Syukriyah, 'Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955)', dalam *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 4, No. 3, Oktober 2016, 609.
[244]Hasanul Rizqa, "Sekilas Sejarah Lahirnya Muslimat NU", https://republika.co.id/berita/pnmwjx458/sekilas-sejarah-lahirnya-muslimat-nu; diakses tanggal 17 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut tentu memunculkan polemik di organisasi Muslimat NU, sebab organisasi perempuan tersebut dianggap 'belum waktunya' aktif di organisasi. Anggapan tersebut berlangsung terus menerus sehingga terjadi polarisasi yang hangat tentang seberapa penting perempuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada organisasi.

Namun, secara *de yure* status keorganisasian Muslimat NU telah diakui secara resmi melalui Kongres di Menes tersebut. Dalam perhelatan kongres tersebut, Muslimat NU berkesempatan untuk memberikan gagasan, dan sumbangsih pemikiran tentang perlu dan pentingnya perempuan NU memiliki hak yang sama sebagaimana yang diperoleh kaum laki-laki. Meski secara struktur organisasi masih di'*pending*' keberadaannya. Sampai pada kongres NU ke-15 tahun 1940 yang diselenggarakan di Surabaya.[245]

Pembahasan secara sengit terjadi dalam kongres ketika terdapat usulan bahwa Muslimat NU akan menjadi organisasi otonom (menjadi bagian tersendiri dan memiliki struktur organisasi secara sendiri). Suasana kongres menjadi cukup tegang, memunculkan pro dan kontra atas usulan tersebut. Salah satu alternatifnya adalah menyerahkan keputusan tersebut kepada Pengurus Besar.

[245] Sebelum diadakan Kongres ke-15, NOM yang kemudian menyelenggarakan rapat umum NOM pada Kongres NU ke-14 tahun 1939 di Magelang. Hadir kurang lebih enam perempuan NU dari perwakilan daerah-daerah untukmenyampaikan gagasan dan pikirannya. Mereka adalah Ny. Saodah, Ny. Gan Antang (Bandung), Ny. Badriyah (Wonosobo), Ny. Sulimah (Banyumas), Ny. Istikomah (Parakan), Ny. Alfiah (Cilacap). Hampir dari mereka berpendapat bahwa perempuan-perempuan NU membutuhkan perkumpulan tersendiri untuk mendukung tugas penting para perempuan. Sebab mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menderdasakan bangsa. Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, tt), 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum kongres ditutup, usulan tersebut belum menghasilkan kata sepakat. KH. M. Dahlan merupakan katalisator merangkap mediator antara organisasi NOM dengan Pengurus Besar. Beberapa strategi dan upaya akhirnya usulan tersebut berhasil memperoleh persetujuan dari Pengurus Besar yakni Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Chasbullah melalui secarik kertas sebagai bukti atau tanda persetujuan tokoh besar NU tersebut.

Selanjutnya, Dahlan dan A. Aziz Dijar adalah tokoh utama dibalik penyusunan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) organisasi Muslimat NU yang secara khusus menjadi cikal bakal dalam peraturan organisasi tersebut. AD/ART ini adalah segala sesuatu yang mencakup berbagai hal, seperti sejarah lahirnya organisasi, visi misi organisasi, tujuan, fungsi, hingga struktur organisasi.

Tepat di hari penutupan Kongres NU ke-16 di Purwokerto tahun 1946, pada tanggal 29 Maret 1946 bertepatan tanggal 26 Rabi'ul awal 1365 Hijriyah, organisasi NOM dengan nama baru Nadhdatul Ulama Muslimat (NUM) resmi dibentuk. Pada tanggal itulah ditetapkan sebagai Harlah (hari lahir) NUM. NUM sebagai wadah organisasi perempuan dibawah naungan langsung oleh NU, sebagai wadah perjuangan perempuan NU untuk mengabdi pada agama, nusa dan bangsa. .

Sebagai organisasi baru, NUM berikhtiar untuk memilih dan menentukan calon ketua dalam organisasi ini, maka terpilihlah Chadijah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahlan sebagai ketua (istri dari KH. M. Dahlan).[246] Chadijah Dahlan menjadi ketua selama dua tahun, dari tahun 1946-1948. Durasi waktu yang cukup singkat itu, dimanfaatkan olehnya untuk memperjuangkan martabat para pengikutnya di lingkungan NU. Eksistensi NUM pun mendapat pengakuan di dunia internasional sebagai pelopor gerakan di bidang perempuan.

Kemudian pada Muktamar NU ke-19 di Palembang, pada tanggal 28 Mei 1952. NUM menjadi badan otonom NU dan mengubah nama yang saat ini telah dikenal oleh seluruh masyarakat dengan nama organisasi Muslimat NU.

Muslimat NU yang merupakan organisasi yang memiliki asas Islam serta berideologi ahlus sunnah wal jama'ah.[247] Begitu panjang proses yang dilalui organisasi ini. Hal tersebut tidak lepas dari faktor keadaan sosial, pendidikan, ekonomi dan politik masyarakat pada saat itu. Hingga akhirnya Muslimat NU mampu menunjukkan peran dan sumbangsihnya di wilayah publik untuk memperjuangan hak-hak mereka khususnya hak-hak kaum perempuan.

Sesuai dengan misi organisasi Muslimat NU antara lain: *pertama*, mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang bertaqwa

[246] Nyai Chodijah Dahlan merupakan ketua pertama Nahdatul Ulama Muslimat bersama-sama dengan Nyai Wachid Hasyim. Mereka berdua mendapatkan *support* yang luar biasa dari suaminya. Nyai Chodijah dan Nyai Wachid Hasyim akhirnya menduduki jabatan utama di kepengurusan NUM. Meskipun perdebatan panjang dan alot kerap terjadi di antara tokoh-tokoh NU sendiri. sebab NU merupakan organisasi yang memiliki ciri khas tradisi ketradisionalnya dan sangat patriarkhis. Lies Marcoes Natsir, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru*, (Cirebon: Institute Studi Islam Fahmina, 2012), 22.

[247] Fathurin Zen, *NU Politik Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah, berkualitas dan mandiri. *Kedua*, mewujudkan masyarakat khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai pribadi. *Ketiga*, melaksanakan tujuan jam'iyah NU untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan bermartabat. *Keempat*, membumikan Islam Rahmatan lil Alamin sebagai gerakan moral dakwah Muslimat NU.[248]

2. Muslimat NU Trenggalek: Rekam Jejak dan Perkembangannya Dari Masa ke Masa

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal terkait sejarah berdirinya Muslimat NU, dari mulai memiliki nama Nahdlatoel Olama Muslimat (NOM), kemudian berubah menjadi Nahdlatul Ulama Muslimat (NUM) hingga akhirnya menetapkan nama menjadi Muslimat NU yang familier dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya warga Muslimat NU.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti mencoba untuk memaparkan rekam jejak Muslimat NU Trenggalek dalam kurun waktu antara 1990-2020. Dalam kurun kurang lebih 30 tahun itu, peneliti berusaha untuk menggali informasi yang berkenaan dengan peran serta Muslimat NU Trenggalek dalam masyarakat.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah informan yang masih aktif hingga saat ini dan beberapa dokumen organisasi misalnya, SK kepengurusan, laporan kegiatan, laporan

[248] Pimpinan Pusat Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslimat NU, 23-27 Nopember 2016, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban masa kepengurusan, dan dokumen lainnya yang masih relevan.

Sebelum Muslimat NU Trenggalek berdiri, sebenarnya masyarakat telah memulainya dengan membentuk *group* atau perkumpulan jama'ah yasin tahlil di kampung-kampung. Perkumpulan tersebut terdiri dari para jama'ah perempuan, baik ibu-ibu maupun pemudi-pemudi. Kegiatan diadakan setiap satu minggu sekali dengan acara yang bervariatif. Kegiatan pun dijadwal secara bergilir dari rumah ke rumah. Dalam satu bulan ada empat kegiatan yang berbeda setiap minggunya. Seperti pengajian, diba'an, tadarusan, yasinan dan lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus Muslimat NU Trenggalek periode 1985-2010, berikut ini:

> Saya ikut Muslimat NU Trenggalek itu mulai tahun 1979. Waktu itu pokoknya ikut-ikutan bersama-sama ibu-ibu yang lain. Seingat saya juga, setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan keliling secara bergantian. Ya di Panggul, Bendungan, Dongko. Diadakan juga arisan piring, dan lainnya.[249]

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa ketika Muslimat NU sudah resmi dibentuk pada tahun 1946 di tingkat pusat. Maka secara benjenjang, Muslimat NU di daerah Jawa maupun luar Jawa sangat antusias untuk segera membentuk organisasi Muslimat NU ini. Salah satunya di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Trenggalek.[250]

---

[249] Ibu LMS, Mantan Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek empat periode, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.

[250] Pimpinan Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslmat NU, 23-27 Nopember 2016, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Spirit kebersamaan dan semangat memperjuangkan hak-hak perempuan menjadi satu dari banyak faktor Muslimat NU berhidmat untuk umat. Terlebih bagaimana menunjukkan peran perempuan dalam sektor publik.

Untuk memperlancar kerja organisasi itulah, maka setiap Pimpinan Cabang di tingkat Kabupaten maupun Kota harus didirikan satu cabang, kecuali terhadap hal-hal atau alasan yang dapat dibenarkan dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.[251]

Sebagai acuan awal atau dasar untuk menentukan kapan Muslimat NU Trenggalek dibentuk, maka peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa masa, yaitu masa awal kepengurusan, masa pertengahan kepengurusan, dan masa sekarang kepengurusan. Berikut ini pengelompokkannya.

a. Masa Awal Kepengurusan Muslimat NU Trenggalek: Periode 1980-1995

Pada masa awal kepengurusan Muslimat NU Trenggalek, tidak terlalu banyak informasi yang peneliti dapatkan. Sebab, ada beberapa hambatan yang peneliti temui di lapangan. Misalnya, *pertama,* tentang keberadaan SK kepengurusan dari periode awal

[251] Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU (AD/ART), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai beberapa tahun. *Kedua,* keberadaan pengurus Muslimat NU Trenggalek yang sebagian besar telah tidak produktif lagi[252]

Terdapat beberapa informasi yang peneliti peroleh terkait dengan struktur kepengurusan pada periode sekitaran 1980-an. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan berikut ini:

> Waktu awal-awal Muslimat NU Trenggalek, waktu itu ketuanya adalah Ibu Nyai Hj. Maslihah Muasyir. Bu Maslihah menjabat sebagai ketua Muslimat NU sangat lama, kira-kira tiga periode. Bapak Ketua NUnya kalau tidak salah ingat adalah Bapak Mahalli. Acara kemana-mana saya selalu diajak oleh beliau. Beliau sudah lama *sedo.* Waktu masih muda, beliau sangat semangat dan giat untuk mengikuti rutinan, baik di tingkat ranting, tingkat ancab, maupun di tingkat cabang.[253]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sementara bahwa Bu Hj. Maslihah Muasyir menjabat selama 3 periode. Di dalam organisasi Muslimat NU, 1 periode selama 5 tahun masa bakti. Sehingga Bu Hj. Maslihah Muasyir menjabat selama kurang lebih 15 tahun. Artinya beliau berkidmat di Muslimat NU dari tahun 1980-1995.

Setiap periode, seluruh pengurus dan jajarannya sampai pada pengurus ranting bermusyawarah atau biasa disebut konfercab. Konfercab ini adalah wadah untuk pergantian pengurus di tubuh

[252] Adapun yang peneliti maksudkan tidak produktif lagi adalah beberapa *key informan* sudah tidak mampu lagi untuk diajak komunikasi, sebagian lagi sudah usia lanjut dan tidak bisa lagi mengingat dengan baik fakta sejarah yang telah dahulu terjadi. Dan beberapa lagi sudah menutup usia.
[253] Ibu LMS, Mantan Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek empat periode, *Wawancara,* Trenggalek, 19 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslimat NU.[254] Pemilihan ketua pada waktu itu didasarkan pada asas musyawarah mufakat. Apabila sebagian besar pengurus telah menyetujui dan sepakat, maka secara otomatis ketua terpilih telah sah menjadi ketua baru. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang informan:

> Pemilihan ketua jaman dulu pokoknya menggunakan asas musyawarah. Tidak ada bakal calon seperti tahun-tahun sekarang. *Lha wong* menjadi ketua sudah mau berangkat saja *Alhamdulillah.* Sebab, *ngurusi umat niku ngih* butuh pengorbanan, perjuangan, waktu, tenaga, kadang-kadang ya biaya juga. Waktu itu dalam hati saya hanya *kepingin* belajar beroganisasi, kumpul banyak teman. Kalau banyak teman *khan* banyak pengalaman.[255]

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 'langgeng'nya masa kepengurusan pada masa awal-awal, diantaranya, *pertama*, masyarakat belom mau dan belum berani untuk memimpin sebuah organisasi. Kedua, merasa takut berbicara di depan forum. Ketiga, masih sibuk dengan urusan anak dan suami. Keempat, pengalaman organisaasi masih minim, dan lain sebagainya.[256]

Meskipun belum diketahui secara pasti tahun berapa Muslimat NU Trenggalek berdiri, namun menurut pengakuan dari salah satu pengurus bahwa sebelum tahun 1980-an, Muslimat NU sudah eksis dengan nama jam'iyah masing-masing. Terbentunya Muslimat NU di Trenggalek dimulai dari sebuah perbincangan

[254] AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslimat NU, 23-27 Nopember 2016, 35.
[255] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 Juni 2019.
[256] Peneliti menyimpulkan dari kegiatan wawancana dengan Ibu LMS, 19 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana para kaum perempuan khsususnya ibu-ibu memiliki *ghirah* untuk lebih memberdayakan masyarakat Trenggalek agar lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan.

b. Masa Pertengahan Kepengurusan (antara tahun 1995-2005)

Berbeda dengan masa-masa awal kepengurusan. Masa pertengahan ini merupakan periode yang terbilang cukup dinamis. Disebut masa pertengahan agar mempermudah klasifikasi dalam kepengurusan. Adapun masa kepengurusan ini berjalan antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Satu periode masa kepengurusan adalah selama lima tahun.

Adapun ketua umum Muslimat NU Trenggalek Periode 1995-2000 adalah Ibu Nyai Aisyah Suyoto. Beliau merupakan istri dari Bapak Suyoto, seorang anggota DPRD Kab.Trenggalek selama 1 periode. Kemudian periode berikutnya terpilih menjadi anggota DPR RI selama 1 periode.

Selanjutnya pada periode 2000-2005, ketua Muslimat NU Trenggalek berikutnya yaitu Ibu Muslihah. Pada kepengurusan Ibu Muslihah ini, kegiatan Muslimat NU cenderung sedikit stagnan. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini:

> Pada waktu jamannya Bu Mus itu, kegiatan Muslimat NU tidak seaktif jaman sebelumnya. Kalau pengurus-pengurus dulu, kegiatan diadakan berpindah-pindah. Dari satu tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ke tempat yang lain. Namun, ketika ketuanya ganti, kegiatan lebih sering diadakan di kantor NU.[257]

Ketika hal tersebut peneliti dalami, ada beberapa alasan mengapa kepengurusan periode 2000-2005 tidak berjalan sebagaimana yang telah diagendakan sebelumnya. Ibu Muslihah ternyata adalah seorang PNS yang kesehariannya dihabiskan di lembaga tertentu. Selain itu juga, beberapa pengurus juga sedang berada dalam masa-masa transisi sehingga komunikasi yang telah dibangun dan dijalin harus diawali kembali.

> Bu Muslihah itu khan seorang PNS, jadi hari-harinya dihabiskan di sekolahan. Sebab, beliaunya adalah seorang Guru. Jadi hampir setiap hari sudah sibuk mengurusi tugasnya sendiri.[258]

Selain itu, Ibu Muslihah yang berdomisili di Kecamatan Pogalan lebih banyak aktifitas di rumah. Beliau memiliki lembaga pendidika non formal TPQ. Sehingga untuk mengurus organisasi tidak memiliki banyak waktu.

> Saya itu baru tahu, kalau ternyata Bu Muslihah adalah seorang ketua Muslimat NU Trenggalek. Ya Allaah...beliau adalah Ibu Nyai saya di desa saya. Namun, saya baru tahu dan terkejut ketika saya awal-awal mengikuti kegiatan Muslimat NU di kantor NU. Beliau duduk di baris terdepan. Dari situlah saya jadi tahu, ternyata Ibu Nyai saya adalah seorang ketua Muslimat NU.[259]

---

[257] Ibu LMS, Mantan Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek empat periode, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.
[258] Ibu LMS, Mantan Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek empat periode, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.
[259] Ibu MRT, S. Pd Sekretaris PAC Muslimat NU Pogalan periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski demikian, di bawah kepemimpinan Ibu Muslihah, Muslimat NU memiliki terobosan-terobosan baru. Misalnya membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait secara intens, dan beberapa program pemerintah bisa di 'garap' oleh Muslimat NU.

c. Masa Sekarang Kepengurusan (tahun 2005-2020)

Setelah 2 periode dipimpin oleh kader Muslimat NU Trenggalek yang berbeda, maka untuk periode 2005 sampai dengan 2020 dimotori oleh kader yang sama. Ibu Nyai Zumrotun Nasihah adalah ketua umum Muslimat NU Trenggalek secara berturut-turut. Selama 3 periode tersebut bermunculan kader-kader *fresh* 'lulusan' Fatayat NU Trenggalek yang sudah habis masa baktinya di organisasi tersebut. Inilah menjadi salah satu *point* penting bagi perkembangan Muslimat NU Trenggalek.

Ibu Nyai Zumrotun Nasihah (selanjutnya ditulis Ibu Nyai Nas) merupakan pengasuh Pondok Pesantren Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek. Istri dari Bapak KH. Kholil Madjid, MA ini merupakan ketua yang terkenal dengan spirit keorganisasian dan menjadi panutan, baik bagi para anggota Pengurus Cabang, Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan Ranting maupun jama'ah di desa-desa.

Meskipun sudah tidak muda lagi, namun semangat dan perjuangannya melampaui ibu-ibu muda. Bahkan hampir setiap ada acara di tingkat Anak Cabang beliau berusaha untuk *rawuh.* Sebab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ketua beliau harus memberikan tauladan yang baik bagi seluruh pengurus, baik di tingkat cabang sampai pada *grassroots.*

Sebagaimana yang Ibu Nyai ZN paparkan beberapa waktu yang lalu, berikut kutipannya:

> ....selagi saya masih diberi Allah kesehatan, kelapangan waktu dan tenaga. Sebisa mungkin saya harus hadir dalam kegiatan-kegiatan Muslimat NU. Saya membayangkan, bagaimana Muslimat NU Anak Cabang berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan acara. Mereka itu senang dan bangga kalau dari pimpinan cabang ada yang hadir. Inilah yang membuat saya semangat dan tidak mengenal lelah.[260]

Seperti diketahui bahwa Trenggalek merupakan wilayah yang mayoritas dikelilingi oleh pegunungan. Dari 14 kecamatan di wilayah ini hampir 50% dataran tinggi.[261] Salah satu contoh di kecamatan Munjungan. Kecamatan ini terkenal dengan medannya yang sulit. Jalan berlika-liku, tikungan tajam dan ekstrem. Hal ini membuat orang yang pertama kali berkunjung ke daerah tersebut harap-harap cemas.

Namun, Ibu Nyai ZN tidak patah semangat untuk melakukan turba (turun ke bawah) ke daerah tersebut. Bahkan ketua PAC Munjungan pernah berkata demikian:

> Orang yang tidak punya *ghirah* perjuangan yang kuat dan besar tidak mungkin mau berkunjung ke daerah ini. Perjalanannya dari kota ke titik lokasi saja hampir 2 jam. Itupun kalau sopirnya profesional. Makanya saya salut dengan Ibu Nyai Mobin (sebutan Ibu Nyai ZN di PAC),

[260] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara,* Trenggalek, 09 Juni 2019.
[261] Dokumen BPS Kabupaten Trenggalek tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah *sepuh* tapi masih semangat mengabdikan hidupnya untuk orang banyak.[262]

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh kepengurusan Ibu Nyai ZN selama hampir 15 tahun ini adalah setiap *selapan* sekali (setiap Ahad Kliwon) dilakukan anjang sana pengurus PAC se-kabupaten Trenggalek.[263] Sebab semua yang menjadi ketua PAC direkrut menjadi pengurus cabang Muslimat NU Trenggalek. Hal ini untuk memudahkan koordinasi di tiap-tiap Pimpinan Anak Cabang.

Selain kegiatan rutinan oleh pengurus cabang, setiap pimpinan anak cabang juga memiliki kegiatan rutinan. Setiap anak cabang Muslimat NU memiliki jadwal yang berbeda-beda. Hal ini menjadi wadah silaturrahim dan komunikasi di tingkat bawah. Tujuannya agar silaturrahim yang sudah berjalan beberapa puluh tahun dapat terjaga. Di samping itu juga untuk mengawal dan membantu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Agenda kegiatan yang dicetuskan oleh pimpinan cabang Muslimat NU Trenggalek dibawah kepemimpinan Ibu Nyai ZN juga banyak inovasi dan terobosan. Misalnya, untuk menumbuhkan semangat keorganisasian, PC Muslimat NU Trenggalek mengadakan Award bagi PAC-PAC di tingkat kecamatan.

Adapun kriteria penilaian dilihat dari seberapa kreatif, aktif, dan inovatif dalam giat organisasi. Sehingga hal ini memacu seluruh

[262] Ibu Hj. DRJ, Ketua PAC Muslimat NU Munjungan, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.
[263] Hal ini dapat dilihat dari program kerja, daftar hadir dan notulensi yang telah terarsip. Hampir 80% pengurus cabang Muslimat NU Trenggalek hadir dalam kegiatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAC untuk terus berinovasi menghidupkan dan melestarikan ruh organisasi sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

> Adapun tujuan diadakan Award setiap tahun adalah untuk memacu semangat para pengurus Muslimat NU di tingkat anak cabang agar supaya mereka lebih kreatif, inovatif dan produktif. Sehingga kegiatan Muslimat NU tidak hanya diisi dengan rutinan saja, akan tetapi mampu bekerjasama dengan para *stakeholder* yang ada di tingkat kecamatan masing-masing. [264]

Semakin aktif Muslimat NU membangun komunikasi dengan para *stakeholder*, maka semakin besar pula peluang Muslimat NU untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam merealisasikan program kerja organisasi. Sebab program kerja organisasi Muslimat NU mencakup semua aspek kehidupan. Misalnya aspek pendidikan, dakwah, kesehatan, ekomoni, bahkan politik.

3. Peran Muslimat NU Trenggalek dalam berbagai Bidang

Muslimat NU merupakan organisasi perempuan di bawah bendera NU. Struktur organisasi ini dimulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Ketua Umum Muslimat NU yang juga sebagai Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M. Si merupakan tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat terutama oleh kaum Muslimat di seluruh Indonesia termasuk kaum muslimat Trenggalek.

[264] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslimat NU Trenggalek dari periode ke periode berikutnya terus berupaya untuk mewujudkan harapan, cita-cita masyarakat melalui program-program yang telah disusun melalui rapat kerja pengurus. Untuk mempermudah memetakan setiap program yang direncanakan, maka perlu kiranya memahami struktur kepengurusan Muslimat NU Trenggalek secara singkat.

Struktur kepengurusan Muslimat NU Trenggalek mengacu pada AD ART Muslimat NU yaitu terdiri dari Ketua (Ketua I, II dan III), Sekretaris (Sekretaris I, II dan III), Bendahara (Bendahara I dan II). Selanjutnya bidang-bidang terdiri atas, bidang organisasi, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang sosial dan lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang dakwah dan pengembangan masyarakat, bidang kesehatan, bidang hukum, advokasi dan litbang.[265]

Setiap cabang memiliki kebutuhannya masing-masing terhadap bidang-bidang yang akan dipakai. Sebab, secara geografis dan sosiologis setiap daerah memiliki karakter yang berbeda, sehingga *plot* bidang-bidang tersebut bersifat lentur, sesuai dengan kebutuhan.

a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Muslimat NU Trenggalek telah berkontribusi di bidang pendidikan dan pelatihan sejak awal periode 1980-an. Untuk jenjang pendidikan pada tingkat paling dasar yakni, Taman Kanak-Kanak. Salah satu pengurus Muslimat NU Trenggalek mengikuti dilklat yang

[265] AD ART Muslimat NU hasil kongres ke-XVII, tanggal 23-27 2016, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselenggarakan oleh PW Muslimat NU Jawa Timur. Setiap cabang mengirimkan 1 delegasi pada acara tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh kader senior Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> Saya itu Mbak, mengikuti penataran guru TK antara tahun 1979-1980 (kalau saya tidak salah ingat) akhir tahun 1979-an. Waktu itu tempatnya di Yayasan Khodijah Surabaya, Jemursari. Karena saya diperintah oleh Ibu ketua, ya..saya *manut* saja. Dari penataran itulah makanya sampai sekarang saya menjadi guru TK, meskipun sudah usia hampir 80 tahun, hehe. [266]

Dari penataran awal itulah, Muslimat NU mendidirikan YPMNU (Yayasan Pendidikan Muslimat NU) khususnya di wilayah Trenggalek sekitaran periode 1990-an. Bina Bhakti Wanita merupakan lembaga yang berada di bawah naungan YPMNU yang berkontribusi pada pendidikan tingkat PAUD.

Periode awal PAUD atau TK yang berada di bawah Muslimat NU berjumlah sekitar 39 lembaga.[267] Semua lembaga tersebut tersebar di seluruh wilayah di Trenggalek. Muslimat NU Trenggalek melalui YPMNU bertanggungjawab memberikan pembinaan atas semua lembaga tersebut. Adapun pembinaan dilakukan secara berkala.

Selain itu, Muslimat NU Trenggalek juga telah melakukan beberapa hal terkait bidang pendidikan dan kaderisasi di antaranya

[266] Ibu LMS, Mantan Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek empat periode, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.
[267] Materi Konferensi CabangMuslimat NU Trenggalek periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu, *pertama.* Meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Musimat NU baik dari sisi kompetensi pendidik, menagemen, sarana dan prasarana serta meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. *Kedua,* membangun hubungan kerjasama dengan *stakeholder* (instansi pemerintah maupun swasta) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.[268]

b. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam bidang kesehatan, Muslimat NU Trenggalek telah menjalin kerjasama dengan mitra lembaga yang berada di masing-masing kecamatan. Misalnya, setiap PAC Muslimat NU melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas setempat untuk sosialisasi penyuluhan pencegahan penyakit kanker serviks melalui Tes IVA.[269] Setiap PAC telah melakukan MoU dengan dinas terkait kegiatan tersebut.[270]

Selain itu, Muslimat NU Trenggalek juga melakukan sosialisasi peduli penyakit DBD atau deman berdarah. Mengingat pada tahun 2016 penyakit deman berdarah di wilayah Trenggalek menyebar secara drastis. Kegiatan dilakukan dengan menghadirkan pakar kesehatan yang kompeten di bidangnya, sehingga *output* yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

---

[268] Materi Konferensi CabangMuslimat NU Trenggalek periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2015.

[269] Tes IVA merupakan salah satu cara untuk mendeteksi secara dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim. IVA sendiri merupakan kependekan dari Inspeksi Visual Asam Asetat. Tes IVA ini dianggap mampu mengatasi dan menyelamatkan banyak perempuan karena metodenya yang relatif mudah, sehingga hasilnya dapat diperoleh secara cepat.

[270] Hasil Notulensi PC Muslimat NU Trenggalek pada pertemuan rutin Ahad Kliwon, 31 Januari 2016 di Pondok Pesantren Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang kesejahteraan masyarakat juga menjadi agenda rutin setiap tahun sekali.[271] Meskipun Muslimat NU merupakan organisasi nirlaba yang tidak memiliki sumber dana, akan tetapi mampu untuk berbagi kepada para janda, anak yatim piatu dan para dhuafa setiap tahunnya. Sesuai dengan AD ART yang telah ditentukan bahwa sumber dana organisasi ini diperoleh dari berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.[272]

c. Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Melalui bidang dakwah dan pengembangan masyarakat ini, Muslimat NU konsisten dengan misi yang telah disepakati bersama bahwa Muslimat NU berkomitmen untuk membumikan Islam rahmatan lil alamin sebagai wadah gerakan dakwah moral Muslimat NU.[273]

Terekam dalam notulensi rapat Muslimat NU beberapa program dakwah Muslimat NU yang akan sudah terealisasikan yaitu:

1. Peringatan Hari Santri

Hari santri yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di masjid Istiqlal Jakarta, 21 Oktober 2015[274] merupakan memontum spesial bagi masyarakat Muslim

[271] Salah satu program kerja Muslimat NU Trenggalek bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah minimal mengadakan santunan anak yatim dan para janda. Hal ini tertuang dalam hasil rapat kerja Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020. Dokumen Rapat Kerja dan LPJ periode 2010-2015.
[272] Pimpinan Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslmat NU, 23-27 Nopember 2016, 48.
[273] Pimpinan Pusat Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslmat NU, 23-27 Nopember 2016, 3.
[274] https://nasional.kompas.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia khususnya oleh kalangan santri. Hari santri ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2015. Hal ini menunjukkan bahwa dedikasi para kyai dan santri dalam merebut kemerdekaan di Indonesia mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

Muslimat NU Trenggalek beserta seluruh jajarannya turut serta memperingati hari santri tersebut di tahun berikutnya, tahun 2016.[275] Maka tepat tanggal 22 Oktober 2016, Muslimat NU mengikuti pawai akbar yang dikomandani oleh PCNU Trenggalek. Keikutsertaan Muslimat NU dalam pawai tersebut merupakan wujud syukur sekaligus mengenang perjuangan para pejuang terlebih para kyai. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Muslimat NU berikut ini:

> *Alhamdulillah*, Inilah salah satu cara Muslimat NU Trenggalek untuk memberikan penghormatan kepada para syuhada' kemerdekaan Indonesia. *Wa bil khusus* untuk para ulama, kyai yang telah memberikan semua jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan Indonesia.[276]

Hari Santri Nasional merupakan momentum bersejarah khususnya bagi warga *nahdiyin*, sebab semua perjuangan bahkan pengorbanan para ulama, kyai mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Oleh sebab itu, hampir setiap tahunnya, PCNU

[275] Pada hari Ahad, 02 Oktober 2016 Muslimat NU Trenggalek mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus terutama dari lembaga pendidikan di bawah naungan Muslimat NU. Kegiatan tersebut membahas tentang agenda perdana menyambut hari santri nasional. Notulen rapat Muslimat NU tanggal 02 Oktober 2016 di Pondok Pesantren Sabilul Hidayah Kecamatan Panggul.

[276] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trenggalek beserta badan otonom dan semua lembaga menyelenggarakan peringatan hari santri nasional tersebut.

2. Pembentukan Laskar Anti Narkoba

Upaya untuk membentuk generasi bangsa bebas narkoba dilakukan oleh Muslimat NU. Menjalin kerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Trenggalek, Muslimat NU memiliki tugas moral untuk mengawal anak-anak muda khususnya anak-anak kader Muslimat NU.[277]

Program ini merupakan program Muslimat NU periode 2015-2020. Adapun yang melatarbelakangi dicetuskannya program tersebut rasa prihatin dan rasa iba melihat situasi kondisi anak bangsa yang semakin lama semakin masif menyalahgunakan narkoba. Oleh karenanya, usaha dan upaya Muslimat NU untuk ikut membantu pemerintah dalam mencegah semakin maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja khususnya di wilayah Trenggalek.

3. Diklat Keluarga Sakinah

Kegiatan diklat keluarga sakinah ini merupakan salah satu program unggulan di bidang dakwah. Bekerjasama dengan Kemenag Trenggalek, kegiatan ini memberikan spirit dan motivasi yang besar kepada seluruh kader keluarga Muslimat di wilayah Trenggalek.

[277] Notulen rapat Muslimat NU tanggal 11 Desember 2016 di PAC Watulimo, rumah Ibu Hj. Qomariyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Koordinator bidang dakwah, bahwa ketahanan keluarga dapat dilihat dari sebagaimana besar kemampuan seorang ibu untuk me-*manage* keluarganya sendiri.

> Saya sebagai koordinator bidang dakwah sekaligus penyuluh di Kemenag Trenggalek, merasa memiliki tanggungjawab moral yang besar untuk turut serta dalam membentuk keluarga sakinah. Melalui Muslimat NU ini, kami bersama-sama Kemenag setempat untuk memberikan sosialisasi dan diklat keluarga sakinah sebagai benteng pertahanan keluarga sakinah. *Alhamdulillah*, program ini berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi, setiap 2 minggu sekali setiap Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU mengadakan diklat keluarga sakinah, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya.[278]

Diklat keluarga sakinah ini memiliki tujuan di antaranya: *pertama*, mewujudkan keluarga yang sesuai dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah. *Kedua*, memberikan pemahaman kepada warga nahdiyat tentang pentingnya membentuk keluarga sakinah. *Ketiga*, memberikan motivasi kepada warga nahdiyat untuk bersama-sama menciptakan iklim harmonis yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan Islam.

4. Syiar Syair

Muslimat NU Trenggalek melalui bidang dakwah juga turut berkontribusi menyampaikan ajaran dakwah yang *rahmatan lil alamin*, santun dan tidak menakut-nakuti. Begitu

[278] Ibu Hj. Nadhirotul Ulfa, M. Pd, Koordinator Bidang Dakwah, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar upaya yang dilakukan oleh Muslimat NU dalam membentuk pribadi yang cinta akan ilmu, tidak mudah termakan isue hoax[279] yang sekarang telah menyebar dengan cepat melalui media massa.[280]

Kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Trenggalek dan stasuin TV lokal, MaduTV Tulungagung. Adapun dalam kegiatan ini diikuti oleh PAC Se-kabupaten. Setiap PAC mengirimkan 2 delegasi *majlis ta'lim* sebagai *mustamiin.* Acara tersebut disiarkan secara *live* oleh MaduTV.[281]

d. Bidang Hukum, Advokasi dan Politik

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) PC Muslimat NU Trenggalek periode 2010-2015 bahwa terkait dengan bidang hukum, advokasi dan politik masih kurang maksimal. Sebab bidang advokasi misalnya merupakan garapan baru bagi Pimpinan Cabang Muslimat NU Trenggalek. Namun hal ini akan menjadi PR bagi kepengurusan periode berikutnya.[282]

Meski demikan, dalam bidang politik, Muslimat NU Trenggalek telah melakukan MoU dengan KPU Trenggalek dalam

[279] Republika.Co.Id., Muslimat NU diimbau Tangkal Hoax dan Ujaran Kebencian, Surabaya, Ahad, 10 Maret 2019 pukul 17. 22 WIB.
[280] *Aula*, 08 tahun XLI, Agustus 2019, 97.
[281] Salah satu kegiatan syiar syair ini bertempat di Pendopo Trenggalek dengan mengahadirkan peserta sebanyak 250 jama'ah. Setiap jama'ah memiliki yel-yel masing-masing sebagai pembuka acara tersebut. Adapun yang para jama'ah terdiri dari PAC Muslimat NU Tugu dan PAC Muslimat NU Karangan. 14 Juli 2019 pukul 10.00-12.00 WIB.
[282] Materi Konferensi Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai hal. Contohnya, mengadakan kegiatan Seminar Sosialisasi UU Pemilu no. 10 tahun 2008. Selain itu, Muslimat NU juga menjalin kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik (Bakesbangpol) Trenggalek.

F. Relasi dan Posisi Antara Muslimat NU, Nahdlatul Ulama dalam Politik Lokal Trenggalek

Relasi antara Muslimat NU dan Nahdlatul Ulama (seterusnya di singkat NU) di Trenggalek merupakan hubungan yang secara struktural sebagai bagian dari NU. Muslimat NU adalah salah satu badan otonom yang berada secara langsung pada garis struktural NU. Relasi ini bentuk hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antara satu dengan yang lain. Hubungan yang saling memengaruhi berdasarkan pada kesadaran untuk saling memberikan masukan atau kritik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> Muslimat NU adalah banom dari pada NU. secara struktural tentu Muslimat NU memiliki koridor dan aturan main sesuai dengan NU. Sebagai seorang 'Bapak', segala sesuai yang disampaikan oleh NU, kita harus *manut*, mengikuti instruksi. Intruksi yang sesuai dengan Khittah NU. Namun, memang ada beberapa hal yang secara fungsional kita tidak selalu beriringan, akan tetapi saling memberikan dukungan secara penuh.[283]

[283] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan sosial antar 'satu atap' harus terus dijaga dan dirawat secara baik agar tidak menimbulkan gesekan di dalam internal NU dan banom-banomnya. Interaksi sosial antara banom satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang mendorong relasi antara Muslimat NU dan NU, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal misalnya, NU memiliki visi yaitu terwujudnya NU sebagai jam'iyyah diniyah ijtimaiyah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat yag sehtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri.[284] Sedangkan visi dari Muslimat NU adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, berkualitas yang dijiwai ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhai Allah Swt.[285]

Secara umum, antara Muslimat NU dan NU memiliki kemiripan dalam menentukan visi organisasi. Visi organisasi inilah yang menjadi landasan dalam menentukan misi organisasi. Memiliki *ghirah* dan tujuan yang sama menjadikan jam'iyah yang penuh kemaslahatan sesuai ajaran Aswaja An-Nahdiyah, maka organisasi ini secara kontinyu meneruskan, melestarikan dan mempertahankan ajaran Islam tersebut.

Di sisi lain terdapat juga faktor eksternal, yaitu masing-masing Ormas memiliki misi yang harus diimplementasikan dari pucuk pimpinan sampai pada *grassroots*, akar rumput, sampai pada pimpinan anak ranting. Muslimat

[284] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama', Peraturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART).
[285] Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU (AD/ART), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU dan NU memiliki bentuk relasi asosiatif. Bentuk relasi asosiatif ini dapat berjalan dengan maksimal sesuai cita-cita masing-masing Ormas ketika keduanya menjalin kerjasama, baik kerjasama secara langsung, kerjasama dalam posisi tawar, atau kerjasama dalam bentuk kompromi.

Dalam bentuk relasi inilah, terkadang antara Muslimat NU dan NU memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi sesuatu. Misalnya dalam hal urusan sikap politik sebagaimana sub bab yang dibahas ini. Dalam beberapa kasus berkaitan dengan 'pil-pil-an', antara Muslimat NU dan NU memiliki pendapat yang berbeda.

Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah aktor Muslimat NU dan atau aktor NU dalam berpolitik. Meskipun tidak membawa bendera organisasi, namun stigma tersebut secara otomatis melekat erat dalam diri si aktor. Sebagaimana pada Pilgub Jatim 2018 silam.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris PCNU Trenggalek, berikut kutipannya:

> Kalau secara struktural tidak ada yang memiliki otoritas untuk mengarahkan dukungan dalam Pilgub 2018 lalu, karena memang terikat khittah NU. namun, dalam prakteknya ada komunikasi politik antar keduanya karena memang dalam satu wadah, yaitu NU. Meskipun dalam Pilgub 2018 ini muncul perbedaan dukungan yang mencolok, yaitu jama'ah yang kebanyakan pengurus NU mendukung Gus Ipul dan jama'ah Muslimat NU mendukung Bu Khofifah. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kepentingan atau kedekatan pribadi, kepentingan organisasi, perbedaan mekanisme dan hak memilih sebagai warga negara.[286]

[286] Bapak ZA, M.SI, Wakil Sekretaris PCNU Trenggalek, *Wawancara via Whatshaap*, Trenggalek, 25 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari *statement* di atas, jelas bahwa Muslimat NU dan NU secara relasi dan posisi dalam hal politik memiliki sikap yang tegas bahwa organisasi masyarakat yang berada di bawah payung NU tidak berpolitik praktis, sebagaimana termaktub dalam Khittah NU. Berikut kutipan pernyataan dari Mustasyar PCNU Trenggalek,

> Saya selaku Mustasyar PCNU Trenggalek, yang pertama dalam melaksanakan pemilu, yang ingin menjadi masyarakat yang baik, adalah mengarahkan kepada seluruh pengurus NU, baik pengurus cabang, banom, dan lembaga di bawah naungan NU, bahwa pengurus NU harus netral. Artinya *monggo* pilih calon yang mana, tetapi harus memilih. Kedua, mengarahkan kepada warga NU wajib hukumnya melaksanakan atau berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pimpinan.[287]

NU sebagai organisasi masyarakat harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Seperti yang disampaikan oleh KH. MST bahwa NU harus netral dalam urusan politik. NU adalah organisasi keummatan yang secara Khittah tidak diperbolehkan dalam kegiatan politik. Akan tetapi disisi lain, masyarakat NU wajib untuk memilih pemimpin baik di level atas sampai pada level bawah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa netralitas pengurus NU harus dijaga dan tetap mengedepankan moralitas serta akhlakul karimah menjadi *point* yang sangat penting dalam proses pil-pil-an. Secara individu, tentu pengurus memiliki Pemilihan masing-masing dan bersifat kondisional. Bagaimanapun warga NU harus ikut berperan dalam proses tersebut.

[287] Bapak KH. MST, Mustasyar PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi, melalui ikut memilih calon pemimpin dengan asas bebas rahasia. Sebab, dengan cara memilih pemimpin yang jujur, amanah akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi.

> Bagaimanapun kita sebagai warga NU, suatu contoh akan memberangkatkan Bupati, ini kan harus lewat partai. Aturannya begitu. Namun, soal Pemilihan ya harus tetap rahasia. Seluruh pengurus NU saya larang untuk menjadi Tim Sukses mengatasnamakan organisasi atau lembaga NU.[288]

Pendapat awal KH. MST agaknya sedikit kontradiktif dengan pernyataan yang disampaikan menjelang detik-detik terakhir dalam penggalian informasi melalui *interview*, ketika pertanyaan dilontarkan tentang memilih di antara dua Pemilihan antara pengurus satu dengan pengurus lainnya, seberapa besar gesekan yang terjadi di antara internal pengurus NU. berikut kutipannya:

> Itulah pandangan saya, yang beda bukanlah pendapat. Tetapi pendapatannya, *hehehe*. Jadi memang seperti itu. Dan itu hanya sebatas pengurus yang mendapat 'pendapatan' dan pengurus yang tidak mendapatkan 'pendapatan'. Di luar pengurus, maksudnya masyarakat umum tidaklah terjadi gejolak seperti itu. Jadi, gesekan terjadi hanya di level internal pengurus saja.[289]

Namun, wajar dan sah apabila secara personal orang NU maupun Muslimat NU memiliki pandangan politik dan Pemilihan politik masing-masing. Sebab Pemilihan politik secara personal adalah hak masing-masing setiap warga negara. Perempuan dan laki-laki memiliki porsi yang sama

[288] Bapak KH. MST, Mustasyar PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.
[289] Bapak KH. MST, Mustasyar PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk turut serta dalam kontestasi politik, meskipun sekedar menjadi partisipan politik. Salah satu pengurus Muslimat NU Trenggalek berpendapat,

> *Wong wedok kuwi kudu* berpolitik, *amergi* sekarang kan jamannya politik. Suara perempuan juga diperhitungkan. *Ben ndak* gampang *melu-melu*. *Wong wedok ki ben rodok* cerdas, karena memang sudah tuntunan zaman.[290]

Pendapat tersebut di atas mengisyaratkan kepada semua warga masyarakat, baik warga nahdiyin dan nahdiyat memiliki kesempatan dan peluang sama dalam urusan politik. Politik tidak hanya urusan dominasi laki-laki, akan tetapi kaum perempuan juga memiliki kapasitas yang sama untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Salah satunya melalui politik.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sekretaris PCNU Trenggalek berikut ini:

> Secara kelembagaan atau organisasi, sikap NU tetap mengambil peran dalam politik kebangsaan, bukan politik kepentingan (praktis). NU khan bukan partai politik, karena NU sudah punya wadah sendiri. Meski demikian NU bukan acuh tak acuh terhadap kondisi dan dinamika politik yang ada. Bukannya NU tidak ada *greget* atau semangat dalam hal itu. Pasti ada. Akan tetapi kami yang ada di cabang tetap mengikuti kebijakan pengurus yang ada di tingkat wilayah. [291]

Tuntutan zaman, di era digital mengharuskan masyarakat agar secara sigap dan cepat merespon apa yang terjadi saat ini. Problematika sosial yang begitu kompleks menuntut semua eleman masyarakat untuk ikut memberikan solusi bijak dan cerdas. Inilah relasi yang imbang antar individu dengan

---

[290] Ibu Hj. STR, Bendahara Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

[291] Bapak JMM, M. Ag, Sekretaris PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

invidu, antar invidu dengan kelompok, serta individu dengan masyarakat secara luas.

Sebagai bagian dari Muslimat NU dan NU tentu harus memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan sebagai bentuk partisipasi dalam menyelesaikan problematika tersebut dalam setiap sektor kehidupan termasuk politik. Bagi Muslimat NU, berpartisipasi dalam kontestasi politik menjadi sesuatu yang seharusnya dilakukan. Hal ini tentu juga harus dipertimbangkan secara matang dan mapan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PCNU Trenggalek berikut kutipannya:

> ....Seperti Bu Khofifah dan Gus Ipul sebagai kader NU sebenarnya tidak ada bedanya. Yang secara kebetuln titiknya Bu Khofifah dari Muslimat NU, sedangkan Gus Ipul dari NU. Keduanya merupakan kader terbaik dan srikandi terbaik dari NU. Kompetisi ini (Pilkada) adalah kompetisi yang sangat wajar, sangat biasa. Namun yang menarik adalah *saking* kuatnya NU, sehingga kader di luar NU tidak mampu berkompetisi di Pilkada Jatim kemarin.[292]

Statement di atas menggambarkan bahwa semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jika dilihat dari calon yang maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018, NU memiliki ruang yang sangat besar dalam ikut berkontestasi dan berpartisipasi politik. peluang besar ini mampu dimanfaatkan oleh kader NU sebagai kompetitornya.

Kader terbaik dari manapun, apapun organisasinya memiliki hak untuk ikut memberikan sumbangsih kepada pemerintah. Namun, harus di

[292] Bapak KH. FTS, S.H, Ketua PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis bawahi yakni kemampuan, kapasitas dan kapabilitas harus mumpumi. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi mereka yang akan memposisisikan sebagai birokrat.

Termasuk aktor Muslimat NU juga memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri atau mendukung calonnya dalam kontestasi politik. Para kontestan juga memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai orang pemimpin. Termasuk yang berangkat dari organisasi masyarakat, baik NU atau Muslimat NU. Inilah yang diungkapkan oleh salah satu Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, berikut kutipannya:

> Muslimat NU sebagai banom NU, jika kemarin itu ada salah satu kader terbaik dari Muslimat NU untuk berangkat menjadi Calon Gubernur Jawa Timur. Maka ini adalah suatu apresiasi tersendiri di mata Muslimat NU atau di mata Nahdlatul Ulama. Maka itu menjadi hal yang sangat penting sehingga seluruh warga Nahdlatul Ulama, *wa bil khusus* Muslimat NU memberikan *support* yang luar biasa.[293]

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. DAS, salah satu pengurus Muslimat NU Trenggalek juga mengungkapkan hal yang senada. Ia menyampaikan sebagai berikut:

> Perempuan Muslimat NU sudah saatnya berperan dalam pembangunan di Jawa Timur. Entah itu pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA). Sebab saya beranggapan bahwa perempuan Muslimat NU banyak yang memiliki kapasitas untuk memimpin negeri ini melalui Jawa Timur. Kami yang berada di Cabang tentu sangat mendukung jika terdapat salah satu kader terbaik NU khususnya dari Muslimat NU yang akan ikut dalam kontestasi politik.[294]

---

[293] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.

[294] Ibu SDM, S. Pd, Ketua PAC Muslimat NU Karangan, *Wawancara*, Trenggalek, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya berkaitan dengan Pilkada Jawa Timur tahun 2018 saja, dalam kapasitas politik lokal Trenggalek pun antara Muslimat NU dengan NU juga beberapa kali diikuti 'drama' saling dukung mendukung secara personal. Hal ini terlihat ketika salah satu informan memberikan sedikit informasi berkenaan dengan Pilkada Trenggalek tahun 2015.

> Waktu Pilkada Trenggalek 2015 itu, seingat saya Muslimat NU (maksudnya orang-orang Muslimat NU, ada juga beberapa pengurus Muslimat cabang) yang mendukung salah satu paslon. Yaitu paslon yang didukung dari partai PKB. Saya sebagai orang Muslimat tentu saja mengikutinya walau tanpa diperintah.[295]

Dari ungkapan di atas, sementara dapat diambil atau ditarik kesimpulan bahwa Muslimat NU (aktor-aktor Muslimat NU) dalam berpolitik berafiliasi ke partai PKB. Meskipun demikian, ada beberapa yang berafiliasi ke partai lainnya. Hal ini tentu dinilai wajar dan lumrah, sebab setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing tanpa harus ada tekanan dari pihak manapun.

Oleh karenanya, perlu kiranya diuraikan sedikit tentang Pilkada Trenggalek 2015. Sesuai dengan data yang ada di KPU, bahwa kontentasi politik diikuti oleh dua paslon, yakni Kholik dan Priyo Handoko (selanjutnya paslon 1) serta Emil Elestianto dan Nur Arifin (selanjutnya paslon 2). Keduanya diberangkatkan dari beberapa partai pendukung dan pengusung. Paslon 1 diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan paslon 2

[295] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh beberapa partai yang terdiri dari PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PAN.[296]

Secara demografis, jika dilihat dari segi sosial politik pada grafik pemerintahan Kabupaten Trenggalek, anggota DPR periode 2014-2019 didominasi dari partai PKB dan Partai PDIP yakni 9 orang.[297] Artinya bahwa PKB yang secara kuantitatif lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai lainnya seharusnya mampu meraup suara terbanyak di Pilkada Trenggalek tahun 2015.

Faktanya, paslon 1 yang didukung oleh PKB kalah dalam perhelatan tersebut. Meskipun paslon 1 *notabene* merupakan pasangan *incumbent*. Tentu saja banyak faktor yang menghambatnya. Salah satunya diungkapkan oleh tim pemenangan paslon 1, yaitu:

> Waktu Pilkada Trenggalek 2015, sebenarnya PC Muslimat NU tidak ada instruksi untuk menyukseskan salah satu paslon. Namun, karena hampir semua anggota Muslimat (maksudnya pengurus cabang Muslimat sebagian besar menjadi pengurus PPKB Trenggalek) dalam lingkaran Perempuan Penggerak Kebangkitan Bangsa (PPKB), maka ya..otomatis mendukung calon yang diusung oleh PKB. Meski akhirnya paslon 1 kalah jauh dari paslon 2. Usaha kami sudah maksimal, mungkin karena kurang *marketeble*.[298]

Ia menyebutkan kurangnya *marketeble* salah satu paslon sehingga perolehan suara tidak maksimal. Adapun yang dimaksud dengan kata *marketeble* adalah program-program yang disampaikan kepada masyarakat tidak dikemas secara apik dan menarik sehingga 'nilai jual' pada masyarakat

[296] KPU Trenggalek tahun 2015.
[297] BPS Trenggalek tahun 2017, 27.
[298] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bagus. Selain itu juga, ada faktor-faktor lainnya sehingga perolehan suara menurun drastis.

Ia juga sangat mengapresiasi sikap politik masing-masing elite paslon. Sebab, ketika perhelatan 'pil-pilan' telah usai semua kembali normal. Artinya bahwa masyarakat Trenggalek khususnya sudah sangat bijak, cerdas dalam menyikapi perbedaan pemilihan dalam politik yang ada pada warga NU, khususnya warga NU masyarakat Trenggalek.

> Masyarakat Trenggalek, jujur saya akui, saya kasih jempol. Masyarakat Trenggalek khususnya Muslimat NU wes podo pinter-pinter. Terbukti setelah pil-pilan selesai semua merapatkan barisan di posisinya masing-masing. Inilah pendidikan politik yang sudah dewasa. Beda Pemilihan itu biasa, dan bagaimana kita bisa berpikir jernih tanpa ada saling mencela satu dengan lainnya.[299]

Demikian juga warga NU lainnya. Menyikapi perbedaan politik tidaklah dianggap sesuatu yang buruk. Meskipun sebagian besar organisasi partai selalu identik dengan perebutan kekuasaan atau *the power struggle*. Namun, praktek yang dilakukan oleh beberapa kader NU dalam kontestasi dan dinamika perpolitikan adalah lebih konsen pada bagaimana menciptakan dan mewujudkan kepentingan masyarakat secara luas, yakni kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karenanya, relasi dan posisi antara Muslimat NU dan NU dalam wilayah politik merupakan hubungan ketersalingan, resiprokal. Tidak ada sikap saling mencela, menghina bahkan memfitnah. Aktifitas politik yang

[299] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh aktor nahdiyin atau nahdiyat merupakan salah satu bentuk tanggungjawab moril dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat.

G. Perilaku Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Berpolitik

Untuk memahami sebuah perilaku politik, maka terlebih dahulu harus mengetahui makna perilaku politik dan politik organisasi. Dalam kajian ini membahas tentang perilaku aktor politik Muslimat NU (baik secara personal maupun secara organisasi. Oleh karenanya penting mengetahui makna keduanya. Perilaku politik merupakan respon individu terhadap aktifitas politik. Respon ini diperoleh dari stimulus yang disalurkan melalui faktor internal (psikologis) ke faktor eksternal (sosiologis). Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu tidak akan pernah lepas dari berbagai aspek dalam kegiatan, termasuk aspek politik.

Dalam sebuah artikel dijelaskan perilaku politik merupakan sebuah perilaku yang diarahkan untuk mempengaruhi dengan menciptakan kesan bahwa individu tersebut sesuai dengan standar kinerja organisasi atau institusi. Lebih dari itu, perilaku politik juga dapat dimaknai sebagai latihan mempengaruhi seseorang secara strategis, rasional, sadar untuk kepentingan mempromosikan kepentingannya sendiri dengan mendukung atau mengorbankan kepentingan orang lain.[300]

[300] Hasan Jafariani, et all., 'Political Behavior In Organizational Context: Nature, Research and Paradigm', *Management Science Letters*, 2 (2012) 2987–3000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perilaku politik secara umum memiliki dua orientasi. *Pertama*, orientasi nilai atau *value*. Orientasi nilai adalah orientasi yang menunjukkan setiap individu memiliki cita-cita untuk diwujudkan. Cita-cita tersebut diwujudkan dengan turut serta berpartisipasi dalam politik, meskipun hanya sebagai partisipan. *Kedua*, orientasi waktu. Orientasi waktu yang dimaksudkan disini adalah bagaimana korelasi atau hubungan perilaku politik antara para aktor politik, simpatisan politik, partisipan politik hari ini dan yang akan datang.

Sedangkan makna politik organisasi merupakan managemen pengaruh untuk mendapatkan tujuan baik yang disetujui ataupun yang tidak disetujui oleh organisasi agar mendapatkan tujuan melalui cara yang tidak dikenai sanksi. Dengan kata lain politik organisasi adalah suatu tindakan yang tidak disetujui secara resmi oleh organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain agar dapat memperoleh tujuan pribadi seseorang.[301]

Oleh karena dalam politik harus memiliki strategi untuk bisa keluar dari aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa strategi digunakan untuk bebas dari sanksi organisasi. Strategi disini tidak dimaknai sebagai tipu muslihat, namun lebih pada bagaimana mengatur rencana dengan fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

Muslimat NU sebagai Ormas yang secara *khittah* tidak boleh berpolitik, namun secara individu (*personality*) tidak ada larangan untuk turut

[301] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ambil bagian dari pesta demokrasi. Perilaku politik aktor Muslimat NU Trenggalek tentu tidak membawa identitas keorganisasian. Aktor Muslimat NU Trenggalek yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung tidak diperbolehkan mencampur-adukkan urusan politik dengan urusan organisasi. Kedua unsur ini saling berhubungan namun tidak bisa disatukan. Oleh sebab itu, aktor Muslimat NU juga harus mengetahui karakter dan daerah calon pemilih.

Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya politik yang bermacam-macam. Keberagaman inilah yang akan melahirkan perilaku politik individu di dalam masyarakat, sehingga perilaku politik secara personal mencerminkan budaya politik di suatu daerah. Misalnya dalam Pilgub Jatim 2018. Wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 37 kabupaten/kota.[302] Wilayah tersebut dibagi menjadi 5 bagian, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura, Metropolis, dan Madura.

Setiap wilayah memiliki karakter dan budaya politik yang berbeda-beda. Sebab, budaya politik adalah sebuah pola perilaku politik yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan bernegara. Bisa juga budaya politik dimaknai sebagai sebuah sistem nilai pada masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif sehingga menjadikan dasar penentuan pembuatan kebijakan publik.

Untuk memahami perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek, maka perlu mengetahui sikap dan perilaku politik Muslimat NU di tingkat wilayah,

[302] Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur berikut ini:

> Meskipun Muslimat NU bukan sebagai partai politik dan tidak boleh berpolitik sesuai dengan khittah NU. Namun, anggota Muslimat NU hampir 98% mengarah kepada ketua Muslimat NU yang lagi melakukan ikhtiar dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.[303]

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu DAS di atas bahwa perilaku politik aktor Muslimat NU dalam Pilkada Jawa Timur 2018 adalah perilaku yang bersifat *personality*. Secara sadar dan tanpa ada komando, ketika ketua pusat Muslimat NU maju dalam perhelatan Pilkada tersebut, tentu sebagai orang yang secara psikologis akan ikut memberikan dukungan, walau tanpa diperintah sekalipun.

Pernyataan di atas sedikit kontras dengan apa yang ditemukan oleh peneliti dalam dokumen rapat Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek. Dari hasil penelusuran peneliti, dalam forum rapat yang diikuti oleh Pengurus Cabang tersebut terdapat pesan yang ditulis oleh notulen bahwa terkait dengan politik elektoral, sebaiknya Pengurus Cabang harus bertindak dengan jernih dan disipin, karena salah satu calon pasangan telah mendapatkan restu dari sebagian besar Kyai di Jawa Timur.[304]

Pernyataan di atas mengisyaratkan adanya sebuah komitmen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab moral

[303] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.
[304] Notulensi Rapat PC Muslimat NU Trenggalek, Trenggalek (Rumah Dinas DPRD Trenggalek), 26 Nopember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing kader (baik dari organisasi atau partai). Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya dalam tubuh Muslimat NU Trenggalek sendiri suara tidaklah utuh pada satu pasangan calon semata. Suara anggota Muslimat NU Trenggalek terbagi atas kedua calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.[305]

Hal senada juga disampaikan oleh pengurus Muslimat NU Trenggalek di tingkat Anak Cabang. Berikut kutipannya:

> ...terus terang saya sebagai pengurus di tingkat Anak Cabang merasa bingung dalam menentukan pilihan. Meskipun pilihan ini merupakan hak pribadi. Namun, saya memiliki tanggungjawab yang besar karena berkaitan dengan sebuah komitmen yang harus dipegang teguh. Akhirnya saya memutuskan untuk mengawal kedua pasangan tersebut. Dukungan ke Bu Khofifah jalan, dan ke Gus Ipul juga jalan. Kita ambil jalan tengah.[306]

Statement di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa hak pilih seseorang terhadap pilihan politik eletoral sesungguhnya bersifat pribadi, namun di sisi lain sebagai pimpinan organisasi juga memiliki tanggungjawab yang besar, sebuah komitmen harus dipegang secara teguh tanpa harus mengesampingkan kebijakan organisasi. Keduanya dapat berjalan beriringan sehingga tercipta harmoni dalam proses dinamika politik yang sedang terjadi.

Dalam perilaku politik, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perilaku aktor dalam politik. (1) pendekatan psikologis, (2) pendekatan sosiologis, (3) pendekatan rasional. Ketiga pendekatan tersebut memiliki tolak ukur dan karakter masing-masing dalam menentukan

---

[305] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.
[306] Ibu Hj. DRJ, Ketua PAC Muslimat NU Munjungan, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku aktor politik, termasuk perilaku aktor Muslimat NU dalam menentukan pilihan politik dalam kontestasi Pilkada.

> Dukungan dan gerakan anggota Muslimat dilakukan secara masif oleh perorangan dan secara non-formal. Karena organisasi yang memiliki landasan yang jelas kita pasti kembali kepada khittah. Tapi persoalannya adalah yang hadir adalah kader Nahdlatul Ulama, khususnya Muslimat NU, maka warga Muslimat NU bergerak secara non-formal untuk memberangkatkan pimpinannya. Hal ini merupakan sikap spontan dan otomatis.[307]

Berdasarkan keterangan di atas bahwa perilaku aktor Muslimat NU dalam politik dapat dikategorikan sebagai model politik dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nilai-nilai sosiologis yang melekat pada diri seseorang (secara personal) sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan arah politiknya.

Pernyataan di atas juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu pengurus di tingkat cabang. Berikut kutipannya:

> ...Kalau ada instruksi dari Pimpinan Cabang tentang calon yang akan didukang, saya termasuk orang yang telah menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani dan tidak bertentangan dengan hati saya, toh yang didukung adalah tokoh sentral Muslimat NU.[308]

Apa yang dikemukakan oleh Ibu STR tentang politik elektoral Pilgub Jatim 2018 merupakan sebuah keniscayaan. Seseorang harus menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Siapapun tidak bisa memaksa orang lain

[307] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.
[308] Ibu Hj. STR, Bendahara Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memilih pemimpin. Walaupun terkadang keputusan seseorang dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Perilaku politik seseorang juga dapat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi lingkaran sosial. Lingkungan sosial inilah yang dapat menghasilkan nilai-nilai sosiologis. Adapun nilai-nilai sosial tersebut meliputi keluarga, kelas sosial, agama, teman kerja, status ekonomi, kedaerahan, dan lainnya.

Kondisi sosial juga dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Salah satunya adalah faktor geopolitik.

> Dalam Pilkada Jawa Timur 2018 kemarin, ada Bu Khofifah. Beliau orangnya pinter, memasyarakat, dan programnya ketika menjadi Menteri Sosial sudah dikenal warga masyarakat. Kemudian pasangan beliau adalah Bapak Emil. Pak Emil adalah Bupati Trenggalek. Walau bagaimanapun pernah menjadi pimpinan warga Trenggalek. Semoga Pak Emil ingat terus dengan kota Trenggalek. Makanya ya...harus kita pilih.[309]

Pendapat tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari faktor geopolitik dalam perilaku politik seseorang. Individu yang menentukan pilihannya berdasarkan atas kedekatan secara geografis (kedaerahan) adalah perilaku yang konstan (sesuai dengan struktur geopolitik) sehingga ketika mengalami perubahan akan terjadi secara pelan dan lambat.

Model perilaku politik yang seperti itu tidaklah menjelaskan tentang bagaimana aktor tersebut berubah pikiran dan Pemilihan dalam kontestasi politik secara personal. Melainkan hanya sebatas basis mengenai kondisi sosial yang merupakan sebagai *center of analysis* atau pusat analisis. Lebih

[309] Ibu SWD, Ketua PAC Muslimat NU Bendungan, *Wawancara*, Trenggalek, 28 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rincinya, bahwa titik tekan dalam pendekatan sosiologis adalah terletak pada kondisi sosial, bukan pada *personality*.

Selain perilaku politik berdasarkan pendekatan sosiologis, ada juga perilaku aktor Muslimat NU yang menggunakan pendekatan psikologis dalam menentukan arah Pemilihan pemimpin. Perilaku ini lebih menitikberatkan pada aspek kedekatan secara psikologis, misalnya kedekatan secara personal, kedekatan dengan partai atau organisasi tertentu, atau mengenai visi misi yang ditawarkan.

Berikut adalah pendapat dari salah satu aktor Muslimat NU Trenggalek dalam menentukan perilaku politiknya pada Pilkada Jawa Timur 2018.

> Kalau kemarin ada himbauan dari PC Muslimat NU Trenggalek *khan* harus ke Bu Khofifah. *Lha*...kalau dari PKB *khan* ke Gus Ipul. Kalau saya terus terang, karena saya orang PKB, saya harus mendukung Gus Ipul (karena saya manut *dawuh*nya guru-guru saya, Mursyid saya). Meskipun saya juga Ketua Muslimat Anak Cabang. Namun, untuk semua anggota Muslimat anak cabang, saya anjurkan untuk ke Bu Khofifah, sebab beliau *khan* orang Muslimat NU.[310]

Pernyataan di atas memiliki dua konotasi makna. *Pertama*, individu yang memiliki kedekatan dengan partai politik. *Kedua*, individu yang memiliki jabatan secara struktural sebagai salah satu ketua organisasi tertentu. Dalam situasi yang demikian, aktor Muslimat NU yaitu Ibu Hj. SMD lebih condong pada kedekatan psikologis sebagai orang partai. Tentu ada berbagai pertimbangan yang diambil sehingga ia memutuskan hal tersebut.

[310] Ibu Nyai Hj. SMD, Ketua PAC Muslimat NU Durenan, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, ia yang sebagai ketua Muslimat Anak Cabang Durenan tetap memiliki tanggungjawab moral untuk mengarahkan seluruh anggotanya agar memilih calon yang yang sesuai dengan garis organisasi. Pernyataan tersebut diungkapkan secara terang-terangan kepada Pimpinan Cabang Muslimat NU. Namun, hal ini tidak menjadi perdebatan yang serius, sebab sesuai dengan apa yang telah disampaikan di awal bahwa Muslimat NU adalah organisasi masyarakat non-partai.

Selaras dengan pendapat di atas, NU dalam hal ini merupakan induk dari organisasi Muslimat NU turut memberikan pernyataan terkait dengan pendekatan yang dipakai dalam menentukan pilihan politiknya.

> Saya secara pribadi tetap mengikuti arahan (semacam *syarah*) dari guru saya. Secara organisasi saya juga tetap mengikuti arahan dari pimpinan di atasnya. Terlepas nanti Pemilihan itu kalah atau menang. Akan tetapi, sikap kita sebagai bentuk ketaatan sebagai pengurus.[311]

Pendekatan psikologis lebih memiliki keterikatan atau motivasi psikologis yang dapat membentuk orientasi politik tiap personal. Keterikatan secara psikologis disebabkan adanya kedekatan institusi, organisasi atau partai. Keterikatan telah terjalin dalam waktu yang relatif lama sehingga antara aktor politik (kontestan dan pemilih) sudah terjalin hubungan emosional.

> Sejak Bu Khofifah mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jatim 2008 sampai sekarang tahun 2018. Pilihan saya tidak pernah berubah. Meskipun ada calon yang lebih bagus atau bahkan lebih pinter dari Ibu, saya tetap mendukung dan memilih ibu.[312]

---

[311] Bapak JMM, M. Ag, Sekretaris PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.
[312] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kedekatan secara psikologis (emosional), perilaku politik seseorang juga dapat dipengaruhi oleh agenda sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Kegiatan sosialisasi ini dapat menentukan perilaku politik individu. Tujuan sosialisasi politik ini adalah untuk menginformasikan kepada calon pemilih berbagai visi misi yang dicanangkan oleh pasangan calon.

Dengan adanya sosialisasi politik seseorang dapat memahami dan mengetahui politik baik secara sadar ataupun tidak. Ketika sosialisasi politik dilakukan, maka seorang pemilih memperoleh pembelajaran tentang bagaimana politik dan pendidikan politik itu secara jelas. Pendidikan politik dimaknai sebagai proses dialog dengan tujuan supaya masyarakat memahami informasi, norma, nilai dan simbol politik negaranya. Masyarakat bisa berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Agar informasi politik dapat diterima secara efektif, maka diperlukan sarana atau agen sosialisasi politik. Ada beberapa sarana sosialisasi politik di antaranya, *pertama,* keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi politik paling awal yang dapat membentuk *value* politik kepada seseorang secara personal. Dalam hal ini, aktor Muslimat NU menentukan Pemilihannya berdasarkan dialog dengan keluarga mereka.

> Awalnya pilihan saya dan suami waktu Pilkada Jatim 2018 tidak sehati. Saya juga tidak memaksa, wong sama-sama memiliki keyakinan (maksudnya pilihan). Namun akhirnya suami saya melihat sendiri dari beberapa debat di TV, akhirnya yaa ikut-ikutan saya, hehehe.[313]

[313] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan di atas dapat digambarkan bahwa dialog dengan keluarga dapat mempengaruhi Pemilihan politik seseorang dalam satu keluarga. Sebab, ketika anggota keluarga melakukan diskusi, mereka akan saling memberikan masukan, arahan bahkan kritik satu dengan lainnya. Sebagaimana yang dialami oleh Ibu UKH. Ia tidak memaksa kehendaknya dengan meminta suami untuk mengikuti Pemilihannya, namun beberapa alasan sehingga sang suami menerima dan mengikuti Pemilihan politik istrinya.

Kedua, sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk kegiatan belajar mengajar antara pendidik, peserta dan seluruh warga sekolahan. Sekolahan menjadi sarana sosialisasi politik yang paling efisien untuk anak usia sekolah pada tingkat pemula. *Ketiga,* kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan menjadi sarana sosialisasi politik yang sesuai karena dengan bergaul dan berkomunikasi antar teman dapat memberikan pengalaman dalam berpolitik.

Keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dapat terdiri dari institusi atau organisasi baik formal maupun non-formal. Secara personal, seseorang yang memiliki pengalaman dalam berorganisasi akan mampu menghadapi dan mengimbangi dinamika politik yang sedang terjadi. *Kelima,* media massa. Media massa memberikan banyak informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat saat ini. Jaringan dan jangkauan informasi yang luas dan cepat dapat ditemukan melalui media massa.

Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyakinkan seseorang untuk menentukan pilihan politik seseorang. Bahkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media massa juga bisa mempengaruhi dan merubah pilihan politik baik secara personal maupun kolektif.

> *Wonten* beberapa *tanggi kulo*, awalnya *dereng manteb* memilih pasangan calon A, *pas ningali* debat *teng* TV *niku akhire ngih sami nderek milih* calon A, *sajak'e* menarik *lan sae ngoten dawuhe*, hehehe.[314]

Apa yang disampaikan di atas merupakan salah satu peran media massa dalam kehidupan masyarakat. Media massa yang secara mudah ditemukan dimana saja, kapan saja, mampu mempengaruhi pilihan politik kolektif. Sehingga masyarakat secara tidak langsung telah menerima informasi yang objektif terkait dengan figur calon pemimpin.

Selanjutnya, perilaku politik aktor Muslimat NU dapat dilihat dari pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah sebuah pendekatan yang kritik tentang pendekatan sosiologis dan psikologis. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada aspek orientasi secara personal dengan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya.

Prinsipnya ketika individu memilih salah satu pasangan calon, bagaimana ia memperoleh keuntungan yang dapat dinikmati oleh dirinya dan kelompoknya. Sebab, pendekatan rasional ini berangkat dari teori ekonomi-politik. lebih detailnya, seorang aktor politik memutuskan pilihan berdasarkan parameter ekonomi-politik. itulah yang menjadi premis sederhana dari pendekatan ini.

Atas dasar itulah, salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dr. DAS, Wakil Sekretaris Muslimat NU Jawa Timur mengatakan bahwa

[314] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hampir semua kader NU memiliki kompetensi sehingga warga NU sudah cerdas dalam menentukan calon pemimpin terbaiknya,

> Gus Ipul adalah kader NU dan juga layak lah untuk berangkat karena pernah menjadi wakil Gubernur. Akan tetapi masyarakat secara umum sudah sangat tahu kapasitas masing-masing kader NU tersebut. Ibu Khofifah selama ini bergerak untuk Indonesia, Gus Ipul juga bergerak untuk Jawa Timur (Indonesia). Dua-duaya sudah menjadi tokoh yang luar biasa di kancah perpolitikan.[315]

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Jawa Timur khususnya warga NU dan Muslimat NU memiliki kebebasan dalam menentukan calon pemimpin masa depan, melalui kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018. Masyarakat sudah cerdas dalam menentukan siapa yang akan dipilih dalam perhetalan tersebut. Kedua kandidat sama-sama berangkat dari NU, sebuah organisasi yang begitu besar dan memiliki pengaruh yang luar biasa di masyarakat, khususnya Jawa Timur.

Secara eksplesit apa yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa Muslimat NU harus menjadi menjadi penyejuk suhu politik. sikap saling menghargai perbedaan dalam menyuarakan hal politik adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Inilah nilai yang harus selalu dijunjung tinggi oleh aktor politik siapapun termasuk Muslimat NU.[316]

Perilaku aktor politik baik NU atau Muslimat NU Trenggalek sama-sama mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan secara umum, tidak mengutamakan ego sektoral yang ada pada organisasinya masing-masing.

---

[315] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.

[316] Ruslan Burhani, "Muslimat Harus Menjadi Penyejuk Politik", https://www.antaranews.com/berita/749885/muslimat-harus-menjadi-penyejuk-politik; diakses tanggal 13 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua organisasi tesebut bersama-sama mewujudkan proses Pilkada yang demokratis, sehingga kemanfaatan dan kemaslahatan dapat dinikmati semua kalangan.

Dengan demikian perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam perhelatan politik elektoral pada Pilkada Jawa Timur 2018 mendukung secara aktif dan penuh baik dari sisi kepentingan individu maupun kepentingan organisasi. Namun, dalam dukungan tersebut didasari dengan latar belakang yang berbeda-beda antara aktor satu dengan aktor yang lainnya.

Dukungan secara aktif dan penuh tersebut bukan berarti mendukung hanya satu pasangan calon saja, melainkan mendukung kedua pasangan calon. Meskipun sebagai pengurus Muslimat NU, seorang aktor politik belum tentu memilih calon pasangan dari unsur organisasi yang sama. Perilaku politik aktor Muslimat NU Trenggalek sangat kompleks, sehingga muncul dinamika politik yang beragam.

Dinamika politik tersebut tidak hanya berada pada tingkat pengurus cabang, melainkan di tingkat anak cabang sampai pada tingkat anak ranting. Aktor Muslimat NU Trenggalek telah terbiasa dengan perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik elektoral. Kader pengurus Ormas bebas menentukan hak politiknya masing-masing.

Jika digambarkan dalam bentuk skema, maka perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek yang mendeukung secara aktif dan penuh dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alur Perilaku Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Politik Elektoral

Gambar 9

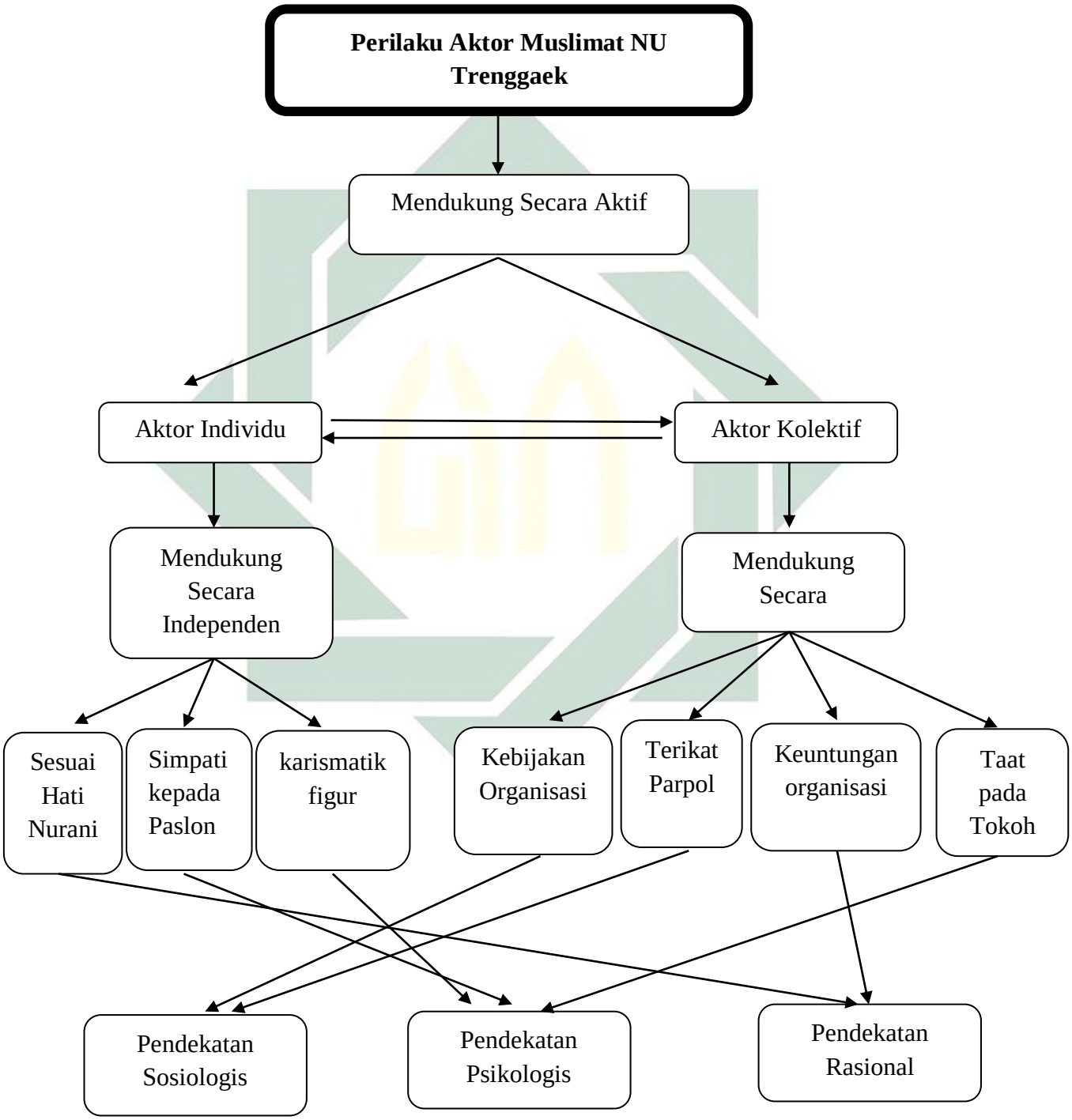

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Faktor-Faktor yang Menentukan Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Berpolitik.

Keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan umum atau memberikan hak suara merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik aktif yang paling sederhana. Secara umum, seseorang atau masyarakat yang ikut berkontribusi dan berpartisipasi aktif menyumbangkan hak suara, atau ikut berkampanye setidaknya memiliki harapan bahwa kepentingan, kebutuhan mereka akan tersalurkan, minimal dapat diperhatikan.

Sebelum membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi para aktor Muslimat NU Trenggalek dalam politik, perlu mengetahui lebih jauh tentang motivasi yang dimiliki oleh setiap aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik. Terdapat dua macam motif para aktor Muslimat NU dalam berpolitik. *Pertama, in order to motive* yaitu sebuah aksi atau tindakan terhadap kejadian di masa depan. *Kedua, because motive* yaitu setiap aksi atau tindakan yang terjadi di masa lampau.

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa persoalan pokok yang diterangkan oleh Alfred Schutz adalah melihat bahwa motif adalah sebuah konteks dari makna yang menghubungkan motivasi dengan apa yang dimotivasi. Dalam motif *in-order-to* dari sebuah tindakan menunjukkan bahwa motif *in-order-to* dari sebuah tindakan tidak lebih dan tidak kurang dari tindakan itu sendiri yang diproyeksikan pada masa depan.

Dalam hal ini, *because-motive* tidak menunjukkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, melainkan mengacu kepada sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahului tindakan yang dilakukan. Jadi, yang ingin dikedepankan oleh Alfred Schutz bahwasanya dengan melihat kembali apa yang mendahului tindakan, maka 'makna' akan dapat dilabelkan

Dari hasil data di lapangan menunjukkan berbagai motivasi yang sangat bervariatif. Misalnya, apa yang diungkapkan oleh salah satu aktor Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> Saya sebagai warga negara *kepengen* ikut mensukseskan pesta demokrasi yang bebas dari poitik uang, dan mudah-mudahan tidak ada politik menyangkut kesukuan, agama, budaya dan lainnya. Dan juga *kepengen* memiliki pemimpin yang jujur, adil tidak tebang pilih. Dalam hal ini, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mudah-mudahan yang terpilih mampu mengemban tugas dengan amanah serta penuh tanggungjawab.[317]

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa motivasi Ibu SYN mengenai keterlibatannya dalam pesta demokrasi adalah menyampaikan harapan terhadap calon pemimpin daerah khususnya di wilayah Jawa Timur. Motivasi yang bersifat umum yang mungkin semua masyarakat berharap hal yang sama.

Ia menyampaikan secara lugas bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat yang tidak boleh terdapat *issue* sara di dalamnya. Sebab, *issue* sara merupakan issue yang sangat sensitif yang sebaiknya dihindari dalam proses demokrasi. Ini sebenarnya *point* yang sangat penting untuk dipahami oleh siapapun, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam politik.

[317] Ibu SYN, S. Pd, Koordinator bidang Sosial PAC Muslimat NU Pule, *Wawancara*, Trenggalek, 03 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek dalam memberikan dukungan kepada kontestan Pilkada adalah masalah yang penting. Secara terang-terangan seorang aktor Muslimat NU Trenggalek memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pilkada, seperti yang diungkapkan di bawah ini:

> Motivasi *kulo derek niki* memang untuk memenangkan Bu Khofifah, Mbak.. *Kulo mboten wonten* pikiran berubah sedikit pun sejak tahun 2008. *Kulo sampun demen kalian* Bu Khofifah, *kulo ngih* sering *kepanggih* ketika pertemuan di wilayah acara rapat Muslimat NU di Surabaya. *Kulo sampun mantep* dan bertekad jiwa raga untuk membantu Bu Khofifah supaya bisa berhasil *magang* sebagai Gubernur. Dan Alhamdulillah, Bu Khofifah menang. *Kulo* sangat bersyukur, semoga Bu Khofifah dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani.[318]

Motivasi politik kerap diidentikkan dengan berbagai macam hal. Pendapat Ibu SLS termotivasi untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam politik karena kekagumannya terhadap seorang figur atau sosok pemimpin. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dari awal pencalonan salah satu kontestan politik yaitu Ibu Khofifah, dirinya tetap yakin bahwa suatu saat idolanya akan menjadi pemimpin di Jawa Timur mendatang.

Bahkan ia juga mengatakan rela mengorbankan jiwa dan raga untuk mensukseskan idolanya tersebut. Selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 2008 sampai 2018 *magang* sebagai calon Gubernur, ia tidak goyah atas pendiriannya. Semuanya itu di*niati* untuk berjuang, membantu agar idolanya sukses menjadi Gubernur, hingga sampai pada kesempatan ketiganya.

[318] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan pendapat di atas, Ketua Muslimat Cabang juga mengatakan demikian terkait motivasinya untuk berpartisipasi dalam Pilgub Jatim 2018. Berikut kutipannya:

> Saya sebagai ketua cabang Muslimat NU Trenggalek, motivasi saya adalah memenuhi hak saya untuk nyoblos dan memilih pemimpin negeri ini. Pemimpin Jawa Timur. *Alhamdulillah*,..pimpinan kami maju sebagai calon Gubernur, maka secara sadar dan memiliki tanggungjawab sebagai 'anak'. *Lha wong* 'ibuk'nya *magang kok ndak* didukung, *khan yaa ndak* baik itu. *Ndak* etis *lha*. Meskipun saya sebagai ketua cabang, tapi saya tidak pernah membawa bendera Muslimat untuk kegiatan dukung-mendukung.[319]

Secara personal Ibu Nyai ZN terang-terangan juga mendukung salah satu paslon atau kontestan Pilkada. Motivasi yang dimilikinya pun hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu SLS. Bagaimana kekuatan figur dan sosok pemimpin turut menjadi andil yang besar dalam menentukan pilihan seseorang dalam aktifitas politik. Dengan semangat yang berapi-api, Ibu Nyai ZN mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan lainnya untuk fokus dalam memenangkan sosok yang dikaguminya.

Meskipun secara fisik ia tidak lagi muda, tetapi semangat dan perjuangan yang dilakukan mengalahkan kaum muda. Ia juga rutin untuk mengajak dan menyeru kepada aktor-aktor Muslimat NU Trenggalek (khususnya) dan seluruh jama'ah yasin tahlil di tingkat ranting, untuk bersama-sama ikhtiar dalam menyukseskan Pilkada Jawa Timur 2018.

> Selama beberapa bulan ketika, figur saya, panutan saya, magang menjadi calon Gubernur, saya sudah bertekad untuk membantu lahir batin, supaya idola saya menang dan dapat dilantik sebagai Gubernur.

[319] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hampir setiap hari turba ke anak cabang, ranting-ranting untuk mengajak warga Muslimat NU agar memilih Bu Khofifah.[320]

Motivasi tersebut tidaklah menjadi motivasi tunggal bagi aktor Muslimat NU Trenggalek. Tentu ada motivasi lain yang merupakan kombinasi dari motivasi tersebut, bahkan motivasi tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktifitas politik. Salah satunya adalah mempengaruhi tingkah laku secara personal. Berbagai motivasi tersebut tetap ditentukan oleh bagaimana individu bertindak. Bisa jadi motivasi awal tidak sama dengan motivasi pada akhirnya. Artinya, kemungkinan motivasi seseorang dalam politik bisa saja berubah, sesuai dengan pengalaman dan perjalanan selama berkutat dengan dunia perpolitikan.

Beberapa aktor politik Muslimat NU Trenggalek memiliki motivasi yang bervariatif. Semisal, motivasi awal hanya memiliki berkeinginan untuk ikut-ikutan saja, namun semakin lama semakin tertarik ikut dalam kontestasi politik. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengurus cabang Muslimat NU Trenggalek sekaligus anggota dewan selama dua periode:

> Saya adalah pengurus Muslimat NU Trenggalek sekaligus pengurus PPKB Trenggalek. Saya sudah lama gabung dalam partai PKB. Secara ideologis dan fisiologis, saya dibesarkan dari partai PKB. Pengalaman perdana mengikuti kontestasi politik adalah melalui pencalonan anggota DPRD Trenggalek. Kalo tidak salah tahun 2004. Alhamdulillah saya lolos menjadi anggota dewan sampai dua periode. Itu merupakan pengalamanyang luar biasa, banyak hal dan ilmu yang

[320] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> saya peroleh ketika menjadi wakil rakyat. Dengan segala suka dukanya.[321]

Pertama kali menjadi kontestan di pemilihan legislatif memberikan pengalaman yang tidak bisa dihitung dengan materi. Pengalaman manis dan pahit pun sudah biasa dialami oleh orang-orang atau aktor politik. Pernah berhasil dan pernah gagal adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Seorang politikus tidak akan pernah merasa kecewa atau bahkan 'rugi' ketika pencalonannya tidak berhasil. Justru bagi mereka, inilah pelajaran berharga.

> Tahun 2014 saya menjadi calon legislatif dari partai yang sama. Ketika itu saya gagal, karena perolehan suara tidak memenuhi persyaratan. Saya mencoba kembali menjadi calon legislatif tingkat 1, namun Allah belom berkehendak. Dalam hati kecil saya, inilah yang terbaik buat saya. Perasaan sedih, kecewa pasti ada. Namun, hal itu cepat berlalu sebab, berjuang untuk kemaslahatan umat tidak hanya disitu, selagi kita masih dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Insyaallah semuanya menjadi mudah.[322]

Dari beberapa motivasi yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat dipaparkan mengenai berbagai faktor-faktor yang menentukan para aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menentukan aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik, di antaranya yaitu:

1. Ketaatan pada organisasi atau lembaga

Organisasi atau lembaga tentu memiliki struktur keorganisasian atau kelembagaan. Di dalamnya terdiri atas pemimpin (ketua atau kepala)

---

[321] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.
[322] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anggota. Siapapun yang ikut atau bergabung dalam wadah organisasi, lembaga atau institusi, mereka harus memiliki komitmen secara sadar bahwa organisasi telah memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam posisi atas kewajiban dan hak sebagai 'warga' organisasi tertentu, masing-masing mempunyai konsekwensi tanggungjawab secara berbeda-beda. Antara pemimpin (ketua atau kepala) dan anggota terikat akan peraturan organisasi yang telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Kaitan dengan ketaatan dalam organisasi, seluruh pengurus harus mentaati AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga).[323] Aturan-aturan tersebut tidaklah memiliki makna dan nilai manakala tidak ada ketaatan atau kepatuhan dari seluruh anggota. Dalam hal ini, aktor Muslimat NU Trenggalek menunjukkan ketaatannya pada organisasi dalam beberapa keputusan yang telah ditentukan oleh ketua organisasi.

Salah satunya adalah tentang sikap politik yang diambil dalam Pilkada Jawa Timur 2018 silam. Namun, perlu ditekankan bahwa sikap politik ini merupakan sikap politik secara individu dari sebagian besar pengurus Muslimat NU Trenggalek, tanpa membawa bendera kebesaran 'bendera organisasi'.

> Saya salah satu pengurus PC Muslimat Trenggalek, jujur waktu itu, pas pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 saya memilih calon dari

[323] Salah satu kewajiban anggota Muslimat NU adalah 'setia dan taat kepada pedoman, aqidah, asas, visi dan misi Muslimat NU serta mendukung usaha yang diselenggarakan oleh organisasi'. AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslimat NU, 23-27 Nopember 2016, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Muslimat NU. Alasannya saya yaa...karena saya taat pada pimpinan saya. Ketua Muslimat mencalonkan, ya..saya memang taat pada aturan dan pada pimpinan. Saya *ndak* fanatik pada partai apapun. Pokoknya saya taat pimpinan itu saja.[324]

Pendapat di atas merupakan pendapat yang bersifat pribadi. Ketika proses *interview* berlangsung, Ibu MRT dirinya yang sebagai pengurus Muslimat NU Trenggalek sekaligus seorang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Trenggalek menjelaskan bahwa ia memilih seorang pemimpin dikarenakan *manut* apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Selain itu, ia juga melihat faktor-faktor yang lainnya. Seperti misalnya, melihat figur calon pemimpin serta lainnya.

Ketaatan pada pimpinan ini juga didasarkan pada menjaga dan mengikuti program-program keorganisasian. Program yang telah direncanakan agar dapat berjalan sesuai dengan agenda kegiatan. Layaknya sebuah organisasi, tercapainya tujuan sebuah organisasi bilamana program-program yang telah disepakati dapat ditaati dan dijalankan bersama-sama.[325]

Senada apa yang disampaikan oleh Ibu MRT, salah seorang pengurus di tingkat Anak Cabang juga menyatakan pendapat yang sama. Berikut kutipannya:

> Saya yang seorang PNS tentunya harus netral dalam urusan politik, soal mendukung calon A atau B, namun secara pribadi saya juga

[324] Ibu MRT, S. Pd Sekretaris PAC Muslimat NU Pogalan periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.

[325] Oleh karenanya kepatuhan dan ketaatan terhadap pimpinan organisasi maupun lembaga harus selalu dilaksanakan agar tidak terjadi kontraproduktif di dalamnya. Misalnya, sulitnya mencapai tujuan yang telah ditentukan, rawan terjadi perpecahan dan perselisihan, memudarnya *muru'ah* pimpinan dan hiangnya keteraturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> punya hak untuk memilih dan menentukan pilihan. Di sisi lain, saya juga pengurus Muslimat NU, maka tentu sebagai warga Muslimat NU saya selalu mengikuti instruksi dari pimpinan. Meskipun dalam hal politik, Muslimat NU tidak mengarahkan ke salah satu calon. Namun, secara otomatis saya 'menangkap' itu. *Sami'na wa atho'na* kepada pimpinan.[326]

Hal yang terlihat begitu kontradiktif dikemukakan oleh salah satu aktor Muslimat NU Trenggalek lainnya. Ketaatan dalam organisasi memang sangat diperlukan bahkan dianjurkan. Namun, dalam beberapa hal seorang pengurus atau anggota Muslimat NU harus 'merdeka' dengan keputusannya dalam memilih calon pimpinan. Apalagi pengurus tersebut berafiliasi ke salah satu partai. Antara organisasi atau kepentingan partai yang menjadi prioritas. Berikut kutipannya:

> Saya memang pengurus Muslimat NU, bahkan sebagai ketua PAC Durenan. Jujur saya sampaikan kepada *sampean*, bahwa memang anggota saya yang Muslimat NU saya arahkan untuk memilih pasangan dari Muslimat NU. bahkan saya terus terang kepada Ketua Cabang Muslimat NU. Sikap saya memang harus begitu. Namun, karena saya juga orang partai, maka Pemilihan saya ya... ikut partai.[327]

Kepatuhan dan ketaatan dalam organisasi maupun partai menunjukkan loyalitas seseorang dalam menjalin komunikasi dan komitmen, sehingga mendengar dan mengikuti arahan dari pimpinan organisasi maupun lembaga merupakan wujud dari menegakkan prinsip *sami'na wa atho'na.*

---

[326] Ibu IMS, M. Kes, Pengurus PAC Muslimat NU Gandusari, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.

[327] IIbu Nyai Hj. SMD, Ketua PAC Muslimat NU Durenan, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Alasan saya memilih salah satu paslon ya..kita khan patuh pada pimpinan, ya sejak dahulu memang sudah mendukung. Bunda kita sudah main 2x. Kita tetap berkomitmen kepada dia, mau kemana lagi, hehehe.[328]

Dalam kehidupan berorganisasi misalnya, prinsip *sami'na wa atho'na* menjadi keharusan bagi para anggota, sebab mereka telah berikrar untuk mengikuti *role play*-nya. Mereka juga harus dengan sadar untuk mengesampingkan ego individu demi kamaslahatan keummatan.

Sikap dukungan secara penuh juga disampaikan oleh pengurus Muslimat NU di tingkat Anak Cabang. Informasi ini peneliti gali di tengah-tengah acara rutinan yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Dengan suasana tidak terlalu formal, informan menyampaikan pendapatnya terkait dengan sikapnya dalam Pilkada Jatim 2018 lalu. Berikut kutipan wawancaranya:

> Pada waktu itu ada pertemuan di PC Muslimat NU Trenggalek. Saya menangkap dari pertemuan tersebut ada instruksi untuk mendukung penuh pencalonan Ibu Ketua Pusat Muslimat NU. Secara otomatis saya sebagai kader harus mengikuti arahan tersebut.[329]

Dari pernyataan di atas menunjukkan adanya sebuah instruksi yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Trenggalek kepada Pimpinan Anak Cabang. Arahan yang sifatnya langsung ini menandakan adanya kepatuhan organisasi dari masing-masing pengurus. Peneliti menilai hal ini merupakan sesuatu yang sifatnya wajar, sebab orang yang

[328] Ibu Hj. SBR, Ketua PAC Muslimat NU Kampak, *Wawancara*, Trenggalek, 08 Maret 2019.
[329] Ibu SYN, S. Pd, Koordinator bidang Sosial PAC Muslimat NU Pule, *Wawancara*, Trenggalek, 03 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergabung dalam sebuah organisasi atau lembaga manapun harus memiliki komitmen dan loyalitas penuh dalam mendukung semua kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan.

Selama kebijakan pimpinan dikeluarkan tidak meresahkan, merugikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia dan syari'at Islam, maka seharusnya sebagai anggota organisasi seyogyanya mengikutinya, tanpa harus mengorbankan sesuatu yang sifatnya prinsip.

Namun demikian, organisasi yang sehat adalah organisasi yang memberikan ruang bagi para anggota untuk *urun rembuk* tentang kebebasan berpendapat, berpikir, bertindak dan memilih sesuai dengan kehendak pribadi sesuai dengan mekanisme keorganisasian.

Sebagaimana Nabi Saw. dalam sabdanya: *'seorang Muslim wajib mendengar dan taat, baik untuk yang ia sukai maupun tidak. Selama hal tersebut tidak diperintahkan dalam menjalankan kemaksiatan. Namun, apabila diperintahkan untuk melanggar maksiat, maka ia tidak wajib melakukan taat.'*

Maka dapat ditarik simpulan awal bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada pimpinan organisasi atau lembaga bukan merupakan sebuah ketaatan yang bersifat mutlak dan final. Ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan yang hanya sebatas pada koridor keorganisasian semata. Selebihnya, kepatuhan dan ketaatan seorang Muslim yakni ketaatan yang sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karismatik Figur

Setiap pemimpin tentu memiliki *style* dan tipe masing-masing dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Di dalam dirinya tercermin *faktor x* yang membuat para anggota atau pengikut merasa terkesima atau bahkan menjadi orang yang 'spesial' dengan segala kelebihan dan kekurangan.

Karismatik sendiri adalah sebuah kepribadian yang ada di dalam diri seseorang berupa pancaran wibawa (orang Jawa menyebutnya dengan *nyoni*) sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya merasa segan atau bahkan merasakan kenyamanan, bahkan orang yang sudah terlanjut memiliki kharisma cenderung untuk dinantikan kehadirannya di dalam masyarakat.

Gaya kepemimpinan kharismatik ini membuat sebagian besar anggota yang dipimpinnya mengikuti *style* atau gaya berbagai terobosan dan inovasi yang dibuat oleh pimpinannya. Gaya kepemimpinan ini dapat memberikan pengaruh *value* para anggota. Selain itu, *style* ini juga tipe kepemimpinan yang secara umum menanamkan nilai-nilai ideologis dengan mengartikulasikan visi organisasi dengan cermat.

Begitu pula dengan para aktor Muslimat NU Trenggalek dalam menentukan pilihan pada Pilkada Jawa Timur 2018 silam. Berikut hasil *interview* yang disampaikan oleh salah satu anggota Muslimat NU Trenggalek,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Kulo milih* pemimpin *niku ngih mergo demen*, *manteb*, *kulo mboten wonten* pikiran berubah sedikit pun sejak tahun 2008.[330]

Kata *demen* (senang) kepada salah satu calon pemimipin merupakan kata yang tidak bisa dideskripsikan secara objektif. Sebab, senang, sedih, bahagia merupakan luapan emosi seseorang yang bersifat subjektif. Ibu SLS mengatakan bahwa motivasinya untuk memilih calon pemimpin adalah didasarkan pada kekaguman dirinya kepada calon tersebut. Hal ini tidak bisa dinarasikan melalui kalimat, namun dapat digambarkan melalui perilakunya dalam menentukan pilihan.

Pemahaman sederhananya seorang pemimpin yang karismatik ialah mereka yang dipuja, dikagumi oleh masyarakat (banyak pengikut), meskipun dari sebagian besar para pengikutnya tidak mampu menjelaskan secara konkrit apa yang mereka kagumi dari sosok pemimpin yang dikaguminya.

Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu relawan pasangan salah satu paslon, berikut kutipannya:

> Saya *khan demen* nomor 1 (pasangan Khofifah Emil), teman saya *demen* nomor 2 (Gus Ipul Mbak Puti). Yaa..Pemilihan *monggo* berbeda, namun hati nurani saya tidak bisa dibohongi. Pokoknya saya *demen* dengan calon nomor 1.[331]

Karismatik yang ada dalam diri seseorang adalah sebuah bentuk kekuatan yang tidak bisa dideskripsikan secara rasio. Inilah yang disebut dengan kekuatan karismatik. Lebih singkat, bahwa karismatik adalah

[330] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.
[331] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpaduan antara daya tarik atau pesona pribadi dengan berbagai kemampuan yang ada pada dirinya sehingga menimbulkan rasa kekaguman, pemujaan dari masyarakat. Oleh karenanya, karisma seorang pemimpin didasarkan atas *individual personality qualities* atau kualitas kepribadian individu.

Berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh informan sebelumnya, satu informan ini mengaku dalam proses Pilkada kemarin memiliki alasan yang sedikit unik. Peneliti meminta ijin secara khusus kepada informan (Ibu STR) untuk meluangkan waktu agar bisa menggali informasi tersebut. Berikut kutipan wawancaranya:

> ...Secara personal, terus terang saya tidak begitu mengenal dengan Ibu Khofifah. Saya justru lebih mengenal baik dengan Pak Emil karena pada waktu itu beliau pernah menjadi Bupati Trenggalek. Intensitas saya bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Emil dan Bu Arumi lebih sering, karena saya juga sering mendampingi Bapak (Suami) yang kebetulan menjadi Ketua DPRD Trenggalek.[332]

Alasan yang disampaikan oleh informan terlihat berbeda dengan alasan-alasan sebelumnya. Ibu STR mengungkapkan bahwa ia lebih mengenal sosok calon Wakil Gubernur Jatim, sebab sebelumnya sering melakukan interaksi, komunikasi secara langsung. Ia juga mengatakan bahwa hubungan antara keluarganya dengan keluarga Cawagub Jatim itu layaknya seperti saudara, sosok figur yang santun, sederhana dan cerdas.

[332] Ibu Hj. STR, Bendahara Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah nilai penting bagi seorang pemimpin karismatik, kecerdasan dalam memanfaatkan momentum untuk menciptakan daya tarik dan kekuatan guna terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan yang dicita-citakan, seorang memimpin juga harus memiliki komitmen yang besar dan siap menanggung resika yang besar pula.

Fakta di lapangan ini menggambarkan alasan yang beragam bagaimana aktor politik Muslimat NU Trenggalek menentukan pilihan politiknya. Bermacam-macam alasan mereka tentu menjadi sesuatu yang wajar, tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Walaupun terkadang pilihan mereka dipengaruhi oleh berbagai intervensi yang datang kepada mereka.

Usaha peneliti tidak berhenti sampai disitu, peneliti juga melakukan konfirmasi kesediaan untuk bisa menggali informasi kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Butuh membuat janji untuk bertemu dengan informan, sebab jika tidak akan menjadi tidak maksimal. Peneliti khawatir jika tidak menghubungi terlebih dahulu tidak akan berjumpa dengan informan. Hal ini penting peneliti lakukan, sebab lokasi yang akan dikunjungi sangat jauh dan merupakan daerah dataran tinggi, sehingga perlu persiapan secara khusus.

Sebagaimana peneliti telah mendapatkan banyak informasi dari informan tersebut. Aktor Muslimat NU Anak Cabang ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan alasannya memilih salah satu paslon tertentu. Berikut kutipan wawancaranya:

> Alasan saya memilih calon tertentu adalah alasan pribadi. Ketika mengetahui kalau Ibu Khofifah *magang* (mencalonkan diri) sebagai Gubernur Jatim, saya telah menetapkan pilihan. Sejauh yang saya tahu, Ibu Khofifah orangnya pintar, memasyarakat. Orang-orang di desa saya juga sudah tahu programnya. Otomatis kami akan memilih beliau.[333]

Pernyataan di atas dapat menjelaskan bahwa seorang pemimpin karismatik adalah orang yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, sehingga masyarakat secara langsung dapat menikmati manisnya kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, sosok pemimpin karismatik harus mampu juga menunjukkan sikap peduli, murah senyum, merasakan penderitaan masyarakat miskin, dan berani mengambil keputusan untuk membantu kemaslahatan masyarakat secara luas.

Karismatik figur ini seolah menjadi faktor yang penting dalam politik elektoral ini. Faktor karismatik juga dapat digolongkan ke dalam faktor internal. Faktor ini juga kerap menjadi alasan aktor Muslimat NU untuk condong kepada salah satu paslon. Sebagaimana alasan yang diungkapkan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, calon pemimpin juga harus mampu membaca fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam faktor karismatik yang

[333] Ibu SWD, Ketua PAC Muslimat NU Bendungan, *Wawancara*, Trenggalek, 28 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih ditekankan adalah bagaimana seorang pemimpin memiliki kekuatan untuk membaca problem krisis sosial sehingga dari pembacaan tersebut dapat melahirkan solusi dalam bentuk eksekusi program.

Keistimewaan seorang pemimpin karismatik adalah mampu mempengaruhi pikiran, pendapat, perasaan bahkan perilaku para pengikutnya, sehingga mereka siap berbuat berbagai hal yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Secara kuantitas, seorang pemimpin yang karismatik memiliki pengikut dalam jumlah yang sangat banyak dan besar.

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa pemimpin yang menjadi figur, dambaan oleh para pengikutnya sulit untuk ditemukan dalam diri seorang pemimpin mengenai alasan atau faktor para pengikut mengapa 'gandrung' pada pimpinannya.

Hal yang menjadi *point* dari *term* karismatik figur adalah figur karismatik ini tidak dapat dipandang dari segi kekayaan, umur, kemewahan atau bahkan penampilan rupawan. Namun, ada semacam kekuatan supranatural yang melekat dalam diri mereka.

3. Keuntungan Organisasi atau Lembaga

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ulasan sebelumnya, Ormas Muslimat NU memiliki wadah bagi para kaum perempuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika dilihat dari salah satu misi tersebut jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Muslimat NU bukan organisasi yang disiapkan atau diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan.

Ormas Muslimat NU merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, berbincang dan berinteraksi sama dengan lainnya. Organisasi ini juga sebagai tempat bagi sekelompok orang yang bekerja sama, saling berkomunikasi, saling berkolaborasi dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama.

Tiap individu memiliki 'keunikan' masing-masing yang sangat beragam. Keberagaman ini dimungkinkan akan memunculkan percikan 'kepentingan' di dalam organisasi itu sendiri, semisal kepentingan dalam hal kekuasaan, politik atau bahkan konflik sekalipun.

Muslimat NU Trenggalek sebagai wadah bagi para individu khususnya para ibu-ibu di wilayah Trenggalek tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda satu dengan lainnya, termasuk dalam hal urusan politik. Meski organisasi Muslimat NU bukan partai politik, namun aktor Muslimat NU Trenggalek secara personal boleh untuk terlibat dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menggali informasi dari salah satu informan yang memiliki peran ganda, sebagai Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek dan tokoh dari banom partai politik. dalam wawancara tersebut jelas sekali diungkapkan bahwa keterlibatan dirinya memiliki faktor yang utama dan paling utama. Berikut kutipannya:

> ....Secara otomatis pilihan saya kepada PKB, yaitu Gus Ipul. Meskipun secara organisasi saya ada di Muslimat NU Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tetapi ada hal yang dipikirkan, bahwa dalam kontestasi ini semua calon harus diselamatkan. NU selamat, Muslimat NU selamat, dan PKB juga selamat. Sebagai seorang yang dibesarkan dari partai, saya harus 'cantik' memainkan strategi politik.[334]

Dari *statement* di atas setidaknya dapat dipahami bahwa keterlibatan seseorang dalam politik tidak lepas dari sejarah masa lalu. Ada pihak-pihak tertentu yang secara otomatis mampu mempengaruhi pilihan seseorang, sehingga keputusan untuk mendukung salah satu pasangan calon menjadi sesuai yang wajar.

Dengan turut serta dalam kontestasi politik (sebagai partisipan aktif, yakni sebagai pemilih), aktor Muslimat NU Trenggalek memilih hak untuk menentukan pilihan politiknya terhadap calonnya. Dalam hal ini, salah satu aktor Muslimat NU Trenggalek memiliki motivasi yang cenderung 'vulgar' mengapa dirinya memilih dan mendukung salah satu paslon dari kontestan Pilkada Jawa Timur 2018. Berikut kutipannya:

> Alasan saya memilih karena calon Gubernur dari organisasi kami berangkat. Secara otomatis saya dan lainnya memilih itu. Andaikata terpilih kan kita yang di struktur bawah dapat merasakan dan mengakses program-programnya. Sebab, Muslimat NU yang ada di ranting juga butuh respon dari pemerintah. Orang-orang yang ada di bawah pengen juga menikmati 'kue' pembangunan dari pemerintah.[335]

Secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu SDM adalah harapan yang wajar sebagai orang yang mendukung salah satu calon. Sebab, dalam proses 'pil-pilan' tidak ada sesuatu yang

[334] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.
[335] Ibu SDM, S. Pd, Ketua PAC Muslimat NU Karangan, *Wawancara*, Trenggalek, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘gratis’. Artinya, ketika calon yang didukungnya menang dalam kontestasi politik, maka ia dapat mengakses program pemerintah secara mudah dan cepat.

Lebih lanjut, antara kedua belah pihak memiliki hubungan yang simbiosis mutualisme, sama-sama memberikan manfaat dan keuntungan. Sebab, kekuasaan adalah mengisyaratkan sebuah kebergantungan. Oleh karenanya, pihak yang sedang berkuasa mempunyai sesuatu yang dianggap penting oleh orang lain sehingga orang tersebut seakan-akan berada dalam kendali orang yang memiliki kekuasaan.

4. Emansipasi perempuan

Emansipasi merupakan sebuah persamaan hak dalam berbagai dimensi kehidupan. Persamaan hak tersebut antara laki-laki dan perempuan. Emansipasi wanita mempunyai makna sebagai sebuah proses pelepasan diri dari berbagai anggapan dan kedudukan sosial ekonomi yang rendah yang membatasi ruang gerak perempuan dalam proses pengembangan diri.

Perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri sehingga mampu memecahkan dan menjawab problematika yang membelenggu dirinya. Artinya, perempuan lebih terlatih untuk belajar mandiri walaupun dalam skala yang sempit (kecil). Dari hal yang kecil itulah, peran dan posisi perempuan dapat menjadi *agen of change* bagi dirinya dan orang sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berusaha melakukan sesuatu (meskipun kecil) namun dapat memberikan faedah kepada orang lain, ituah wujud emansipasi yang sesungguhnya. Dalam semua aspek kehidupan, perempuan juga memiliki akses yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh kalangan laki-laki. Misalnya, aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya, bahkan politik sekalipun.

Dalam hal politik, perempuan dapat berperan aktif untuk memberikan kontribusi, baik sebagai kontestan kontestasi politik atau sebagai partisipan aktif (menjadi tim sukses, relawan, dan lainnya). Perempuan juga berkesempatan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat berkembang dari masa ke masa tanpa harus melunturkan jati dirinya sebagai perempuan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota pengurus Muslimat NU bahwa dirinya ikut mendukung dan mensukseskan salah satu kontestan politik karena memang solidaritas dan emansipasi wanita. Berikut kutipannya,

> Saya kepingin Jawa Timur dipimpin oleh perempuan, sebab dari dulu Jawa Timur khususnya selalu dipimpin oleh bapak-bapak. Saya melihat dalam Pilkada Jatim tahun 2018 ini, sudah saatnya perempuan yang pemimpin. Secara kemampuan juga tidak diragukan lagi.[336]

Ibu Musrifah mengatakan secara tersirat bahwa perempuan juga bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk memajukan bangsa

[336] Ibu SMF, Pengurus PAC Muslimat NU Watulimo, *Wawancara*, Trenggalek, 5 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan negara khususnya di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut tentu merupakan salah satu wujud emansipasi wanita yang harus didukung sepenuhnya.

Secara terpisah, salah satu aktor Muslimat NU juga memberikan dukungan atas dasar emansipasi wanita.

> *Kulo* milih Bu Khofifah, Mbak... alasan *kulo seng lanang* milih *lanang*, *seng wedok* milih *wedok*. *Suarane didum* Mbak...hehehe. saya *niki khan* di samping sebagai bendahara Muslimat NU Trenggalek, tapi *khan* saya juga kader PKB. Suami *kulo* anggota dewan dari partai PKB. Tapi hal itu tidak jadi masalah. Memilih pemimpin itu harus dari hati nurani.[337]

Berbeda tipis dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Musrifah, Ibu Sutrimariani yang merupakan bendahara Muslimat NU, sekaligus orang PKB. Suaminya adalah Ketua DPRD Trenggalek yang berangkat dari partai PKB. Latar belakang yang berbeda tidak mempengaruhi untuk memilih calon pemimpin di Pilgub Jatim 2018.

Ia berasumsi bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Dengan catatan, perempuan tersebut harus memiliki potensi, kepribadian, kapasitas serta kemampuan dalam memimpin. Tidak mungkin hanya karena sama-sama perempuan lantas harus dipilih. Tetap rekam jejak harus diperhitungkan juga.

Oleh karenanya, emansispasi wanita menjadi penting untuk didukung dan diperjuangkan demi tercapainya kesamaan hak antara laki-

[337] Ibu Hj. STR, Bendahara Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan dalam setiap dimensi kehidupan, satu diantaranya adalah terkait masalah politik.

5. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM

Membahas tentang kapasitas tentu berkaitan dengan beberapa hal, contohnya: kapasitas dapat dimaknai sebagai daya serap atau daya tampung, kapasitas juga dapat diartikan sebagai ruang atau fasilitas yang tersedia, dan kapasitas juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan.

Untuk mengambil peran dalam segala aspek kehidupan, seseorang dituntut untuk memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni. Dalam hal politik juga demikian. Kemauan tanpa kemampuan tentu tidak bisa berjalan seimbang. Tujuan yang dicapai pun tidaklah berbuah maksimal.

Mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam hal ini bersifat wajib. Sebab, semakin tangguh kemampuan dan kualitas manusia, maka semakin mudah dan cepat dalam mencapai tujuan. Jika tidak diikuti oleh kualitas sumber daya manusia, maka segala yang telah direncanakan tidaklah maksimal.

Kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu komponen yang penting dalam setiap dimensi kehidupan. Jumlah anggota organisasi yang banyak dan besar tanpa diimbangi kualitas SDM yang memadai, hanyalah menjadi beban bagi organisasi itu sendiri. minimnya kualitas SDM tersebut disebabkan salah satunya adalah faktor kualitas pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktor Muslimat NU adalah salah satu unsur yang mengambil peran dalam proses demokrasi melalui kontestasi politik Pilkada Jawa Timur 2018. Dari beberapa para pengurus atau sekian banyak anggota Muslimat NU yang berpartisipasi dalam politik (berperan sebagai kontestan, partisipan aktif atau relawan) masih banyak di antara mereka yang mengaku bahwa masih minim dalam urusan kemampuan atau kualitas. Sebagaimana yang disampaikan berikut ini;

> Saya memang memiliki kemauan yang besar terhadap politik. Sejak dulu saya turut serta dalam politik. Meskipun hanya sebatas tim sukses atau relawan salah satu calon. Tapi, di sisi lain saya juga tahu diri bahwa kemampuan saya dalam urusan politik sangatlah minim sekali. Saya memang senang berpolitik. Mengerahkan massa untuk kumpul-kumpul dan kegiatan lainnya. Bahkan saya rela menjadi saksi di tingkat kecamatan. Menunggu dari proses awal, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Saya terus menunggu proses tersebut sampai pada proses penghitungan suara. Meskipun tidak ada perjanjian 'wani piro' saya rela dan ikhlas.[338]

Tidak mudah bagi seseorang untuk memutuskan terjun secara *all out* sebagai relawan atau tim sukses dalam politik. Mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan uang demi mensukseskan calon yang mereka dukung.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa urusan politik bukan serta merta memberikan dukungan kepada salah satu paslon. Lebih dari itu adalah bagaimana kita mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat agar memiliki pemahaman dalam hal politik.

> Menurut saya, dalam politik harus memahami siapa yang diusung dan siapa yang didukung. Para elite politik atau tim sukses atau

[338] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> relawan misalnya, harus paham betul. Bahwa paslon yang maju harus diusung oleh partai politik. Nah..dalam hal ini (Pilkada Jawa Timur 2018) Gus Ipul diusung oleh partai PKB, sedangkan Bunda Khofifah itu didukung oleh Muslimat. Kita tahu bahwa Muslimat itu khan tidak partai politik. Jadi keberadaan Muslimat adalah sebagai pendukung bukan pengusung. [339]

Inilah yang menjadi faktor penghambat aktor Muslimat NU dalam berpolitik. Meskipun keterlibaannya hanya sebagai pendukung salah satu paslon, namun pengaruh dan dampaknya sungguh besar. Meskipun menjadi faktor penghambat, namun di sisi lain hal itu justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemauan yang sungguh tanpa pamrih menjadikan segalanya berjalan lancar, sesuai dengan yang diharapkan.

6. Membangun *networking* dan komunikasi di internal organisasi

Dalam sebuah organisasi, instansi atau lembaga harus diperhatikan dalam masalah komunikasi. Komunikasi menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau *mis-understanding*. Ketika membangun komunikasi di antara banyak orang atau banyak kalangan, maka harus menciptakan sinergitas, dan harmoni dalam menciptakan komunikasi yang efektif.

Komunikasi yang efektif merupakan proses komunikasi yang terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah adanya komunikator (subjek), komunikan (objek), pesan yang disampaikan, media yang digunakan dan adanya umpan balik atau *feedback*. Semua unsur tersebut harus berjalan beriringan sehingga sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

[339] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, organisasi (Muslimat NU, aktor Muslimat NU) telah memberikan informasi kepada seluruh pengurus dan anggota dalam proses sosialisasi Pilkada Jawa Timur 2018. Namun, data di lapangan didapatkan terdapat beberapa kesalahpahaman dalam memberikan dukungan kepada salah satu kontestan politik.

Dalam menangkap sebuah pesan politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU, beberapa di antara anggota Muslimat NU banyak yang *mis-understanding.* Sebagaimana hasil *interview* berikut ini,

> Begini Mbak, saya mau cerita sedikit. Waktu itu Muslimat dikumpulkan di kantor PKB Trenggalek. Per PAC diutus untuk mengirimkan 2 orang untuk mengikuti pertemuan tersebut. Pada waktu itu, Gus Ipul yang terlebih dahulu maju calon Gubernur, kemudian Bu Khofifah muncul belakangan. Akhirnya *khan* jadi bingung semua. Namun, ada beberapa instruksi agar netral. Milih siapapun *monggo*, *thoh* keduanya sama-sama orang NU. artinya jangan terlalu fanatik lah...[340]

Dari ungkapan di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa antara komunikator, komunikan dan pesan yang disampaikan mengandung ambiguitas. Ibu Insyi secara tidak sengaja menerima informasi bahwa calon Gubernur dari Muslimat NU akan maju dalam perhelatan kontestasi politik Pilgub Jatim 2018.

Tentu hal ini membuat bingung orang-orang yang berada dalam satu forum yang sama. Pesan yang disampaikan menimbulkan multi-tafsir sehingga hal ini menjadi penghambat bagi para aktor Muslimat untuk menangkap informasi yang telah disampaikan dalam pertemuan

[340] Ibu Hj. ISS, Ketua PAC Muslimat NU Pogalan, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal. Inilah yang mengakibatkan munculnya gesekan di dalam internal organisasi itu sendiri.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Insy, salah satu aktor Muslimat NU juga mengakan hal serupa,

> *Kulo ngih* setengah bingung juga. Kan kita sebelum ada Bu Khofifah, kita sudah bersatu dengan PKB. Kemudian Bu Khofifah muncul di belakang. Bagaimanapun juga Bu Khofifah adalah ibu kita bersama. Tapi karena sudah seperti itu (sudah ada ikrar untuk mendukung Gus Ipul). Kita tetap tanggungjawab. Kepada Gus Ipul dan Bu Khofifah sama-sama kita lakukan (menyerukan untuk memilih salah satu sesuai hati nurani). Yang terpenting kami mengambil jalan yang terbaik.[341]

Gesekan yang terjadi di internal organisasi ini menyebabkan beberapa aktor Muslimat NU mengalami kebingungan dalam menentukan Pemilihan. Hal ini disebabkan karena adanya mis-komunikasi yang terjadi di internal itu sendiri. Meskipun menentukan Pemilihan adalah urusan masing-masing, namun beberapa di antara mereka banyak yang *sendiko dawuh* kepada ketua atau panutan mereka.

Inilah pentingnya membangun komunikasi di antara beberapa pihak. Komunikasi sebagai wujud interaksi yang dilakukan oleh setiap personal dengan tujuan akhir adalah menyamakan sebuah 'persepsi'. Persepsi yang dimaksudkan disini adalah tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Komunikasi juga bagian dari kebutuhan manusia yang dilakukan setiap hari, baik komunikasi yang bersifat formal atau informal, dalam

[341] Ibu Hj. DRJ, Ketua PAC Muslimat NU Munjungan, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga formal atau lembaga non-formal yang memperhatikan beberapa aspek, misalnya kapan komunikasi dilakukan, dengan siapa, pesan apa yang akan disampaikan, dan lainnya. Meski demikian, dalam prakteknya banyak komunikasi yang gagal dilakukan karena adalah kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Kesalahpahaman itu terjadi ketika antara kamunikator dan komunikan memiliki tafsiran yang berbeda-beda dengan satu pesan yang sama. Oleh karenanya, kesalahpahaman ini perlu diminimalisir agar terwujud komunikasi yang efektif sehingga dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi baik secara personal, kelompok atau masyarakat yang lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang Melatarbelakangi Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Politik Lokal

Gambar 9

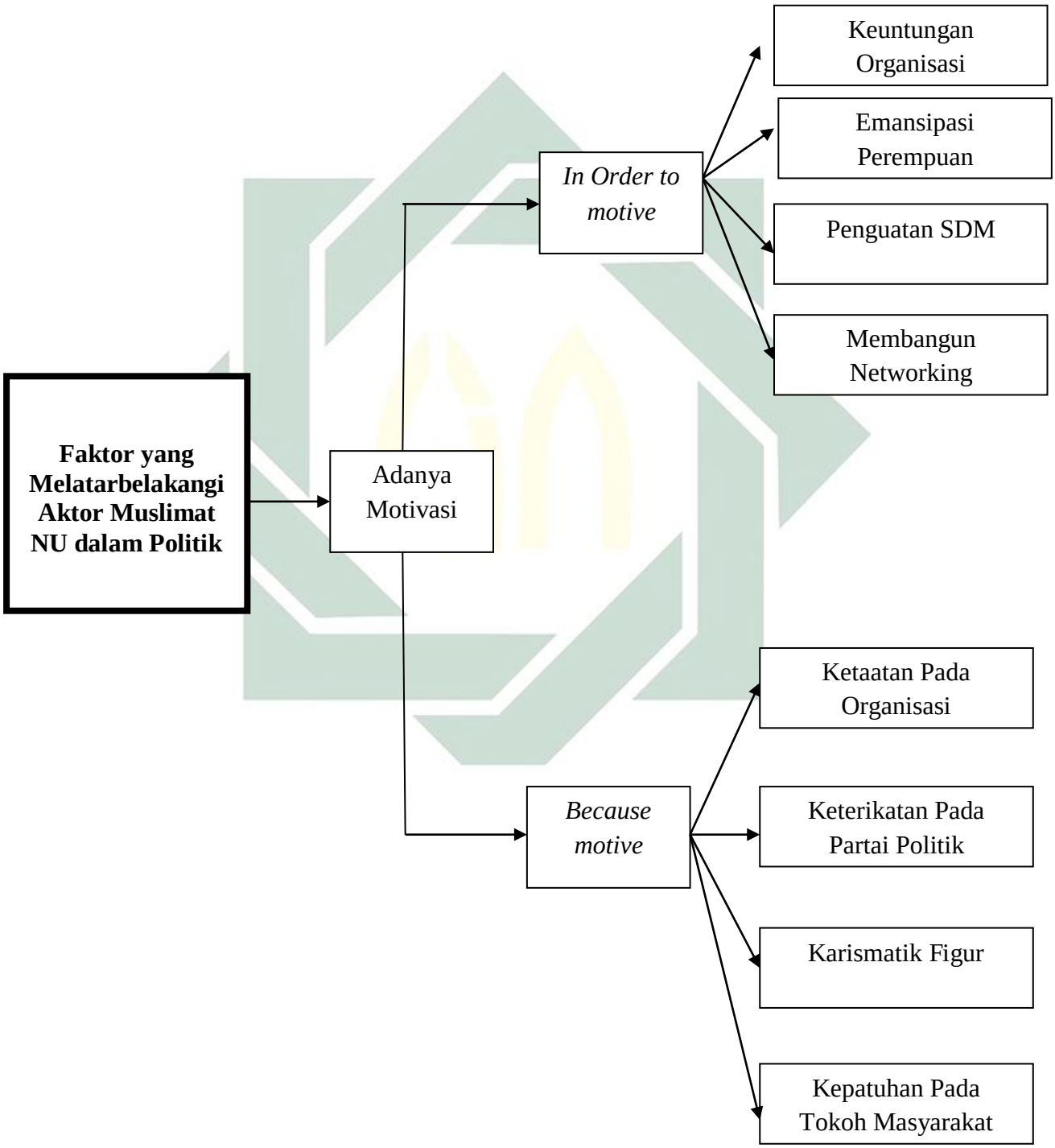

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

EKSPERIMENTASI POLITIK MUSLIMAT NU TRENGGALEK PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018

I. Kebijakan Organisasi Muslimat NU Trenggalek dalam Pilgub Jatim 2018

1. Muslimat NU Trenggalek: Merespon Kebijakan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jatim tentang Pilgub Jatim 2018

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 yang lalu, Muslimat NU Trenggalek dalam kebijakan organisasinya mengikuti kebijakan dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Muslimat NU Trenggalek merupakan bagian dari Muslimat NU Jawa Timur.

Secara garis organisasi, Muslimat NU Trenggalek tunduk dan patuh terhadap semua kebijakan organisasi yang sesuai dengan visi misi organisasi. Namun, di luar kebijakan organisasi, pengurus Muslimat NU Trenggalek memiliki hak masing-masing secara personal, misalnya dalam aspek politik yaitu dalam kontestasi politik elektoral Pilgub Jatim 2018.

Oleh sebab itu, perlu untuk menjelaskan bagaimana respon Muslimat NU Jawa Timur terdapat Muslimat NU Trenggalek. Peneliti telah melakukan *interview* kepada Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur atas Pengurus Cabang secara umum termasuk Muslimat NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trenggalek. Untuk mempermudah mengklasifikasi setiap Pengurus Cabang, maka diperlukan sistem zonasi guna sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi di tingkat cabang.

Adapun beberapa zonasi/karesidenan tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini:

Pembagian Zonasi/Karisedenan

Tabel 6

No.	Zonasi/Karesidenan	Kabupaten/Kota
1.	Tapal Kuda	Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab.Pasuruan
2.	Madura/Blok M/Arek	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kangean
3.	Pantura	Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro
4.	Mataraman	Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri (Kab/Kota), Jombang, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Nganjuk, Madiun, Ngawi
5.	Metropolis	Surabaya, Malang, Mojokerto (Kab/Kota)

Dari tabel di atas dapat dilihat setiap Pimpinan Cabang Muslimat NU se-Jawa Timur berada dalam wilayah karesidenan masing-masing. Setiap karesidenan memiliki koordinator untuk membantu Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur dalam melakukan sosialisasi, koordinasi maupun konsolidasi organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslimat NU Jawa Timur melakukan koordinasi dan konsolidasi politik bersama-sama dengan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur untuk memberikan dukungan moril kepada calon Gubernur Jawa Timur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur berikut ini:

> Kami Muslimat NU Jawa Timur semuanya utuh mendukung Bu Khofifah. Dari Muslimat wilayah sampai Muslimat NU ranting semuanya adalah saudara. Karena bersaudara, sudah selayaknya mendukung penuh Bu Khofifah. Apalagi Bu Khofifah adalah pimpinan pusat Muslimat NU. Ketua Umum organisasi perempuan Nahdlatul Ulama.[342]

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dukungan Muslimat NU yang diberikan kepada salah satu pasangan calon adalah untuk membangun dan mempertahankan kelompoknya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh David L. Paletz bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh seorang individu atau komunitas tidak akan pernah lepas dari peran simbolik media.[343] Muslimat NU dalam hal ini sebagai simbol dari sebuah komunitas yang sedang melakukan aktifitas politik.

Paletz menambahkan jika seseorang atau kelompok memiliki keinginan dalam mempertahankan kelompok atau dominasi kelompok, maka mereka harus membangun jaringan dan gerakan melalui memaksimalkan kekuatan simbol yang dimiliki. Kekuatan simbol

---

[342] Disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, Ibu Hj. Masruroh Wachid, M. Si dalam acara Rapat Konsolidasi Pemenangan Khofifah-Emil di Mojokerto. 08 April 2018. Juli Hantoro, "Kata Muslimat NU: Mendukung Khofifah-Emil itu Untuk Dunia Akhirat", https://Pilkada.tempo.co/read/1077852/kata-muslimat-nu-mendukung-khofifah-emil-itu-untuk-dunia-akhirat. diakses tanggal 15 Juni 2019.

[343] David L. Paletz dalam *'Political Culture and Political Communication',* (Barcelona: Duke University, 1994), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat berupa apapun termasuk organisasi sosial atau masyarakat. Dalam politik, kekuatan simbol biasanya diwujudkan melalui komunikasi politik yang efektif dan terarah.

Pernyataan di atas juga direspon oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Trenggalek sebagai berikut:

> Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur Alhamdulillah melakukan turba secara rutin ke cabang-cabang. PW menyampaikan program-program organisasi dan agenda-agenda yang harus direspon dengan cepat. Kami, Pimpinan Cabang Muslimat NU Trenggalek merespon hal tersebut untuk mensukseskan agenda itu.[344]

Meskipun *statement* dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Trenggalek tidak menyebut secara langsung agenda 'politik' tersebut namun respon cepat dilakukan dengan cara komunikasi dan konsolidasi di jajaran Pengurus Cabang sampai ke Pengurus Anak Cabang yang kemudian dilanjutkan di struktur organisasi paling bawah yaitu Pengurus Ranting.

Komunikasi dan konsolidasi dilakukan secara secara personal tanpa membawa bendera Muslimat NU Trenggalek, meskipun aktor politik ini termasuk bagian dari keluarga besar organisasi Muslimat NU Trenggalek. Inilah wujud kekuatan simbol yang mampu memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat.

Kekuatan simbol tidak akan bisa bermakna apabila tidak ada relasi dan interaksi dengan yang lain. Terbangunnya makna simbolik jika

[344] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interaksi sosial terjadi. Interaksi simbolik merupakan sebuah interaksi yang berusaha untuk mengungkapkan realitas sosial tentang perilaku manusia. Hal ini terjadi karena adanya interaksi kultur antar individu yang saling berhubungan, baik dari segi aspek masyarakat atau kelompok.[345]

Interaksi sosial secara simbolik menurut George Herbert Mead dapat terjadi ketika suatu masyarakat diorganisasikan dalam lingkungan yang sama, sehingga dapat dilakukan identifikasi personal satu dengan lainnya.[346] Dengan cara seperti itu, sebuah komunitas akan dapat dibentuk dan disatukan. Inilah yang menjadi salah satu cara untuk membangun jaringan dari berbagai aspek manapun.

Muslimat NU Jawa Timur mempunyai kader sampai pada akar rumput dapat dengan mudah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi pada setiap kegiatan termasuk pada saat musim 'pil-pil-an'. Meskipun Muslimat NU bukan organisasi politik, dan harus kembali ke *khittah*. Namun setiap warga masyarakat termasuk warga Muslimat NU memiliki hak untuk berpolitik. Meskipun ada batasan-batasan yang harus ditaati. Secara garis organisasi, Muslimat NU tidak berpolitik, akan tetapi secara personal mereka memliki hak yang sama dengan yang lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Muslimat NU Jawa Timur berikut ini:

---

[345] M. Syahran Jailani, 'Interaksi Simbolik, Konstruktivisme, Teori Kritis, Postmodernimisme dan Poststrukturalisme: Telaah Basis Teoritis Paradigma Penelitian Kualiatatif', *Edu-Bio;* Vol. 3, 2012.

[346] George Herbert Mead, *Mind, Self And Society: From The Standpoint of a Social Behaviorist,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Muslimat NU sebagai warga bangsa mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kontestasi manapun, termasuk dalam pilgub Jatim 2018. Dan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional termasuk maju menjadi calon Gubernur.[347]

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa semua warga masyarakat memiliki hak untuk berkontribusi bagi negaranya. Kontribusi tersebut dapat berbagai macam bentuknya, sehingga mempunyai nilai kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat luas. Apakah ia mencalonkan diri sebagai pemimpin, atau sebagai tim sukses, atau sebagai relawan, atau ia memilih sebagai orang yang pasif dalam hal tersebut. Semuanya memiliki hak personal.

Muslimat NU dalam hal ini juga memiliki hak yang sama. Namun, bagi mereka yang bergabung dalam sebuah lembaga sosial, khususnya yang berafiliasi ke NU, maka ada aturan main yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar (AD/ART) masing-masing organisasi. Secara *khittah* organisasi, Muslimat NU tidak berpolitik, akan tetapi secara personal (baik anggota maupun pengurus) Muslimat NU harus berpolitik.[348]

Pernyataan tambahan juga diungkapkan oleh Ibu SMR selaku Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur bahwa kembali ke *khittah*

---

[347] Ibu Hj. SMR, Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara melalui WhatsApp*, 12 Nopember 2019.

[348] Telah dijelaskan dalam AD/ART Muslimat NU bahwa untuk mewujudkan visi misi organisasi harus memiliki strategi agar visi misi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Salah satu di antaranya adalah: (1) meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, kompetitif yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa, dan negara. (2) berkhidmat aktif dalam segala aspek kehidupan. (3) meningkatkan jejaring dan kemitraan dengan lembaga/organisasi yang tidak bertentangan dengan visi dan misi orgaisasi Muslimat NU. Pimpinan Pusat Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslmat NU, 23-27 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan berarti tidak berpolitik.[349] Meskipun pernyataan tersebut harus dikonfirmasikan lebih lanjut. Senada dengan pernyataan tersebut di atas, *statement* dari wakil sekretaris Muslimat NU. Ia mengatakan bahwa meskipun Muslimat NU bukan partai politik, dan tidak boleh berpolitik. Namun, secara personal tidak ada larangan untuk berpolitik.[350]

Merespon apa yang disampaikan oleh Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, Sekretaris PC Muslimat NU Trenggalek juga memberikan tanggapannya. Berikut kutipan *interview*:

> Sebagai warga negara yang baik memang harus ikut mensukseskan Pilkada ini. Tentu ini adalah sebuah ikhtiar politik yang harus kita dukung sama-sama. Menurut saya, Pilgub Jatim 2018 ini adalah Pilkada yang paling berat, sebab kedua calon merupakan kader terbaik NU dan Muslimat NU. Namun demikian, kita sebagai Pimpinan Cabang harus bersikap netral, walaupun ada 'permainan' di dalamnya.[351]

Secara tersirat apa yang disampaikan Sekretaris PC Muslimat Trenggalek memiliki makna 'bimbang'. Ia menyebutkan kata 'paling berat'. Kata-kata tersebut menuntut seeorang untuk memilih di antara dua pilihan dengan kriteria yang paling baik. Kedua calon yang sama-sama maju dalam kontestasi politik elektoral ini memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Selain itu, hal yang dinilai berat adalah keduanya sama-sama kader terbaik nahdiyin yang secara kebetulan berangkat dari titik *miqat* yang berbeda.

---

[349] Ibu Hj. SMR, Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara melalui Whatshaap*, 12 Nopember 2019.
[350] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.
[351] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun kedua calon kader terbaik NU, namun perlu diperhatikan bahwa Khofifah dan Gus Ipul tidak diberangkatkan oleh NU, melainkan diberangkatkan oleh partai politik. Oleh karenanya, partai politik sebagai pengusung menjadi 'kendaraan' dan 'mesin' kedua calon tersebut. Walaupun demikian, pengurus Ormas (secara personal) juga memiliki peran untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU telah disebutkan secara spesifik bahwa organisasi Muslimat NU diperkenankan untuk menjalin hubungan kemitraan, kerjasama, dan jejaring dengan pihak manapun yang tidak bertentangan dengan visi dan misi Muslimat NU. hal ini pertanda bahwa selama kerjasama tersebut dapat menciptakan kemaslahatan atau hajat orang banyak, maka tidak ada larangan bagi Muslimat NU untuk turut serta.

Sebab, komunikasi dan interaksi dengan pihak di luar Muslimat NU dapat membangun *trust* kepada masyarakat luas. Dari komuikasi dan interaksi itulah bagaimana sebuah organisasi besar dapat memahami setiap perilaku para anggotanya. Dengan demikian, perilaku aktifitas komunikasi itu akan memunculkan banyak simbol yang bermakna.

Membaca dan mengamati partisipasi Muslimat NU dalam Pilgub Jatim 2018 dapat ditelusuri melalui berbagai *statement* atau pernyataan dari para petinggi pengurus Muslimat NU Jawa Timur di jajaran pengurus harian. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur bahwa keterlibatan Muslimat NU dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilkada Jatim adalah untuk mendukung sepenuhnya calon Gubernur yang secara kebetulan juga kader terbaik Muslimat NU.

Warga Muslimat NU harus mendukung Bu Khofifah karena beliau adalah ketua umum Badan Otonom perempuan NU. namun, tidak hanya itu alasan mendukung beliau. Menurutnya, Bu Khofifah tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Satu hal lagi, bahwa mendukung Bu Khofifah tidaklah soal jabatan, lebih dari itu ini adalah soal perjuangan.[352]

Secara tegas dan lugas Ibu Masruroh Wachid mengatakan bahwa menjadi sebuah keharusan untuk mendukung dan mensukseskan Bu Khofifah agar dapat terpilih menjadi Gubenur Jawa Timur dan dilantik. Hampir seluruh anggota Muslimat NU Se-Jawa Timur menyatakan kesanggupan dan kesediaannya dalam mengawal suara ketua umum Muslimat NU.

Secara bersamaan, pernyataan Ketua PW Muslimat NU Jatim tersebut ditanggapi juga oleh Sekretaris PC Muslimat NU Trenggalek, berikut kutipannya:

> Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua PW merupakan sesuatu yang wajar. Mungkin yang dimaksud sebagai 'warga Muslimat NU' adalah seluruh kaum perempuan di Jawa timur yang secara individu memiliki hak suara dalam proses Pilgub ini.[353]

---

[352] Moch. Andriansyah, "Muslimat NU Ungkap Alasan Dukung Khofifah di Pilgub Jatim", https://www.merdeka.com/politik/muslimat-nu-ungkap-alasan-dukung-khofifah-di-pilgub-Jatim.html; diakses tanggal 20 September 2019.

[353] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia mengatakan tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PW Muslimat NU Jatim. Dalam pernyataan tersebut memang secara lugas bahwa warga Muslimat NU Jatim harus mendukung Khofifah dalam perhelatan Pilgub Jatim 2018 ini. Mungkin pernyataan tersebut dianggap sebagian kalangan bahwa Muslimat NU telah berpolitik praktis. Tentu hal tersebut tidak boleh dipandang sepihak. Muslimat NU membangun relasi dengan siapapun, organisasi manapun, institusi atau bahkan dengan partai politik sekalipun.

Sejalan dengan pendapat di atas, Imam Suprayogo mengatakan bahwa politik mengandung relasi yang kuat dengan kehidupan agama itu sendiri.[354] Kehidupan manusia di dunia dapat termanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya aspek sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan bahkan politik.

Ia menambahkan bahwa agama dan kehidupan politik memiliki korelasi ketersalingan. Bahwa seseorang hidup tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai religiusitas semata, namun berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia mencontohkan bagaimana Rasulullah disamping menjadi pembawa *risalah* juga sebagai kepala negara, yang berkecimpung dalam utusan administrasi dan birokrasi ketatanegaraan.

Secara *historical studies*, keterlibatan umat Islam (baca kyai) dalam perhelatan politik terlihat konkrit ketika proses memperjuangkan

[354] Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN-Malag Press, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan Indonesia. Itu artinya, umat Islam dan politik laksana dua sisi mata uang yang selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Dengan begitu, hubungan diantara keduanya dimaknai sebagai *two power,* memiliki dua kekuatan besar yaitu Islam sebagai kekuatan agama (*religious power)* dan kekuatan politik (*political power).*[355]

Berkaitan dengan hal tersebut partisipasi Muslimat NU dalam politik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah keikutsertaan dalam memberikan usulan mengenai kebijakan umum, kritik, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedang partisipasi pasif adalah keikutsertaan yang cenderung menerima, mentaati, dan melaksanakan semua keputusan pemerintah.[356]

Jika dianalisis dari klasifikasi di atas, maka Muslimat NU tergolong sebagai orang atau kelompok yang melakukan partisipasi aktif. Sebab, peran organisasi ini berperan aktif secara penuh dalam mensukseskan salah satu pasangan calon sehingga calon tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu wujud konkritnya yaitu dengan turut memberikan hak suara dalam proses Pilkada.

Sementara itu, partisipasi politik menurut Lester Milbarth dan Goel[357] dapat dibedakan menjadi empat kategori. *Pertama,* apatis. Seseorang yang memiliki sikap acuh tak acuh terhadap proses demokrasi

[355] BJ Bollan, *Pergumulan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 16.
[356] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Grasindo, 1992), 142.
[357] Lester Milbarth dan M. L Goel, *Political Participation,* (Chicago: Rand McNally College Publishing, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipengaruhi oleh aspek emosional, sosial dan lainnya. Dalam kategori ini, orang tersebut tidak memberikan perhatian terhadap politik sehingga cenderung untuk menarik diri dari proses politik.

Kedua, spektator. Kategori ini adalah seseorang yang setidaknya pernah berpartisipasi dalam proses politik meskipun dengan intensitas yang jarang. *Ketiga*, gladiator. Partisipasi gladiator ini merupakan orang-orang yang secara aktif berpartisipasi berkontribusi serta terlibat secara langsung dala proses politik.[358]

Dukungan dan gerakan anggota Muslimat dilakukan secara masif oleh perorangan dan secara non-formal. Karena organisasi yang memiliki landasan yang jelas kita pasti kembali kepada khittah. Tapi persoalannya adalah yang hadir adalah kader Nahdlatul Ulama, khususnya Muslimat NU, maka warga Muslimat NU bergerak secara non-formal untuk memberangkatkan pimpinannya. Hal ini merupakan sikap spontan dan otomatis.[359]

Keempat, pengkritik. Orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Partisipasi non-konvensional dapat dimaknai sebagai partisipasi politik yang tidak sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Partisipasi ini

[358] Partisipasi gladiator ini dilakukan oleh seorang komunikator politik (yaitu orang yang bertugas untuk mengadakan komunikasi secara intens) untuk menfasilitasi komunikasi secara langsung, secara tatap muka, aktifitas partai dan pekerja kampanye, dan aktifitas masyarakat.
[359] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat baik secara personal maupun kelompok.[360]

Partisipasi dalam memberikan dukungan baik secara individu maupun kelompok digunakan oleh Muslimat NU secara masif. Ada beberapa asumsi bahwa pilihan politik Muslimat NU diduga akan sama dengan pemilihan Muslimat NU secara institusi. Asumsi ini mungkin benar mungkin salah. Sebab, anggota Muslimat NU yang memiliki kedekatan emosional secara dekat akan turut berpartisipasi aktif.[361]

Namun, semakin berkembangnya wawasan pengetahuan dan pendidikan serta derasnya berbagai informasi yang mereka peroleh, akhirnya beberapa pengurus atau anggota Muslimat NU tidak turut berpartisipasi aktif dalam proses politik. meskipun tidak secara signifikan. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur memberikan pengarahan kepada seluruh warga masyarakat khususnya warga Muslimat NU Trenggalek untuk menyuarakan hak pilih dalam proses politik.

2. Muslimat NU Trenggalek Berpolitik Melalui Politik Kultural

Secara definitif politik memang identikkan dengan sebuah kekuasaan, sebab politik sejatinya berkaitan dengan kekuasaan. Ketika

[360] Dalam hal ini, partisipasi politik juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi konvensional adalah partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. Adapun bentuk-bentuknya misalnya, pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, dan sejenisnya. Sebaliknya partisipasi non-konvensional adalah partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Misalnya, pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik, dan sejenisnya.

[361] Munawir Haris, 'Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah', *At-Tahrir*, Vol. 15, no. 2 November 2015, 283-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dihubungkan dengan kultural atau budaya, maka posisi politik dan budaya menjadi sebuah satu keping koin yang tidak bisa dipisahkan. Namun, NU selepas kembali ke *khittah* 1926, organisasi ini bergerak dalam politik kultural. NU sebagai organisasi masyarakat yang besar dengan pengaruh dan kekuatan yang besar pula, justru memiliki *moral force* atau kekuatan moral tersendiri.[362]

Politik kultural yang dipakai oleh Muslimat NU Trenggalek dalam kontestasi politik Pilkada Jatim 2018 berupa sebuah tindakan yang secara konkrit dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Organisasi Kemasyarakatan ini bergerak secara masif dan konsisten sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh KH. M. Sahal Mahfudz bahwa NU tidak hanya memiliki kekuatan politik secara kultural, melainkan NU harus mampu mempengaruhi proses demokrasi tanpa semata memperoleh kekuasaan.[363]

Muslimat NU Trenggalek selain bergerak di bidang dakwah, sosial, pendidikan, juga menaruh perhatian terhadap perkembangan dinamika politik yang sedang terjadi. Hal ini didorong oleh semangat perubahan dan pembaharuan, maka di dalam mengelola sebuah institusi atau ormas harus memunculkan ide-ide dan nilai-nilai perubahan yang bersifat akomodatif.[364]

---

[362] NUonline, "Menegaskan Kembali Politik Kultural", https://www.nu.or.id/post/read/7106/menegaskan-kembali-politik-kultural; diakses tanggal 24 September 2019

[363] Ibid.

[364] Usiono, (ed), *Kontribusi Ormas Islam dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad Ke-21*, (Medan: Perdana Publishing, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadirnya ormas Islam perempuan ini menjadi salah satu wujud dari partisipasi kaum perempuan mengembangkan sebuah demokrasi yang didalamnya mengandung upya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kejujuran, serta kebersamaan dalam perbedaan.[365] Oleh karenanya, Muslimat NU perlu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk ikut serta memperjuangkan kepentingan anggota dan masyarakat masyarakat secara luas.

Selain itu, Muslimat NU yang juga merupakan bagian dari gerakan sosial mempunyai orientasi yang berbeda dengan partai politik. Ralp Turner dalam *Collective Behavior* membagi gerakan sosial berdasarkan orientasinya.[366] *Pertama,* gerakan yang berdasarkan pada kekuasaan *(power-oriented movement).* Oreintasi ini memiliki tujuan utama untuk mendapatkan kekuasaan, pengakuan, label, dan status dari para pengikut gerakan sosial tersebut.

Kedua, gerakan sosial yang berorientasi pada nilai *(value-oriented movement).* Gerakan ini memiliki ciri dengan komitmen para pengikutnya terhadap suatu prinsip yang menolak segala bentuk kompromi demi sebuah tujuan yang telah dicita-citakan. *Ketiga,* gerakan yang berorientasi pada partisipasi *(participation-oriented movement).* Gerakan ini adalah sebuah gerakan yang hanya mencari kekurangan dalam masyarakat tanpa memberikan solusi.

---

[365] Catur Wibowo, dkk., 'Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah', *Jurnal Bina Praja*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2015, 1-20.
[366] Ralp Turner & Lewis Killian, *Collective Behavior* (New York: Prentice Hall, 1957).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari pembagian orientasi di atas, posisi Muslimat NU setidaknya cenderung pada orientasi nilai. Orientasi nilai ini bisa dikatakan sebagai orientasi yang gigih mempertahankan pilihan politiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu akan berbeda orientasi manakala Muslimat NU adalah sebagai partai politik. Masyarakat luas sudah paham jika yang 'bermain' politik adalah dari partai, maka orientasinya pasti mengarah pada *power-oriented movement*, orientasi kekuasaan semata.

Tahun 2018 merupakan tahun dimana Muslimat NU Trenggalek berperan aktif untuk kesekian kalinya ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam politik. Majunya tokoh sentral Muslimat NU, yakni Khofifah Indar Parawansa untuk ketiga kalinya merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab moral dalam memajukan kesejahteraan warga masyarakat khususnya warga Jawa Timur. Hal ini tidak serta merta untuk mencari kedudukan atau kekuasaan. Lebih dari itu adalah bagaimana menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

Justru hal ini menjadi tantangan bagi warga Muslimat NU Jawa Timur khususnya Muslimat NU Trenggalek, sebab 'ibu' dari warga Muslimat NU ini maju dalam perhelatan Pilgub Jatim untuk kali ketiga (tahun 2008, tahun 2013, dan tahun 2018). Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua PW Muslimat NU Jawa Timur bahwa warga Muslimat NU Jatim harus ikut membantu mensosialisasikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkampanyekan kader terbaik dari rumah sendiri. Hal ini tidak serta merta mencari kedudukan tertinggi di level Jawa Timur. Namun, bagaimana berjuang untuk mewujudkan kemaslahatan dan hajat warga masyarakat.

Aktifitas politik yang terus dilakukan oleh Muslimat NU Trenggalek di seluruh lapisan masyarakat adalah dengan cara dakwah kultural dalam berpolitik. Dakwah kultural dalam berpolitik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan bertatap muka secara langsung, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Cara ini biasa dipakai oleh oleh warga Muslimat NU Trenggalek dengan rutin yasinan, tahlil keliling, jam'iyyah dan lain sebagainya.

> Saya sebagai pengurus cabang sekaligus pimpinan Anak Cabang merasa tergerak untuk ikut mensukseskan Pilkada ini. Sejak sepuluh tahun yang lalu semangat itu tidak pernah hilang. Saya merasa bertanggungjawab untuk memenangkan Ibu Khofifah. Makanya saya secara pribadi juga turun langsung ke ranting-ranting untuk menghadiri rutinan tiap ranting.[367]

Aktifitas turun ke bawah atau biasa disebut turba merupakan agenda rutinan yang dilakukan oleh jajaran pengurus, baik di tingkat cabang sampai ke ranting. Dalam rutinan tersebut biasanya diisi dengan shalawatan, yasinan, dan yang terakhir sambutan dari pimpinan anak cabang.

Dari situlah peran aktor Muslimat NU sangat efektif dan efisien. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan, bahwa meskipun ia

[367] Ibu QMR, Pimpinan PAC Gandusari, *Wawancara*, Trenggalek, 27 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan arahan atau instruksi kepada pengurus Muslimat yang berada di bawah, ia tidak mengatasnamakan diri sebagai pengurus Muslimat NU, namun kepada kepada ajakan dari diri sendiri. disinilah pentingnya menggunakan bahasa yang komunikatif.

Penggunaan bahasa juga diperlukan dalam menggambarkan representasi budaya oleh aktor politik atau aktor sosial. Dalam konteks ini maka istilah politik budaya atau politik kultural adalah bentuk perjuangan yang berkelanjutan dalam menganalisa kondisi politik yang sedang terjadi.[368]

Muslimat NU Trenggalek melalui politik kultural menjadi salah satu alternatif untuk merepresentasikan keinginan warga masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya. Sebab sebagaimana yang diungkapkan di atas bahwa politik budaya merupakan sebuah bentuk dari perjuangan yang akan dilakukan oleh Muslimat NU Trenggalek dalam mendukung dan mensukseskan kontestasi politik melalui Pilkada Jatim 2018.

Russell Ferguson dalam sebuah catatannya mengatakan bahwa marginalisasi dan budaya kontemporer cenderung 'tidak pernah berbicara atas namanya sendiri'. Otoritasnya didasarkan pada ketiadaan.[369] Ketika berbicara tentang wacana dominan, tanpa mengidentifikasi siapa yang berbicara, namun terdapat hubungan dominasi di balik sebuah pesan.

---

[368] Nina Glick Schiller, 'Cultural Politics and the Politics of Culture', *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 04 May 2010. DOI: 10.1080/1070289X.1997.9962580 http://dx.doi.org/10.1080/1070289X.1997.9962580.

[369] Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh Minh-ha and Cornel West, eds, *Introduction: Invisible Center. In Out There: Marginalization and Contemporary Cultures*, (New York: The New Museum of Contemporary Art, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuatan dalam menyampaikan pesan secara komunikatif akan mampu memberikan dampak dan efek yang sangat besar bagi warga masyarakat. Muslimat NU Trenggalek berupaya untuk selalu komunikatif dalam menyampaikan pesan tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh Muslimat NU Trenggalek tidaklah untuk mengutamakan kepentingan pribadi, tidak untuk mengutamakan kepentingan organisasi, namun lebih pada kepentingan warga masyarakat khususnya warga nahdiyin secara keseluruhan.

Dengan cara tersebut, dakwah kultural dalam berpolitik secara bersamaan akan terbangun. Warga masyarakat khususnya kalangan bawah akan lebih mudah diberikan pemahaman secara langsung mengapa penting untuk ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak pilih dalam proses demokrasi, baik di tingkat desa ataupun di level pemilihan presiden sekalipun. Selain itu, cara persuasif juga dilakukan oleh anggota Muslimat NU baik sebagai relawan, tim sukses atau yang lainnya.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Kacung Marijan yang berjudul *The Study of Political Culture in Indonesia,*[370] ia menyatakan bahwa secara umum terdapat du akategori dalam konsep budaya politik. *pertama,* budaya politik dipahami secara struktural. Sudut pandang ini terlihat pada politik budaya sebagai bagian dari fenomena politik. adapun fenomena tersebut terdiri dari sikap, orientasi, keyakinan, dan emosi dalam masyarakat.

[370] Kacung Marijan, 'The Study of Political Culture in Indonesia', *Masyarakat Kebudayaan dan Politik,* Th XII, No 2, April 1999, 57-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, budaya politik dipandang secara fungsional atau instrumental. Dalam hal ini, budaya politik berfungsi sebagai penentu perilaku politik. oleh sebab itu, sebuah demokrasi harus membutuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan sikap terhadap objek politik. Pola perilaku masyarakat inilah yang dihayati dan digunakan oleh anggota masyarakat daam kehidupan sehari-hari. Sehingga budaya politik dapat membangun sistem nilai bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

J. Muslimat NU Trenggalek dalam Pilgub Jatim 2018

1. Sikap dan Peran Muslimat NU Trenggalek dalam Pilgub Jatim 2018

Muslimat NU Trenggalek dalam Pilgub Jatim 2018 memiliki sikap dan peran tersendiri untuk merepon aktifitas politik yang terjadi di Trenggalek. Hiruk pikuk perhelatan politik 2018 diikuti oleh dua pasangan. Keduanya sama-sama sebagai kader terbaik dari organisasi masyarakat NU. Gus Ipul yang *notabene* adalah kader terbaik NU dan Ibuu Khofifah adalah ketua umum Muslimat NU yang secara garis organisatoris berada dalam Badan Otonom (Banom) NU. Meskipun keduanya diusung dari partai yang berbeda.

Meski demikian, keduanya harus diusung oleh partai politik sehingga posisi dan peran NU dan Muslimat NU hanya sebagai pendukung, bukan pengusung. Organisasi NU dan Muslimat NU merupakan organisasi non-politik yang mempunyai visi dan misi kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke *khittah.* Salah satu redaksinya adalah organisasi yang berada di bawah naungan NU tidak boleh berpolitik.

Oleh karenanya, agar nilai dan sikap politik dapat berfungsi dengan baik, maka setiap individu maupun kelompok perlu memegang nilai-nilai dan sikap dasar yang telah ditentukan. Nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan aktor politik sangat penting untuk efektifitas demokrasi. Karena itu, sangat penting mengetahui dan memahami konteks untuk menentukan efek dari berbagai bentuk partisipasi politik.[371]

Sikap Muslimat NU Trenggalek tetap patuh dan taat aturan yaang sudah dipahami bersama-sama. Namun, ada hal yang krusial bahwa Muslimat NU berpolitik tidak membawa bendera organisasi melainkan membawa bendera merah putih. Kebersamaan dan persatuan menjadi tujuan utama dalam agenda politik ini. Tujuannya untuk meewujudkan Jawa Timur lima tahun ke depan menjadi lebih baik.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu DAS melalui wawancara. Ia mengatakan bahwa:

> ...salah satu kader yang berangkat adalah ketua Muslimat NU, maka warga Muslimat NU bergerak secara non-formal (tidak membawa atribut organisasi). Hal ini merupakan sikap yang spontan dan otomatis.[372]

Oleh karenanya peran politik perempuan Muslimat NU diartikan sebagai proses keterlibatan perempuan dalam aktifitas politik, baik dalam

[371] Davidov, E., Schmidt, P., & Schwartz, S. H. 'Bringing values back in: The adequacy of the European Social Survey to measure values in 20 countries', *Public Opinion Quarterly, 72* (3), 2008, 420-445.
[372] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga formal maupun non-formal.[373] Tidak hanya dalam aktifitas politik saja, Muslimat NU mengacu pada bidang garapannya memiliki berbagai aspek dalam turut serta mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat melalui berbagai bidang, seperti: bidang dakwah, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga advokasi.

Untuk fokus pada bagaimana sikap dan peran Muslimat NU dalam Pilgub Jatim 2018, maka Muslimat NU Trenggalek melalui Pimpinan Wilayah menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya warga Muslimat NU, dari Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting untuk mensukseskan Pilgub Jatim 2018 dengan menyuarakan aspirasi mereka melalui pemilihan umum.

Sejalan dengan pernyataan Ibu DAS di atas, berikut ini kutipan wawancara melalui pesan singkat *whatshApp* beberapa waktu yang lalu dengan Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur,

> ...Sikap Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur dalam Pilkada Jatim 2018 adalah menganjurkan, menyarankan dan mendorong seluruh masyarakat khususnya anggota Muslimat NU untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan golput.[374]

Pernyataan di atas lebih bersifat umum, dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebab, tingkat partisipasi yang tinggi akan mempengaruhi jumlah suara yang didapatkan. Ia juga sepertinya menganggap bahwa tolak ukur kesuksesan sebuah pesta demokrasi salah

[373] M. Abdul karim, *Wacana Politik Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 54-55.
[374] Ibu Hj. SMR, Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara melalui Whatshaap,* 12 Nopember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya dengan banyaknya tingkat partisipasi warga masyarakat dalam memberikan hak suara.

Dalam kontestasi Pilkada Jatim 2018, peran Muslimat NU dalam memberikan dukungan moril kepada salah satu pasangan calon dapat dilihat secara riil di lapangan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pasangan calon, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan dalam satu kesempatan bahwa peran Muslimat NU sungguh sangat luar biasa. Semua kompenan bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Kerja keras dan kerjasama organisasi masyarakat Muslimat NU menjadi salah satu motor penggerak sampai ke tingkat paling bawah.[375]

Khofifah juga menambahkan peran Muslimat NU dalam kontestasi Pilkada kali ini juga diikuti dengan berbagai do'a-do'a khusus, munajat kepada Allah, serta berbagai wiritan diamalkan sebagai wujud ikhtiar agar calon dari Muslimat NU dapat berhasil dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita. Artinya, ada kekuatan spiritual yang menjadi keyakinan kader Muslimat NU bahwa *riyadhah* dapat berhasil apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Selain itu banyak kader-kader Muslimat NU Trenggalek yang menjadi relawan dalam Pilgub Jatim 2018. Mereka rela menjadi relawan, tim sukses yang tidak kenal lelah, berjuang dengan jiwa raga

[375] Sofyan Cahyono, "Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim", https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/07/2018/khofifah-yang-sakti-muslimat-nu-Jatim/; diakses tanggal 21 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencari dukungan dari masyarakat luas. Di samping itu, banyak relawan yang tidur di beberapa kampung-kampung, berkeliing dari satu titik ke titik yang lain, namun usaha dan ikhtiar mereka tidak terekspos oleh banyak orang termasuk media massa.

Eksistensi dan kekuatan Muslimat NU juga telah diapresiasi serta diakui oleh elit-elit partai politik. Muslimat NU adalah bukan organisasi masyarakat sembarangan. Jaringan yang tersebar di seluruh penjuru sampai pada kader di akar rumput. Organisasi masyarakat yang memiliki jaringan yang telah mengembang secara matang baik secara struktural maupun kultural.

Akan tetapi, dalam konteks perhelatan politik di Jawa Timur, terdapat sosok kharismatik yang mampu memberi pengaruh yang besar dalam kontestasi politik tersebut. Sosok kyai dan dan pesantren memiliki peranan yang luar biasa. Hal ini merupakan relasi-relasi kekuasaan yang sangat strategis yang akan menjadi *starting point* bagi masing-masing pasangan calon atau kontestan politik, khususnya dalam perhelatan politik Pilgub Jatim 2018.

Relasi-relasi tersebut dalam bahasa Michel Foucault disebut sebagai relasi kekuasaan. Menurutunya, kekuasaan adalah sebuah strategi dalam berbagai lingkup yang senantiasa mengalami perubahan dan pergeseran. Ia juga memberikan batasan makna mengenai kekuasaan, yaitu (1) kekuasaan tidak dapat dilokalisir, (2) kekuasaan berkaitan dengan jaringan, (3) kekuasaan memberikan struktur kegiatan, (4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan tidaklah represif melainkan produktif, (5) kekuasaan adalah melekat pada kehendak untuk dapat diketahui dan dipahami.[376]

Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah hubungan kepemilikan sebagaimana properti. Kekuasaan juga tidak dipahami sebagai fungsi dominasi berdasarkan pada kelas ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Marx. Kekuasaan juga tidak dipahami sebagai bagian dari kharismatik seperti pendapat Max Weber.[377] Namun kekuasaan dapat dipahami sebagai situasi yang strategis dan kompleks dalam sebuah masyarakat.

Kekuasaan bagi Foucault dipandang sebagai relasi yang beraneka ragam yang tersebar sebagaimana sebuah jaringan, dimana jaringan tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat strategis. Oleh sebab itu, memahami kekuasaan harus diawali dengan pertayaan bagaimana kekuasaan beroperasi? atau dengan cara apa kekuasaan tersebut dioperasionalkan, bukan dengan pertanyaan apakah kekuasaan itu dan siapa yang berkuasa atas kekuasaan itu sendiri?.[378]

Foucault berpikir bahwa salah apabila kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki dan digunakan lembaga secara opresif terhadap individu dan kelompok. Sehingga mereka mencoba untuk memindahkan

---

[376] Umar Kamahi, 'Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik', *Jurnal Al-Khitabah,* Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133.

[377] Dalam pandangan Max Weber yang juga seorang sosiolog mengatakan bahwa relasi kuasa dapat dilihat dari otoritas kharismatik. Ia membagi otoritas menjadi tiga macam, yaitu otoritas kharismatik, otoritas, tradisional dan otoritas rasional. Lihat Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization,* (New York, 1946), 358-381.

[378] Kamahi, 'Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik', 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan sebagai penindasan sederhana terhadap golongan yang lemah.[379]

Jika dikaitkan dengan relasi kuasa milik Michel Foucault, maka posisi kyai (Bu Nyai di Muslimat NU) tidak memiliki peran yang signifikan dalam memproduksi sebuah kekuasaan. Meskipun seorang kyai atau Bu Nyai memiliki kharisma dalam dirinya untuk mempengaruhi para jama'ahnya. Itulah sebabnya, para elite NU (dalam hal ini Muslimat NU) selalu kontinyu dalam membuat dan membentuk jaringan sampai akar rumput.

Namun, dalam sebuah artikel yang berjudul *Values, Attitudes, and Political Participation in Mexico* diungkapkan bahwa *'...political attitudes reflect a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor'*.[380] Maksud dari *statement* tersebut bahwa faktor kharisma tidak menentukan seseorang untuk dipilih dalam sebuah perhelatan politik. Justru sikap politik individu mencerminkan kecenderungan psikologi dengan beberapa tingkat kesukaan atau ketidaksukaan.

Meski demikian, perebutan kekuasaan yang diikuti oleh dua kader elite terbaik NU di Jawa Timur tetap berjalan harmonis, kondusif, dan demokratis tanpa ada pertikaian dan permusuhan di antara kedua calon pasangan. Inilah salah satu bentuk ikhtiar politik yang dilakukan oleh

[379] Sergiu Balan, *M. Foucault's View On Power Relations*, Institute of Philosophy and Psychology, C.R. Motru", Bucharest, 20 November 2017, 38.
[380] Alejandro Pastrana-Valls, 'Values, Attitudes, and Political Participation in Mexico', *Palabra Clave*, 2018, 21(3), 673-709. DOI: 10.5294/pacla.2018.21.3.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga masyarakat Jawa Timur dalam membangun harmonisasi dalam perbedaan pendapat.

Proses demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali ini menunjukkan betapa warga masyarakat Jawa Timur telah dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam menyuarakan suara pada perletahan politik Pilgub Jatim 2018. Meskipun pesta demokrasi telau usai dilakukan, namun hubungan, relasi, komunikasi tetap dijaga dan dilestarikan untuk mewujudkan proses pendidikan politik yang santun, damai, sejuk serta menyenangkan.

Meskipun tidak menjadi partai politik, namun Muslimat NU terus membangun komunikasi dan komitmen kepada pemerintah untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam proses demokrasi. Tidak hanya itu, organisasi masyarakat perempuan ini turut serta ikhtiar dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan bermartabat.

Oleh sebab itu, Muslimat NU khususnya Muslimat NU Trenggalek melalui Pilgub Jatim 2018 melakukan upaya politik untuk mewujudkan hal tersebut. Tentu saja sikap politik yang ada dalam Muslimat NU Trenggalek adalah sikap politik yang ditujukan oleh personal, meskipun secara individu mereka berada di bawah Muslimat NU Trenggalek. Sikap tersebut menunjukkan bahwa warga Muslimat NU Trenggalek telah memiliki pemahaman dalam berpolitik. Mereka telah dengan sadar mengetahui bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap kedewasaan dalam politik telah ditunjukkan sebagian besar kader Muslimat NU Trenggalek melalui pesta demokrasi Pilgub Jatim 2018. Salah satu sikap yang dijunjung tinggi oleh warga Muslimat NU Trenggalek adalah sikap moderat dalam politik. Sikap moderat adalah sikap dimana masyarakat telah puas dengan kondisi yang ada dan bersedia untuk maju, mengembangkan potensi yang ada. Namun, sikap ini tidak serta merta menerima berbagai perubahan yang ada. Harus ada hal-hal yang menjadi pertimbangan tersendiri.

Namun, di sisi lain, juga ada sikap warga Muslimat NU Trenggalek yang lebih memiliki bersikap tetap mempertahankan kondisi yang sudah ada. Sikap seperti ini dapat dikategorikan sebagai perilaku *status quo*. *Status quo* ini menganggap bahwa warga masyarakat yang sudah merasa puas dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga hal tersebut patut untuk dipertahankan.

> ....Seperti Bu Khofifah dan Gus Ipul sebagai kader NU sebenarnya tidak ada bedanya. Yang secara kebetulan titiknya Bu Khofifah dari Muslimat NU, sedangkan Gus Ipul dari NU. Keduanya merupakan kader terbaik dan srikandi terbaik dari NU. Kompetisi ini (Pilkada) adalah kompetisi yang sangat wajar, sangat biasa. Namun yang menarik adalah *saking* kuatnya NU, sehingga kader di luar NU tidak mampu berkompetisi di Pilkada Jatim kemarin.[381]

Pernyataan di atas dapat sedikit digambarkan bahwa kader terbaik NU (kedua pasangan calon) yang maju sebagai calon Gubernur adalah bentuk kompetisi yang sehat. Keduanya sama-sama memiliki pengalaman dalam kepemimpinan. Sehingga kompetisi seperti itu dianggap sebagai

[381] Bapak KH. FTS, S.H, Ketua PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang wajar dan bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tanpa ada permusuhan dan perpecahan.

Kaitannya dengan majunya kader terbaik NU, seolah-olah membendung kader dari luar NU tidak memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon kepala daerah sebagai wujud ikhtiar membangun kemajuan bangsa melalui kontestasi politik. tidak dapat dipungkiri bahwa Jawa Timur merupakan lumbung dari warga nahdiyin. Secara ideologi memegang teguh ajaran ahlus sunnah wal jama'ah an-nahdiyah.

Seeorang atau pihak lain tidak diberi ruang untuk turut serta dalam sebuah perhelatan, termasuk perhelatan politik sekalipun. Nyatanya di masyarakat sikap ini ada namun tidak terlalu mencolok. Kendati demikian, ada beberapa alasan kenapa mereka memilih sikap ini. Secara personal atau kolektif mereka akan tetap mempertahankan Pemilihannya masing-masing tanpa menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara sesama. Seperti yang disampaikan salah seorang aktor muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> Masyarakat Trenggalek, jujur saya akui, saya kasih jempol. Masyarakat Trenggalek khususnya Muslimat NU wes podo pinter-pinter. Terbukti setelah pil-pilan selesai semua merapatkan barisan di posisinya masing-masing. Inilah pendidikan politik yang sudah dewasa. Beda Pemilihan itu biasa, dan bagaimana kita bisa berpikir jernih tanpa ada saling mencela satu dengan lainnya.[382]

Pendapat yang disampaikan oleh Ibu STM terkait sikap aktor Muslimat NU Trenggalek dalam politik diakui sebagai sikap yang

[382] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gentlemen. Berani berbeda pemilihan karena memiliki 'jago' masing-masing dalam kontestasi politik Pilkada Jatim 2018. Hampir semua warga Muslimat NU Trenggalek menyuarakan aspirasinya. Meskipun berbeda pandangan dan pendapat satu sama lain sama-sama menghormati.

Hal ini penting untuk dirawat, dijaga dan dipahami oleh seluruh warga masyarakat (khususnya dalam hal ini adalah warga Muslimat NU Trenggalek) bahwa politik tidaklah segalanya, yang lebih penting adalah proses demokrasi dilakukan dengan cara yang santun dan bermartabat. Kedewasaan dalam politik menjadi salah satu *point* yang utama dalam menciptakan kondisi yang adem dan menyejukkan. Ketika proses 'pil-pilan sudah selesai maka warga masyarakat diharapkan saling berangkulan kembali, merapatkan barisan sesuai dengan posisinya masing-masing.[383]

Terkadang pandangan seseorang terhadap politik juga berbeda sebagaimana yang dikemukakan di atas. Dalam sebuah srtikel yang berjudul '*The Role of Organizational Politics, Contextual Resources, and Formal Communication on Change Recipients' Commitment To Change:*

[383] Sikap ini bisa ditelusuri dan diamati dari beberapa group whatsApp yang ada di lingkungan warga Muslimat NU Trenggalek. Ketika proses kampanye berangsung suhu dan tensi politik sedikit memanas karena terdapat dua kubu yang mendukung calonnya masing-masing. Sehingga kegiatan organisasi Muslimat sedikit rancuh (antara kegiatan organisasi dan kegiatan kampanye). Namun, setelah proses Pilkada selesai dan telah diketahui siapa pemenangnya, secara otomatis 'suhu' di dalam group WA tersebut sedikit meredah. Meskipun masih ada beberapa anggota group yang kurang legowo dengan hasil akhir yang telah diumumkan oleh pihak berwenang. Inilah salah satu bukti bahwa warga Muslimat NU telah cerdas dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A Multilevel Study',[384] disebutkan bahwa pandangan seseorang terhadap politik dapat membangun sikap destruktif dan konstruktif sehingga membentuk komitmen orang untuk berubah.

Di satu sisi, sebuah politik dalam sebagai pemicu pandangan destruktif yang menambah kondisi menjadi serba ketidakpastian yang melekat pada perubahan, sehingga memunculkan komitmen yang rendah untuk berubah. Sebaliknya, pandangan konstruktif justru menawarkan adanya sumber daya untuk mengurangi dampak negatif sehingga mendukung adanya perubahan yang positif.

Dalam konteks ini, sikap dan peran Muslimat NU Trenggalek lebih mengarah pada pandangan konstruktif. Bagaimana menciptakan iklim perubahan bagi masyarakat dengan ikut berkontribusi dalam proses demokrasi dan pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pengalaman individu dapat diperoleh dan didapatkan dengan cara yang unik, dengan caranya masing-masing.

Selain melalui refleksi individu, juga melalui akal kolektif yang berasal dari serangkaian interaksi sosial dan agen perubahan, sebab kedua unsur tersebut (antara refleksi individu dan akal kolektif) saling berkesinambungan dalam mewujudkan pilihan politik yang sesuai dengan motivasi-motivasi yang ada pada diri aktor itu sendiri.

[384] Dave Bouckenooghe, 'The Role Of Organizational Politics, Contextual Resources, and Formal Communication on Change Recipients' Commitment To Change: A Multilevel Study', *European Journal of Work and Organizational Psychology,* 579. DOI: 10.1080/1359432X.2011.591573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Muslimat NU Trenggalek: Membaca Arah Dukungan dalam Pilgub Jatim 2018

Mengkaji ilmu politik tidak bisa disamakan dengan membahas ilmu pasti atau ilmu lainnya. Di dalam politik tidak selalu antara *output* dan *input* berbanding lurus. Tidak seperti ilmu matematika, satu tambah satu hasilnya dua. Dalam politik, perhitungan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Bisa saja penjumlahan tersebut hasilnya jauh lebih sedikit atau bahkan jauh lebih banyak.

Berkenaan dengan hal tersebut, Muslimat NU Trenggalek sebagai objek kajian dalam pembahasan ini dan sebagai wadah bagi aktor Muslimat NU Trenggalek memiliki keberagaman dalam menentukan sikap politiknya. Hal itu terlihat dari paparan data yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya.

Pemilihan polilik yang menjadi penentu sikap mereka di dasarkan pada berbagai faktor. Ada yang memakai kondisi sosial sebagai pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan. Seperti pernyataan di bawah ini:

> Dalam Pilkada Jawa Timur 2018 kemarin, ada Bu Khofifah. Beliau orangnya pinter, memasyarakat, dan programnya ketika menjadi Menteri Sosial sudah dikenal warga masyarakat. Kemudian pasangan beliau adalah Bapak Emil. Pak Emil adalah Bupati Trenggalek. Walau bagaimanapun pernah menjadi pimpinan warga Trenggalek. Semoga Pak Emil ingat terus dengan kota Trenggalek. Makanya ya...harus kita pilih.[385]

[385] Ibu SWD, Ketua PAC Muslimat NU Bendungan, *Wawancara*, Trenggalek, 28 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa faktor sosial yang menentukan sikapnya dalam memilih salah satu pasangan calon. Ada semacam kedekatan emosional karena salah satu wakilnya pernah menjadi bagian dari dirinya. Artinya, pasangan calon tersebut pernah menjadi kepala daerah di daerahnya. Sehingga kedekatan emosional telah terjalin antara warga dengan sang pemimpin.

Studi tentang dukungan organisasi memiliki sejarah panjang yang di awali pada tahun 1950-an. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa sebuah dukungan dalam organisasi dapat dicontohkan oleh karyawan kepada atasan. Ketika sebuah organisasi mendapatkan dukungan dari para bawahan, maka yang terjadi adalah terwujudnya lingkungan yang aman dan positif. Oleh karenanya dibutuhkan loyalitas yang penuh.[386]

Loyalitas merupakan bentuk dukungan yang diberikan seseorang kepada orang lain, diberikan orang lain untuk lembaga atau organisasi. Dari loyalitas yang diberikan oleh individu kepada organisasi akan memunculkan keyakinan bahwa usaha mereka dihargai sebagai sebuah usaha kerja keras, tanpa pamrih. Urusan hasil adalah urusan lain yang siapapun tidak akan pernah mengetahuinya. Apapun hasilnya tidak mengurangi layolitas seseorang dalam berjuang.[387]

---

[386] Russell Cropanzano, John C. Howes, Alicia A. Grandey and Paul Toth, 'The Relationship Of Organizational Politics And Support To Work Behaviors, Attitudes, And Stress', *Journal Of Organizational Behavior,* Vol. 18, (1997).

[387] Steven G. Manning, *Appraising Organizational Politics And Support: Challenging Employees To Engage,* (Dissertation: The Degree Of Doctor Of Philosophy Colorado State University Fort Collins, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain karena faktor kondisi sosial, ada juga faktor lain yang menentukan seseorang untuk memilih salah satu paslon.

> Kalau kemarin ada himbauan dari PC Muslimat NU Trenggalek *khan* harus ke Bu Khofifah. *Lha*...kalau dari PKB *khan* ke Gus Ipul. Kalau saya terus terang, karena saya orang PKB, saya harus mendukung Gus Ipul (karena saya manut *dawuh*nya guru-guru saya, Mursyid saya). Meskipun saya juga Ketua Muslimat Anak Cabang. Namun, untuk semua anggota Muslimat anak cabang, saya anjurkan untuk ke Bu Khofifah, sebab beliau *khan* orang Muslimat NU.[388]

Apa yang disampaikan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek tersebut mengandung dua unsur makna. *Pertama,* ia memiliki relasi yang mendalam dengan sang guru, sehingga harus *manut* apa yang di *dawuh*kan seorang guru kepada seorang murid. Sang guru menjadi patron bagi dirinya. *Kedua,* ia sebagai tokoh Muslimat NU Trenggalek di level kecamatan juga memiliki tanggungjawab moral dalam mengawal suara warga Muslimat NU Trenggalek.

Kedua entitas tersebut sama-sama memiliki konsekwensi logis yang harus ia tanggung. Secara personal, ia wajib mentaati apa yang disampaikan sang guru, secara organisatoris is berkewajiban untuk *sami'na wa atho'na* kepada pimpinan organisasi. Sehingga jalan tengah diambil sebagai langkah antisipasi agar keduanya sama-sama berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang merasa tidak didukung.

Kecenderungan seseorang memilih calon pemimpin juga dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga. Keluarga menjadi unsur yang utama

[388] Ibu Nyai Hj. SMD, Ketua PAC Muslimat NU Durenan, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses tersebut. Sebab, keluarga tempat mencurahkan *unek-unek*, pikiran, saling memberikan Informasi, diskusi tanpa batas sehingga saling memberikan masukan dan tanggapan.

> Awalnya pilihan saya dan suami waktu Pilkada Jatim 2018 tidak sehati. Saya juga tidak memaksa, wong sama-sama memiliki keyakinan (maksudnya pilihan). Namun akhirnya suami saya melihat sendiri dari beberapa debat di TV, akhirnya yaa ikut-ikutan saya, hehehe.[389]

Dari ungkapan di atas, bahwa diskusi bersama-sama dapat memberikan gambaran, masukan, saling beradu argumentasi tanpa menjelekkan pasangan. Diskusi terbuka dengan cara yang santai khas keluarga akan menjadikan suasana penuh keakraban dan saling menghormati tanpa harus berprasangka negatif untuk mendukung calon pemimpin.

Adanya informasi melalui media juga sangat berpengaruh pada psikologi pemilih. Media (baik media massa atau media *online*) memiliki peran untuk menyakinkan pemilih sehingga mempengaruhi pilihan politiknya.

> *Wonten* beberapa *tanggi kulo*, awalnya *dereng manteb* memilih pasangan calon A, *pas ningali* debat *teng* TV *niku akhire ngih sami nderek milih* calon A, *sajak'e* menarik *lan sae ngoten dawuhe*, hehehe.[390]

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Termasuk kebebasan untuk menerima, mencari dan

[389] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.
[390] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan Informasi tentang apapun melalui media apapun.[391] Oleh sebab itu, setiap orang memiliki hak bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan serta mengambil sisi-sisi manfaatnya. Termasuk dalam kehidupan berpolitik.

Dari beberapa pendapat dapat dianalisis bahwa arah dukungan yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek tidaklah bersifat utuh. Aktor Muslimat NU Trenggalek tentu memiliki berbagai pertimbangan yang matang dalam menentukan pilihan. Meskipun dalam politik sangat identik dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.

Arah dukungan aktor Muslimat NU Trenggalek juga dapat dikaitkan dengan kepentingan politis. Sebab, seseorang yang telah masuk dalam lingkungan politik akan terpengaruh pada proses yang ada. Berlangsungnya kehidupan politik sendiri diwarnai dengan tingkat keberadaan aktor politik. Dengan demikian, antara aktor politik dan kepentingan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam politik juga didasarkan pada heterogenitas. Memahami aktor politik sama halnya harus memahami publik. Pubik ini dibagi menjadi dua bagian.[392] *Pertama*, publik dalam makna umum, yaitu masyarakat pemilih yang memiliki

[391] Andrew M. Whelan, *Digital Media: The Cultural Politics of Information*, B. M. Z. Cohen (eds), (New Zealand*:University of Wollongong*, 2012),333.
[392] Andrea D. Rounce, Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion on Decision Making', Department of Political Science Carleton University, *The Canadian Political Science Association's Annual Meeting,* June 3 to 5, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minat dalam politik namun hanya sebatas ikut berpartisipasi secara wajar tanpa ada tendensi apapun.

Kedua, publik sektoral (publik dalam makna khusus). Dalam kategori ini publik khusus hanya berdasarkan ukuran jumlah anggota atau komunitas dalam suatu lembaga atau organisasi. *Ketiga*, publik aktif. Partisipasi publik dalam makna aktif adalah mereka yang mewakili para kaum elite politik yang terlibat secara langsung dalam proses politik.

Ketiga kategori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Namun, jika dilihat dari penjelasan di atas, maka perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam politik dapat digolongkan dalam kategori publik secara khusus. Artinya, Muslimat NU Trenggalek sebagai wadah organisasi perempuan NU memiliki kekuatan dalam segi kuantitas.

Di sisi lain, Muslimat NU Trenggalek telah menjadi bagian dari publik aktif. Maksudnya hampir sebagian besar aktor Muslimat NU Trenggalek turut serta secara aktif dalam proses politik melalui Pilgub Jatim 2018. Mereka secara total dan loyal terhadap pilihan politik masing-masing.

Meskipun suara aktor Muslimat NU Trenggalek tidah utuh kepada salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, namun berdasarkan temuan di lapangan hampir seluruh aktor Muslimat NU Trenggalek yang berada di tingkat anak cabang (tingkat kecamatan) turut andil dan mendukung penuh proses pemilihan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Analisis Perilaku Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Berpolitik

1. Perilaku Politik Aktor Muslimat NU Trenggalek yang Mengarah Pada Orientasi

Perilaku politik aktor Muslimat NU Trenggalek yang mengarah pada orientasi terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, orientasi kognitif. Orientasi ini memberikan pemahaman kepada para aktor politik mengenai pengetahuan tentang politik dan segala dimensinya. seseorang yang terjun ke dalam dunia politik setidaknya harus mengetahui bagaimana orang tersebut bertindak dan berperilaku.

Selain itu seorang aktor politik harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirawan, bahwa perilaku seseorang dalam berpolitik adalah sesuatu yang bersifat *purposive*.[393] Perilaku tersebut harus didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya.

> Menurut saya, dalam politik harus memahami siapa yang diusung dan siapa yang didukung. Para elite politik atau tim sukses atau relawan misalnya, harus paham betul. Bahwa paslon yang maju harus diusung oleh partai politik. Nah..dalam hal ini (Pilkada Jawa Timur 2018) Gus Ipul diusung oleh partai PKB, sedangkan Bunda Khofifah itu didukung oleh Muslimat. Kita tahu bahwa Muslimat itu khan tidak partai politik. Jadi keberadaan Muslimat adalah sebagai pendukung bukan pengusung. [394]

Dengan pernyataan di atas, maka penting memahami posisi seorang aktor politik jika dikaitkan dengan siapa yang mendukung dan siapa yang

[393] Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 191-192.
[394] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusung. Disinilah penting memiliki pemahaman dan pengetahuan secara kognitif. Banyak dari aktor Muslimat NU Trenggalek memiliki pemahaman yang kurang tepat terkait dengan posisi Musimat NU dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018.

Sudah jelas telah disampaikan pada uraian sebelumnya bahwa Muslimat NU adalah organisasi masyarakat non-partai. Ketika Ormas turut berpartisipasi dalam sebuah perhelatan politik, maka posisinya adalah sebagai pendukung, bukan pengusung. Sebab Muslimat NU adalah salah satu organisasi di bawah payung Nahdlatul Ulama'. Oleh karena itu, organisasi masyarakat di bawah bendera NU dilarang untuk berpolitik sesuai dengan *khittah*.

Dengan mengetahui proses dan dinamika dalam dunia politik, para aktor politik (baik secara individu maupun kelompok) disarankan untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan, keputusan dan lainnya. Untuk itu, perlu pemahaman yang utuh agar aktor politik mampu menciptakan kondisi politik yang demokratis namun tetap kritis dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Kedua, Orientasi Afektif. Orientasi ini lebih mengacu pada sikap, perasaan, dan perilaku politik secara personil atau individu. Dalam kategori ini aspek yang ditonjolkan adalah aspek emosiaonal. Bagaimana hubungan kedekatan aktor politik dengan kontestan politik. keduanya membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta harmonisasi dalam sebuah ikatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orientasi afektif ini menunjukkan pada aspek ikatan emosional seseorang. Ikatan tersebut juga berkaitan dengan sistem politik yang memiliki perasaan secara khusus terhadap berbagai aspek sistem politik sehingga mempengaruhi sikap politiknya. Apakah ia menolak atau menerima sistem politik tersebut. Komponen yang paling besar memberikan dan mempengaruhi sikap politik seseorang bersumber dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.

Sebab dari sinilah proses pembentukan sikap dan perilaku seseorang muncul dan berkembang. Seperti pernyataan di bawah ini:

> Awalnya pilihan saya dan suami waktu Pilkada Jatim 2018 tidak sehati. Saya juga tidak memaksa, wong sama-sama memiliki keyakinan (maksudnya pilihan). Namun akhirnya suami saya melihat sendiri dari beberapa debat di TV, akhirnya yaa ikut-ikutan saya, hehehe.[395]

Statement di atas menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya terkait urusan politik, namun lebih bagaimana membangun komunikasi secara sehat dan intens. Pilihan poitik adalah pilihan masing-masing individu, walaupun mereka diikat oleh ikatan keluarga. Namun, hak politik setiap invidu merupakan hak privasi setiap manusia.

Oleh karenanya, sikap dan perilaku yang telah lama bersemi dalam diri seseorang, baik di keluarga, lingkungan masyarakat, dan bahkan lingkungan yang lebih luas dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap proses pembentukan afektif seseorang. Dengan begitu,

[395] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang memiliki perasaan positif maka mereka akan turut berpartisipasi dalam politik secara penuh (baik sebagai partisipan aktif, aktor politik, atau kontestan politik)

Ketiga, orientasi evaluatif. Orientasi ini berkenaan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. selain itu, orientasi juga berkaitan dengan standar nilai yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan politik. sebenarnya orientasi evaluatif ini hampir mirip dengan orientasi afektif.

Adapun yang membedakan adalah apabila orientasi afektif cendung untuk menggunakan perasaan yang melibatkan seluruh individu-individu. Berbeda dengan orientasi evaluatif. Dalam orientasi evaluatif lebih cenderung menggunakan standar moral dalam menilai setiap individu yang terlibat dalam politik.

Jadi, setiap individu diberlakukan standar moral untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam politik. dan dalam orietasi ini, perlu memastikan apakah sistem poltik sudah berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Terutama menyangkut kredibilitas para aktor politik berkaitan dengan integritas sikap dan perilaku. Memastikan bahwa mereka bersih dari perilaku-perilaku yang negatif, misalnya korupsi, kolusi, atau nepotisme.

Inilah yang membedakan antara kedua oreintasi yang sebelumnya, yaitu orientasi kognitif dan oriantasi afektif. Dalam orientasi evaluatif ini yang membedakan adalah adanya standar nilai dan moral. Apabila sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral dinilai bobrok, maka akan terjadi beberapa kemungkinan-kemungkinan, contohnya: individu akan bersikap apatis terhadap proses demokrasi yang ada, atau indvidu akan masuk dalam sistem tersebut untuk memperbaiki sistem yang ada.

Sikap apatis adalah sikap masa bodoh, acuh tak acuh, dan sikap tidak mau terlibat dalam proses politik. mereka menganggap bahwa proses demokrasi yang terjadi tidaklah penting. Mereka juga tidak menghiraukan dan memperdulikan kehidupan politik baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Mereka juga cendurung untuk menutup diri dan acuh terhadap kondisi di sekitarnya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sikap apatis ini muncul karena rendahnya tingkat kepercayaan sistem politik terhadap publik. Selain itu, rendahnya sikap saling menghormati, menghargai, tenggang rasa, kepedulian sosial yang mereka miliki. Untuk mengatasi individu yang demikian, maka perlu kiranya memberikan penyuluhan tentang politik akan pentingnya semangat kerjasama untuk kepentingan yang lebih luas.

2. Perilaku Politik Muslimat NU Trenggalek Melalui Beberapa Aspek dan Pendekatan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penyajian data tentang perilaku Muslimat NU Trenggalek, maka perilaku Muslimat NU Trenggalek dapat dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan dalam aktifitas politik Pilgub Jatim 2018. Berikut ini penjelasan dan pemaparan data serta analisisnya.

Pendekatan yang digunakan oleh Muslimat NU Trenggalek dalam mendukung pasangan calon adalah melalui pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

a. Perilaku Politik Aktor Muslimat NU Trenggalek Melalui Pendekatan Sosiologis

Dalam pendekatan ini, terdapat berbagai nilai-nilai sosiologis yang ada pada diri seorang pemilih kepada kontestan politik. Pegaruh nilai inilah yang menyebabkan seorang pemilih untuk memilih sesuai dengan keadaan sosial yang ada. Sebab nilai-nilai sosial tersebut telah melekat pada dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Adapun yang termasuk dalam nilai-nilai sosiologis adalah kelas sosial, keluarga, status ekonomi, kedaerahan, lingkungan kerja, lingkungan organisasi atau lembaga. Dari berbagai nilai tersebut, aktor Muslimat NU Trenggalek memiliki pedoman dan pegangan untuk menyakinkan pilihan sesuai dengan kedekatan dari berbagai nilai sosial yang telah disebutkan di atas tersebut.

Hal inilah yang telah disampaikan oleh salah satu Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Berikut kutipannya:

> Dukungan dan gerakan anggota Muslimat dilakukan secara masif oleh perorangan dan secara non-formal. Karena organisasi yang memiliki landasan yang jelas kita pasti kembali kepada khittah. Tapi persoalannya adalah yang hadir adalah kader Nahdlatul Ulama, khususnya Muslimat NU, maka warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Muslimat NU bergerak secara non-formal untuk memberangkatkan pimpinannya. Hal ini merupakan sikap spontan dan otomatis.[396]

Kehadiran salah satu kontestan politik dalam Pilgub Jatim 2018 yang juga merupakan tokoh Muslimat NU, Pimpinan Pusat Muslimat NU yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur adalah sebuah ikhtiar politik untuk berjuang dan berhidmat untuk bangsa melalui Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa apabila seorang kader terbaik dari Muslimat NU maju sebagai calon pemimpin, maka wajar akan mendapat dukungan dari anggota Muslimat NU di seluruh Jawa Timur.

> Dalam Pilkada Jawa Timur 2018 kemaren, ada Bu Khofifah. Beliau orangnya pinter, memasyarakat, dan programnya ketika menjadi Menteri Sosial sudah dikenal warga masyarakat. Kemudian pasangan beliau adalah Bapak Emil. Pak Emil adalah Bupati Trenggalek. Walau bagaimanapun pernah menjadi pimpinan warga Trenggalek. Semoga Pak Emil ingat terus dengan kota Trenggalek. Makanya ya...harus kita pilih.[397]

Dalam wawancara tersebut, salah seorang informan mengatakan bahwa ia memilih karena ada hubungan sosial dengan calon wakil Gubernur Jawa Timur. Ia juga mengatakan bahwa secara ikatan emosional masih melekat di dalam benaknya. Bahwa calon wakil Gubernur adalah pernah menjadi bagian dari wilayah atau daerahnya. Sehingga rasa kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya masih berjalan dengan baik.

---

[396] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.
[397] Ibu SWD, Ketua PAC Muslimat NU Bendungan, *Wawancara*, Trenggalek, 28 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bartels dalam *The Study of Electoral Behavior* bahwa nilai-nilai sosial yang telah terpatri dalam benak seorang invidu akan mempengaruhi perilaku dalam menentukan Pilihan politik.[398] oleh karena itu faktor sosiologis sebagai faktor utama yang menentukan pilihan seseorang kepada para kontestan politik. Faktor geopolitik juga menjadi bagian dari pendekatan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kondisi lingkungan masuk dalam kategori pendekatan sosiologis.

Maka analisis data dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dapat mempengaruhi dan menentukan pilihan seseorang terhadap calon pemimpin. Apabila seorang individu melakukan kontak sosial, interaksi sosial dengan lingkungan, maka individu tersebut dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Adman Nursal, bahwa *social group* memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan persepsi dan sikap individu.[399]

Untuk memahami lebih detail dan rinci tentang pendekatan sosiologis, maka harus mengetahui pusat analisisnya. Dalam pendekatan ini yang menjadi *center of analysis* adalah pada kondisi sosial dan lingkungan. Kondisi sosial menjadi penentu utama dalam

[398] Bartels, L. M, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 240.
[399] Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami sikap dan perilaku politik seseorang. Namun, dalam pendekatan ini juga memiliki dimensi lain, yaitu sikap dan perilaku akan berubah secara perlahan sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi.

b. Perilaku Politik Aktor Muslimat NU Trenggalek Melalui Pendekatan Psikologis

Jika dalam pendekatan sosiologi lebih menitik beratkan pada aspek kondisi dan lingkungan sosial. Dalam pendekatan psikologis ini, perilaku aktor Muslimat NU lebih dipengaruhi pada faktor kedekatan secara psikologis dan bersifat *personality*. Adapun dalam pendekatan ini dapat dikategorikan berbagai dengan kedekatan, baik secara personal, psikologis dan emosional. Kedekatan ini juga dapat melalui kedekatan yang bersifat individu atau organisasi tertentu.

Pendekatan psikologis dipengaruhi oleh adanya keterikatan motivasi secara psikologis pada personal sehingga ia memiliki orientasi atau kecenderungan politik kepada calon pemimpin tertentu. Kecenderungan kepada calon tertentu terjadi sebab adanya kedekatan secara psikologis antara pemilih dan para kontestan (baik dari sisi personal maupun garis organisasi.[400]

Seperti yang disampaikan oleh salah satu aktor Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

[400] Dieter Roth., *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: Friderich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, 2008), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kalau kemarin ada himbauan dari PC Muslimat NU Trenggalek *khan* harus ke Bu Khofifah. *Lha*...kalau dari PKB *khan* ke Gus Ipul. Kalau saya terus terang, karena saya orang PKB, saya harus mendukung Gus Ipul (karena saya manut *dawuh*nya guru-guru saya, Mursyid saya). Meskipun saya juga Ketua Muslimat Anak Cabang. Namun, untuk semua anggota Muslimat anak cabang, saya anjurkan untuk ke Bu Khofifah, sebab beliau *khan* orang Muslimat NU.[401]

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa kedekatan psikologis dapat menentukan Pemilihan seseorang terhadap apapun termasuk dalam pilihan politik. Pernyataan di atas dapat digambarkan meskipun secara garis organisatoris ia memiliki jabatan struktural di Muslimat NU anak cabang, namun ia lebih memihak pada *dawuh* para guru-gurunya dan kedekatan dengan partai politik. Artinya kedekatan emosional dan psikologis telah berlangsung lama dan berjalan sampai saat ini.

Sebagaimana dipaparkan oleh Dieter Roth[402] bahwa hubungan psikologi antara pemili dan aktor politik dapat dikaitkan dengan relasi yang dibangun berdasarkan kedekatan secara organisasi, lembaga atau partai politik sekalipun. Hubungan keduanya telah dibangun di atas komunikasi yang baik, harmonis dan menyatu, sehingga muncul perasaan dari seorang pemilih untuk memiliki tanggungjawab atas keberhasilan sebuah organisasi atau partai politik.

---

[401] Ibu Nyai Hj. SMD, Ketua PAC Muslimat NU Durenan, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Maret 2019.
[402] Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, seorang aktor politik yang telah memiliki kekuatan *trust* dan modal kepecayaan dalam diri seseorang atau organisasi tertentu harus memiliki komitmen sehingga kepercayaan tersebut menjadi senjata bagi dirinya. Selain itu, seorang aktor politik harus memiliki kualitas instrumental untuk menyakinkan masyarakat, dan memiiki integritas yang tinggi sebagai wujud dari menjunjung tinggi moralitas aktor politik.[403]

> Sejak Bu Khofifah mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jatim 2008 sampai sekarang tahun 2018. Pemilihan saya tidak pernah berubah. Meskipun ada calon yang lebih bagus atau bahkan lebih pinter dari Ibu, saya tetap mendukung dan memilih ibu.[404]

Pernyataan di atas menggambarkan betapa kedekatan emosional dan psikologis telah dibangun dalam kurun waktu yang lama. tidak serta merta karena garis lurus organisasi. Namun, kecakapan dan kelihaian seorang kontestan politik untuk 'merawat' dengan baik para pemilih yang 'istiqamah'. Komunikasi yang dibangun setiap saat dengan cara salah satunya melakukan turba (turun ke bawah) meskipun tidak ada agenda politik.

Inilah pentingnya merawat dan menjaga hubungan agar terwujud komunikasi yang melibatkan kedua pihak (*two way communication)*. Komunikasi dan sosialisasi menjadi bagian dari cara merawat hubungan tersebut. Adapun sosialisasi ini bertujuan untuk

[403] Andriyus, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Singingi Hilir pada Pemilihan Umum Legislatif 2009', *Journal of Government, Social and Politics*, vol. 2, nomor 2, September 2013, 27.
[404] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka melek informasi terkait proses politik dan pentingnya berpartisipasi di dalamnya.

Media dan sarana sosialisasi poitik dapat melalui keluarga, media massa, lingkungan kerja, pergaulan di masyarakat, dan lainnya. Dengan adanya sosialisasi politik, masyarakat memahami dan mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan politik dengan jelas. Sebab, partisipasi masyarakat salah satu penentu keberhasilan proses politik dan demokrasi di Jawa Timur khususnya di Trenggalek.

c. Perilaku Politik Aktor Muslimat NU Trenggalek Melalui Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional ini jenis pendekatan yang mengadopsi dari teori ekonomi. Maka asumsi dasarnya adalah berangkat dari ekonomi-politik. oleh karenanya, dalam pendekatan pilihan rasional ini memiliki tujuan bagaimana menyajikan tentang perilaku politik sesuai dengan kondisi dan situasi pasar (dalam hal ini masyarakat). Kondisi pasar menentukan seseorang dalam menentukan pilihan politiknya

Sesuai teori dan prinsip ekonomi bahwa seorang aktor politik mengeluarkan biaya politik sekecil mungkin untuk memperoleh profit sebanyak-banyaknya. Jika dikaitkan dengan kajian sosiologi, maka Pemilihan yang diambil sesuai dengan kepentingan personal namun hasilnya untuk kemaslahan khalayak umum. Hasilnya dapat dinikmati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama oleh masyarakat. Meski demikian, pendekatan pilihan rasional tetap berorientasi pada prinsip dan nilai kemaslahatan.

> Gus Ipul adalah kader NU dan juga layak lah untuk berangkat karena pernah menjadi Wakil Gubernur. Akan tetapi masyarakat secara umum sudah sangat tahu kapasitas masing-masing kader NU tersebut. Ibu Khofifah selama ini bergerak untuk Indonesia, Gus Ipul juga bergerak untuk Jawa Timur (Indonesia). Dua-duaya sudah menjadi tokoh yang luar biasa di kancah perpolitikan.[405]

Apa yang disampaikan oleh salah satu pengurus Muslimat Jawa Timur tersebut mengandung pernyataan yang memberikan kebebasan untuk memilih pemimpin bagi seluruh warga nahdiyin khususnya warga Muslimat NU di seluruh Jawa Timur. Kedua pasangan calon yang sama-sama memiliki visi misi untuk memajukan Jawa Timur, namun melalui pintu dan titik yang berbeda.

Masyarakat Jawa Timur khususnya warga Muslimat NU telah cerdas dalam menentukan sikap bagaimana mereka harus berperilaku dan bertindak. Oleh sebab itu, baik NU maupun Muslimat NU sama-sama memiliki tujuan mulia dalam membangun dan mewujudkan Jawa Timur menjadi wilayah yang lebih maju dan sejahtera. Kedua organisasi tersebut bergerak bersama namun dengan cara, metode dan strategi yang berbeda. Dengan harapan mencapai tujuan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

[405] Ibu Dr. DAS, M.SI, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu sosiolog Barat, James Samuel Coleman[406] merupakan tokoh yang memunculkan teori pilihan rasional atau *rasional choiche theory*. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa segala perilaku sosial yang mengarah pada perilaku manusia (secara personal) dapat menentukan setiap keputusan yang dihasilkan. Karena konsep dasar teori ini adalah fokus kepada masing-masing orang secara personal yang mengarah pada sebuah *value.*

Finn Collin dalam *Social Reality* juga mengemukakan hal yang senada dengan apa yang disampaikan oleh James Samuel Coleman. Collin mengatakan bahwa aktorlah yang memahami dan mengetahui yang apa akan ia lakukan untuk menentukan pilihan politik. sebab, sebuah perilaku seseorang dapat menunjukkan identitas pribadinya. Oleh sebab itu, seorang aktor dapat membangun realitas sosialnya melalui interpretasi atau terjemahan terhadap perilakunya sendiri. [407]

Interpretasi tersebut dapat menghasilkan sebuah *meaningfulness* atau kebermaknaan.[408] Bagi Collin, fakta manusia dan sosial merupakan hasil dari perilaku manusia yang dihubungkan dengan *meaning*. Meaning atau makna adalah fakta final dari sebuah aksi

[406] James S. Coleman lahir di Bedford, Indiana pada tahun 1926. Ia dibesarkan di Amerika Serikat bagian Selatan dan Tengah. Lulus Diploma Sekolah Menengah dari Dupont Manual High School di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1944. Kemudian ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang Kimia dari Universitas Purdue tahun 1949. Setelah itu melanjutkan studinya pada Universitas Columbia dan memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Sosiologi tahun 1955. Lihat Peter V. Marsden, The Sociology Of James S. Coleman, *Annu. Rev. Sociol*, on January 24, 2005, 2-3., 2-3. DOI: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122209. lihat selengkapnya Jon Clark (ed), *James S.Coleman*, (London and New York: Routledge Falmer, 1996), 422-441.
[407] Finn Collin, *Social Reality*, (London and New York: Routledge, 1997), 112.
[408] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihasilkan oleh seorang aktor sehingga menghasilkan sebuah perilaku dan tindakan.[409]

Pendekatan yang terakhir ini merupakan reaksi atau kritikan atas pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Sebab, dalam kedua pendekatan yang sebelumnya, tidak dijumpai sesuatu yang mengarah pada hasil dan *value*. Hal yang membedakan dalam pendekatan pilihan rasional adalah pendekatan yang memiliki orientasi pada hasil.[410]

> Alasan saya memilih karena calon Gubernur dari organisasi kami berangkat. Secara otomatis saya dan lainnya memilih itu. Andaikata terpilih kan kita yang di struktur bawah dapat merasakan dan mengakses program-programnya. Sebab, Muslimat NU yang ada di ranting juga butuh respon dari pemerintah. Orang-orang yang ada di bawah pengen juga menikmati 'kue' pembangunan dari pemerintah.[411]

Terdapat berbagai pertimbangan rasional mengapa aktor Muslimat NU Trenggalek memilih pasangan calon A atau B. Salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan secara organisasi, karena mengadopsi dari teori ekonomi, maka pendekatan pilihan rasional ini sebagai produk "itung-itungan', mengkalkulasi, menghitung seberapa besar keuntungan dan seberapa kerugian yang akan diterima, terlebih bagi seorang pemilih.[412]

Keuntungan berupa bagi-bagi 'kue' pembangunan meskipun diungkapkan oleh salah seorang dari aktor Muslimat NU Trenggalek, namun di sisi lain adalah 'kue' pembangunan tersebut dapat dinikmati

[409] Ibid., 115
[410] Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, 49.
[411] Ibu SDM, S. Pd, Ketua PAC Muslimat NU Karangan, *Wawancara*, Trenggalek, 16 Maret 2019.
[412] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik.* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak, kemaslahatan khalayak umum, dan dirasakan secara merata kepada masyarakat luas.

Ketiga pendekatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berpartisipasi dalam politik termasuk memilih calon pemimpin dalam kontestasi politik adalah kegiatan atau aktifitas politik yang otonom. Dalam menentukan pilihan, seorang pemilih tidak ada paksaan, desakan, bahkan ancaman dari pihak manapun. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan perilaku politik.

Namun yang menjadi benang merah adalah sikap dan perilaku politik tersebut dapat ditentukan dari berbagai faktor yang melekat pada diri seorang pemilih. Baik faktor internal maupun eksternal. Semua faktor tersebut saling berkesinambungan dalam menentukan pilihan politik seseorang.

Coleman mengungkapkan ada dua mekanisme dalam menentukan pilihan rasional. Pilihan rasional yang bersifat mikro dan makro. Ia memberikan gambaran perilaku aktor yang bersifat mikro yang mengarah pada sifat makro. *Pertama* perilaku kolektif. Analisanya adalah fenomena perilaku makro ini sebagai dinamika perilaku kolektif yang tergolong dinamis. *Kedua*, norma. Norma ini berguna untuk mengidentifikasi perilaku setiap individu. Oleh karenanya, studi norma tentang perilaku, bagaimana kepatuhan seorang aktor dapat membawa manfaat bagi target.[413]

[413] Marsden, The Sociology Of James S. Coleman, 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, aktor korporat. Dalam pembahasan struktur sosial, seorang aktor politik berusaha mendapatkan apa yang diinginkan meski hal tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan lembaga atau organisasi. Kondisi tersebut dinamakan oleh Coleman sebagai aktor korparat.

3. Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Aktor Muslimat NU Trenggalek

Membahas tentang bentuk-bentuk perilaku politik sama halnya dengan mengkaji bentuk-bentuk partisipasi politik. Sebab, perilaku identik dengan peran serta atau partisipasi dalam politik. Aktor politik dalam kaitannya dengan perilaku politik merujuk pada peran serta aktor Muslimat NU Trenggalek dalam partisipasi politik melalui Pilkada Jawa Timur 2018.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek bermacam-macam, misalnya: dengan partisipasi secara aktif, ada juga yang partisipasi pasif, partisipasi individual, partisipasi kolektif, dan partisipasi lainnya. Partisipasi yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek lebih berorientasi pada partisipasi yang bersifat individual maupun kolektif.

Jika dilihat dari segi sifatnya, maka perilaku politik seseorang dapat digolongkan menjadi beberapa macam. *Pertama*, perilaku radikal. Perilaku ini menunjukkan sebuah sikap ketidakpuasan dengan keadaan yang ada sehingga menginginkan terjadi perubahan secara cepat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam. Dalam perilaku ini menuntut perubahan yang bersifat instan, sehingga tidak membutuhkan kompromi dengan pihak lain.

Kedua, perilaku moderat. Perilaku ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh individu atau masyarakat yang puas dengan keadaan yang ada dan bersedia untuk menuju perubahan yang lebih baik. Namun sikap ini tidak menerima sepenuhnya bentuk perubahan. *Ketiga,* perilaku *status quo*. Perilaku ini merupakan sebuah sikap yang mempertahankan keadaan saat ini seperti keadaan sebelumnya. Dengan maksud lain sikap status quo tidak menghendaki perubahan sesuai jamannyadan tetap memegang teguh prinsip sebelumnya.

Keempat, perilaku konservatif. Sikap dan perilaku politik yang tidak menghendaki adanya perubahan yang mendasar dalam sebuah sistem politik. Sikap ini banyak dianut oleh orang-orang yang sudah memiliki posisi strategis sehingga mereka diuntungkan dengan keadaan tersebut. Untuk melanggengkan posisi tersebut, aktor politik kemudian turut mengatur dan mengendalikan sistem yang ada.

Kelima, perilaku liberal. Perilaku liberal ini menunjukkan sikap yang mengingkan adanya perubahan secara cepat dan signifikan. Perubahan biasanya berdasarkan atas kekuatan hukum yang bersifat legal formal untuk mecapai tujuan yang diinginkan.

Melihat klasifikasi perilaku politik ditinjau dari aspek sikap, maka perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dapat dikategorikan dalam dua klasifikasi di atas, yaitu perilaku moderat dan perilaku konservatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh dari perilaku konservatif seperti yang disampaikan oleh salah seorang dari aktor Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> Muslimat NU adalah banom dari pada NU. Secara struktural tentu Muslimat NU memiliki koridor dan aturan main sesuai dengan NU. Sebagai seorang 'Bapak', sesuai yang disampaikan oleh NU, kita harus *manut*, mengikuti instruksi. Intruksi yang sesuai dengan Khittah NU. Namun, memang ada beberapa hal yang secara fungsional kita tidak selalu beriringan, akan tetapi saling memberikan dukungan secara penuh.[414]

Dalam wawancara tersebut dengan tegas diungkapkan oleh informan bahwa sebagai Banom NU, Muslimat NU harus *manut* dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Trenggalek. Apapun yang menjadi yang disampaikan oleh seorang 'Bapak' sebaiknya ditaati dan dilaksanakan. Meskipun secara praksis hal ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Muslimat NU Trenggalek di atas bahwa dukungan yang dilakukan oleh warga Muslimat NU adalah merupakan bentuk partisipasi dalam bidang politik, terlebih warga Muslimat NU ikut serta mensukseskan Pilkada Jawa Timur 2018 dengan memilih salah satu pasangan sesuai dengan hati nurani dan tidak ada paksaan bahkan tekanan dari pihak manapun.

Berbeda dengan perilaku konservatif yang memilih untuk bertahan dari perubahan dalam pilihan politik. Perilaku moderat justru lebih terbuka dalam menerima perubahan. Salah satu informan menyatakan

[414] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa keterlibatannya secara aktif dalam Pilgub Jatim 2018 adalah untuk Jawa Timur yang lebih baik, yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun wawancara peneliti lakukan selepas kegiatan rutinan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang Pule beberapa waktu yang lalu. Berikut ini kutipan wawancaranya:

> ...Antara Ibu Khofifah dan Gus Ipul sama-sama memiliki kelebihan masing-masing. Gus Ipul sudah memimpin Jawa Timur selama 10 tahun. Ibu Khofifah juga pernah menjadi Menteri Sosial. Saya kira saatnya Jawa Timur menuju lebih baik. Mari memberikan kesempatan calon lain untuk memimpin Jawa Timur ke depan.[415]

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Semua orang pasti akan mengalaminya. Begitupun juga dengan kekuasaan. Sebagaimana informan dalam politik elektoral ini, ia menaruh harapan kepada calon memimpin Jawa Timur yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Harapan untuk memiliki pemimpin yang baru dapat diwujudkan sehingga apa yang menjadi visi misi kedua pasangan calon dapat direalisasikan dengan cepat dan transparan.

Inilah bentuk perilaku politik atas prtisipasi politik yang dilakukan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek. Para aktor Muslimat NU menggunakan cara yang berbeda-beda dalam melakukan sosialiasi politik. Partisipasi politik sebagai partisipasi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam agenda-agenda tertentu, misalnya, agenda penetapan, pengambilan keputusan, kebijakan organisasi. Dalam hal ini

[415] Ibu SYN, S. Pd, Koordinator bidang Sosial PAC Muslimat NU Pule, *Wawancara*, Trenggalek, 03 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Georg Aichholzer and Doris Allhutter membagi keterlibatan aktor politik menjadi tiga bagian, komunikasi, konsultasi, dan partisipasi.[416]

Secara pribadi maupun kelompok, warga Muslimat NU Trenggalek turut andil dalam menyuarakan pendapatnya. Namun, jika berbicara tentang Muslimat NU maka wadahnya adalah organisasi. Hal ini diperkuat dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Florence Faucher menyebutkan bahwa aktifitas politik saat ini telah ditandai oleh dominasi organisasi yang berbasis keanggotaan massa. Seorang aktor politik (secara individu) akan mencari identitas kolektif dan komitmen dalam jangka waktu yang panjang.[417]

Identitas kolektif tersebut dapat dikategorikan sebuah organisasi atau lembaga. Kehidupan organisasi merupakan bentuk dan wujud dari interaksi politik.[418] Dengan demikian, politik dalam organisasi melibatkan semua unsur dan kekuatan untuk mendapatkan kendali atas daya simbolis yang nyata.

> Perempuan Muslimat NU sudah saatnya berperan dalam pembangunan di Jawa Timur. Entah itu pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA). Sebab saya beranggapan bahwa perempuan Muslimat NU banyak yang memiliki kapasitas untuk memimpin negeri ini melalui Jawa Timur. Kami yang berada di Cabang tentu sangat mendukung jika

[416] Georg Aichholzer and Doris Allhutter, 'Online Forms of Political Participation and Their Impact on Democracy', *European Consortium for Political Research (ECPR)*, Workshop "Professionalisation and Individualised Collective Action: Analysing New 'Participatory' Dimensions in Civil Society", April 2009.

[417] Florence Faucher, New *forms of political participation. Changing demands or changing opportunities to participate in political parties?*, Macmillan Publishers Ltd. 1472-4790 Comparative European Politics 1–25, 2014. www.palgrave-journals.com/cep/.

[418] Bernard Oladosu Omisore and Augustina Nwaneka Nweke, 'The Influence of Power and Politics in Organizations', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, July 2014, Vol. 4, No. 7 ISSN: 2222-6990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat salah satu kader terbaik NU khususnya dari Muslimat NU yang akan ikut dalam kontestasi politik.[419]

Partisipasi aktif inilah yang ditunjukkan oleh aktor Muslimat NU Trenggalek dalam kontestasi Pilkada Jatim 2018. Adapun tujuan utamanya untuk meningkatkan partisipasi politik (khususnya kaum perempuan) adalah adanya sistem kuota (dalam pemilihan legislatif). Rancangan ini sebagai langkah afirmatif bahwa negara yang memiliki sistem kuota memunculkan banyak peluang bagi kaum perempuan untuk turut berperan serta dalam politik.[420]

L. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktor Muslimat NU Trenggalek dalam Politik

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi aktor Muslimat NU Trenggalek dalam politik, tentu harus mengetahui motivasi yang mendorong aktor Muslimat NU Trenggalek untuk ikut berpartisipasi (baik sebagai relawan maupun sebagai tim sukses) dalam politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa motivasi yang menyebabkan mereka aktif berkampanye untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon.

Terdapat dua macam motif para aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik. *Pertama, in order to motive* yaitu sebuah aksi atau tindakan

[419] Ibu SDM, S. Pd, Ketua PAC Muslimat NU Karangan, *Wawancara*, Trenggalek, 16 Maret 2019.
[420] Margareth Beshrer, "Pertisipasi Perempuan Dalam Politik Semakin Meningkat", https://www.voaindonesia.com/a/partisipasi-perempuan-dalam-politik-semakin meningkat/4837337.html; diakses tanggal 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kejadian di masa depan. *Kedua, because motive* yaitu setiap aksi atau tindakan yang terjadi di masa lampau. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Muslimat Trenggalek berikut ini:

> Saya sebagai Ketua Cabang Muslimat NU Trenggalek, motivasi saya adalah memenuhi hak saya untuk nyoblos dan memilih pemimpin negeri ini. Pemimpin Jawa Timur.[421]

Sedangkan motivasi lainnya adalah mendukung salah satu pasangan calon karena melihat figur atau ketokohan.

> Motivasi *kulo derek niki* memang untuk memenangkan Bu Khofifah, Mbak.. *Kulo mboten wonten* pikiran berubah sedikit pun sejak tahun 2008. *Kulo sampun demen kalian* Bu Khofifah, *kulo ngih* sering *kepanggih* ketika pertemuan di wilayah acara rapat Muslimat NU di Surabaya. *Kulo sampun mantep* dan bertekad jiwa raga untuk membantu Bu Khofifah supaya bisa berhasil *magang* sebagai Gubernur. Dan Alhamdulillah, Bu Khofifah menang. *Kulo* sangat bersyukur, semoga Bu Khofifah dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani.[422]

Selain itu, ada juga motivasi yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas, mereka memiliki motivasi tersendiri dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini disebabkan karena berbagai pengalaman dan pembelajaran yang sudah dialami selama beberapa tahun ke belakang. Tentu hal ini menjadi sah ketika seseorang memilih didasarkan atas petimbangan rasional.

> Saya adalah pengurus Muslimat NU Trenggalek sekaligus pengurus PPKB Trenggalek. Saya sudah lama gabung dalam partai PKB. Secara ideologis dan fisiologis, saya dibesarkan dari partai PKB. Pengalaman perdana mengikuti kontestasi politik adalah melalui pencalonan anggota DPRD Trenggalek. Kalo tidak salah tahun 2004.

[421] Ibu Nyai Hj. ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 Juni 2019
[422] Ibu SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Alhamdulillah saya lolos menjadi anggota dewan sampai dua periode. Itu merupakan pengalamanyang luar biasa, banyak hal dan ilmu yang saya peroleh ketika menjadi wakil rakyat. Dengan segala suka dukanya.[423]

Berangkat dari motivasi dua motif di atas yakni *in order to motive* dan *because motive*, maka dapat diulas sebagai berikut

a. Ketaatan pada organisasi atau lembaga

Bentuk kepatuhan seorang pengurus atau anggota sebuah organisasi adalah salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk ketaatan akan instruksi atau perintah yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi (ketua pada level tertentu) kepada seluruh pengurus atau anggota.

Sebagaimana yang terjadi di Muslimat NU Trenggalek. Dalam memberikan sebuah perintah, ketua Muslimat NU Trenggalek tidak serta merta menginstruksikan agar memilih pasangan tertentu. Namun, dengan bahasa persuasif, personal kepada personal pesan politik tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh anggota Muslimat NU Trenggalek di level akar rumput.

Hal ini dapat ditemui dari salah satu pengurus Muslimat NU Trenggalek di tingkat kecamatan (Anak Cabang) berikut ini:

> Saya salah satu pengurus PC Muslimat Trenggalek, jujur waktu itu, pas pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 saya memilih calon dari Muslimat NU. alasannya saya yaa...karena saya taat pada pimpinan saya. Ketua Muslimat mencalonkan, ya..saya memang taat pada

[423] Ibu Hj. STM, M. Ag, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> aturan dan pada pimpinan. Saya *ndak* fanatik pada partai apapun. Pokoknya saya taat pimpinan itu saja.[424]

Ketaatan ini juga didasarkan pada pimpinan organisasi untuk selalu mengikuti dan melaksanakan setiap program-program yang telah direncanakan oleh impinan wilayah. Apabila program dari Pimpinan Wilayah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pimpinan Cabang dan seterusnya, maka tujuan organisasi akan tercapai sesuai dengan cita-cita organisasi.

> Saya yang seorang PNS tentunya harus netral dalam urusan politik, soal mendukung calon A atau B, namun secara pribadi saya juga punya hak untuk memilih dan menentukan pilihan. Di sisi lain, saya juga pengurus Muslimat NU, maka tentu sebagai warga Muslimat NU saya selalu mengikuti instruksi dari pimpinan. Meskipun dalam hal politik, Muslimat NU tidak mengarahkan ke salah satu calon. Namun, secara otomatis saya 'menangkap' itu. *Sami'na wa atho'na* kepada pimpinan.[425]

Namun perlu dipertegas bahwa bentuk ketaatan ini tidaklah bersifat absolut, akan tetapi ketaatan atau kepatuhan ini bersifat wajar dan tidak final. Ada hal-hal yang perlu digaris bawahi yaitu ketaatan yang dimaksud disini adalah ketaatan hanyalah sebatas hubungan garis organisasi, tidak semua apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh pimpinan dapat dilaksanakan. Selama instruksi tidak bertentangan dengan syariat dan koridor organisasi, maka patut untuk dilaksanakan dan diteruskan kepada seluruh anggota.

---

[424] Ibu MRT, S. Pd Sekretaris PAC Muslimat NU Pogalan periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.
[425] Ibu IMS, M. Kes, Pengurus PAC Muslimat NU Gandusari, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karismatik figur atau ketokohan

Pemimpin organisasi atau lembaga merupakan pembahasan yang menarik dan tidak pernah habis untuk dikupas dan dibahas. Sebab seorang pemimpin menjadi salah satu motor penggerak dalam berbagai aktifitas organisasi, lembaga atau bahkan politik. selain itu, pemimpin juga berperan untuk memberi bimbingan, masukan, koreksi, motivasi bahkan teladan. Setiap pemimpin memiliki karakter, sifat, dan kepribadiannya masing-masing.

Salah satunya adalah sosok pemimpin yang kharismatik. Tipe pemimpin ini seperti ini tidaklah bisa ditiru, dicontoh atau diduplikasikan. Sebab, pemimpin kharismatik merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut. Seseorang yang memiliki tipe kepemimpinan kharismatik dapat dimanifestasikan pada dua aspek, aspek kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri sehingga tidak bisa dilogikakan, dan aspek kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Antara kedua aspek tersebut dianggap sebagai kombinasi antara pesona atau daya tarik personal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas yang luar biasa untuk membuat khayalak umum mendukung berbagai visi dan misinya dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Dengan demikian, dapat mempengaruhi seseorang sehingga menimbulkan sebuah pemujaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa kagum dari masyarat terhadap dirinya (kekaguman atas kualitas kepribadian individu).

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus Muslimat NU Trenggalek sekaligus sebagai relawan berikut ini:

> Saya *khan demen* nomor satu (pasangan Khofifah Emil), teman saya *demen* nomor 2 (Gus Ipul Mbak Putih). Yaa..Pemilihan *monggo* berbeda, namun hati nurani saya tidak bisa dibohongi. Pokoknya saya *demen* dengan calon nomor satu.[426]

Pernyataan di atas menimbulkan sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sebab, kata *demen* adalah kata yang abstrak yang tidak dapat digambarkan melalui kalimat, namun hanya bisa diungkapkan melalui perasaan. Seseorang yang sudah terlanjur suka, cinta terhadap sesuatu maka akan sulit untuk menemukan alasannya. Sama halnya pernyataan di atas.

Perasaan *demen* terhadap calon pemimpin, figur pemimpin merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Tidak bisa dilogikakan. Hampir setiap orang memiliki sifat dan sikap kecenderungan yang berbeda-beda. Bahkan terkadang apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri tidak terjadi kepada orang lain.

Kecenderungan itulah yang menjadi salah satu faktor seorang aktor politik dalam menentukan pilihan. Pilihan mereka berbeda meskipun dalam wadah yang sama yaitu organisasi Muslimat NU Trenggalek. Dalam kaitannya dengan pilih memilih calon pemimpin, setiap orang

[426] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih haknya masing-masing dalam menentukan pilihan. Tidak ada paksaan dalam memilih pemimpin.

Oleh karenanya, dalam faktor karismatik ini, seorang pemilih tidak memandang seorang pemimpin dari mana mereka berasal, seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki, dari mana keturunan mereka berasal, atau seberapa mahal penampilan yang diperlihatkan kepada masyarakat. Ada hal yang lebih penting dari itu semua adalah adanya kekuatan supranatural yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan dikombinasikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jennifer L. Epley dalam sebuah artikel yang berjudul *'Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics'*,[427] bahwa kepemimpinan karismatik memiliki beragam definisi, beragam makna yang di dalam diri seorang pemimpin terdapat sesuatu yang membuat mereka unik dan luar biasa.

Kepemimpinan karismatik bagi Weber adalah sebuah penilaian yang bersifat subjektif. Dalam upaya untuk memahami dan mengklasifikasikan pendekatan subyektif tersebut, Weber menciptakan tiga model legitimasi.[428] *Pertama*, tradisi. Tradisi ini terfokus pada perilaku masa lalu yang memberikan validitas dan makna bagi hukum saat ini.

---

[427] Jennifer L. Epley 'Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics', *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 7; July 2015, 8.

[428] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, G. Roth,& C. Wittich (Eds.), (Berkeley: University of California Press, 1978)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, karisma. Model legitimasi kharisma ini lebih menekankan pada personalistik dan kekuatan individu yang menunjukkan sifat 'istimewa' yang ada pada diri seorang pemimpin. *Ketiga,* legal rasional. Pada point ini mengacu pada instrumental rasionalitas, yaitu memilih cara yang tepat untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan.

Weber juga mengungkapkan bahwa figur karismatik tidak dapat dipahami secara rasional. Ia mengatakan, *'....but rather the bearers of specific gifts of body and mind that werw considered "supernatural" (in the sense tht not everybody could have access to them)'.*[429] Bahwa tidak semua orang bisa mengakses sifat kharismatik yang ada pada diri seseorang. Sebab *charisma is a highly individual quality,*[430] kualitas yang sangat individual yang dimiliki orang orang-orang tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa otoritas karismatik adalah sesuatu yang bersandar atas kepercayaan pada kesucian atau nilai dominasi. Sedangkan tradisionalis yang luar biasa bersandar atas kepercayaan pada kesucian rutinitas sehari-hari.[431]

c. Keuntungan organisasi atau lembaga

Muslimat NU sebagai wadah organisasi bagi para perempuan nahdiyin untuk turut serta mewujudkan harapan dan cita-cita agar negara Indonesia lebih baik dan maju. Berkaitan dengan hal tersebut, warga

[429] Epley 'Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics', 9.
[430] Ibid., 9-10.
[431] Stephen Turner, *Charisma and Obedience: A Risk Cognition Approach,* (Florida: The Leadership Quarterly, 1993), 235-236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat khususnya di lingkungan NU melakukan usaha, ikhtiar untuk mendedikasikan dirinya kepada organisasi Muslimat NU.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Muslimat NU Trenggalek ikut berperan aktif mendukung program pemerintah. Tentu saja sesuai dengan bidang garapan dari organisasi Muslimat NU. Termasuk dalam urusan politik. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, Muslimat NU adalah organisasi masyarakat, bukan partai politik. Namun, warga Muslimat NU berhak untuk terlibat dalam urusan politik, baik lansung maupun tidak langsung.

Sebagai upaya tersebut, maka Muslimat NU Trenggalek berkomitmen untuk mensukseskan proses demokrasi. Meski demikian, motivasi setiap personal tentu berbeda-beda. Dalam hal ini, motivasi aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik salah satunya adalah apabila ia mendukung salah satu pasangan calon, ia berharap kelak ketika calonnya menang, organisasinya dapat menikmati 'kue' pembangunan. Berikut kutipan wawancaranya:

> Alasan saya memilih karena calon Gubernur dari organisasi kami berangkat. Secara otomatis saya dan lainnya memilih itu. Andaikata terpiih kan kita yang di struktur bawah dapat merasakan dan mengakses program-programnya. Sebab, Muslimat NU yang ada di ranting juga butuh respon dari pemerintah. Orang-orang yang ada di bawah pengen juga menikmati 'kue' pembangunan dari pemerintah.[432]

Alasan di atas mungkin wajar, sebab jika nantinya calon tersebut menang dalam perhelatan politik, setidaknya organisasinya akan

[432] Ibu SDM, S. Pd, Ketua PAC Muslimat NU Karangan, *Wawancara*, Trenggalek, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh program dari pemerintah. Artinya, program tersebut nantinya akan bermanfaat untuk orang lain, masyarakat secara luas.

Kaitan dengan pernyataan tersebut, Bernard Oladosu Omisore dalam sebuah artikel yang bertajuk *'The Influence of Power and Politics in Organizations'*[433] menyatakan bahwa organisasi adaah sebuah sistem yang terorganisasi, mereka bukanlah entitas rasional yang dinegosiasikan secara politik. sebab, kelangsungan hidup dalam organisasi apapun adalah tindakan politik. Dengan demikian kehidupan organisasi didominasi oleh interaksi politik.

Politik dalam organisasi melibatkan berbagai kekuatan taktis untuk mempertahankan atau mendapatkan kendali atas berbagai sumber daya simbolik yang nyata. Struktur organisasi adalah entitas yang muncul dari hasil keputusan politik yang dilakukan oleh aktor politik dan kelompok kepentingan tertentu.[434]

Keuntungan lainnya adalah mudah memperoleh akses. Setiap program yang akan disampaikan kepada masyarakat tentu tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun akses tersebut di dapat dari organisasi Muslimat NU. Oleh karenanya, 'kue' pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk warga Muslimat NU Trenggalek.

---

[433] Bernard Oladosu Omisore and Augustina Nwaneka Nweke, 'The Influence of Power and Politics in Organizations', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, July 2014, Vol. 4, No. 7 ISSN: 2222-6990. DOI: 10.6007/IJARBSS/v4-i7/997.

[434] Barcharach, S.B., and Lawler, E.J, *Power Tactics in Bargaining*, (New York: State School of Industrial and Labor relations, Cornell University, 1980).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Emansipasi perempuan

Meskipun Muslimat NU adalah organisasi masyarakat yang beranggotakan perempuan, namun hal ini tidak serta merta bahwa pemimpin harus berasal dari kaum perempuan. Ada alasan-alasan yang rasional mengapa Muslimat NU mendukung pemimpin perempuan. Satu alasan yang mendasar bagi organisasi ini mengapa perlu menghadirkan pemimpin perempuan.

Secara *historical studies*, Jawa Timur khususnya belum pernah dipimpin oleh pemimpin perempuan. Selama bertahun-tahun Jawa Timur dipimpin kaum laki-laki. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu jawabannya memerlukan kajian yang khusus dan mendalam. Sebab dalam pembahasan hal tersebut tidak menjadi fokus yang diteliti.

Dalam dimensi kehidupan, laki-laki dan perempuan memiliki peran, porsi yang sama dalam kancah publik. Pergerakannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.[435] Dalam wilayah publik, tidak memandang laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama dalam mengaktualisasikan dirinya kepada masyarakat. Masyarakat seolah menghendaki suasana yang berbeda dalam kehidupan berdemokrasi.

Kontestasi politik yakni Pilkada Jatim 2018 seolah menemukan panggung bagi perempuan untuk berekspresi, mengaktualisasikan diri dalam berdemokrasi. Perempuan memiliki kesempatan selebar-lebarnya

[435] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan, 2004), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk ikut berpartisipasi sebagai kontestan politik. Inilah yang menjadi dasar aktor Muslimat NU Trenggalek dalam mendukung calon pemimpin dari perempuan dalam kontestasi Pilkada Jatim 2018. Berikut alasannya:

> Saya kepingin Jawa Timur dipimpin oleh perempuan, sebab dari dulu Jawa Timur khususnya selalu dipimpin oleh bapak-bapak. Saya melihat dalam Pilkada Jatim tahun 2018 ini, sudah saatnya perempuan yang pemimpin. Secara kemampuan juga tidak diragukan lagi.[436]

Statement di atas dapat dibaca secara sederhana bahwa perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka memilih sosok pemimpin dari kaum perempuan. Secara konkrit dukungan yang mereka berikan adalah sebuah bentuk apresiasi dan bentuk emansipasi perempuan di Jawa Timur.

Jika diamati, pendapat di atas dapat dianalisis menggunakan dua, yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi. Pendekatan sosiologis dapat dilihat dari nilai-nilai sosiologis yang ada pada diri kontestan politik sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu. Pendekatan ini bisa berupa agama, kesukuan, status sosial, kedaerahan, kelas sosial, etnis, tradisi keluarga, atau yang lainnya.[437]

Namun, berbeda dengan pendekatan psikologis. Pendekatan ini lebih tergantung bagaimana kerikatan individu pada tokoh atau figur

[436] Ibu SMF, Pengurus PAC Muslimat NU Watulimo, *Wawancara*, Trenggalek, 5 Agustus 2019.
[437] Bartels, L. M, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Ketergantungan tersebut dapat berupa ikatan kedekatan dalam organisasi atau terhadap figur kandidat tertentu.[438] Adanya hubungan emosional antara kedua belah pihak telah terjalin dalam kurun waktu yang relatif lama.

Berbeda dengan pendapat Dalton, ia menyatakan bahwa efek terbesar yang dihasilkan dari sikap pemilih adalah dapat dipengaruhi oleh sebuah disposisi sikap.[439] Sikap tersebut menentukan bagaimana loyalitas seorang individu atau kelompok kepada kontestan politik.[440] Oleh sebab itu, penting menjalin dan menjaga komunikasi antara kedua belah pihak sehingga ikatan emosional yang terjalin semakin erat dan kuat.

e. Minimnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai hal, seseorang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Perlu adanya keseimbangan antara kemauan dan kemampuan. Kemauan tanpa kemampuan akan berjalan tidak maksimal. Namun, kemampuan tanpa adanya kemauan tentu akan diam di tempat, tidak mungkin ada perubahan di dalamnya.

Oleh karenanya, organisasi masyarakat harus memiliki modal yang cukup untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan

---

[438] Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode.* (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), 39.
[439] Disposisi sikap adalah sebuah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku politik untuk melaksanakan dan mewujudkan visi misi dengan sungguh-sungguh.
[440] Russell J. Dalton, *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. (New York: Chatham House Publishers, 2002), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat luas. *Modality* akan berpengaruh bagi keberlangsungan setiap lembaga atau organisasi yang ada. Tanpa *modality* mereka akan rapuh, tidak berdaya dan lemah. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu aktor politik Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> Saya memang memiliki kemauan yang besar terhadap politik. Sejak dulu saya turut serta dalam politik. Meskipun hanya sebatas tim sukses atau relawan salah satu calon. Tapi, di sisi lain saya juga tahu diri bahwa kemampuan saya dalam urusan politik sangatlah minim sekali. Saya memang senang berpolitik. Mengerahkan massa untuk kumpul-kumpul dan kegiatan lainnya. Bahkan saya rela menjadi saksi di tingkat kecamatan. Menunggu dari proses awal, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Saya terus menunggu proses tersebut sampai pada proses penghitungan suara. Meskipun tidak ada perjanjian 'wani piro' saya rela dan ikhlas.[441]

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa kemampuan seseorang harus diukur seberapa mampu dan kuat untuk ikut berkontribusi dalam bidang politik. Ketika secara personal tidak memungkinkan untuk melakukan sendiri, maka mereka harus bergabung dalam sebuah organisasi atau lembaga. Lyda Judson Hanif menyebutnya sebagai modal sosial atau *social capital.*[442]

Konsep *social capital* ini muncul ketika sebagian besar masyarakat luas memiliki persepsi bahwa tiap-tiap masyarakat (baik dalam skala kecil maupun besar) mustahil secara personal dapat

[441] Ibu UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.
[442] Lyda Judson Hanif, 'The Rural School Community Center,' *The Annals of the American Academy of Political and Social Science.* Rusydi Syahra, 'Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan, memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Untuk memecahkan *problem* tersebut diperlukan sebuah kerjasama, solidaritas, gotong royong yang kuat untuk menemukan masalah yang ada sehingga solusi mudah ditemukan.

Dalam modal sosial, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh individu maupun kelompok, di antaranya: *pertama*, kepercayaan (*trust*). Kepercayaan adalah sistem rasa saling percaya yang erat kaitannya dengan modal sosial.[443] Ketika seorang aktor politik melakukan suatu kebaikan, maka mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan dihargai orang lain. Sebaliknya, jika seorang aktor politik mengingkari apa yang disampaikan di depan khalayak umum, maka akan pupus kepercayaan yang telah dibangun.

Kedua, nilai (*norms*). Merupakan suatu aturan yang tidak tertulis dari komunitas tertentu.[444] Adapun tujuan dari norma adalah sebagai penekan bagi masyarakat apakah perbuatan yang dilakukan mengandung manfaat atau tidak. Norma juga dapat digunakan sebagai tolak ukut bahwa perbuatan tersebut memiliki arti atau tidak.

Oleh karenanya, dengan adanya norma, setiap perbuatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, tidak

[443] James S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, S102. Qianhong Fu, *Trust, Social Capital, And Organizational Effectiveness*, Major Paper Submitted To The Faculty Of The Virginia Polytechnic Institute And State University In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of, Master Of Public And International Affairs April 22, 2004.

[444] Putnam, R.D. (with R. Leonardi and R.Y. Nanetti), *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy,* (Princeton: Princeton University Press, 1993). Dikutip oleh Frank A.G. den Butter, and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and Networks', *Version*, 09 June 2005, 2-3. Author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/229023696

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar nilai-nilai yang bertentangan. Antara nilai dan norma memiliki peran sebagai barometer seseorang dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Sebabnya keduanya menjadi penentu dalam bertindak dan berinteraksi sosial.[445]

Ketiga, *networking*. jaringan adalah sebuah ikatan antara personal dan kelompok sosial yang saling berkaitan sehingga dapat dihubungkan melalui media dan kepercayaan. Inilah letak korelasi antara kepercayaan, nilai dan jaringan. Sebuah kepercayaan akan dipertahankan oleh nilai sehingga membentuk *networking*. oleh sebab itu, baik individu maupun kelompok harus memiliki koneksi yang kuat sehingga dapat saling mendukung antara aktor politik satu dengan yang lain.

Meskipun keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aktor Muslimat NU dalam berpolitik, namun semangat perjuangan dan pengorbanan mereka tidak pernah putus. Walaupun posisi dari aktor Muslimat NU hanya sebagai pendukung, relawan dan tim sukses. Kemauan yang keras dapat mewujudkan sebuah harapan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.

f. Terjadinya mis-komunikasi di internal organisasi.

Komunikasi menjadi faktor penting dalam menjalin kerjasama antara lembaga atau organisasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi dapat berjalan efektif apabila ada kesepahaman antara komunikator dan

[445] Frank A.G. den Butter, and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and Networks', 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikan, antara kontestan politik dengan partisipan politik. agar tidak terjadi *mis-understanding*, kedua belah pihak harus saling bersinergi.

Hal ini terjadi di dalam struktur organisasi Muslimat NU Trenggalek dalam melakukan sosialisasi tentang Pilkada Jatim 2018, antara Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang sampai tingkat bawah tidak menjalin komunikasi secara intens. Akibatnya, banyak pihak yang merasa bingung terhadap sikap politik yang diambil oleh Muslimat NU.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh salah satu ketua PAC Muslimat NU Trenggalek yang sekaligus menjadi pengurus cabang Muslimat NU Trenggalek. Berikut kutipannya:

> Begini Mbak, saya mau cerita sedikit. Waktu itu Muslimat dikumpulkan di kantor PKB Trenggalek. Per PAC diutus untuk mengirimkan 2 orang untuk mengikuti pertemuan tersebut. Pada waktu itu, Gus Ipul yang terlebih dahulu maju calon Gubernur, kemudian Bu Khofifah muncul belakangan. Akhirnya *khan* jadi bingung semua. Namun, ada beberapa instruksi agar netral. Milih siapapun *monggo*, *thoh* keduanya sama-sama orang NU. artinya jangan terlalu fanatik lah...[446]

Dari pendapat di atas, ada sedikit kebingungan yang ia alami, baik sebagai pengurus cabang atau sebagai ketua PAC Muslimat NU. Tentu sebagai warga masyarakat ia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Namun disisi lain ia juga menjadi salah satu tokoh Muslimat NU di tingkat kecamatan. Ia memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan informasi yang benar tentang Pilkada tersebut.

[446] Ibu Hj. ISS, Ketua PAC Muslimat NU Pogalan, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah sebabnya, mengapa komunikasi harus terus dilakukan untuk menghindari atau paling tidak untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman di antara dua belah pihak. Bagi, Clio Kenterelidou komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam proses politik.[447] Proses politik tersebut dapat berupa politik formal maupun non-formal.

Agar komunikasi dapat berjalan dengan harmonis, dinamis dan tepat sasaran, maka organisasi atau lembaga harus memaksimalkan proses interaksi sosial di antara kedua belah pihak dengan metode yang sesuai dengan kondisi saat ini.[448] Ketika hal tersebut sudah dijalankan maka proses pencapaian tujuan akan mudah untuk diwujudkan.

Kebingungan menerima pesan politik juga disampaikan oleh salah satu aktor Muslimat NU Trenggalek berikut ini:

> *Kulo ngih* setengah bingung juga. Kan kita sebelum ada Bu Khofifah, kita sudah bersatu dengan PKB. Kemudian Bu Khofifah muncul di belakang. Bagaimanapun juga Bu Khofifah adalah ibu kita bersama. Tapi karena sudah seperti itu (sudah ada ikrar untuk mendukung Gus Ipul). Kita tetap tanggungjawab. Kepada Gus Ipul dan Bu Khofifah sama-sama kita lakukan (menyerukan untuk memilih salah satu sesuai hati nurani). Yang terpenting kami mengambil jalan yang terbaik.[449]

Inilah pentingnya membangun sebuah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang tidak sehat akan memunculkan percikan-percikan

---

[447] Clio Kenterelidou, *Public Political Communication and Media: The case of contemporary Greece,* (Department of Journalism and Mass Communication: Aristotle University of Thessaloniki, June 2005), 3.
[448] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 114-115.
[449] Ibu Hj. DRJ, Ketua PAC Muslimat NU Munjungan, *Wawancara,* Trenggalek, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketegangan di dalam internal organisasi. Semakin sering terjadi mis-komunikasi maka akan semakin besar pula peluang gesekan yang dihasilkan. Sejatinya, urgensi dari komunikasi adalah bagaimana menemukan kesepahaman dalam memaknai sebuah pesan yang disampaikan.

Komunikasi politik juga lazim dikaitkan dengan perbincangan politik berupa pesan politik, baik secara verbal maupun non-verbal yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dalam suatu sistem politik.[450] Oleh sebab itu, unsur-unsur dari komunikasi juga harus dipenuhi sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan harmonis.

Dari seluruh penjelasan di atas mengenai analisis perilaku politik aktor Muslimat NU Trenggalek dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, maka dapat ditunjukkan bagaimana relasi Ormas perempuan dan politik lokal atas eksperimentasi politik aktor Muslimat NU Trenggalek pada gambar di bawah ini:

[450] Eko Harry Susanto, 'Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Kajian Komunikasi,* Volume 1, No. 2, Desember 2013, 163-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Politik Lokal

Gambar 10

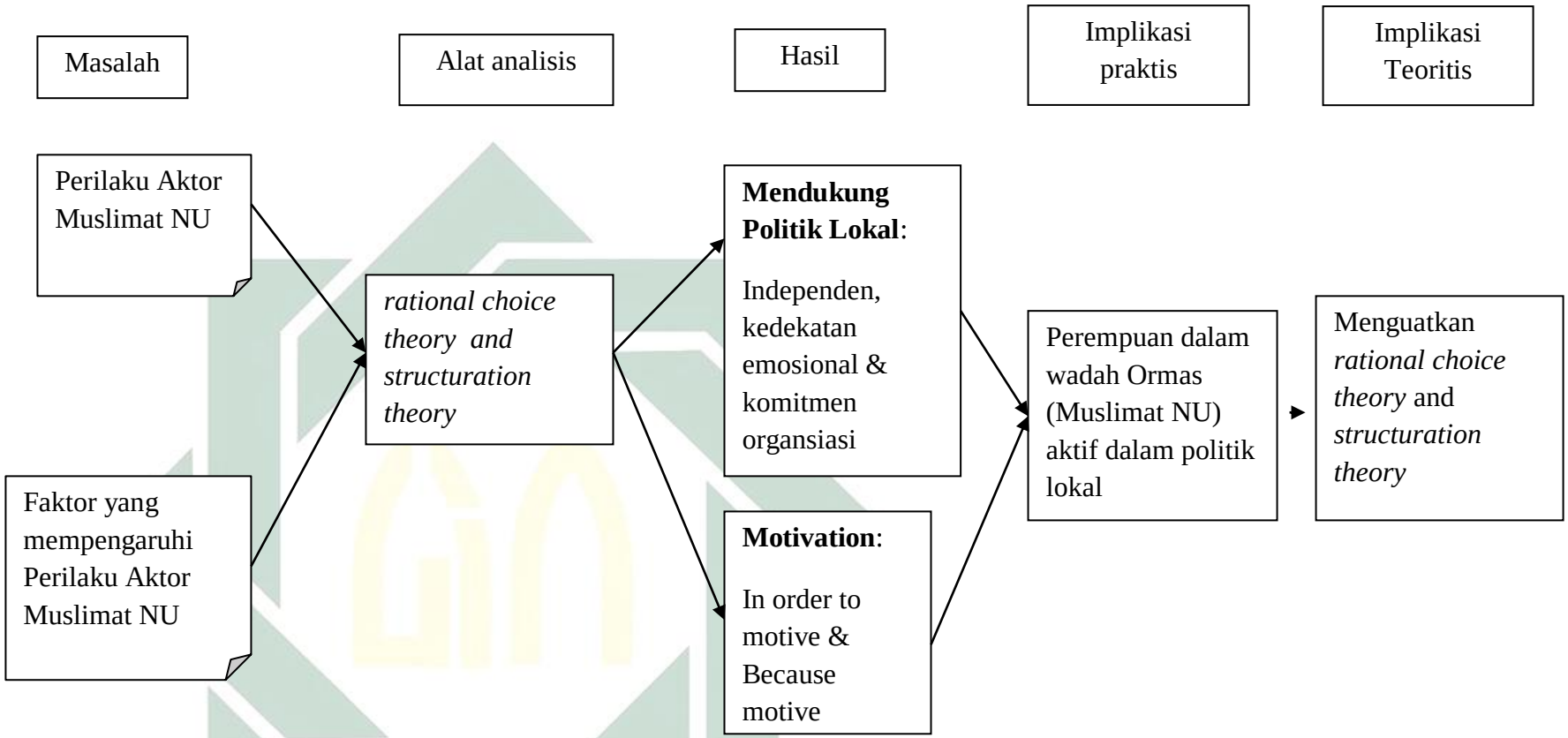

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil paparan dan analisis dalam dalam penelitian ini, sesuai dengan perspektif teoritis dan pendekatan dalam menjawab masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relasi antara Muslimat NU Trenggalek dan politik adalah merupakan hubungan yang berdasarkan simbiosis mutualis. Artinya, keduanya sama-sama memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun Muslimat NU bukan partai politik, namun keberadaannya dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga, organisasi bahkan dengan partai politik.

Untuk memahami bagaimana perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik, maka terdapat beberapa perilaku politik aktor Muslimat NU Trenggalek dan beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku politik aktor Muslimat NU Trenggalek, di antaranya:

1. Perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik mendukung secara aktif dan penuh pada Pilkada Jatim 2018. Adapun perilaku tersebut didasarkan pada: *pertama*, hubungan kedekatan secara organisasi, *kedua*, kedekatan dengan salah satu figur (secara geopolitik), *ketiga*, adanya kedekatan emosional (baik secara individu maupun kelompok), *keempat*, ketaatan kepada figur (ketokohan), *kelima*, melihat kapasitas figur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keenam, melihat visi misi yang ditawarkan, *ketujuh*, rekam jejak figur politik, dan *kedelapan*, kepentingan organisasi atau lembaga. Dari temuan perilaku tersebut didasarkan atas berbagai perspektif, yaitu sosiologi, psikologi, dan rasional.

2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi aktor Muslimat NU Trenggalek dalam berpolitik yaitu: ketaatan pada organisasi atau lembaga, kharismatik pada figur ketokohan, memberikan keuntungan pada organisasi atau lembaga, mewujudkan emansipasi perempuan dalam masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, membangun komunikasi dan jejaring. Faktor-faktor tersebut merujuk pada perspektif fenomenologi yang digunakan untuk melihat bagaimana motif tujuan (*in order to motive)* dan motif sebab *(because motive)* dalam perilaku berpolitik.

B. Implikasi Teoritis

Disertasi ini memiliki implikasi teoritis yaitu menguatkan teori *rational choice* perspektif James S. Coleman yang didukung oleh *structuration theory* perspektif Anthony Giddens. Temuan disertasi perspektif James S. Coleman, yang dimaksud perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek berada pada level mikro, yaitu level dimana aktor Muslimat NU Trenggalek berperan sebagai aktor individu (aktor Muslimat NU menimbulkan perilaku dalam sebuah sistem sosial). Dengan maksud lain, bahwa hanya seorang aktorlah yang mengetahui dan memahami perilaku politik yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun pada beberapa hal, perilaku aktor Muslimat NU Trenggalek juga merujuk kepada institusi atau organisasi (berada pada level makro). Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa kegiatan atau aktivitas dari aktor Muslimat NU Trenggalek melalui rapat anggota pengurus baik secara tersirat maupun tersurat yang juga membahas situasi dari dinamika politik elektoral yang terjadi.

Oleh sebab itu, teori Coleman harus dipadukan dengan teori Anthony Giddens tentang teori strukturasi, bahwa teori ini menjelaskan dualitas antara agen (aktor politik) dengan struktur (institusi, norma, aturan) tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan dialektik yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya dalam praktik sosial.

Muslimat NU Trenggalek sebagai aktor individu dalam politik elektoral memiliki pilihan rasional dalam berperilaku politik, tetapi di sisi lain ia juga dibatasi oleh nilai-nilai yang lebih besar. Nilai-nilai tersebut dapat berupa aturan yang ada dalam organisasi Muslimat NU berupa Peraturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART organisasi).

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi civitas akademika. Namun, masih banyak kekurangan dan keterbatasan studi yang belum terselesaikan secara maksimal, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembahasan tentang Organisasi Kemasyarakatan perempuan (Muslimat NU) secara spesifik masih jarang ditemukan. Terdapat beberapa kajian terkait hal tersebut namun hanya bersifat umum dan global. Sehingga kajian tentang Muslimat NU Trenggalek secara referensi masih banyak kendala, salah satunya adalah kendala dalam mencari sumber-sumber atau referensi primer, sehingga penelitian ini lebih banyak menggunakan referensi sekunder baik berupa artikel, sumber website, analisis konseptual, hasil-hasil penelitian, dan berbagai komentar para ahli.
2. Pada bagian data lapangan, penelitian ini terbatas hanya pada wilayah di Trenggalek. Sebuah kabupaten di ujung Barat wilayah Jawa Timur. Hal yang menjadi problem pokok adalah disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah keterbatasan logistik dan managemen waktu penelitian.
3. Penelitian ini belum melakukan ekplorasi data secara lebih mendalam pada bagian sejarah berdirinya organisasi Muslimat NU Trenggalek dan pada bagian *historical studies* Muslimat NU di Trenggalek. Sebab data yang diperoleh masih sebatas data lapangan berupa *interview* kepada para sesepuh Muslimat NU Trenggalek. Oleh karenanya, penelitian lanjutan diharapkan bisa memberikan pencerahan lebih mendalam terkait hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Saran-Saran Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian, implikasi teori, dan keterbatasan studi dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran, khususnya kepada para peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan terkait masalah organisasi Muslimat NU Trenggalek dapat dikembangkan dengan melacak, mencari, dan menemukan referensi primer untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yang ingin dicapai dan dikembangkan.
2. Penelitian lanjutan tentang masalah organisasi kemasyarakatan perempuan dan politik lokal pada Pilgub Jatim 2018 dapat dikembangkan dengan cakupan masalah yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan dapat utuh dan sebagai pengayaan terhadap data-data pustaka dan lapangan sehingga dapat menyajikan data sebelum atau sesudah kontestasi politik tersebut diselenggarakan.
3. Penelitian lanjutan tentang Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan politik lokal dapat dikembangan dengan menggunakan perspektif, metode, teori yang berbeda dengan apa yang tersaji dalam penelitian ini.
4. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengembangan lokus penelitian yang lebih luas sehingga penelitian tersebut kaya akan data dan sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIBLIOGRAFI

BUKU

al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam.* Yogyakarta: Suluh Press, 2005.

Almond, Gabriel and Sidney Verba. *The Civic Culture*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

Anthony Mayfield, *What Is a Social Media?*. London: iCrossing, 2008.

Antony, Giddens. *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration,* (UK: Polity Press, 1984).

Anwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya.* Yogyakarta: Liberti, 1988.

Apter, David E. "Duchamp's Urinal: Who Says What's Rational When Things Get Though?" dalam Robert E. Goodin & Charles Tilly (eds), *The Handbooks of Political Science: Contextual Political Analysis.* Oxford University Press, 2006.

Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Asfar, Muhammad. 'Wanita dan Politik: Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami', dalam *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Liza Hadiz (ed). Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004.

Atjeh, Aboebakar. *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim*. Jombang: Pustaka Tebuireng, tt.

Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tantangan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Baasir, Faisal. *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Baehaqi, Imam (ed). *Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog.* Yogyakarta: LKiS, 2002.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barcharach, S.B., and Lawler, E.J, *Power Tactics in Bargaining.* New York: State School of Industrial and Labor relations, Cornell University, 1980.

Bartels, L. M, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Bartels, L. M, "The Study of Electoral Behavior' dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Baumann, Pari. *Sustainable Livelihoods And Political Capital: Arguments and Evidence From Decentralisation and Natural Resourcemanagement In India*. London: Overseas Development Institute, October 2000. ISBN 0 85003 4965.

Bell, Diane, et all (eds). *General Field: Women, Man and Ethnography*. London and New York, 1993.

Berg, Bruce L. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences, Fourth Edition.* California: California Stole University, 2001. ISBN 0-205-31847-9.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994)

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

Blomgren, Emelie. *Women and Political Participation A Minor Field Study on Hindrances for Women"s Political Participation in Georgia*. The School of Social Sciences Thesis in Political Science, 2010.

Blumler, Jay G. and Dennis Kavanagh, 'The Third Age of Political Communication: Influences and Features', *Political Communication,* 16, 1999.

Bogdan, Robert. *Participant Observation in Organizational Settings*. Syracuse: Syracuse University Press, 1972.

Bollan, BJ. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.* Yogyakarta: LKiS, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buchorie, St. Rogayah. *Wanita Islam: Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya.* Bandung: Baitul Hikmah, 2006.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Burdah, Ibnu. *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi*. Malang: Instrans Publishing, 2014.

Byrnes, Robert F. *Change in the Soviet Political Stsrem Lirnit and Likelihoods.* University of Notre Dame, Review of Politics, 1984.

Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Casey, Kimberly L. *'Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory.*

Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik: Perubahan dan Kesinambungan.* Yogyakarta: Pintal, 2011.

Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial,* terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Collin, Finn *Social Reality.* London and New York: Routledge, 1997.

Dalton, Russell J. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. New York: Chatham House Publishers, 2002.

Dalton, Russell J. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. New York: Chatham House Publishers, 2002.

David L. Paletz dalam *'Political Culture and Political Communication',* Barcelona: Duke University, 1994.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Ferguson, Russell, Martha Gever, Trinh Minh-ha and Cornel West, eds, *Introduction: Invisible Center. In Out There: Marginalization and*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contemporary Cultures. New York: The New Museum of Contemporary Art, 1990.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

Gidden, Anthony dan David Held. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Politik.* Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan.* Jakarta: PT. Renika cipta, 2000.

Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1996.

Harapan, Edi. *Komunikasi Antar Pribadi: Perilaku Insani dalam Organisasi Pendidikan.* Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Ida, Laode. *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru.* Jakarta: Erlangga, 2002.

Ja'far, M. Anis Qasim. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2002.

Jon Clark (ed), *James S.Coleman.* London and New York: Routledge Falmer, 1996.

Karim, M. Abdul. *Wacana Politik Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Kenterelidou, Clio. *Public Political Communication and Media: The case of contemporary Greece.* Department of Journalism and Mass Communication: Aristotle University of Thessaloniki, June 2005.

Kirk, Jarome & Marc L. Miller, *Realiability and Validity in Qualitative Research*, vol. I. Beverly Hills: Sage Publication, 1986.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam.* Yogyakarta: ISCiSoD, 2018.

Laine, Marlene de. *Fieldwork, Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in Qualitative Research*. London: SAGE Publications, 2000.

Lasswell, Harold D. *Propaganda Technique In The World War,* (New York: The United States of Amerika, 1938), First Publised in 1927, Reprinted 1938.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lowi, Theodore J. et all. *American Government: Power and Purpose*, eighth edition. New York: W.W Norton & Company, 2004.

Lubis, Akhyar. *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Machrusah, Safira. *Muslimat And Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia*, Tesis. Australia: The Australian National University, 2005).

Manning, Steven G. *Appraising Organizational Politics And Support: Challenging Employees To Engage*. Dissertation: The Degree Of Doctor Of Philosophy Colorado State University Fort Collins, 2018.

Marijan, Kacung. *Demokratisasi Di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.

Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.

Marty dan Appleby, *Social Movement: Critique Method and Issues*. USA, 1994.

McNair, Brian. *An Introduction To Political Communication*, Second edition. London and New York: Routledge, 1995.

Mead, George Herbert. *Mind, Self And Society: From The Standpoint of a Social Behaviorist.*

Micheletti, Michele. *Communication and Political Understanding as Political Participation.* Sweden: Karlstad University.

Milbarth, Lester and M. L Goel. *Political Participation.* Chicago: Rand McNally College Publishing, 1997.

Miles, Matthew dan A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Mitchell, Joyce M. *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science.* Chicago: Rand Mc. Nally.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Mufti, Muslim. *Teori-Teori Politik.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren.* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama': Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif.* Jakarta: LP3ES, 2004.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Baru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat.* Bandung: Mizan, 1999.

Muzadi, Abdul Muchith. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran: Refleksi 65 tahun Ikut NU.* Surabaya; Khalista, 2007.

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Natsir, Lies Marcoes. *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru*. Cirebon: Institute Studi Islam Fahmina, 2012.

Nursal, Adman. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Nursal, Adman. *Politik Marketing Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Paletz, David L. *Political Culture and Political Communication.* Barcelona: Duke University, 1994.

Parawansa, Khofifah Indar. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender.* Jakarta: LP3ES, 2006.

Prawira, Purwa Atmaja. *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru.* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Putnam, R.D. (with R. Leonardi and R.Y. Nanetti), *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy,* (Princeton: Princeton University Press, 1993).

Qomar, Mujamil. *NU Liberal: Dari Tradisonalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ricklander, Louise. 'Women and Politics' dalam Jenny Firth-cozens and Micheal A. West (eds), *Women at Work: Psychological and Orgnizational Perspective.* Philadelphia: Open University Press, 1993.

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rohaniah, Yoyoh. *Pengantar Ilmu Politik.* Malang: Intrans Publishing, 2015.

Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.

Rosenbluth, Frances. *The Female Political Career.* The World Bank: Women In Parlaments Global Forum, January 2015.

Roth, Dieter. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friderich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, 2008.

Roth, Dieter. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode.* Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009.

Samah, Kristin dan Fransisca Ria Susanti. *Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan dalam Pilpres.* Jakarta: Gramedia, 2011.

Sarman, Mukhtar. *Banalitas Kontestasi Politik: Refleksi Pemilu Legislatif 2014 di Kalimantan Selatan.* Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2014.

Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sitepu, P. Anthonius. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Soejipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005.

Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar.* Jakarta : Rajawali, 2002.

Sumbadze, Nana. *Gender and Society.* Georgia: UNDP, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN-Malag Press, 2009.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Turner, Stephen. *Charisma and Obedience: A Risk Cognition Approach.* Florida: The Leadership Quarterly, 1993.

Turner, Ralp & Lewis Killian, *Collective Behavior* (New York: Prentice Hall, 1957).

Usiono, (ed), *Kontribusi Ormas Islam dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad Ke-21*, (Medan: Perdana Publishing, 2015).

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, G. Roth,& C. Wittich (Eds.). Berkeley: University of California Press, 1978.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization.* New York, 1946.

Whelan, Andrew M. *Digital Media: The Cultural Politics of Information*, B. M. Z. Cohen (eds). New Zealand:*University of Wollongong*, 2012.

Wilar, Abraham Silo. *NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU.* Rembang: Pyramida Media Utama, 2009.

Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial.* Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

Zen, Fathurin. *NU Politik Analisis Wacana.* Yogyakarta: LKiS, 2004.

ARTIKEL JURNAL

Abdullah, Suparman. 'Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas', *Socius,* Volumei XII - Januari 2013.

Aichholzer, Georg and Doris Allhutter, 'Online Forms of Political Participation and Their Impact on Democracy', *European Consortium for Political Research (ECPR),* Workshop "Professionalisation and Individualised

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Collective Action: Analysing New 'Participatory' Dimensions in Civil Society", April 2009.

Alfani, Hendra. 'Political Communication Channel and The Phenomenon of Political Communicators in Indonesia', *Communication Sphere*. Vol. 1. No. 1, November 2015. ISSN: 2477-1562.

Amundsen, Inge dan Happy Kayuni (ed), *Women in Politics in Malawi*. Norway: Department of Political and Administrative Studies (PAS) University of Malawi, Chancellor College, 2016) ISBN: 978-99908-0-529-1.

Andriyus, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Singingi Hilir pada Pemilihan Umum Legislatif 2009', *Journal of Government, Social and Politics*, vol. 2, nomor 2, September 2013.

Andriyus, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Singingi Hilir pada Pemilihan Umum Legislatif 2009', *Journal of Government, Social and Politics*, vol. 2, nomor 2, September 2013.

Anwar, Abdul Afif. 'Peran Organisasi Nahdlatul Ulama Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang*, Vol. 02. No. 1, Nopember 2014.

Aribowo, *Potret Politisi Wanita*, Laporan Penelitian, (Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1994).

Ashaf, Abdul Firman Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif, *Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2, Juli 2006.

Aula, 08 tahun XLI, Agustus 2019, 97.

Azmi, Zaireeni. Women's Participation In Decision Making: The Case of Muslimat In Party Islam Se-Malaysia (PAS), *International Journal of Management and Applied Science* Volume-2, Issue-12, Special Issue-1, Dec.-2016. ISSN: 2394-7926.

Balan, Sergiu. *M. Foucault's View On Power Relations*, Institute of Philosophy and Psychology, C.R. Motru", Bucharest, 20 November 2017.

Bouckenooghe, Dave. 'The Role Of Organizational Politics, Contextual Resources, and Formal Communication on Change Recipients' Commitment To Change: A Multilevel Study', *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 579. DOI: 10.1080/1359432X.2011.591573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Butter, Frank A.G. den and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and Networks'.

Chekunova, Marina A. et all., 'New Media In Political Communication: General Approaches', *EEIE SHS Web of Conference*, 9, 01015 (2016). DOI: 10.1051/shsconf/20162901015.

Chen, Li-Ju. 'Do Gender Quotas Influence Women's Representation and Policies?' *The European Journal of Comparative Economics*, Vol. 7, n. 1, 2010. pp. 13-60. ISSN 1824-2979. online at http://eaces.liuc.it.

Coleman, James S. Social Capital in the Creation of Human Capital, *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, (1988), pp. S95-S120, S98. Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.

Coleman, James S. Social Capital in the Creation of Human Capital, S102. Qianhong Fu, *Trust, Social Capital, And Organizational Effectiveness*, Major Paper Submitted To The Faculty Of The Virginia Polytechnic Institute And State University In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of, Master Of Public And International Affairs April 22, 2004,

Cropanzano, Russell, John C. Howes, Alicia A. Grandey and Paul Toth, 'The Relationship Of Organizational Politics And Support To Work Behaviors, Attitudes, And Stress', *Journal Of Organizational Behavior*, Vol. 18, (1997). CCC 0894±3796/97/020159±22$17.50.

Dahlerup, Drude. 'Electoral Gender Quotas: Between Equality Of Opportunity And Equality Of Result', *Representation*, Vol. 43, No. 2, 2007, ISSN 0034-4893 print/1749-4001 online/07/020073-20, McDougall Trust, London, DOI: 10.1080/00344890701363227.

Darhour, Hanane and Drude Dahlerup, 'Sustainable representation of women through gender quotas: A decade's experience in Morocco, *Women's Studies International Forum* (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2013.04.008.

Davidov, E., Schmidt, P., & Schwartz, S. H. 'Bringing values back in: The adequacy of the European Social Survey to measure values in 20 countries', *Public Opinion Quarterly, 72* (3), 2008.

Elliston, Federick. *Phenomenology Reinterpreted: from Husserl to Heideger* dalam *Philosophy Today*, Vol. xxi, No. 3/4, 1977, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Epley, Jennifer L. 'Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics', *International Journal of Humanities and Social Science,* Vol. 5, No. 7; July 2015.

Eriyanti, Linda Dwi. 'Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.* Volume 20, Nomor 1, Juli 2016 (69-83). ISSN 1410-4946.

Eriyanti, Linda Dwi. 'Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran *Mainstream* dan *Non-Mainstream'. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Volume 20, Nomor 1, Juli 2016.

Faliszewski, Piotr. 'How Hard Is It for a Party to Nominate an ElectionWinner?', *Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16).*

Faucher, Florence. *New forms of political participation. Changing demands or changing opportunities to participate in political parties?,* Macmillan Publishers Ltd. 1472-4790 Comparative European Politics 1–25, 2014. www.palgrave-journals.com/cep/.

Frank A.G. den Butter, and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and Networks', *Version,* 09 June 2005, 2-3. Author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/229023696.

French, Richard D. 'Political Capital', *Representation,* Vol. 47, No. 2, 2011, 216. ISSN 0034-4893 Print/1749-4001 Online/11/020215–16. DOI: 10.1080/00344893.2011.581086.

Hanif, Lyda Judson. 'The Rural School Community Center,' *The Annals of the American Academy of Political and Social Science,* Vol. 67, New Possibilities in Education (Sep., 1916), 130-138, p. 130 URL: https://www.jstor.org/stable/1013498. This content downloaded from 202.67.46.46 on Fri, 25 Jan 2019 01:09:35 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms.

Haris, Munawir. 'Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah', dalam *At-Tahrir,* Vol. 15, no. 2 November 2015.

Haliim, Wimmy, 'Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Malang 2013', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2*, (2), 2017. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Heale, Roberta and Dorothy Forbes, 'Understanding Triangulation in Research', *Evid Based Nurs*, October 2013, volume 16, number 4, 98. DOI: 10.1136/eb-2013-101494.

Hidayatullah, Syarif. 'The Consolidation of The Islamic Tradisionalism: A Case Study of The Nahdlatul Ulama', dalam *Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future.*

Iswanto, Agus. "Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformulasi Tradisi Di Tengah Perubahan," *Jurnal Lektur Keagamaan,* Vol. 11, No. 2, (2013).

Ishomuddin,et all. Culture and Political Understanding on Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) in East Java, *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE,* Volume 6, Issue 8, August 2019, PP 5 1-62 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0608006 www.arcjournals.org

Jabeen, Shazi Shah and Aqila Rafiuddin. 'Factors Influencing the Education Decision Making Process', Boston, USA, *Second 21st Century Academic Forum at Harvard* – 2015. Vol. 5, No. 1 ISSN: 2330-1236.

Jacobs, Cheryl. 'Community Capitals: Political Capital', *South Dakota State University Open PRAIRIE: Open Public Research Access Institutional Repository and Information Exchange,* Revised April 2011, 1-4. http://openprairie.sdstate.edu/extension_extra/522.

Jafariani, Hasan. 'Political Behaviorin Organizational Context: Nature, Research and Paradigm', *Management Science Letters*, 2 (2012).

Jailani, M. Syahran. 'Interaksi Simbolik, Konstruktivisme, Teori Kritis, Postmodernimisme dan Poststrukturalisme: Telaah Basis Teoritis Paradigma Penelitian Kualiatatif', *Edu-Bio;* Vol. 3, 2012.

Kamahi, Umar. 'Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik', *Jurnal Al-Khitabah,* Vol. III, No. 1, Juni 2017.

Kenterelidou, Clio. *Public Political Communication and Media: The case of contemporary Greece.* Department of Journalism and Mass Communication: Aristotle University of Thessaloniki, June 2005.

Kumar, Pankaj. 'Participation of Women in Politics: Worldwide experience', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS),* Volume 22, Issue 12, Ver. 6 (December. 2017) PP 77-88 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org DOI: 10.9790/0837-2212067788.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Liando, Daud M. 'Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) dalam *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum.* Oktober, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2016.

Lilleker, Darren and Karolina Koc-Michalska. *Online Political Communication Strategies: MEPs e-representation and self-representation,* Francis (Routledge), 2013, 10 (2), pp. 190-207. DOI. 10.1080/19331681.2012.758071.

Marijan, Kacung. 'The Study of Political Culture in Indonesia', *Masyarakat Kebudayaan dan Politik,* Th XII, No 2, April 1999.

Marsden, Peter V. The Sociology Of James S. Coleman, *Annu. Rev. Sociol,* on January 24, 2005, 2-3., 2-3. DOI: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122209. lihat selengkapnya Jon Clark (ed), *James S.Coleman.* London and New York: Routledge Falmer, 1996.

Marsden, Peter V. The Sociology Of James S. Coleman, *Annu. Rev. Sociol,* on January 24, 2005, 2-3., 2-3. DOI: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122209.

Miller, Bruce A. 'The Role of Rural Schools in Community Development: Policy Issues and Implications,' *Journal of Research in Rural Education,* Winter, 1995, Vol. 11, No.3.

Mukarom, Zaenal. Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, dalam *Mediator,* Vo. 02. Nomor. 01 Desember 2008. Terakreditasi Dirjen Dikti No. SK/56/DIKTI/Kep/2005.

Muzadi, Abdul Muchid. 'NU Kini Lebih Jama'ah daripada Jam'iyyah', *Aula,* no. 11, November 1997.

National Democratic Institute, *Why Women In Politics*?.

Nakamura, Mitsuo. 'Nahdlatul Ulama', in John L.Esposito (eds), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World,* Vol. III, New York: Oxford University Press.

Nirzalin, Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens, *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala,* Vol. 3, No.3, Juni 2013.

Ocran, Raymond Kwasi. *Women's Political Participation: A Comparative Study On Ghana And Tanzania,* (International Master's Degree Program in

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Border Crossings: Global & Local Societies in Transition (Sociology), Faculty of Social Sciences University of Eastern Finland May, 2014.

Offenhauer, Priscilla. *Women In Islamic Societies: A Selected Review Of Social Scientific.* Washington DC: Federal Research Division Library Of Congress, November 2005. Literature Library Of Congress – Federal Research Division. 20540−4840.

Olayiwola, Rahman Olalekan. Political Communications: Press and Politics in Nigeria's Second Republic, *Africa Media Review,* Vol. 5 No. 2.1991, 33. .http://digital.lib.msu.edu/projects/africanjournals/.

Omisore, Bernard Oladosu and Augustina Nwaneka Nweke, 'The Influence of Power and Politics in Organizations', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,* July 2014, Vol. 4, No. 7 ISSN: 2222-6990.

Parawansa, Khofifah Indar. Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam *International IDEA, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: AMEEPRO, 2002.

Picture, A Bigger. *What is social capital?,* OECD Insights: Human Capital.

Purba, Chip Chexk. Hubungan Faktor Sosiologis dan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan Tahun 2015 di Kecamatan Bandar Petalangan (Studi Kasus Desa Lubuk Keranji Timur dan Desa Kuala Semundam), *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.

Purwanti, Ani. 'Quota Law's For Women In Politics: Implementation In Indonesia', *Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 6,* Vol. 4. April 18 – 19, 2015. ISBN 978-967-11350-4-4.

Putnam, R.D. (with R. Leonardi and R.Y. Nanetti), *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy,* (Princeton: Princeton University Press, 1993). Dikutip oleh Frank A.G. den Butter, and Robert H.J. Mosch, 'Externalities Of Social Capital: The Role of Values, Norms and Networks', *Version,* 09 June 2005, 2-3. Author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/229023696

Radhika Kapur, *Role of Women in Mass Media.*

Reunanen, Esa. *Media Capital in the Political Field,* Tampere 14.4.2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rounce, Andrea D. Political Actors' Perceptions of Public Opinion: Assessing the Impact of Opinion on Decision Making', Department of Political Science Carleton University, *The Canadian Political Science Association's Annual Meeting,* June 3 to 5, 2004.

Roviana, Sri. 'Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik, *Jurnal Pendidikan Islam.* Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436 DOI: 10.14421/jpi.2014.32.403-424.

Salajegheh, Sanjar and Nasrin Pirmoradi, 'Social Capital of the Organization', *International Journal of Engineering Research and Developmen*t, e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X, www.ijerd.com Volume 7, Issue 12 (July 2013), PP. 40-52, 44.

Sato, Yoshimichi. 'Rational Choice Theory', *Sociopedia.isa.* 2013. DOI: 10.1177/205684601372.

Schiller, Nina Glick. 'Cultural Politics and the Politics of Culture', *Identities: Global Studies in Culture and Power,* 04 May 2010. DOI: 10.1080/1070289X.1997.9962580.

Sewell, William H. A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation, *American Journal of Sociology,* Vol. 98, No. 1 (Jul., 1992).

Sholikhah, Amirotun. 'Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)', *Komunika*, Vol. 8, No. 1, Januari - Juni 2014, ISSN: 1978 1261.

Shelton, Dinah et all. The Road To Substantive Democracy: Women´S Political Participation In The Americas. *Inter-American Commission On Human Rights*. Oea/Ser.L/V/Ii. Doc. 79 18 April 2011.

Siisiäinen, Martti Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam', Paper presented at ISTR Fourth International Conference *"The Third Sector: For What and for Whom?"* Trinity College, Dublin, Ireland July 5-8, 2000.

Silverman, David. *Qualitative Research: Theory, Method and Practice,* Second Edition. London: Sage Publications.

Supono, Boedyo. 'Peranan Modal Sosial dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan,* Vol. 11, No. 1, April 2011.

Susanto, Eko Harry 'Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum', *Jurnal Kajian Komunikasi,* Volume 1, No. 2, Desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Swartz, David. *The Sociology Of Pierre Bourdieu,* (London The University of Chicago Press, 1997), 66. ISBN (CLOTH): 0-226-78594-7. ISBN (PAPER): 0-226-78595-5.

Syahra, Rusydi. 'Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003.

Syamsiyatun, Siti. Muslim Women's Politics In Advancing Their Gender Interests: A Case-Study Of Nasyiatul Aisyiyah In Indonesian New Order Era, *Al-Jāmi'ah,* Vol. 45, No. 1, 2007 M/1428 H.

Syarifuddin, 'Komunikasi Politik Bermedia Dan Penggunaannya Oleh Masyarakat (Survey pada Masyarakat Palopo Sulawesi Selatan Tentang Kampanye Pilpres 2014)', *Jurnal Studi Komunikasi dan Media,* Vol. 19 No. 1 (Januari - Juni 2015).

Syukriyah, Lailatus. 'Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955)', dalam *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 4, No. 3, Oktober 2016.

Tandon, Nidhi. *Women in Politics: Gender, Power and Development,* Mariz Tadros (ed), 23(2):399-401, May 2015 DOI. 10.1080/13552074.2015.1067967.

Valls, Alejandro Pastrana. 'Values, Attitudes, and Political Participation in Mexico', *Palabra Clave*, 2018, 21(3), 673-709. DOI: 10.5294/pacla.2018.21.3.3.

Waldstrøm, Christian. *Social Capital In Organizations–Beyond Structure and Metaphor***,** Department of Organization & Management, Haslegaardsvej.

Wibowo, Catur, dkk., 'Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah', *Jurnal Bina Praja*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2015.

Zamfirache, Irina. 'Women and Politics – The Glass Ceiling', *Journal Of Comparative Research In Anthropology And Sociology,* Volume 1(1): 175-185, ISSN 2068 – 0317, 2010, http://compaso.ro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WEBSITE

https://kumparan.com/kumparannews/manuver-garang-muslimat-nu-di-timur-jawa-27431110790541303

https://pilkada.tempo.co/read/1077852/kata-muslimat-nu-mendukung-khofifah-emil-itu-untuk-dunia-akhirat.

https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/07/2018/khofifah-yang-sakti-muslimat-nu-jatim/.

https://kumparan.com/kumparannews/manuver-garang-muslimat-nu-di-timur-jawa-27431110790541303

https://www.merdeka.com/politik/muslimat-nu-ungkap-alasan-dukung-khofifah-di-pilgub-jatim.html.

http:// www.pengertianilmu.com/2015/08/pengertian-tanah-mediteran.html.

http://id.wikipedia.org?wiki/aluvial.

http://links.jstor.org/sici?sici=0002 9602%281988%2994%3CS95%3ASCITCO%3E2.0.CO%3B2-P

http://www.muslimedianews.com/2014/05/jumlah-warga-nu-83-juta-jiwa-di.html#ixzz5X0FdagcR.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000379902;view=1up;seq=10.

https://nasional.kompas.com.

https://www.muslimat-nu.com/sejarah-muslimat-nu/. (17 Agustus 2019).

https://www.peaceisloud.org/wpcontent/uploads/2017/04/Why-Women-in-Politics.

https://www.voaindonesia.com/a/partisipasi-perempuan-dalam-politik-semakin meningkat/4837337.html

http://dx.doi.org/10.1080/1070289X.1997.9962580.

https://www.nu.or.id/post/read/7106/menegaskan-kembali-politik-kultural

https://www.researchgate.net/publication/237710955_Defining_Political_Capital_A_Reconsideration_of_Bourdieu's_Interconvertibility_Theory.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.researchgate.net/publication/323770675_The_Role_of_Women_in_Mass_Media.

Prasetya. *Ormas Harus Bisa Menyebarkan Konten Positif Melalui Media Massa*, online pada 05 September 2018. Diunduh pada 01 Nopember 2019.

Republika.Co.Id., Muslimat NU diimbau Tangkal Hoax dan Ujaran Kebencian, Surabaya.

Richard Whittington Giddens, structuration theory and strategy as practice. https://www.researchgate.net/publication/285180282

Wahyu, Yohan. https://nasional.kompas.com diposting, 4 Agustus 2015.

WAWANCARA

DAS, Wakil Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 06 September 2019.

DRJ, Ketua PAC Muslimat NU Munjungan, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.

ISS, Ketua PAC Muslimat NU Pogalan, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

NNU, Koordinator Bidang Dakwah, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Juni 2019.

SBR, Ketua PAC Muslimat NU Kampak, *Wawancara*, Trenggalek, 08 Maret 2019.

SMR, Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur, *Wawancara melalui Whatshaap*, 12 Nopember 2019.

STM, Sekretaris Cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 04 Maret 2019.

STR, Bendahara Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 05 Maret 2019.

IMS, Pengurus PAC Muslimat NU Gandusari, *Wawancara*, Trenggalek, 10 Maret 2019.

JMM, Sekretaris PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MST, Mustasyar PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 29 September 2019.

FTS, Ketua PCNU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 18 Oktober 2019.

LMS, Mantan Pengurus Cabang Muslimat NU Trenggalek empat periode, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.

MRT, Sekretaris PAC Muslimat NU Pogalan periode 2015-2020, *Wawancara*, Trenggalek, 19 Agustus 2019.

SMD, Ketua PAC Muslimat NU Durenan, *Wawancara*, Trenggalek, 15 Maret 2019.

ZN, Ketua PC Muslimat NU Trenggalek, *Wawancara*, Trenggalek, 09 juni 2019.

SMF, Pengurus PAC Muslimat NU Watulimo, *Wawancara*, Trenggalek, 5 Agustus 2019.

SWD, Ketua PAC Muslimat NU Bendungan, *Wawancara*, Trenggalek, 28 Maret 2019.

SDM, Ketua PAC Muslimat NU Karangan, *Wawancara*, Trenggalek, 16 Maret 2019.

SLS, Ketua PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

SYT, S. Pd, Koordinator bidang Sosial PAC Muslimat NU Pule, *Wawancara*, Trenggalek, 03 Maret 2019.

UKH, Pengurus PAC Muslimat NU Tugu, *Wawancara*, Trenggalek, 02 Maret 2019.

ZA, Wakil Sekretaris PCNU Trenggalek, *Wawancara via Whatshaap*, Trenggalek, 25 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TESIS/DISERTASI

Auliya, Hilyatul. *Kontestasi Kader Muslimat NU dalam Domain Politik: Studi Atas Partisipasi Politik Pengurus Pusat Muslimat NU Periode 2006-2011*. Yogyakarta: PPs. UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2011.

Masruhan, *Konflik Politik Kyai NU dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008: Analisis Fiqh al-Ikhtilaf.* Surabaya: PPs. IAIN Sunan Ampel Surabaya, Disertasi, 2010.

Machrusah, Safira *Muslimat And Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within a Traditional Muslim Organisation in Indonesia,* Tesis, (Australia: The Australian National University, 2005).

Pantouw, Stella Maria Ignasia. Modalitas *Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010.* Semarang: Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Ilmu Politik, Tesis, 2012.

DOKUMEN ORGANISASI dan INSTITUSI

Badan Pusat Statistik Trenggalek tahun 2017.

Dokumen Rapat Kerja dan LPJ periode 2010-2015.

Hasil Notulensi PC Muslimat NU Trenggalek periode 2015-2020.

KPU Trenggalek tahun 2015.

Materi Konferensi cabang Muslimat NU Trenggalek periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2015.

Pimpinan Pusat Muslimat NU, AD/ART Muslimat NU, Hasil Kongres XVII Muslimat NU, 23-27 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id